

"Indonesia baru saja melancarkan sebuah kudeta militer [military coup] yang khas negeri tersebut."

— Marshall Green, Dubes AS untuk Indonesia, 12 Maret 1966



Dilengkapi dokumen-dokumen rahasia dari Kedubes AS di Jakarta, Deplu Amerika di Washington, CIA, Gedung Putih, dan Kantor National Security Agency

MEMBONGKAR SUPERSEMAR!

Dari CIA Hingga Kudeta Merangkak
Melawan Bung Karno



EDISI
REVISI

16 PIDATO
BUNG KARNO

BONUS
CD

Baskara T. Wardaya, SJ

Penulis buku BUNG KARNO MENGGUGAT! dan INDONESIA MELAWAN AMERIKA



sumber: Deppen RI

MEMBONGKAR SUPERSEMAR!

**Dari CIA Hingga Kudeta Merangkak
Melawan Bung Karno**

MEMBONGKAR SUPERSEMAR!

**Dari CIA Hingga Kudeta Merangkak
Melawan Bung Karno**

Baskara T. Wardaya, SJ



MEMBONGKAR SUPERSEMAR!

Dari CIA Hingga Kudeta Merangkak
Melawan Bung Karno

Penulis: Baskara T. Wardaya, SJ

Penyunting: Islah Gusmian & JF Tualaka

Perancang Sampul: Teguh Prastowo

Penata Letak: D. Noe

Kredit foto:

- Koleksi Departemen Penerangan RI

- Buku "30 Tahun Indonesia Merdeka", Setneg RI, 1985

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Cetakan I, II, (2007) III, 2009

PENERBIT GALANGPRESS (Anggota Ikapi)

Jln. Anggrek 3/34 Baciro Baru Yogyakarta 55225

Telp. (0274) 554985, 554986 Faks. (0274) 554985

e-mail: galangpress@jmn.net.id

www.galangpress.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Wardaya, Baskara T.,

MEMBONGKAR SUPERSEMAR! Dari CIA Hingga Kudeta Merangkak

Melawan Bung Karno; Penyunting: Islah Gusmian & JF Tualaka; Yogyakarta:

Galangpress; Cet. III, 2009; 360 halaman; 150 x 230 mm

ISBN: 978-602-8174-16-9

I. Politik

I. Judul

II. Baskara T. Wardaya, SJ

Dicetak oleh:

PERCETAKAN GALANGPRESS

Jln. Anggrek 3/34 Baciro Baru Yogyakarta 55225

Telp. (0274) 554985, 554986 Faks. (0274) 554985

email: perceatakan@galangpress.com

Distributor tunggal:

PT BUKU KITA

Jln. H. Montong No 57, RT 006/RW 02

Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan

Telp. (021) 78883030 Fax. (021) 7864440

email: marketingbukukita@gmail.com

*Untuk almarhum Pak Pram dan Pak Lev,
dua guru sejati.*

MENYIBAK KABUT SUPERSEMAR

PENGANTAR UNTUK EDISI KETIGA

KETIKA beberapa waktu lalu terbit buku yang antara lain berisi pengakuan seorang mantan pejabat CIA (*Central Intelligence Agency*) tentang perekrutan almarhum Adam Malik ke dalam dinas rahasia Amerika Serikat tersebut, khalayak ramai di Indonesia menjadi heboh.¹ Hampir semua orang bereaksi. Dari anggota keluarga, pejabat negara, akademisi hingga warga masyarakat umum, semuanya memberikan reaksi. Media massa, baik cetak maupun elektronik, menambah ramainya reaksi-reaksi yang muncul.² Tak sedikit dari reaksi-reaksi itu muncul dengan titik tolak pemikiran bahwa tidak mungkin seorang Adam Malik yang mantan pejuang dan Wakil Presiden RI itu pernah menjadi agen CIA. Namun demikian, tidak sedikit pula reaksi yang mendesak agar masalah ini tidak ditanggapi secara emosional melainkan secara profesional, misalnya dengan melakukan pengkajian atau penelitian dan penulisan buku ilmiah.

¹ Buku yang dimaksud adalah buku Tim Weiner, *Membongkar Kegagalan CIA* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). Weiner adalah seorang pemenang Hadiah Pulitzer di A.S.

² Majalah *Tempo* misalnya, menjadikan kasus ini sebagai salah satu laporan utamanya. Lihat *Tempo* edisi 1-7 Desember 2008.



Adam Malik: Tanggal 6 Juni 1966 mengirim surat kepada Presiden Johnson karena ingin bertemu. (sumber: ANRI)

Mulai Bermunculan

Lepas dari apakah isi dari pengakuan pejabat CIA itu benar atau tidak, kasus ini menunjukkan bahwa sebenarnya masih ada sejumlah “lembah gelap” dalam momen-momen atau dalam diri pelaku-pelaku sejarah Indonesia yang menuntut kita untuk melakukan kajian dan penelitian lebih jauh. Ada semacam “kabut tebal” yang masih menyelimuti banyak peristiwa penting dalam masa lalu negeri ini, dan kabut itu sedang memanggil kita untuk menyibaknya agar peristiwa-peristiwa penting tersebut bisa makin jelas terlihat, untuk kemudian bisa makin mudah dipahami dan dipelajari lebih lanjut.

Salah satu peristiwa penting dalam sejarah kita yang masih berada di lembah gelap dan diselimuti kabut tebal semacam itu tentu saja adalah peristiwa yang melatar belakangi munculnya Surat Perintah tanggal 11 Maret 1966 atau yang lebih dikenal dengan sebutan “Supersemar”. Selain latar belakang, masih diselimuti kabut tebal pula, berbagai bentuk dinamika politik yang kemudian bergerak, menyusul lahirnya surat perintah tersebut. Secara umum kita sadar bahwa ada banyak hal terjadi waktu itu, tetapi bagaimana persisnya seringkali kita tidak tahu.

Yang kita tahu bahwa tak lama setelah surat perintah itu muncul, tiba-tiba saja konstelasi politik di Indonesia berubah, dan itupun berubah secara drastis. Di luar pemahaman yang memadai dari rakyat kebanyakan, Presiden Sukarno makin kehilangan pengaruh dan kekuasaannya, orang-orang yang setia pada Bung Karno makin banyak yang ditangkap atau hilang begitu saja, dan tokoh-tokoh baru mulai bermunculan di pucuk pimpinan Republik. Sementara itu hubungan antara RI dengan sejumlah negara maju, khususnya Jepang dan Amerika Serikat, makin dekat. Pada saat yang sama munculnya kepemimpinan baru yang menggantikan kepemimpinan Presiden Sukarno tampak sekali diiringi oleh semakin gencarnya modal asing yang masuk ke Indonesia. Padahal pada masa pemerintahan Bung Karno penanaman modal asing selalu disikapi secara hati-hati demi kepentingan bangsa.

Komprehensif dan Kontekstual

Hal-hal di atas mendorong banyak orang untuk mencari tahu lebih jauh mengenai apa sebenarnya Supersemar itu. Berikut apa sesungguhnya yang menjadi latar belakang dan dampak langsung dari Supersemar waktu itu. Dan tentu saja banyak orang juga terdorong untuk bisa belajar bersama dari berbagai peristiwa yang terjadi di seputar masalah Supersemar untuk kepentingan masa kini dan masa depan.

Tanpa ingin mengklaim diri sebagai satu-satunya sumber jawaban yang paling bisa diandalkan, buku Anda ini berniat untuk membantu menyingkap kabut tebal yang masih menyelimuti Supersemar tersebut. Khususnya di seputar kelahiran dan penggunaannya oleh berbagai pihak yang berkepentingan waktu itu, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang ditampilkan dalam buku ini adalah dokumen-dokumen di seputar surat perintah tersebut, dengan disertai pengantar dan penjelasan secukupnya. Dengan begitu diharapkan bahwa sembari membaca dokumen-dokumen yang ada kita akan terdorong untuk melakukan penggalian dan pemikiran bersama demi pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual atas peristiwa yang sangat penting itu.

Ketika buku ini pertama kali terbit, tanggapan masyarakat cukup menyentuh hati. Dalam beberapa pekan cetakan pertama langsung habis dari toko-toko buku. Meskipun cetakan kedua tidak selaris cetakan pertama, namun ternyata habis juga, sehingga kini dibutuhkan cetak ulang selanjutnya. Hal ini tentu saja merupakan salah satu tanda bahwa banyak orang tetap tinggi niatnya untuk menggeluti dan mempelajari sejarah Indonesia, khususnya di seputar masalah Supersemar.

Itulah sebabnya penulis ingin berterima kasih kepada teman-teman di Penerbit Galangpress, yang selama ini telah bekerja keras untuk mewujudkan dan mensosialisasikan buku ini. Terima kasih pula karena dalam edisi ini oleh teman-teman Galangpress telah diupayakan adanya cover baru, bahkan disertai bonus *CD* menarik yang sepenuhnya merupakan hasil inisiatif dan tanggung jawab penerbit. Kepada teman-teman penulis di PUSdEP (Pusat Sejarah dan Etika Politik) Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, khususnya Elizabeth Tri Rejeki Marganingsih yang telah membantu dalam koreksi dan revisi untuk edisi ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga untuk Ismyati dan Serihartati atas kesediaan mengoreksi naskah akhir. Semoga

hasil kerja keras bersama ini dapat diterima sebagai salah satu bentuk sumbangsih kami pada masyarakat, dalam rangka menyibak berbagai kabut tebal yang menyelimuti lembah gelap peristiwa-peristiwa masa lalu kita, khususnya peristiwa Supersemar. ☒

DAFTAR ISI

**MENYIBAK KABUT SUPERSEMAR: PENGANTAR
UNTUK EDISI KETIGA — 9**

DAFTAR ISI — 15

**PENDAHULUAN: CARA LAIN MEMANDANG
SUPERSEMAR — 21**

Bab 1

**JANUARI 1966: AMERIKA, MAHASISWA DAN
TENTARA — 45**

1. Pengantar — 45
2. Harapan Amerika Terhadap Militer — 47
3. RPKAD Kembali dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali — 57
4. Amerika Ragu-ragu Membantu Indonesia — 61
5. Soeharto dan Demonstrasi Mahasiswa di Bogor — 63
6. Rencana Demonstrasi Mahasiswa dan Sikap Militer — 68
7. Amerika Khawatirkan Putus akan Hubungan Indonesia-Amerika — 73

Bab 2

FEBRUARI 1966: CIA, TENTARA DAN “POTRET GANJIL” — 77

1. Pengantar — 77
2. Amerika Bersikap Ekstra Hati-hati — 79
3. Cindy Adams Ingin Membantu — 86
4. CIA dan “Potret Ganjil” Indonesia — 88
5. Bantuan Militer Rahasia untuk Indonesia — 98
6. Indonesia Belum Butuh Bantuan — 102
7. Amerika dan Transisi yang Berkepanjangan — 106
8. A.S. Menolak Membantu Indonesia — 110
9. Soeharto Mengancam Amerika Serikat? — 112

Bab 3

MARET 1966: AMERIKA, SUPERSEMAR DAN KUDETA KHAS INDONESIA — 119

1. Pengantar — 119
2. Bantuan Militer untuk Indonesia — 123
3. Menyingkirkan Bung Karno dalam Dua Tahap — 125
4. Tegang Menjelang Supersemar — 131
5. Supersemar sebagai Kudeta Militer — 136
6. Supersemar sebagai Kudeta Sukses yang Harus Didukung — 141
7. Supersemar sebagai Pembawa “Pemerintahan Baru” — 143
8. Sikap Hati-hati dalam Membantu “Pemerintahan Baru” — 147
9. Menghindari Tuduhan “Udang di Balik Batu” — 152
10. Limapuluhan Ribu Ton Beras untuk “Pemerintahan Baru” — 154
11. “Pemerintahan Baru” Ingin Mempererat Hubungan — 156

DAFTAR ISI

**MENYIBAK KABUT SUPERSEMAR: PENGANTAR
UNTUK EDISI KETIGA — 9**

DAFTAR ISI — 15

**PENDAHULUAN: CARA LAIN MEMANDANG
SUPERSEMAR — 21**

Bab 1

**JANUARI 1966: AMERIKA, MAHASISWA DAN
TENTARA — 45**

1. Pengantar — 45
2. Harapan Amerika Terhadap Militer — 47
3. RPKAD Kembali dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali — 57
4. Amerika Ragu-ragu Membantu Indonesia — 61
5. Soeharto dan Demonstrasi Mahasiswa di Bogor — 63
6. Rencana Demonstrasi Mahasiswa dan Sikap Militer — 68
7. Amerika Khawatirkan Putus akan Hubungan Indonesia-Amerika — 73

Bab 2

FEBRUARI 1966: CIA, TENTARA DAN “POTRET GANJIL” — 77

1. Pengantar — 77
2. Amerika Bersikap Ekstra Hati-hati — 79
3. Cindy Adams Ingin Membantu — 86
4. CIA dan “Potret Ganjil” Indonesia — 88
5. Bantuan Militer Rahasia untuk Indonesia — 98
6. Indonesia Belum Butuh Bantuan — 102
7. Amerika dan Transisi yang Berkepanjangan — 106
8. A.S. Menolak Membantu Indonesia — 110
9. Soeharto Mengancam Amerika Serikat? — 112

Bab 3

MARET 1966: AMERIKA, SUPERSEMAR DAN KUDETA KHAS INDONESIA — 119

1. Pengantar — 119
2. Bantuan Militer untuk Indonesia — 123
3. Menyingkirkan Bung Karno dalam Dua Tahap — 125
4. Tegang Menjelang Supersemar — 131
5. Supersemar sebagai Kudeta Militer — 136
6. Supersemar sebagai Kudeta Sukses yang Harus Didukung — 141
7. Supersemar sebagai Pembawa “Pemerintahan Baru” — 143
8. Sikap Hati-hati dalam Membantu “Pemerintahan Baru” — 147
9. Menghindari Tuduhan “Udang di Balik Batu” — 152
10. Limapuluhan Ribu Ton Beras untuk “Pemerintahan Baru” — 154
11. “Pemerintahan Baru” Ingin Mempererat Hubungan — 156

Bab 4

April 1966: Amerika Serikat dan Sikap Hati-hati — 161

1. Pengantar — 161
2. Senang Namun Hati-hati — 163
3. Inggris Dianjurkan Tidak Membantu Dulu — 166

Bab 5

Mei 1966: Soeharto Tak Mau Sebut Nama Bung Karno — 173

1. Pengantar — 173
2. Membengkaknya Hutang Indonesia — 175
3. Soeharto Tak Lagi Sebut Nama Bung Karno — 181

Bab 6

Juni 1966: Adam Malik Minta Bantuan A.S. — 191

1. Pengantar — 191
2. Adam Malik Meminta Bantuan A.S. — 193
3. Sultan Hamengku Buwono IX Mengharapkan Hubungan Baik dengan AS — 194
4. Rencana A.S. Membantu Indonesia Pasca-Bung Karno — 195
5. CIA tentang Kelompok-kelompok Pemuda di Indonesia — 206

Bab 7

Juli 1966: Supersemar dan De-Sukarnoisasi — 221

1. Pengantar — 221
2. Perjuangan Panjang De-Sukarnoisasi — 223
3. Supersemar, Tekanan Militer dan TAP MPRS No. XXV/1966 — 227
4. Kabinet Baru Makin Meninggalkan Bung Karno — 247

5. Kabinet Baru Sebagai Kekalahan Bung Karno — 250
6. Wayang dan Realitas Politik di Indonesia — 252
7. Kabinet Baru, Kemenangan Bagi Soeharto — 258

Bab 8

Agustus 1966: Supersemar dan Berakhirnya Konfrontasi — 269

1. Pengantar — 269
2. Mencegah Bangkitnya Kembali Sukarnoisme — 271
3. Pemerintahan Baru dan Berakhirnya Konfrontasi — 278

Bab 9

September 1966: Menghangatnya Hubungan Indonesia-Amerika Serikat — 289

1. Pengantar — 289
2. Kongres A.S. dan Rencana Pemberian Bantuan untuk Indonesia — 291
3. Soeharto dan Ancaman Terselubung terhadap Bung Karno — 295
4. Persiapan Pertemuan Presiden Johnson-Adam Malik — 298
5. Pertemuan Presiden Johnson dan Adam Malik — 300
6. Pertemuan Wapres Hubert Humphrey dengan Menlu Adam Malik — 304

Penutup — 311

Daftar Pustaka — 315

Lampiran-Lampiran — 323

Indeks — 351

Tentang Penulis — 357



Logo CIA:
Simbol kekuatan Amerika Serikat di dunia intelijen.
(sumber: Dokumen CIA)

PENDAHULUAN:

CARA LAIN MEMANDANG

SUPERSEMAR

1. Pengantar

SEJARAH, menurut E.H. Carr, adalah suatu interaksi berkesinambungan antara sejarawan (atau siapapun yang melakukan studi sejarah) dengan fakta masa lampau yang dimilikinya. Dengan demikian sejarah merupakan semacam proses “dialog” terus-menerus antara sejarawan atau peminat sejarah yang hidup pada masa kini dengan peristiwa atau pelaku-pelaku peristiwa di masa lampau.¹ Dalam penulisan sejarah, tekanan tidak hanya terletak pada “apa sebenarnya yang terjadi di masa lampau”, melainkan juga pada bagaimana sejarawan atau kita semua “berdialog” dengan fakta masa lalu itu. Itulah sebabnya sering dikatakan bahwa penulisan sejarah harus terus dilakukan dan setiap generasi perlu menulis sejarahnya sendiri. Dipahami dengan cara demikian sejarah bukan hanya menyangkut urusan masa lampau, melainkan juga erat terkait dengan masa kini, dan selanjutnya dengan masa depan.

Memahami sejarah dengan cara demikian kiranya akan membantu kita untuk lebih bersemangat dalam meneliti dan mengkaji

¹ Sebagaimana disitir oleh Dr. Asvi Warman Adam dalam Asvi Warman Adam, *Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2004), hlm. 113.

masa lalu kita, entah sebagai individu maupun sebagai bagian dari bangsa secara keseluruhan. Bangsa ini memiliki masa lalu yang kaya dan oleh karena itu ia “memanggil” kita semua untuk tidak enggan “berdialog” dengan masa lalunya, sehingga sebagai individu maupun warga bangsa kita akan terus diperkaya dalam menapaki perjalanan selanjutnya.

Bertolak dari gagasan tersebut kita menjadi tertarik untuk terus mengadakan dialog macam itu dengan berbagai peristiwa penting dari masa yang telah lewat, termasuk di antaranya peristiwa lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang dikenal sebagai Supersemar. Supersemar menjadi penting karena kelahirannya telah menandai arus-balik (kalau tidak mau dikatakan “pembelokan”) berbagai kebijakan dalam negeri maupun luar negeri Indonesia. Supersemar, misalnya, menandai makin merosotnya kekuatan Presiden Sukarno dan makin naiknya kekuasaan Letnan Jenderal Soeharto. Bersamaan dengan itu terjadi pula arus-balik arah perpolitikan Indonesia dari sipil ke militer, dari berorientasi kiri ke haluan kanan, dari arah kerakyatan menjadi berkiblat ke elit politik, dari anti-nekolim (anti neo-kolonialisme dan imperialisme) menjadi pro-modal asing, dsb. Melihat berbagai bentuk arus-balik itu kita ingin tahu: bagaimana semua itu bisa terjadi? Kitapun terdorong untuk bertanya: pelajaran apa yang kita bisa tarik dari semua itu?

Setiap tahun, khususnya setiap bulan Maret tiba, orang selalu bicara tentang Supersemar. Pada tanggal 11 bulan itu di tahun 1966 di Istana Bogor, Bung Karno sebagai Presiden yang sekaligus Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, Pemimpin Besar Revolusi dan Mandataris MPRS menandatangani sebuah *surat perintah harian* yang menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk “mengambil segala tindakan yang dianggap perlu” dengan mak-sud demi “terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya Pemerintahan dan jalannya Revolusi”.

Selengkapnya surat perintah harian itu berbunyi:²

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERINTAH

I. Mengingat:

- 1.1. Tingkatan Revolusi sekarang ini, serta keadaan politik baik Nasional maupun Internasional
- 1.2. Perintah Harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/ Presiden/Panglima Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966

II. Menimbang:

- 2.1. Perlu adanya ketenangan dan kestabilan Pemerintahan dan jalannya Revolusi.
- 2.2. Perlu adanya jaminan keutuhan Pemimpin Besar Revolusi, ABRI dan Rakjat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta segala adjaran-adjarannya.

III. Miemutuskan/Memerintahkan:

Kepada: LETNAN DJENDERAL SOEHARTO, MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT

Untuk: Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi:

1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya Pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar revolusi/ mandataris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi.
2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan2 lain dengan sebaik-baiknya.
3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan-paut dalam tugas dan tanggung-djawab seperti tersebut diatas.

IV. Selesai.

Djakarta, 11 Maret 1966

**PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/PEMIMPIN
BESAR REVOLUSI/MANDATARIS M.P.R.S.**

(tanda tangan)

SUKARNO

² 30 Tahun Indonesia Merdeka, Jilid III, Setneg RI, 1985, hlm. 91.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERINTAH

I. Mengingat :

1. Tinggatan Revolusi sekarang ini, serta keadaan politik baik Nasional maupun Internasional.
1. 2. Perintah Harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Presiden/Panglima Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966.

II. Memintah :

2. 1. Perlu adanya ketetapan dan kostabtan Pemerintahan dan jalannya Revolusi.
2. 2. Perlu adanya diancaman kekuatan Pemimpin Besar Revolusi, ABRI dan Rakyat untuk membebaskan kepemimpinan dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta segala adjiran-adjarannya.

III. Menuntaskan/Memerintahkan :

Kepada : LETJEN DIJENDRAL SUHARTO, MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT
Untuk : Ansi name Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi :

1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terdampaknya kesanahan dan ketetapan serta kostabtan jalannya Pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta mendanai keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala adjiran Pemimpin Besar Revolusi.
2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan lain dengan sebaik-baiknya.
3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang berangkat-paut dalam tugas dan tanggung-jawabnya seperti tersebut diatas.

IV. Selesai .

Djakarta, 11 Maret 1966.

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/PEMIMPIN BESAR
REVOLUSI/MANDATARIS M.P.R.S.

Sukarno -

SUKARNO

SUPERSEMAR: Sebuah penanda arus balik!
(sumber: ANRI)

Tidak lama setelah surat itu ditandatangani oleh Bung Karno dan kemudian diterima oleh Letnan Jenderal Soeharto, iklim politik Indonesia menjadi berubah secara drastis. Kurang dari duapuluhan empat jam setelah ditandatanganinya surat itu, si penerima surat langsung membubarkan sebuah partai politik, dalam hal ini Partai Komunis Indonesia (PKI). Selanjutnya ia mengatur keanggotaan partai, menangkap belasan menteri, menyingkirkan orang-orang yang pro-Bung Karno, untuk akhirnya nanti bahkan mendongkel Sang Penandatangan Surat itu sendiri dari kursi kepresidenan. Sungguh tragis.

Kesadaran akan sisi tragis itu akan makin mendalam bila kita ingat bahwa lahirnya Supersemar telah didahului oleh banjir darah sekitar setengah juta rakyat Indonesia yang tewas di tangan sesama warga negara Indonesia. Dalam pembantaian massal yang berlangsung antara pekan ketiga bulan Oktober hingga bulan Desember 1965 dan setelahnya itu, berbagai kekuatan sipil dan militer saling menopang untuk menghabisi hidup sekian banyak orang tanpa ada proses pengadilan. Nyaris tidak ada jejak-jejak kemanusiaan sebagaimana layaknya dalam sebuah masyarakat yang ingin mengedepankan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kelak kita akan tahu bahwa meskipun pembunuhan itu berskala massal dan di luar hukum, hampir tidak ada satu pihak pun yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab dan mencoba mencari solusi bersama atas masalah pembantaian itu. Bahkan upaya untuk mengadakan rekonsiliasi antara para korban dan pelaku pun selalu dihalang-halangi dengan berbagai macam alasan. Benar-benar tragis.

Sebenarnya garis besar dari apa yang berlangsung pada hari Jumat tanggal 11 Maret 1966 itu telah secara umum diketahui. Pagi itu, di Istana Merdeka Bung Karno memimpin Sidang Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan. Ketika Bung Karno sedang berbicara, Brigadir Jenderal M. Sabur, Komandan Resimen Cakrabirawa, masuk ke ruang sidang, ingin mem-

beritahu Brigadir Jenderal Amirmachmud, Pangdam V/Jaya yang juga hadir dalam sidang itu, bahwa di luar sedang ada sejumlah pasukan tak dikenal dan ini menimbulkan kekhawatiran. Berhubung Brigjen Sabur tidak berhasil meminta Brigjen Amirmachmud untuk keluar, ia lalu menyampaikan nota kepada Bung Karno, memberitahu soal pasukan tak dikenal itu. Bung Karno kelihatan menjadi gugup, sehingga kemudian menyerahkan pimpinan sidang ke Waperdam II Leimena, sedang ia sendiri bersama Dokter Soebandrio bergegas meninggalkan Istana. Keduanya segera naik helikopter menuju ke Istana Bogor.

Tak lama setelah mendengar berita tentang apa yang terjadi di Istana itu, Soeharto —satu-satunya menteri yang tidak hadir dalam sidang kabinet dengan alasan “sakit” mengutus tiga orang, yakni Brigadir Jenderal M. Jusuf, Brigadir Jenderal Basuki Rachmat dan Brigadir Jenderal Amirmachmud, untuk menyusul Bung Karno ke Bogor. Pertemuan antara ketiga Jenderal tersebut dengan Bung Karno berakhirk dengan ditandatanganinya surat perintah harian, yakni Surat Perintah 11 Maret 1966 (Super-semar), dengan segala kelanjutan dan konsekuensi politis yang telah kita sebut di atas tadi.

Dilihat dengan cara demikian, kronologi lahirnya Supersemar menjadi tampak jelas dan gagasannya menjadi mudah diikuti. Namun demikian, kalau dicermati secara lebih jauh, ternyata ada sejumlah pertanyaan yang masih perlu dicari jawabannya. Misalnya, *pertama*, apakah surat itu dibuat Bung Karno secara sukarela atau di bawah tekanan? Yang jelas proses lahirnya surat itu diawali dengan perginya Bung Karno dari tengah-tengah Sidang Kabinet yang ia pimpin di Jakarta. Ia lari ke Bogor karena ia merasa keselamatan pribadinya tidak terjamin. Selain itu, yang mengusulkan dikeluarkannya surat itu adalah tiga orang Jenderal militer yang diutus oleh Men/Pangad Letjen Soeharto, dan bukan Bung Karno sendiri. Perlu diingat, ketiga Jenderal itu tidak datang karena dipanggil oleh Bung Karno sebagai Presiden atau Panglima Tertinggi ABRI, melainkan karena adanya inisiatif dari

Letjen Soeharto setelah mereka bertemu di kediaman Soeharto di Jl. H. Agus Salim 98, Jakarta.

Kedua, timbul pertanyaan siapa sebenarnya yang mengetik naskah asli surat itu? Apakah Bung Karno sendiri mendiktekannya pada seorang pengetik di Istana Bogor, ataukah surat itu sebenarnya telah dibuat sebelumnya dan Bung Karno tinggal tandatangan? Benedict Anderson, misalnya, berpendapat bahwa naskah asli surat itu dibuat di Markas Besar AD, sehingga kop suratnya adalah kop surat MBAD, dan bukan kop surat kepresidenan.

Ketiga, apakah surat yang sempat beredar di kalangan elit politik dan militer waktu itu adalah surat yang asli ditandatangani oleh Bung Karno ataukah salinannya yang telah diubah-ubah sesuai kepentingan pihak-pihak tertentu? Ada sejumlah dugaan bahwa begitu sampai di Jakarta surat yang ditandatangani oleh Bung Karno itu mengalami perubahan dan diberi tanda tangan palsu, sehingga menjadi tidak jelas lagi mana yang asli dan mana yang palsu. Di Sekretariat Negara saja ada dua naskah surat berbeda yang masing-masing terdiri dari satu halaman, lengkap dengan tanda tangan Bung Karno, namun cara pengetikan dan tanda tangannya agak berbeda satu dengan yang lain. Sementara itu Alm. Jenderal M. Jusuf juga memiliki naskah Supersemar “asli” lengkap dengan tanda tangan Bung Karno, namun dengan cara pengetikan yang juga berbeda dan (anehnya) terdiri dari dua halaman. Aneh tapi nyata.

Keempat, di mana sebenarnya naskah asli surat perintah itu kini? Mengingat bahwa surat itu penting sekali dan merupakan dokumen negara yang ditandatangani Presiden, kecil kemungkinan bahwa surat itu hilang begitu saja. Besar kemungkinan bahwa surat itu sengaja dihilangkan atau disembunyikan. Pertanyaannya, mengapa dihilangkan atau disembunyikan? Dan siapa yang harus bertanggung jawab? Mengapa semua orang yang terlibat dalam kelahiran surat itu bila ditanya soal naskah Supersemar cenderung bungkam seribu bahasa? Ketika buku ini

disusun kebanyakan saksi peristiwa itu telah meninggal, kecuali Soeharto. Namun Soeharto pun selalu tutup mulut kalau ditanya soal naskah Supersemar. Mengapa?

Hampir semua pertanyaan itu sampai kini tidak terjawab secara memuaskan. Seandainyapun ada jawaban, tentu berbeda-beda. Bahkan pertanyaan mengenai apakah Jenderal yang datang hari itu tiga orang atau empat orang, masih merupakan tanda tanya. Melihat kenyataan seperti itu mengapa kita tidak mencoba mencari cara lain untuk memandang Supersemar? Kita tidak lagi ingin berfokus pada masalah naskah surat itu *per se* (atau naskah itu saja), melainkan pada pra-kondisi yang melahirkan surat perintah itu serta pada berbagai dampak yang telah timbul akibat adanya bermacam tindakan yang dilakukan atasnama surat perintah tersebut. Dengan latar belakang itulah kali ini kita bermaksud “membongkar” kembali Supersemar.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, buku yang sedang Anda baca ini ingin mengajak Anda untuk membongkar dan memandang Supersemar dengan cara yang agak berbeda itu. Sebagai salah satu caranya, buku ini ingin mengundang Anda untuk mencermati kembali lembar-lembar “rekaman” dinamika sosial, politik, militer yang berlangsung pada bulan-bulan menjelang dan setelah munculnya Supersemar. Yang dimaksud dengan lembar-lembar rekaman itu adalah dokumen-dokumen dari pemerintah Amerika Serikat yang ternyata banyak mencatat berbagai peristiwa di Indonesia pada kurun waktu sekitar dikeluarkannya Supersemar itu. Berhubung hampir semua dokumen yang akan kita lihat itu aslinya berasal dari Amerika—and secara lebih khusus berkaitan dengan politik luar negeri Amerika—maka marilah kita secara singkat melihat dinamika internasional yang menjadi konteks politik luar negeri Amerika waktu itu.

2. Perang Dingin Sebagai Konteks Internasional Supersemar

Amerika Serikat pada tahun 1966 adalah sebuah negeri adikuasa yang sedang terlibat dalam Perang Dingin, suatu konflik internasional yang sudah dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. Perang Dingin menimbulkan pertentangan antara kubu negara-negara Barat-Kapitalis yang dipimpin oleh Amerika Serikat melawan kubu negara-negara Komunis-Sosialis di bawah pengaruh Uni Soviet. Perang itu disebut “dingin” karena tidak disertai konflik fisik langsung antara pemimpin kedua kubu. Namun demikian, di luar kedua negara adidaya itu Perang Dingin tidak selalu “dingin” karena melibatkan konflik bersenjata yang “panas” dan mematikan, seperti misalnya di Korea, Vietnam, dan Afghanistan.

Berkaitan dengan Indonesia, waktu itu Amerika amat khawatir melihat negeri ini yang dirasa semakin condong ke kiri dan dengan demikian makin mengancam kepentingan AS beserta sekutu-sekutunya. Tempat kedudukan (*ranking*) sebagai partai pemenang terbesar keempat dalam Pemilu tahun 1955 yang diraih PKI membuat kekhawatiran itu semakin nyata. Semangat untuk melawan perkembangan pengaruh Komunis inilah yang antara lain mendorong keterlibatan Amerika dalam Pemberontakan PRRI/Permesta pada pertengahan tahun 1950-an. Setelah pemberontakan itu gagal, berbekal semangat yang sama Amerika mulai mengundang para perwira militer Indonesia untuk dididik di sekolah-sekolah militer di AS.

Secara lebih khusus, Amerika waswas mengikuti pesatnya perkembangan PKI, yang pada tahun 1964 telah tumbuh menjadi partai Komunis terbesar di dunia di luar blok Uni Soviet-Cina. Menjadi lebih waswas lagi ketika disadari bahwa antara Bung Karno dan PKI terjalin hubungan yang makin erat dan saling mendukung. Retorika Bung Karno yang sangat anti neokolonialisme dan anti neo-imperialisme Barat juga turut

meresahkan Washington. Amerika sadar, Bung Karno tidak hanya memiliki pengaruh yang kuat di dalam negeri, melainkan juga di luar negeri, khususnya di antara negara-negara Non-Blok. Bagi Amerika dan sekutunya, politik Konfrontasi Indonesia melawan pembentukan Federasi Malaysia adalah salah satu contoh dari ambisi Bung Karno untuk memperluas pengaruh militernya di luar batas-batas Indonesia.

Melihat dinamika seperti itu Amerika berupaya memengaruhi Indonesia agar menghentikan orientasi kiri-nya dan agar membelokkan orientasi itu ke arah yang sesuai dengan kepentingan Barat. Amerika pun terus berusaha menggerogoti kekuasaan dan pengaruh Bung Karno dan PKI, sekaligus berharap pemerintahannya suatu saat diganti dengan pemerintahan baru yang pro-Barat, pro-Kapitalis. Di tengah harapan Amerika yang seperti itulah Supersemar lahir. Kelahiran surat itu, serta bagaimana nantinya ia menjadi legitimasi bagi lahirnya pemerintahan yang pro-Barat, seakan merupakan hujan pertama yang membasahi bumi setelah musim kemarau yang panjang.

3. Tragedi '65 Sebagai Konteks Domestik Supersemar

Mirip dengan kekhawatiran Amerika, di dalam negeri pun kekhawatiran akibat makin berkembangnya PKI juga melanda sejumlah kalangan. PKI yang setelah Peristiwa Madiun 1948 ditumpas, pada awal tahun 1950-an sudah bisa mulai bangkit lagi dengan kepemimpinan yang lebih muda dan dinamis. Sebagaimana telah kita singgung, pada Pemilu 1955 PKI bahkan menduduki *ranking* keempat sebagai partai terbesar pemenang Pemilu. Kemenangan ini membuat waswas-nya banyak kalangan yang anti-Komunis di dalam negeri. Pelan tapi pasti mereka berusaha meminimalisir atau kalau bisa bahkan menyingkirkan sama sekali pengaruh PKI di negeri ini.

Sementara itu, Bung Karno yang dengan konsep NASAKOM (Nasionalisme, Agama dan Komunisme)-nya tampak makin dekat

dengan PKI juga membuat khawatir banyak pihak. Seakan mengamini kekhawatiran pihak-pihak luar negeri, berbagai elemen dalam negeri juga mulai khawatir bahwa Bung Karno tidak hanya akan membawa Indonesia ke arah yang ditentukan oleh PKI, melainkan juga tunduk di bawah kepentingan Komunis internasional, khususnya Republik Rakyat Cina.

Apa yang terjadi pada dini hari 1 Oktober 1965 menjadi katalisator untuk makin cepatnya dinamika politik di Indonesia berkaitan dengan situasi di atas. Ketika pada hari itu enam orang Jenderal dan seorang perwira pertama Angkatan Darat tewas akibat operasi militer yang dilakukan oleh Gerakan Tigapulu September, pihak Angkatan Darat langsung melemparkan tuduhan bahwa PKI-lah yang secara penuh bertanggung jawab atas peristiwa berdarah itu. Berbagai bentuk kampanye media massa dilakukan untuk memperkuat tuduhan itu, dan tiga minggu kemudian (sekitar 20 Oktober 1965) mulailah pembantaian massal di Jawa Tengah. Pada bulan November pembantaian massal berlanjut di Jawa Timur, untuk selanjutnya meluas ke Bali pada bulan Desember-nya. Banyak laporan mengatakan, pembunuhan dilakukan oleh kombinasi kekuatan sipil dan militer. Dalam waktu tiga bulan pembantaian massal itu menelan korban sekitar setengah juta orang.

Berhadapan dengan situasi demikian Bung Karno tampak kaget dan kewalahan. Tampaknya ia tidak pernah menyangka bahwa bangsa yang telah ia bantu dalam perjuangan menuju kemerdekaan itu akan sedemikian tega membunuh sesama warga negaranya. Ia lantas menjanjikan “solusi politik” untuk situasi ini, namun tak kunjung jelas apa yang ia mau lakukan. Ia mengatakan bahwa sejumlah pemimpin PKI “keblinger” dan terlibat dalam peristiwa berdarah itu, namun menolak untuk secara resmi membubarkan Partai Komunis tersebut. Dalam situasi demikian kalangan anti-Komunis semakin tak sabar. Mereka ingin supaya PKI segera dibubarkan (meskipun praktis kepemimpinannya

sudah kocar-kacir dan anggotanya yang masih hidup tercerai-berai). Sekaligus mereka juga menghendaki bahwa orang-orang kiri di sekitar Bung Karno disingkirkan—atau kalau perlu Bung Karno-nya sendiri yang disingkirkan. Dalam konteks domestik seperti itulah pada tanggal 11 Maret 1966 itu muncul Supersemar dengan segala kontroversi dan konsekuensinya.

4. Supersemar dan Dampaknya

A. Dampak Luar Negeri

Sebagaimana bisa kita lihat di depan, naskah Supersemar sendiri tidak panjang, seperti layaknya sebuah surat perintah harian. Namun demikian ternyata ia memiliki dampak atau implikasi yang amat luas dan panjang bagi Indonesia, baik dalam kebijakan luar negeri maupun dalam negeri. Dengan adanya Supersemar dan naiknya kubu Soeharto, orientasi politik luar negeri menjadi berbelok arah. Amerika yang dulunya menjadi “musuh” Bung Karno kini menjadi sahabat pemerintahan pasca-Bung Karno. Persahabatan juga dibina dengan sejumlah negara kapitalis lain. Sementara itu Konfrontasi Malaysia dihentikan. Padahal oleh Bung Karno sejak 1963 Konfrontasi Malaysia telah dijadikan salah satu simbol konkret perlawanan terhadap hegemoni kapitalis. Pada saat yang sama hutang luar negeri yang pada zaman Bung Karno masih relatif terbatas, sejak naiknya kubu Soeharto hutang itu menjadi besar-besaran. Indonesia yang sebelumnya menyatakan diri keluar dari organisasi-organisasi internasional (termasuk PBB), akhirnya bergabung kembali dengan organisasi-organisasi itu.

B. Dampak Dalam Negeri

Yang lebih pokok untuk kita lihat dan perlu untuk terus kita dialogkan tentu saja adalah dampak dari Supersemar terhadap situasi dalam negeri Indonesia sendiri. Sebagaimana telah kita

lihat, berkat adanya Supersemar itu kalangan militer, di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, nyaris bisa melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Termasuk di sini adalah pembubaran partai politik (dalam hal ini PKI) yang sebenarnya adalah wewenang Presiden. Penangkapan menteri-menteri, rekayasa keanggotaan MPRS, penetapan Supersemar sebagai Ketetapan (TAP) MPRS dan sebagainya adalah contoh-contoh lain mengenai bagaimana Supersemar itu mempunyai dampak yang amat luas.

Tak kalah penting tentu saja adalah bahwa berkat Supersemar itu Jenderal Soeharto berhasil memengaruhi MPRS untuk tidak hanya menjadikan surat perintah itu menjadi TAP MPRS, melainkan juga mencabut status Bung Karno sebagai Presiden Seumur Hidup. Tidak hanya itu, MPRS yang sudah diatur oleh Soeharto ini nanti akhirnya akan berani menolak pidato pertanggung jawaban Presiden Sukarno (*pidato Nawaksara*) berikut perbaikannya, dan akhirnya memberhentikan Sukarno sebagai Presiden Indonesia. Dan sejak itu Indonesia dipimpin oleh Jenderal Soeharto bersama Orde Baru dengan segala implikasinya.

5. Kudeta Merangkak

Melihat bagaimana sejumlah faktor tahap demi tahap melatar belakangi munculnya Supersemar, sekaligus bagaimana Supersemar tahap demi tahap menyingkirkan kekuasaan dan pengaruh Bung Karno sebagai Presiden RI dapat dikatakan bahwa Supersemar merupakan bagian dari pelengseran kekuasaan (dengan kata lain “kudeta”) yang bergerak secara bertahap terhadap Presiden Sukarno. Y. Pohan (1988) menyebut periode 1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966 sebagai *a creeping coup* alias kudeta merangkak. Kudeta merangkak itu diawali dengan percobaan operasi militer Gerakan Tigapuluh September pada tanggal 1 Oktober 1966, dan diakhiri dengan pemberian Surat Perintah 11 Maret (1966) yang dikenal sebagai Supersemar.

Salah satu dokumen dari Amerika yang akan kita baca nanti menyebut Supersemar ini sebagai suatu “kudeta yang khas Indonesia.”

Apapun bentuknya, yang penting bagi kita bukanlah masalah apakah kudeta itu merangkak, berjalan atau berlari, melainkan bahwa di negeri ini telah pernah terjadi peralihan kekuasaan yang keabsahannya bisa dipertanyakan karena tidak melibatkan rakyat sebagaimana misalnya dalam bentuk Pemilu. Wakil-wakil rakyat yang duduk di MPRS juga tidak semuanya duduk di sana karena dipilih oleh rakyat melalui Pemilu.

Sebagaimana kita semua tahu, apa yang sudah terjadi memang sudah terjadi, dan kita tak dapat mengubahnya. Namun demikian, dalam spirit untuk belajar sejarah kita ingin terus mengadakan “dialog” dengan masa lalu itu agar dapat terus-menerus belajar darinya.

6. Manfaat Membaca Buku Ini

Sebagaimana dikatakan di depan, apa yang akan dijadikan objek (atau lebih tepat dikatakan “*partner dialog*”?) dari studi sejarah kita melalui buku ini adalah dokumen-dokumen Amerika Serikat. Meskipun demikian, dengan membaca buku ini kita tidak hanya akan tahu mengenai seluk-beluk kebijakan AS terhadap Indonesia, melainkan juga dinamika politik dalam negeri Indonesia sendiri, beserta sepak-terjang para pemain politik yang ada di dalamnya. Akan bisa kita ketahui misalnya bagaimana sebenarnya sikap tentara terhadap demonstrasi mahasiswa, posisi politis yang diambil oleh Adam Malik, hingga seberapa sebenarnya besarnya hutang luar negeri Indonesia saat itu dan bagaimana upaya pembayarannya.

Buku ini bukan terutama mau menjawab pertanyaan-pertanyaan di seputar naskah Supersemar, melainkan ingin mengeksplorasi berbagai permasalahan yang timbul sebelum dan setelah penandatanganan naskah tersebut. Yang kita jadikan part-

ner adalah dokumen-dokumen Amerika Serikat, karena sejauh ini dokumen-dokumen itulah yang dimiliki penulis.

Di tempat asalnya, dokumen-dokumen itu merupakan dokumen-dokumen yang sejauh ini sudah bisa diakses dan terbuka untuk publik, setidaknya untuk para peneliti di bidang yang bersangkutan. Dengan membaca dokumen-dokumen itu diharapkan Anda akan dapat belajar mengenai dinamika yang terjadi di dalam negeri Indonesia seputar peristiwa bersejarah yang mengubah arah dan haluan politik Indonesia itu. Demikian pula, kita akan mengikuti berbagai reaksi oleh Amerika terhadap apa yang berlangsung di Indonesia. Akan tampak misalnya, pemerintah Amerika Serikat begitu antusias untuk menyingkirkan Bung Karno, namun pada saat yang sama unsur-unsur anti-Komunis di Indonesia sendiri, baik dari kalangan sipil maupun militer, juga tak kalah antusiasnya dalam upaya memotong kuasa dan pengaruh Sang Proklamator itu.

Melalui dokumen-dokumen itu kita akan dapat sekilas melihat pasang-surut peranan berbagai elemen yang ikut bermain dalam bermacam peristiwa di sekitar munculnya Supersemar itu. Elemen-elemen itu amat beragam. Dari pihak Amerika elemen-elemen itu antara lain meliputi: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, CIA, Presiden Lyndon B. Johnson, National Security Agency, dsb. Sedang dari pihak Indonesia elemen-elemen itu misalnya: Presiden Sukarno, Jenderal Soeharto, Adam Malik, dr. Soebandrio, Angkatan Darat, Mahasiswa, Partai-Partai Politik, dan lain-lain.

7. Tentang Buku Ini

Buku ini banyak menggunakan sumber-sumber primer. Sebagaimana telah kita singgung, bentuknya adalah dokumen-dokumen resmi dari pemerintah AS, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan AS terhadap Indonesia pada delapan bulan pertama tahun 1966 (Januari-September). Dokumen-dokumen itu aslinya cukup “kacau”, dalam arti tidak runtut topik dan

gagasan-gagasannya. Sejumlah naskah berasal dari teks telegram, sehingga banyak kata disingkat atau salah ketik, atau sebagianya lagi tertutup warna hitam dalam proses pengirimannya. Maklum, dokumen-dokumen itu semula memang ditulis dan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan sesaat waktu itu, serta seturut gelombang naik-turunnya dinamika politik yang saat itu berlangsung di Indonesia dari hari ke hari. Oleh para petugas arsip dan perpustakaan sudah coba diatur dan disistematisasi, namun tetap saja tidak bisa seruntut sistematisasi sebuah buku. Hal itu terjadi juga mengingat bahwa dokumen-dokumen yang ada di sini berasal dari berbagai instansi yang berbeda, meskipun semua terkait dengan kebijakan luar negeri AS. Ada yang berasal dari Kedutaan Besar AS di Indonesia di Jakarta, ada yang berasal dari Departemen Luar Negeri Amerika di Washington, ada yang berasal dari CIA (*Central Intelligence Agency*), atau dari Gedung Putih, atau dari kantor *National Security Agency*, ada pula yang berasal dari pejabat pemerintah di Indonesia. Berhubung asalnya berbeda-beda, maka biasanya isi, gaya bahasa dan tekanan yang diberikan oleh dokumen-dokumen itu juga berbeda-beda, sesuai dengan instansi asal masing-masing.

Terjemahan atas dokumen-dokumen itu dilakukan sedapat mungkin apa adanya, tidak diolah, meskipun subjektivitas penerjemah pasti turut berpengaruh. Perlu dicatat di sini bahwa dalam menerjemahkan suatu dokumen penulis belum tentu setuju dengan apa yang dikatakan dalam dokumen-dokumen tersebut. Penulis sadar, entah kita setuju atau tidak, dokumen-dokumen itu telah menjadi bagian dari masa lalu bangsa ini dan oleh karena itu perlu diterjemahkan dan dipelajari. Diharapkan, dokumen-dokumen yang ada dalam buku ini dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut mengenai Indonesia selama periode yang dibahas.

Untuk mempermudah Anda dalam membaca dokumen-dokumen itu, penulis mengategorikannya menurut bulan.

Maksudnya supaya Anda bisa melihat dinamika politik di Indonesia waktu itu secara kronologis, serta bagaimana Amerika Serikat bereaksi terhadapnya. Pada setiap awal dokumen penulis berusaha memberikan keterangan singkat, dengan maksud untuk membantu melihat konteks dari dokumen itu serta beberapa butir gagasan yang kiranya perlu mendapat perhatian. Pengantar singkat pada setiap awal bulan juga ditulis dengan maksud serupa, tetapi mungkin dalam ruang-lingkup yang sedikit lebih luas. Jika Anda tidak merasa terbantu, Anda dipersilakan untuk mengabaikan saja pengantar-pengantar itu dan langsung masuk ke dokumentanya. Penulis ingin supaya Anda mendapat kesempatan seluas mungkin dalam membaca dan menafsirkan dokumen-dokumen yang tersedia.

Hampir semua dokumen itu aslinya berkode “Rahasia” atau “Konfidensial”, “Distribusi Terbatas” atau “Tidak Untuk Distribusi di Luar Negeri”, dsb. Namun penulis berhasil mendapatkan akses ke dokumen-dokumen itu karena memang dokumen-dokumen itu telah “lolos sensor” melalui proses yang disebut proses “sanitasi” atau “deklasifikasi”. Artinya, isi dokumen-dokumen itu (kecuali yang di-blok dengan tinta hitam atau penutup putih) sudah boleh dibaca oleh publik.

Sedikit catatan teknis: dalam menerjemahkan dokumen kadang-kadang penulis menyisipkan beberapa tanda khusus guna mempermudah pembacaan dokumen tersebut. Untuk bagian-bagian yang belum di-deklasifikasi alias masih dirahasiakan, akan diberi keterangan, misalnya: *[satu kata dirahasiakan]*. Itu berarti pada dokumen aslinya bagian tersebut masih di-blok atau ditutup karena adanya suatu item yang masih perlu dirahasiakan. Tanda [] biasanya menunjuk pada tambahan item dari penulis dalam proses penerjemahan naskah atau penyusunan buku ini. Maksudnya untuk memperjelas sesuatu, entah itu untuk melengkapi nama seseorang atau memperjelas sebuah daftar urutan tertentu. Penulis memilih menggunakan nama “Sukarno” dan bukan “Soekarno”,

karena yang lebih dipilih oleh Bung Karno sendiri adalah penulisan nama “Sukarno”, sebagai salah satu tanda ditinggalkannya ejaan Belanda dan digantinya dengan ejaan Indonesia. Namun demikian dalam tanda tangan ia tetap menggunakan ejaan Belanda “Soekarno” karena sudah terlanjur bertahun-tahun menggunakan tanda tangan itu.³

Untuk sekedar informasi, penulis mendapatkan dokumen-dokumen itu selama penelitian penulis di AS pada periode 1998-1999 dan 2004-2005. Selama dua periode itu penulis melakukan penelitian di Perpustakaan Kongres dan di Arsip Nasional I (keduanya di Washington, D.C.), serta di Arsip Nasional II (di College Park, Maryland) maupun di sejumlah Perpustakaan Kepresidenan yang tersebar di berbagai kota di AS. Berkaitan dengan politik luar negeri AS terhadap Indonesia pada tahun 1966, penulis mendapatkan banyak bahan di Lyndon B. Johnson Library di Austin, Texas. Selain itu, bahan juga penulis dapatkan dari seri *Foreign Relations of the United States* yang berisi penulisan kembali dokumen-dokumen yang terkait dengan politik luar negeri Amerika Serikat. Sementara itu banyak sumber sekunder penulis dapatkan di Perpustakaan Pusat University of Wisconsin-Madison.

8. Ucapan Terima Kasih

Perkenankan sekarang saya menyampaikan ucapan terima kasih, mengingat banyaknya pihak yang telah membantu sehingga buku ini bisa terwujud dan sampai ke tangan Anda. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta, khususnya Program Pasca-Sarjana

³ Dalam Otobiografinya, Bung Karno mengatakan, “In School my signature had to be spelled Soekarno—the Dutch way. In independent Indonesia I have ordered all ‘OE’ spelling back to ‘U’. the spelling of Soekarno is now Sukarno. However, it is difficult to change one’s signature after fifty years so when I myself sign my name, I still write S-O-E.” Sukarno, *An Autobiography As Told to Cindy Adams*. (New York: The Bobbs-Merill Company, Inc., 1965), hlm. 26-27.

dan Jurusan Sejarah USD, karena telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyusun buku ini di antara tugas-tugas resmi yang diberikan. Kepada rekan-rekan saya staff PUSdEP (Pusat Sejarah dan Etika Politik), terutama Y. Tri Subagya MA, Monica Laksono, E. Mita Yuwanti, Hendrik Boli Tobi, dan Wahyudi saya berterima kasih atas segala sumbangan ide, dukungan, kerjasama serta kesabaran mereka. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang telah membantu proses penerjemahan dokumen-dokumen dalam buku ini, seperti P.G. Widi Setyanto, Monica Laksono, Letty Sunaryo, Vincensia Nilam Maharani, Francisca Endang Lestariningsih, Theresia Yunia Setyawan, Noor Qomaria Agustina, Ardian Sigit Nugroho, dan Agustinus Budi Winursito.

Kepada Almamater saya, Marquette University di Milwaukee, Wisconsin (AS) dan seluruh Staff Fulbright/AMINEF di Jakarta maupun Washington saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih. Berkat bantuan dana dari Marquette University dan Fulbright saya dapat melakukan penelitian, baik penelitian doktoral maupun *post-doctoral* di Amerika, sehingga bisa mendapatkan berbagai bahan mengenai sejarah Indonesia yang amat penting untuk menyusun buku ini. Dalam mendapatkan bahan-bahan itu di Amerika saya telah dibantu oleh rekan-rekan staff di Center for Southeast Asian Studies, Jurusan Sejarah, serta Perpustakaan Pusat University of Wisconsin-Madison. Saya juga banyak dibantu oleh staff Perpustakaan Lyndon B. Johnson di Austin, Texas maupun staff Perpustakaan Kongres di Washington D.C. Kepada mereka semua saya menyampaikan terima kasih.

Tentu saja rasa terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada Mas Julius Felicianus, Direktur Galangpress, beserta seluruh staff-nya, khususnya Editor Islah Gusmian dan *Designer* Teguh Prastowo. Berkat desakan, dukungan dan kerjasama dengan teman-teman Keluarga Besar Galangpress saya termotivasi untuk mewujudkan buku yang sedang Anda tekuni ini. Kepada seluruh

jajaran Galangpress beserta partnernya PT Buku Kita (Agromedia Group) sebagai distributor saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih.

9. Kritik dan Saran

Lebih dari sekedar berkutat di sekitar “teori konspirasi” mengenai naskah Supersemar, buku ini bermaksud mengajak Anda untuk membuka kembali lembar-lembar sejarah bangsa ini di seputar peristiwa munculnya Supersemar, khususnya antara bulan Januari hingga September 1966. Pada periode itulah terjadi transisi kekuasaan terbesar yang terjadi di negeri ini sejak dicapainya kemerdekaan. Kita ingin membongkar dan menyimak kembali dinamika sosial, politik, ekonomi dan diplomatik yang terjadi pada saat itu. Kali ini pembongkaran dan penyimakan kembali itu berdasar pada dokumen-dokumen yang dimiliki sebuah negara adikuasa yang saat itu memiliki kepentingan besar di Indonesia, yakni Amerika Serikat.

Dari sisi AS kita ingin melihat sejauh mana sebenarnya badan-badan yang terlibat dengan kebijakan terhadap Indonesia mengikuti, mencatat, melaporkan, dan sekaligus berusaha memengaruhi apa yang sedang berlangsung di Indonesia saat itu. Akan tetapi lebih dari itu semua, sekaligus sambil mengingat kembali apa yang dikatakan oleh E.H. Carr di depan, kita ingin membaca dokumen-dokumen itu karena kita ingin melakukan “dialog terus-menerus” dengan masa lalu kita. Dalam dialog itu diharapkan kita akan dapat lebih memahami masa lalu kita, yang selanjutnya akan memantapkan langkah kita di masa kini dan yang akan datang.

Akhir kata, mengingat keterbatasan penulis dalam memahami peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam dokumen-dokumen berikut, tentu ada banyak kekurangan dalam buku ini, baik menyangkut penggunaan istilah, waktu terjadinya peristiwa, maupun urutan gagasan. Jika itu terjadi penulis mohon maaf.

Sekaligus penulis ingin memohon kepada Anda untuk memberikan komentar atau koreksi, sehingga jika buku ini diperkenankan untuk dicetak ulang, masukan dari Anda itu akan bisa kami sertakan untuk menambah bobot buku ini. Sebelumnya penulis mengucapkan banyak terima kasih. Selamat membaca. ☒



Anti Amerika! Demonstrasi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 1965 (sumber: Deppen RI)

BAB 1

JANUARI 1966: AMERIKA, MAHASISWA DAN TENTARA

1. Pengantar

Bulan Januari 1966 adalah bulan yang penuh ketegangan. Puncak rangkaian pembunuhan massal di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali baru saja usai, namun pengejaran dan penangkapan terhadap mereka yang dianggap terkait dengan PKI terus berlanjut. Di banyak tempat tindakan-tindakan itu berubah menjadi praktik-praktik kekerasan yang acak dan lepas kontrol. Sebagian besar personil RPKAD yang selama ini ditugaskan di ketiga provinsi itu sudah mulai berdatangan kembali ke Jakarta. Tampaknya waktu itu beredar rumor bahwa kembalinya tentara itu berkaitan dengan antisipasi bahwa pada bulan Januari akan terjadi kerusuhan besar di Jakarta. Beredar pula rumor bahwa Bung Karno akan bepergian ke luar negeri dalam jangka waktu yang tak ditentukan, sehingga timbul dugaan bahwa akan terjadi pergantian kekuasaan.

Sementara itu di Jakarta dan Bogor demonstrasi mahasiswa berlangsung dengan semakin gencar. Pada tanggal 15 Januari, misalnya, terjadi demonstrasi besar-besaran di sekitar Istana Bogor, memprotes susunan Kabinet Dwikora yang menurut mahasiswa tidak mencerminkan keinginan masyarakat. Karena meningkatnya ketegangan antara para demonstran dan pengawal istana, nyaris terjadi bentrok fisik antara kedua pihak. Menariknya, di tengah situasi nyaris bentrok itu tiba-tiba muncul Soeharto yang tampil untuk menenangkan situasi. Ia muncul sebanyak dua kali.

Tak ada penjelasan mengenai apa posisi dia di situ, atau apa sebenarnya kaitan antara dia dengan para demonstran.

Melihat perkembangan situasi yang ada di Indonesia, Amerika tampak gembira. Kegembiraan itu terutama berkaitan dengan dihabisinya kekuatan PKI baik di tingkat elit partai maupun di daerah-daerah. Washington sadar bahwa perihal keterlibatan PKI dalam operasi militer 1 Oktober 1965 masih belum jelas, namun tidak keberatan bahwa PKI dituduh sebagai otaknya dan bahwa tuduhan itu dijadikan alasan bagi ditumpasnya partai tersebut. Harapan Amerika, bukan hanya PKI yang akan hilang dari panggung politik Indonesia, melainkan kalau bisa juga Presiden Sukarno karena dianggap terlalu kiri.

Pada saat yang sama Amerika berusaha sebisa mungkin mengambil jarak untuk tidak ikut campur tangan dalam dinamika politik Indonesia. Bahkan desakan Ibnu Sutowo supaya Amerika mengirim beras untuk Indonesia ditolak secara halus oleh pemerintah AS. Alasannya, AS masih ingin menunggu kepastian situasi.

2. Harapan Amerika terhadap Militer

*Dalam dokumen di bawah, yang dikeluarkan oleh CIA pada tanggal 3 Januari 1966, kelihatan sekali bahwa pihak Amerika sangat puas dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia setelah Peristiwa 1 Oktober 1965, yang oleh sejumlah kalangan disebut sebagai "kudeta" itu. Dalam peristiwa tersebut ada enam Jenderal tertinggi Angkatan Darat terbunuh, dan selama beberapa bulan kemudian disusul dengan terbunuhnya setengah juta rakyat sipil Indonesia yang lain. Pada satu sisi Amerika mengakui bahwa "fakta di balik kudeta yang merenggut nyawa enam Jenderal tertinggi AD itu belum sepenuhnya diketahui." Pada sisi lain Amerika tampak sangat senang dengan makin naiknya posisi militer serta makin tersingkirnya pemerintahan sipil di bawah Presiden Sukarno. Dalam kaitan dengan itu tampaknya Amerika sempat turut berspekulasi bahwa yang akan menggantikan Sukarno adalah Nasution.****

PERUBAHAN POLITIK DI INDONESIA¹

(Memorandum Intelijen, Central Intelligence Agency)

Ringkasan

1. Sekarang menjadi jelas bahwa percobaan Kudeta 1 Oktober yang gagal itu membawa Indonesia kepada sebuah titik pembalikan bersejarah. Era dominasi Sukarno sudah berakhir. Semula kekuatan Sukarno didasarkan, pertama, pada kepribadiannya dan kehormatannya yang hebat sebagai perwujudan nasionalisme Indonesia. Kedua, pada kemampuannya mempertentangkan unsur-unsur kekuatan pokok Indonesia satu sama lain pada tahun-tahun belakangan ini, terutama Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Angkatan Darat (AD). Namun dalam tiga

¹ CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY Dokumen OCI No. 0481/66, Kantor Urusan Intelijen, 3 Januari 1966, *Memorandum Intelijen*, "Perubahan Politik di Indonesia". Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #116.

bulan terakhir ini kehormatannya benar-benar terkikis. Dia bukan lagi Bapak dan tokoh sentral politik bagi Indonesia. Dia lebih terkesan sebagai seorang tua yang cerewet. Yang lebih penting, perimbangan politik telah berubah secara signifikan: AD benar-benar telah menghancurkan PKI. Namun kekacauan politik ini belum sedikit pun memecahkan masalah-masalah pokok Indonesia. Bahkan kemampuan AD untuk mengatasi masalah-masalah itu pun tidak dapat dinilai terlalu tinggi, terutama jika dilihat dari kinerja mereka selama ini.

Pendahuluan

2. Presiden Sukarno telah menjadi tokoh sentral Indonesia selama 20 tahun setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia dari Belanda pada tahun 1945. Ketika pandangan politiknya bergeser, Sukarno membawa seluruh struktur negara ini bersamanya. Seiring dengan pergeserannya yang konsisten ke arah kiri, dia mendukung perkembangan PKI. PKI mengidentikkan dirinya dengan Sukarno dan memanfaatkan pengakuan dan dukungan dari Sukarno. Dari situ PKI berkembang dari sebuah partai kecil yang tidak diperhitungkan menjadi organisasi massa yang paling kuat di Indonesia. Pada tahun 1965 PKI mengklaim memiliki tiga juta orang anggota dan mendapat dukungan dari lebih dari lima belas juta orang yang tersebar dalam organisasi-organisasi front yang berafiliasi dengannya. Satu-satunya kelompok yang memiliki kemampuan dan kecenderungan untuk menghentikan kelompok Komunis adalah AD. Para pimpinan AD, yang secara pribadi anti-Komunis namun juga setia kepada Sukarno, dengan ragu mengikuti pergerakan Sukarno ke arah kiri. Selama bertahun-tahun harapan AD untuk sebuah perubahan arah politik Indonesia tertumpu pada adanya kemungkinan PKI menentang Sukarno atau pemerintah, sehingga AD akan memiliki alasan untuk memukul balik PKI.

3. Sejak September 1965 pertumbuhan kekuatan Komunis semakin kentara berkat dukungan Sukarno di belakangnya. Atmosfer politik di Indonesia benar-benar terasa seperti sebuah totalitarianisme Komunis. Elemen masyarakat moderat lumpuh dan terpecah-pecah. Para tokoh non-Komunis oportunistis, misalnya Menteri Luar Negeri Soebandrio, berusaha mendekati kubu Komunis. Sementara itu para pemimpin AD berpura-pura sejalan dengan kelompok nasionalis ekstrim pendukung Sukarno dan kelompok pro-Komunis, namun pada saat yang sama melindungi diri terhadap usaha Presiden dan PKI untuk meningkatkan pengaruh Komunis dalam tubuh AD. Meskipun demikian, sepertinya AD akan kalah.

Percobaan Kudeta

4. Namun, situasi ini hampir sepenuhnya berbalik berkat adanya reaksi cepat dari AD terhadap usaha Kudeta 1 Oktober tersebut. Kudeta yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menamakan diri “Gerakan 30 September” itu melibatkan elemen-elemen Komunis dan kemungkinan didalangi oleh PKI sendiri. Fakta di balik kudeta yang merenggut nyawa enam Jenderal tinggi AD itu belum sepenuhnya diketahui, tapi AD telah mengeluarkan pernyataan bahwa kudeta itu adalah usaha Komunis untuk menggulingkan pemerintahan, dan berdasarkan tuduhan ini mereka menyerang para pemimpin dan anggota PKI.

5. Para pimpinan AD yakin bahwa Sukarno juga terlibat dalam kudeta itu, sehingga kesetiaan mereka padanya justru berubah menjadi ketidakpercayaan. Meskipun pengaruh politik mereka sedang naik, AD masih menahan diri untuk tidak mengungkapkan keterlibatan Sukarno dalam Gerakan 30 September dan tidak juga berusaha menggulingkannya. Sukarno sendiri dengan setengah hati menyetujui serangan terhadap elemen-elemen yang terlibat dalam Kudeta, tetapi sekaligus menyangkal tuduhan AD bahwa ia melindungi PKI.

Perluasan Peranan AD

6. Militer, khususnya AD, jelas-jelas telah tampil sebagai kekuatan yang paling siap di Indonesia. Entah para pemimpin AD yang masih hidup sadar atau tidak, Kudeta berikut reaksi balik atasnya telah menempatkan militer pada posisi dominan. Penolakan Sukarno untuk bekerjasama sepenuhnya dengan AD dan kritik-kritiknya yang terus terlontar (tapi tak banyak dampaknya) memaksa AD untuk memperluas kewaspadaan-nya dalam melindungi diri dari kemungkinan serangan balasan. Kompromi gaya Jawa masih mungkin terjadi antara Sukarno dengan militer, namun semakin hari semakin kecil kemungkinan itu. Tampaknya kian jelas bahwa dengan semakin besar kekuasaan politiknya, militer akan semakin merasa berkurang kepentingannya untuk berkompromi dengan Sukarno. Militer juga tidak akan memberikan kekuasaan yang telah diperoleh itu kepada partai-partai tradisional. Militer telah menggunakan elemen-elemen anti-Komunis untuk mempercepat proses dalam mencapai tujuan-tujuannya, namun juga tidak ingin bahwa elemen-elemen itu merasa diri sejajar dengan militer. Seperti Sukarno sendiri, selama bertahun-tahun AD menunjukkan ketidakpercayaan dan ketidaksukaan yang mendalam terhadap politikus-politikus tradisional yang cenderung suka bertengkar dan tidak begitu jelas manfaatnya.

7. Khususnya bulan lalu, AD sudah mulai menampakkan peran yang lebih besar di pemerintahan. Menteri Pertahanan Nasution dan Kepala Satuan AD Soeharto secara resmi berpidato tentang beberapa hal yang justru tidak begitu berkaitan dengan urusan militer dan keamanan. Namun, setelah pada awalnya sempat ragu-ragu, AD akhirnya mendesak adanya reorganisasi pada tubuh Komando Operasi Tertinggi Indonesia (KOTI). Sekarang ini KOTI bertanggungjawab atas hampir semua kehidupan politik di Indonesia dan tampaknya akan tumbuh menjadi semacam “Supra Kabinet”. AD mendominasi organisasi ini sehingga mempercepat pengesahannya.

Militer juga melakukan kontrol ketat atas semua media massa di Indonesia.

8. Angkatan-angkatan lain dalam Angkatan Bersenjata juga telah tunduk pada AD. Sejak semula Angkatan Laut telah mendukung sepenuhnya prakarsa AD. Meskipun semula Angkatan Udara—khususnya Komandan terdahulunya yakni [Omar] Dani—dianggap terlibat dalam pemberontakan, sekarang ini AU tampak sibuk membersihkan jajarannya dari unsur-unsur PKI. Komandan Angkatan Udara yang baru, Muljano Herlambang, *[beberapa kata dirahasiakan]* sekarang tampak bekerjasama secara baik dengan Jenderal Nasution dan Soeharto, dan juga telah menyerukan seruan anti-PKI dalam minggu-minggu terakhir ini. Dalam situasi demikian makin kecil kesempatan bagi Sukarno untuk menjalankan “taktik adu domba”-nya—sebuah taktik yang sudah sering dipakainya pada masa lalu untuk menjaga agar militer tetap tunduk pada keinginannya.

PKI dan Komunisme

9. Sebenarnya bahaya bahwa PKI akan mengambil alih Indonesia telah diantisipasi, mungkin sejak bertahun-tahun lalu. Namun sekarang ini PKI adalah sebuah kekuatan yang lemah. Hampir semua anggota Politbiro PKI sudah ditangkap. Banyak dari mereka telah dibunuh, termasuk tiga pemimpin tertinggi PKI, yakni Aidit, Lukman, dan Nyoto. Jaringan partai tersebut telah dihancurkan, sehingga cabang-cabang partai terpaksa berusaha bertahan tanpa arahan dari pusat. Organisasi massa PKI telah dilumpuhkan dan dihentikan kegiatannya.

10. Meskipun secara resmi PKI belum dilarang, namun kiranya tindakan pelarangan itu nanti hanya akan menjadi semacam formalitas saja. Sebagian komandan AD di provinsi-provinsi di Indonesia sudah berinisiatif untuk melarang PKI. Meskipun untuk sementara waktu organisasi PKI hampir tanpa pemimpin, tapi masih ada kemungkinan bahwa mereka akan

melakukan sabotase-sabotase terbatas untuk mempertahankan diri. Akan tetapi, AD tidak perlu lagi khawatir akan perlawanan serentak PKI. Serangan mereka atas PKI telah memporak-porandakan kubu PKI, dan sepertinya serangan itu masih akan terus berlanjut. Sementara itu pembunuhan atas anggota dan simpatisan PKI di Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali masih terus berlangsung.

11. Namun demikian, pemikiran Marxis dan khususnya Komunis masih tetap ada di Indonesia. Sepertinya cukup sulit bagi sebagian rakyat Indonesia untuk beralih dari jargon dan pandangan yang terlanjur mereka miliki sejak beberapa tahun belakangan ini. Meskipun berkali-kali Sukarno menyatakan bahwa “Indonesia tidak akan ada tanpa Komunisme”, AD tetap yakin bahwa hal itu tidak akan memicu berdirinya partai baru yang akan menggantikan PKI. Penting bahwa militer tetap berada pada posisi demikian.

12. Tampaknya PKI tidak lagi mempunyai masa depan kecuali sebagai gerakan bawah tanah revolusioner, seperti gerakan-gerakan serupa yang mendapat dukungan dari Beijing. Tapi gerakan bawah tanah yang melawan rezim yang sedang berkuasa, meskipun hanya karena alasan berseberangan prinsip, selalu akan mendapat tekanan luar biasa dari pemerintah, sebagaimana yang terjadi di Yugoslavia. Dalam hal ini, kasus Mesir dan Syria dapat menjadi contoh yang menarik. Oleh karena itu kiranya perrusuhan antara sisa-sisa PKI dengan pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh AD tidak akan terelakkan.

Status Sukarno Terkini

13. Sejalan dengan meningkatnya kekuasaan AD, kekuasaan Sukarno menjadi semakin kecil. Meskipun pernah menjadi orang yang kekuasaannya tak tertandingi di Indonesia, sekarang ini Sukarno semakin tersingkirkan. Nasihat-nasihatnya diabaikan; pernyataan-pernyataan yang ia keluarkan tampaknya tidak

memberikan pengaruh apapun pada apa yang terjadi belakangan ini. Di mana-mana pidato-pidatonya diplintir dan kadang-kadang diubah-ubah melalui pers yang dikontrol oleh AD. Radio Indonesia tidak diizinkan untuk menyiarkan pidato Sukarno, bahkan pidato yang singkat sekali pun. Berdasarkan laporan Kedutaan Besar Amerika, pidato-pidato Sukarno tidak lagi berpengaruh pada pendengarnya. Sukarno sering terdengar memekakkan telinga dan cenderung rewel, dan ia semakin kelihatan tersingkir dari kehidupan politik. Ia tampaknya gagal dalam melindungi pendukung-pendukung politiknya.

14. Sukarno tentu saja masih tetap berusaha menjaga unsur “KOM” dalam NASAKOM—kependekan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme yang menurutnya merupakan pilar-pilar revolusi Indonesia. Akan tetapi tampaknya kecil kemungkinan bahwa ia akan berhasil menyelamatkan PKI yang sekarang ini, maupun menghidupkan kembali suatu partai dengan nama lain dalam waktu dekat. Sukarno takut bahwa dengan kekalahan PKI barisan kiri revolusinya akan mengendur atau mundur. Akan tetapi hancurnya PKI juga berarti berakhirknya sebuah partai yang paling disiplin, dinamis, dan terorganisir dengan baik di Indonesia, dan hal ini juga menambah beban pikiran Sukarno. Sukarno yang tidak berafiliasi ke partai politik apapun kini tidak lagi mempunyai partai massa yang bisa mendukung ide-ide dan teori-teorinya, dan tidak ada pula kekuatan politik yang memadai baginya untuk mengimbangi kekuatan AD.

15. Semua itu tidak hanya mengurangi pengaruh politik Sukarno, tapi sepertinya juga telah memengaruhi kerangka pikirnya. Penampilan-penampilannya yang sering kacau seperti menunjukkan bahwa ia sudah mulai kehilangan kepercayaan diri. Secara realistik posisi Sukarno hanya tinggal sebagai kepala negara simbolis saja. Jenderal Soeharto yang oleh Sukarno sendiri disebut sebagai “penjaga ketertiban dan keamanan Indonesia” jelas telah naik statusnya melebihi Sang Presiden dan sering kali

ia berhasil meloloskan kepentingan-kepentingan AD dalam banyak hal. Satu-satunya tindakan penting Sukarno dalam beberapa pekan terakhir ini adalah mengubah nilai tukar mata uang Indonesia—sebuah tindakan yang diambil tanpa persetujuan AD. Namun demikian sepertinya tindakan itu hanya kecil saja pengaruhnya pada sektor ekonomi dan tidak akan menolong posisi Presiden secara politis.

Masa Depan Sukarno

16. Mungkin saja Sukarno akan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan politik yang kini sedang berubah untuk kemudian bangkit lagi, namun untuk sementara ini ia telah kehilangan sentuhan politiknya. Lebih dari itu, sebagai indikasi atas semakin terpuruknya karir politik Sukarno, para politikus oportunistis tampaknya mulai berpikir bahwa dekat dengan Sukarno semakin tak ada gunanya.

17. Banyak pendukung politik Sukarno juga semakin kehilangan peran politik mereka. Mungkin ini hanya masalah waktu saja, sampai suatu saat nanti Soebandrio dipecat dari jabatannya. Perombakan pemerintahan seperti yang diisukan akan menyingkirkan tokoh-tokoh lain yang sudah lama dekat dengan Sukarno. Menteri Penerangan Roeslan Abdul Gani mendapat posisi utama di KOTI, tapi—seperti layaknya seorang oportunistis—ia kini kelihatan mau bekerjasama dengan AD. Wakil Perdana Menteri Ketiga Chaerul Saleh masih aktif, tapi dia juga kelihatan mulai khawatir dan mulai mendekatkan diri dengan AD, sehingga ia baru-baru ini ia membuat pernyataan yang cenderung mirip dengan pernyataan-pernyataan Nasution dan Soeharto.

18. Presiden Sukarno kemungkinan hanya akan punya sedikit waktu untuk membuat keajaiban politik yang sekian tahun telah menempatkannya di pusat segala sesuatu mengenai Indonesia. Kesehatannya semakin memburuk. Ada juga rumor yang semakin santer bahwa Sukarno akan sepenuhnya “disingkirkan dari

panggung” setelah tahun baru. Banyak pimpinan senior AD percaya bahwa Sukarno terlibat dalam percobaan Kudeta itu. Beberapa orang—termasuk Soeharto—tinggal punya sedikit rasa hormat kepada Presiden Sukarno dan mungkin akan senang melihatnya disingkirkan dari tampuk pimpinan. Akan tetapi, tampaknya penurunan status kepresidenan menjadi kantor seremonial akan berlangsung perlahan. Perubahan macam itu akan terjadi lebih karena dorongan keadaan daripada karena adanya perombakan pemerintahan secara resmi. Kebanyakan pimpinan AD merasa bahwa Sukarno masih berguna bagi mereka sebagai simbol kesatuan Indonesia dan sebagai legitimasi bagi orde politik yang baru. Lagi pula, suatu gerakan langsung melawan Sukarno akan dapat menyulut aksi yang kemudian dapat memecah belah kekuatan AD. Hal itu mungkin terjadi mengingat bahwa beberapa pejabat senior masih setia kepada Presiden Sukarno.

Masalah-masalah dalam AD

19. Seiring dengan berjalannya waktu, tumbuh beberapa kelompok dalam AD yang memungkinkan terjadinya perpecahan. Meskipun tidak akan memengaruhi posisi Nasution dan Soeharto secara serius, namun kelompok-kelompok itu mungkin saja menawarkan pada Sukarno kemungkinan untuk manuver baru. Angkatan Bersenjata sepertinya juga mulai berhadapan dengan banyaknya problem ekonomi dan masalah pemerintahan di Indonesia. Meskipun para pemimpin militer baru-baru ini telah didesak untuk memberikan perhatian lebih besar pada masalah-masalah ekonomi, namun tidak ada tanda-tanda bahwa mereka telah menyusun sebuah program yang terpadu untuk mengatasi masalah ekonomi maupun masalah-masalah mendesak yang lain. Pihak militer sedang mempertimbangkan untuk menunjuk Sultan Yogyakarta guna menangani masalah ekonomi melalui KOTI, namun tampaknya kecil kemungkinan bahwa para

Jenderal akan sungguh-sungguh mempercayai orang dari kalangan sipil untuk membantu militer dalam menjalankan pemerintahan. Apalagi mengingat bahwa sekarang ini militer sedang berusaha menghancurkan PKI dan melakukan berbagai manuver melawan Sukarno. Meskipun sebenarnya militer sendiri sangat berharap untuk bisa memegang tampuk pemerintahan, namun agaknya mereka akan melakukannya melalui suatu pemerintahan yang seolah-olah dipimpin oleh kelompok sipil. Tidak ada tanda-tanda bahwa mereka berencana untuk mendirikan suatu pemerintahan diktator militer, meskipun Nasution telah disebut-sebut oleh beberapa tokoh Angkatan Bersenjata sebagai calon pengganti Sukarno.

20. Akan tetapi, mengingat makin meningkatnya desakan untuk mencari jalan keluar bagi masalah-masalah Indonesia—khususnya masalah ekonomi—Angkatan Bersenjata mungkin merasa bahwa pemerintahan sipil akan merupakan sesuatu yang terlalu “mewah”. Karena sekarang ini kekuasaan praktis ada di tangan militer, sangat mungkin bahwa mereka akan disalahkan jika jalan keluar bagi masalah-masalah Indonesia tidak kunjung ditemukan. Oleh karena itu, para pemimpin militer mungkin akan merasa perlu untuk mengambil tindakan langsung dalam mengatasi masalah-masalah yang ada. Dalam keadaan darurat seperti sekarang ini Angkatan Bersenjata sudah cukup jauh terlibat dalam administrasi negara.

21. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, militer tidak terlalu kompeten dalam menangani administrasi negara. Pada periode 1957-1960, ketika tentara mendapat tanggung jawab administratif yang besar, ternyata keadaan negara tidak menjadi lebih baik. Persediaan dan penyaluran bahan makanan kacau, sementara korupsi terjadi di hampir semua lapisan di AD. Mungkin saja para pemimpin AD sudah belajar dari petualangan yang gagal tersebut, namun tidak bisa dijamin bahwa mereka tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama.

3. RPKAD Kembali dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali

*Dokumen berikut ditulis oleh Dubes AS untuk Indonesia Marshall Green tanggal 5 Januari 1966. Dalam dokumen yang ditujukan ke Departemen Luar Negeri di Washington ini ia antara lain melaporkan kembalinya pasukan RPKAD dari pelaksanaan tugas menumpas mereka yang dituduh sebagai anggota PKI, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Menurut Green, salah satu alasan kembalinya pasukan itu adalah untuk memperkuat posisi AD, karena diduga akan ada suatu kerusuhan pada awal Januari. Saat itu katanya situasi politik di Jakarta tak menentu, antara lain ditandai dengan rumor mengenai rencana kepergian Bung Karno ke luar negeri untuk jangka waktu yang tidak jelas.****

TELEGRAM DARI KEDUBES AMERIKA SERIKAT (JAKARTA) UNTUK DEPARTEMEN LUAR NEGERI (WASHINGTON)²

1. Situasi Umum Sampai Jam 17.00 Tanggal 5 Januari 1966

Situasi politik menjadi lebih tidak jelas daripada biasanya sebagai akibat dari meningkatnya manuver-manuver di belakang layar dan ketidakpastian tentang rencana Sukarno pergi ke luar negeri. Kembalinya pasukan RPKAD (Resimen Para-Komando Angkatan Darat) dari daerah juga menimbulkan pertanyaan tentang arah perkembangan politik.

2. Rencana Perjalanan Sukarno dan Manuver Politik

A. Berdasarkan berbagai laporan bahwa Sukarno sedang merencanakan (atau pura-pura merencanakan) perjalanan ke luar negeri, Soebandrio dan Leimena mengumumkan pernyataan

² Telegram dari Kedubes Amerika (Jakarta) untuk Departemen Luar Negeri (Washington), 5 Januari 1966. Rahasia. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #37.

publik pada tanggal 4 Januari bahwa Sukarno tidak merencanakan perjalanan ke luar negeri dan bahwa laporan-laporan mengenai rencana perjalanan itu adalah propaganda Nekolim [Neokolonialisme dan imperialism]. Perjalanan itu masih mungkin tetapi tidak akan segera. Seorang Assisten Menteri mengatakan bahwa AD masih secara diam-diam menentang kepergian Sukarno. [*Satu kata dirahasiakan*] mengatakan “solusi politik” yang sudah lama dijanjikan. Ada kemungkinan-kemungkinan lain tentang mengapa laporan rencana perjalanan Sukarno tidak menentu. Misalnya Sukarno ragu-ragu, kesehatan Sukarno sedang tak menentu, Istana sengaja menyebarkan kebingungan, atau perbedaan pandangan mengenai siapa yang harus menggantinya selama dia pergi, dll.

B. Rapat Kabinet yang ketiga sejak Kudeta diadakan pada tanggal 2 Januari. Asisten Menteri yang tersebut di atas juga mengatakan bahwa tak ada hal yang penting dalam pertemuan Kabinet itu, kecuali pernyataan Sukarno yang menyangkal tuduhan mengenai keterlibatannya dalam Gestapu sebagaimana terkait dengan laporan mengenai penahanan Aidit. Media juga melaporkan tentang Rapat Presidium pada tanggal 4 Januari di mana tiga Waperdam (Wakil Perdana Menteri) menghindari pertanyaan pers. Pertemuan-pertemuan itu serta ketidakjelasan mengenai rencana perjalanan Sukarno memberikan kesan tentang adanya manuver-manuver politik yang semakin intens di belakang layar. [*Beberapa kata dirahasiakan*] menunjukkan bahwa Sukarno telah memerintahkan untuk meningkatkan Konfrontasi dengan Malaysia dengan jalan mentransfer pasukan ke Kalimantan dan menunda taktik AD. Akibatnya beberapa hari terakhir ini timbul perang kata antara Nasution dan Sukarno.

3. Kembalinya Pasukan Raiders Kostrad

RPKAD —7 pasukan elit yang telah menjadi pelaksana penumpasan PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali—telah

dikembalikan ke Jakarta pada tanggal 31 Desember 1965 kecuali sekelompok kecil pasukan di Bali yang baru akan kembali minggu depan. Alasan untuk mengembalikan pasukan itu adalah karena situasi keamanan sudah mulai normal. Menurut laporan yang belum dikonfirmasi yang berasal dari Kostrad, kembalinya RPKAD itu berkaitan dengan kemungkinan adanya kerusuhan pada tanggal 1 Januari. Apapun alasannya, kembalinya RPKAD memperkuat posisi AD di Ibukota dan mungkin kemampuan AD untuk menekan Sukarno. Menurut laporan [*beberapa kata dirahasiakan*] terjadi ketegangan antara RPKAD yang baru kembali dengan Cakrabirawa (pasukan pengawal Presiden) sehingga timbul tawuran di jalanan.

4. Perkembangan Media Massa

Beberapa saat terakhir ini telah muncul sejumlah surat kabar yang dimaksudkan untuk mengembalikan momentum kampanye anti-PKI dan anti-Sukarno yang sudah dimulai sejak pertengahan Desember 1965. Dua dari surat kabar itu, *Djiwa Revolusi* dan edisi Jakarta dari *Jihad* milik Perti (yang selain terbit dalam edisi “nasional” juga terbit secara lokal) secara terbuka meminta Presiden Sukarno untuk menunjuk Wakil Presiden, memperingatkan dia bahwa “Indonesia tidak membutuhkan partai Marxis”, dan mengecam komposisi Kabinet yang ada sekarang ini. Jenderal Soekendro, yang baru kembali ke Indonesia dua minggu yang lalu, dikenal sebagai [*satu kata dirahasiakan*] surat kabar dan membuat sentimen anti-Sukarno kembali merebak. Sehubungan dengan itu, kekuatan-kekuatan pro-Sukarno juga menerbitkan sejumlah koran untuk membantu Menteri Penerangan Kabinet Dwikora dalam mengembalikan kharisma [*satu kata dirahasiakan*] yang kini semakin meredup. Salah satu koran itu, *Genta*, diketuai oleh Komandan Pasukan Gerak Cepat Angkatan Udara, yang sebagiannya telah melatih Pemuda Rakyat pada bulan September 1965. Tetapi *Genta* terkesan kurang

profesional dan tidak mendapat dukungan dari Menteri Penerangan Ahmadi. Ahmadi sendiri telah mengambil sikap *low profile* sejak mendapat serangan dari kedua belah pihak. Koran-koran baru yang pro-AD mengikuti tradisi sensasional dari korannya Soekendro yakni *Api* yang kini sudah tidak terbit, dengan rubrik-rubrik seperti “Apalagi?...Apa yang akan terjadi?”, “Operasi militer sudah siap...”, kemudian “Angkatan Bersenjata telah siap...” Semua itu berakibat semakin memanas dan tidak menentunya situasi politik di Jakarta.

Green

4. Amerika Ragu-ragu Membantu Indonesia

Tampaknya Ibnu Sutowo pernah mencoba mendekati orang-orang dari kalangan pemerintah Jepang agar membantu mendesak pemerintah Amerika supaya mengirim bantuan ke Indonesia. Alasan yang dipakai, kalau Indonesia tak dibantu ada kemungkinan Komunisme akan bangkit lagi. Selain itu Ibnu juga sedikit mengancam dengan mengatakan bahwa kalau AS tidak mau bantu, maka Indonesia akan berpaling ke Uni Soviet, musuh bebuyutan AS dalam Perang Dingin. Terhadap desakan itu kelihatannya pemerintah Amerika menolak secara halus. Alasan Amerika adalah bahwa Washington masih menunggu kepastian situasi ekonomi dan politik di Indonesia.

*Aslinya dokumen ini adalah telegram dari Departemen Luar Negeri AS di Washington untuk Kedubes AS di Jakarta.****

BANTUAN EKONOMI UNTUK INDONESIA

Telegram dari Departemen Luar Negeri (Washington) untuk Kedubes Amerika (Jakarta)³

1. Michio Kawabe, rekan dekat mantan Perdana Menteri Jepang Kishi mengatur pertemuan makan siang melalui Harry Kern dengan maksud bicara mengenai bantuan untuk Indonesia. Sebelumnya Kawabe pernah mengusahakan acara ini melalui Charles Symington, tetapi kemudian memutuskan bahwa Kern akan lebih bisa punya akses dengan pemerintah Amerika.

2. Kawabe mengatakan bahwa Jenderal Ibnu Sutowo dalam kunjungannya ke Tokyo bulan Desember lalu telah mencoba menghubungi Kishi supaya membantu mengusahakan program bantuan dari Amerika untuk Indonesia melalui perantara dari Jepang. Ibnu mengatakan kepada Kishi bahwa suatu cara telah disiapkan dengan pemerintah Amerika, dan bahwa yang perlu dikerjakan tinggal soal pembayarannya saja. Ibnu mengatakan,

³ Telegram dari Departemen Luar Negeri (Washington) untuk Kedubes Amerika (Jakarta), 13 Januari 1966. Status: Konfidenzial. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #114a.

tanpa bantuan tersebut ada bahaya bahwa PKI akan bangkit lagi di Indonesia, dan jika bantuan Amerika tidak datang Indonesia akan terpaksa berpaling ke Uni Soviet. Kawabe mengatakan bahwa menurut Kishi langkah ini merupakan kesempatan terakhir untuk membantu kekuatan-kekuatan konstruktif di Indonesia. Kawabe juga pernah datang ke Washington atas perintah Kishi untuk mengecek kebenaran tentang berita-berita mengenai Indonesia dan, jika berita-berita itu betul, perlu untuk mencari perantara dari Jepang guna mengusahakan bantuan Amerika untuk Indonesia. Kishi telah memberitahu Perdana Menteri Sato (mungkin juga Menteri Keuangan Fukuda) tentang permintaan Ibnu Sutowo, tetapi pemerintah Jepang di bawah eselon itu belum pernah diberitahu dan Kedubes Jepang di Washington juga belum tahu mengenai isi dari misi Kawabe.

3. Atas permintaan Kawabe kita memberi tanggapan berikut:

- a. Sekarang ini Amerika belum memikirkan bantuan dalam jumlah besar kepada Indonesia entah langsung atau tak langsung;
- b. Posisi ini diambil berdasarkan pembacaan atas ketidakpastian yang melengkapi baik politik internal Indonesia sekarang ini maupun arah ke depan politik luar negeri dan dalam negeri Indonesia;
- c. Ketidakpastian itu terutama mencakup: kebijakan ekonomi dan keuangan; kelanjutan dari kemerosotan ekonomi sebagai akibat dari konfrontasi Malaysia; sikap terhadap perusahaan-perusahaan minyak Amerika yang sekarang merupakan sumber utama pendapatan luar negeri; dan arah umum hubungan Indonesia-Amerika.

4. Kawabe merasa puas dan mengatakan bahwa pemerintah Jepang juga punya problem yang sama berkaitan dengan masalah pertanyaan-pertanyaan di seputar bantuan untuk Indonesia.

Ball

5. Soeharto dan Demonstrasi Mahasiswa di Bogor

Pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 1966 terjadi demonstrasi besar-besaran di sekitar Istana Bogor. Waktu itu di Istana sedang berlangsung rapat Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Sukarno. Sebagaimana dilaporkan oleh Dubes Green dalam dokumen tertanggal 17 Jauari 1966 ini pihak Amerika tampak senang bahwa para mahasiswa berdemo dengan penuh semangat melawan pemerintahan Bung Karno. Mereka datang dari tempat-tempat lain, khususnya Jakarta dan Bandung. Dilaporkan, para mahasiswa bahkan berani melawan pasukan Cakrabirawa, hingga nyaris terjadi bentrok fisik. Di tengah itu semua, kata Green, tiba-tiba muncul Jenderal Soeharto untuk menenangkan situasi. Ia kemudian menghilang, tetapi lalu muncul kembali. Tidak disebutkan bagaimana Soeharto bisa tiba-tiba muncul, tapi juga tiba-tiba hilang.

*Dikatakan bahwa dalam rapat itu Bung Karno sempat geram kepada mahasiswa yang berdemo. Ia sempat menunjukkan adanya pamflet yang menuduhnya terlibat dalam "Gestapo" dan ia menolak tuduhan itu. Adam Malik yang hadir dalam rapat itu menyatakan bahwa kemungkinan besar pamflet itu dibuat oleh orang-orangnya. Pada bagian akhir dokumen dikatakan adanya indikasi bahwa militer akan menarik dukungan kepada mahasiswa yang berdemonstrasi. Pertanyaannya, mengapa?****

TELEGRAM DARI KEDUBES AMERIKA (JAKARTA) UNTUK DEPARTEMEN LUAR NEGERI (WASHINGTON)⁴

1. Demonstrasi mahasiswa di Bogor pada hari Sabtu, yang diadakan bersamaan dengan pidato Sukarno di depan rapat Kabinet, hampir menjadi sebuah titik-balik karena nyaris terjadi bentrokan antara mahasiswa dengan pasukan keamanan Istana. Semangat dan disiplin mahasiswa tetap tinggi, dan mereka

⁴ Telegram dari Kedubes Amerika (Jakarta) untuk Departemen Luar Negeri (Washington), 17 Januari 1966. Status: Konfidensial. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #31.

berencana melakukan demonstrasi lebih lanjut selama pekan ini, termasuk demonstrasi besar yang direncanakan untuk hari Selasa, jika diijinkan oleh AD. (Tujuan lebih lanjut dari para mahasiswa dan sikap AD dilaporkan dalam telegram terpisah).

2. Berdasar berbagai sumber di kalangan mahasiswa, berikut adalah kronologi dari apa yang terjadi pada tanggal 15 Januari di Bogor: sekitar 150-200 truk berisi mahasiswa datang dari Jakarta (jumlah persisnya berbeda-beda) dan turun di Bogor mulai Jumat petang dan bergabung dengan kelompok-kelompok mahasiswa dari Bandung maupun Bogor sendiri. Datang pula rombongan Pasukan Khusus dari Divisi Siliwangi (disebut Kujang) dan dari Resimen Mahasiswa Jakarta dan Bandung. (Resimen Mahasiswa adalah salah satu unit AD yang terdiri dari mahasiswa paruh-waktu). Empat kendaraan lapis baja, yang semua atau sebagiannya berasal dari Resimen Mahasiswa, berada di gerbang Istana. Ketika mereka dilarang masuk ke pelataran Istana salah satu dari kendaraan lapis baja itu ditabrakkan ke pintu gerbang, sementara tiga yang lain berjaga-jaga.

3. Pada titik ini pasukan pengawal Istana (Cakrabirawa) mulai melepaskan tembakan ke udara. Beberapa peluru jatuh ke tengah-tengah kerumunan massa. Meskipun sejumlah mahasiswa menyatakan terluka, namun tidak ada korban jiwa meskipun sumber lain mengatakan bahwa salah seorang pemimpin KAMI wajahnya kena popor senjata. Sebagai reaksi atas insiden penembakan ini seorang anggota Menwa dari Universitas Kristen di Jakarta melompat ke salah satu kendaraan lapis baja dan mengarahkan moncong senjata ke arah Cakrabirawa, sementara beberapa tentara Siliwangi juga mengarahkan senjata mereka ke Cakrabirawa. Tak lama kemudian insiden tembak-menembak hampir terjadi, namun bisa dihindari ketika seorang Kapten AD berteriak dan memerintahkan untuk tidak menembak. Jenderal Soeharto yang didampingi Admiral Martadinata dan Jenderal

Polisi Sutjipto, dengan cepat muncul di tengah massa dan menangkan para demonstran.

4. Selama berlangsungnya rapat Kabinet dan pidato Sukarno, Istana Bogor sepenuhnya dikepung oleh mahasiswa demonstran dan para Menteri dilarang melewati pintu gerbang sampai jam 16.00, kecuali delapan orang menteri yang dipandu oleh Adam Malik—berkat popularitas pribadi Adam Malik. (Sebuah sumber melaporkan bahwa sejumlah Menteri yang lain pergi dengan naik helikopter). Akhirnya, Jenderal Soeharto muncul lagi, dan membujuk para mahasiswa untuk membubarkan diri. Dia mengumumkan bahwa PKI telah dilarang atau bahwa dia sendiri yang akan melarang PKI jika Presiden Sukarno tidak mau melakukannya (laporan-laporan berbeda dalam hal apa yang sebenarnya dia katakan). Soeharto meminta kesabaran berkaitan dengan soal penurunan harga.

5. Semangat dan disiplin para mahasiswa sangat tinggi, dan mereka semakin jelas mengarahkan demonstrasi mereka ke arah Sukarno. Banyak sumber melaporkan bahwa tembok-tembok di Bogor dan khususnya rumahnya Hartini dicoret-coret dengan tulisan yang menyatakan bahwa Hartini (istri Sukarno) adalah “pelacur” atau “pelacur Gerwani” (Gerwani adalah *onderbouw* PKI). Sumber lain yang layak dipercaya mengatakan bahwa sebuah jalan di Djatinegara yang menuju rumah seorang istri simpanan terbaru Sukarno ditulisi “Jangan terlalu sering mengunjungi istri simpananmu, Bung”.

6. Salah satu aspek dari pidato Sukarno yang tidak dilaporkan dalam telegram terdahulu mungkin penting. Pada akhir pidato Sukarno mengatakan: “Ini aku, Sukarno. Aku tidak bisa menjadi orang lain. Siapa yang ingin mengikuti aku, ikuti! Siapa yang menyukai aku, belalah aku. Aku melihat ada gejala-gejala upaya untuk menjatuhkan Sukarno. Aku tidak akan menyerah satu milimeter pun. Bentuklah barisanmu tapi jangan bertindak liar.

Tunggu komandoku". Banyak orang Indonesia menafsirkan kata-kata itu, yang disampaikan dengan nada-suara tertentu, sebagai perintah tersembunyi kepada PKI dan kekuatan-kekuatan pro-Komunis lain untuk menyiapkan diri guna melakukan pertempuran habis-habisan. Kurang dari satu jam setelah selesainya pidato itu, di jalan-jalan di Jakarta muncul spanduk-spanduk yang menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap Bung Karno. Spanduk-spanduk itu kebanyakan dibuat oleh "Gema Sukarno", yang ternyata merupakan singkatan dari Gerakan Mahasiswa Sukarno. Spanduk-spanduk itu sangat bertentangan dengan nada demonstrasi di Bogor, di mana para saksi mata mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda pro-Sukarno. Poster atau bahkan pekikan "Hidup Sukarno!" juga tak ada. Poster-poster pro-Sukarno yang muncul berasal dari BPI (sebuah badan intelijen yang diketuai Soebandrio), dengan menggunakan GMNI (mahasiswa PNI) yang berhaluan kiri.

7. Sejumlah sumber menerima informasi dari Adam Malik bahwa dalam rapat Kabinet terakhir, Sukarno tampak geram terhadap para mahasiswa tetapi tetap tampak sehat. Dalam pidatonya Sukarno sempat menyinggung pamflet yang menuduhnya sebagai pengkhianat bangsa karena dalam menyebut Gerakan 30 September ia menggunakan istilah "Gestok" dan bukan istilah "Gestapu". Adam Malik juga mengatakan bahwa pada kesempatan itu Sukarno sempat mengeluarkan dokumen dari saku dan melambai-lambaiannya seakan-akan sebagai barang bukti terhadap apa yang dikatakannya. Beberapa saat kemudian (tampaknya tak lama setelah pidato tersebut) Sukarno memerintahkan Soebandrio untuk menyelidiki asal-usul pamflet tersebut. Adam Malik tidak dapat melihat pamflet itu dari dekat tetapi yakin bahwa pamflet itu dibuat oleh orang-orang dari kubunya.

8. Komentar: Demonstrasi yang berlangsung pada hari Sabtu lalu merupakan salah satu demonstrasi yang paling penting dalam

beberapa tahun terakhir ini. Kalau saja ada demonstran yang kehilangan kepala karena tertembak, atau ada yang meninggal atau terluka, ada kemungkinan besar Istana Presiden akan diserbu. Para mahasiswa tampak semakin percaya diri dan makin solid, serta semakin jauh meninggalkan sikap hati-hati yang dianjurkan oleh Nasution. Pihak Istana maupun para Menteri benar-benar gentar menyadari tekad para mahasiswa, sebagaimana tercermin dalam laporan yang mengatakan bahwa pada hari Minggu Istana dikelilingi oleh tumpukan karung pasir dan personil militer yang dilengkapi dengan senjata otomatis. Semangat para mahasiswa tercermin dengan jelas dalam pembicaraan dengan staff Kedutaan kita. Pada kesempatan itu mereka secara terbuka dan bangga menunjukkan kesamaan antara demonstrasi mahasiswa di Jakarta dengan demonstrasi mahasiswa Korea dalam menumbangkan Presiden Syngman Rhee, atau demonstrasi untuk menumbangkan Menderes di Turki. Salah seorang mantan aktivis mahasiswa Angkatan 1945 yang dulu pernah mendesak Sukarno untuk memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia menyamakan semangat mahasiswa sekarang ini dengan semangat 1945. Dia mengatakan: "Kami telah melakukan Revolusi. Mungkin mahasiswa-mahasiswa ini akan melakukan hal yang sama". Optimisme ini kemudian dimentahkan oleh sikap AD yang tampaknya mau menarik dukungannya terhadap demonstrasi mahasiswa.

Green

6. Rencana Demonstrasi Mahasiswa dan Sikap Militer

Dokumen ini aslinya adalah telegram ditulis oleh Dubes Green di Jakarta untuk Departemen Luar Negeri di Washington. Tak puas dengan demonstrasi keras yang terjadi hari Sabtu tanggal 15 Januari 1966, begitu menurut dokumen ini, para mahasiswa bermaksud mengadakan demonstrasi lebih besar dan lebih lama di Jakarta guna menekan Bung Kurni. Suasana tarik-ulur terjadi antara mahasiswa anti-Komunis dan mahasiswa pro-Komunis serta kubu tentara. Ketiganya tampak bersemboyan membela Bung Kurni dan membela kepentingan rakyat, namun sebenarnya mereka memiliki agenda yang berbeda-beda.

*Sementara itu terjadilah tawar-menawar antara kubu tentara dan kubu Bung Kurni. Kubu tentara ingin supaya PKI secara resmi dibubarkan, namun kubu Bung Kurni selalu mengulur waktu dengan menjanjikan akan diumumkannya suatu “solusi politik”. Kedubes AS di Jakarta tampaknya masih belum yakin ke mana situasi politik yang demikian itu nantinya akan mengarah.****

TELEGRAM DARI KEDUBES AMERIKA (JAKARTA) UNTUK DEPARTEMEN LUAR NEGERI (WASHINGTON)⁵

1. Sebagai kelanjutan atas kerusuhan di Bogor hari Sabtu lalu, mahasiswa anti-Komunis tetap berapi-api selama akhir pekan dan merencanakan untuk mengadakan demonstrasi lebih lanjut guna meningkatkan tekanan pada Sukarno. Sementara itu sikap militer terhadap demonstrasi mahasiswa semakin kuat, dan beredar pertanyaan apakah militer, demi alasan taktis, akan menarik dukungan dari gelombang demonstrasi mahasiswa.

⁵ “Rencana Demonstrasi Mahasiswa dan Sikap Militer”, Telegram dari Kedubes Amerika (Jakarta) untuk Departemen Luar Negeri (Washington), 17 Januari 1966. Status: Konfidensial. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #30.

2. Sumber-sumber dari kalangan mahasiswa selama akhir pekan mengindikasikan bahwa mereka merencanakan untuk melanjutkan demonstrasi selama seminggu ke depan.

- A. Sasaran utama demonstrasi pada hari Senin adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN)
- B. Demonstrasi itu akan dilanjutkan dengan demonstrasi yang lebih besar pada hari Selasa di Istana Negara. Menurut rencana, mahasiswa Jakarta akan berdemonstrasi pada Senin pagi. Sementara itu para mahasiswa dari Bogor akan mulai bergerak ke Jakarta Senin sore. Karena pagi ini ada keragu-raguan apakah para demontran dari Bandung akan bisa mencapai Jakarta dalam waktu satu hari, maka demonstrasi itu akan ditunda sampai hari Rabu. Seorang sumber berita mengatakan bahwa tiga atau empat truk akan dilepaskan dalam puncak demonstrasi guna menyerbu Kedubes Cina (RRT). Sumber lain (Darmawan Moenaf) direncanakan akan ikut dalam penyerbuan itu tetapi tidak memberi keterangan detail mengenai tujuan penyerbuan maupun kerusakan yang akan ditimbulkan. Seorang sumber dari Masyumi melaporkan adanya rencana untuk melakukan serbuan atas instansi-instansi telekomunikasi pada hari Kamis.

3. Sikap militer terhadap rencana demonstrasi mahasiswa itu sekarang menjadi lebih jelas dibanding dengan minggu sebelumnya. Komandan militer Jakarta Amir Machmud menyatakan pada tanggal 16 Januari bahwa demonstrasi-demonstrasi mahasiswa itu “tidak disiplin dan bahkan cenderung anarkis”. Machmud menyatakan bahwa para mahasiswa telah bergeser dari tujuan semula yakni untuk menurunkan harga. Mereka telah menyebabkan kemacetan lalu lintas dan memaksa pom-pom bensin untuk menjual bahan bakar lebih rendah daripada harga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ia menyatakan bahwa

satuan-satuan keamanan telah diperintahkan untuk “mengambil tindakan-tindakan preventif”. Sebenarnya militer telah berusaha mengembalikan harga bahan bakar ke harga resmi. Pada hari Minggu para komandan militer (Nasution, Soeharto, Martadinata, Sutjipto, dan Herlambang) juga telah mengeluarkan pernyataan: (A) kesetiaan pada Bung Karno dan (B) “kekompakan” Angkatan Bersenjata dengan rakyat “demi suksesnya revolusi, terutama demi mempertahankan revolusi”.

4. Pada hari Minggu pula sejumlah elemen anti-Komunis khawatir mengenai perpecahan di antara para mahasiswa. Seorang sumber dari PSI, setelah mendengarkan pernyataan Amir Machmud, menghabiskan sepanjang hari Minggu itu untuk mengunjungi sumber-sumber dari kalangan militer dalam upaya untuk membujuk militer agar tetap mendukung para mahasiswa dan menyampaikan pesan-pesan kepada mahasiswa secara langsung, dan bukan melalui pernyataan-pernyataan publik. Alasannya karena pernyataan-pernyataan publik macam itu akan membuat kesan bahwa para mahasiswa itu berada pada posisi yang keliru, serta dapat menimbulkan dukungan untuk Sukarno. Sumber-sumber dari kalangan mahasiswa menyatakan bahwa militer membutuhkan mahasiswa, sebagaimana halnya mahasiswa juga membutuhkan militer. Selanjutnya melalui mahasiswa militer akan memiliki posisi yang lebih kuat.

5. Pada tanggal 16 Januari KAMI mengeluarkan pernyataan bahwa, setelah mempelajari pidato Sukarno, KAMI: (A) mendukung Sukarno sepenuhnya, (B) siap untuk bergabung dengan gerakan demi kepentingan rakyat, negara dan Revolusi, (C) menyambut perintah Presiden untuk membentuk Dewan Mahasiswa Nasional, dan (D) mengimbau para mahasiswa untuk menegakkan disiplin, daya-juang, dan kewaspadaan.

6. Pada tanggal 17 Januari hanya ada sedikit kegiatan KAMI yang tampak di Jakarta, sementara para mahasiswa kiri, sebagaimana di laporkan oleh BPI, memasang spanduk-spanduk

untuk mendukung Sukarno. Staff Kedutaan juga melihat spanduk-spanduk yang bertebaran dari Germindo (kelompok mahasiswa yang terkait dengan Partindo, yang berbau Komunis). Dalam pidato hari Sabtu malam Soebandrio mendesak dibentuknya “Front Sukarno” dan pada hari Senin sore Ahmadi menyatakan bahwa para pegawai Departemen Penerangan menjadi anggota dari front tersebut. (Tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai bagaimana sebenarnya “front” itu).

7. Komentar:

A. Sebagai dampak dari apa yang berlangsung selama akhir pekan, situasi politik di Jakarta lebih membingungkan daripada biasanya. Sekarang suasana menjadi tegang dan harap-harap cemas, sebagaimana tampak dari pernyataan Menteri Pendidikan Tinggi Sjarif Thajeb kepada staff pendidikan Amerika (Beers) tadi pagi, yakni bahwa “akan ada perubahan besar di Indonesia dan saya kira hal itu akan terjadi pekan ini”. Dugaan bahwa sesuatu akan terjadi diperkuat oleh pernyataan Soebandrio yang disiarkan radio tadi pagi, bahwa “solusi politik akan diumumkan sebelum akhir bulan puasa (24 Januari)”.

B. Pertanyaan terbesar adalah mengapa militer menarik dukungan terhadap demonstrasi mahasiswa (setidaknya untuk sementara). Kemungkinan jawabannya: (1) militer agak ketakutan karena demonstrasi di Bogor Sabtu lalu nyaris menjadi kerusuhan terbuka; (2) Militer menarik diri dari konfrontasi langsung melawan Sukarno; dan (3) ada kesepakatan khusus antara militer dan Sukarno soal “solusi politik”.

C. Berkaitan dengan kemungkinan terakhir kami mendapat laporan sementara dari seorang aktivis Masyumi yang sekarang menjadi penasihat Subchan bahwa tiga minggu yang lalu Sukarno telah menyampaikan tiga alternatif kepada Soeharto berkaitan dengan pelarangan PKI, yakni: (1) PKI dilarang tetapi dibentuk partai Komunis baru setelahnya, (2) PKI tidak dilarang tetapi berada di bawah pengawasan partai-partai lain dalam

sebuah front nasional, atau (3) larang semua partai dan bentuk satu saja sebuah front nasional. Sebuah sumber mengatakan bahwa Soeharto menyampaikan usulan itu kepada Nasution, dan Nasution menolak alternatif (2) dan (3), tetapi setuju pada alternatif (1), dengan pemikiran bahwa pembentukan partai Komunis baru dapat ditunda.

D. Berdasar pada sikapnya selama ini, kami tidak yakin bahwa militer akan menarik dukungannya kepada para mahasiswa dan partai-partai jika situasi makin meruncing. Namun ada kemungkinan militer setuju untuk menghentikan demonstrasi-demonstrasi untuk sementara sambil menunggu “solusi politik” yang diajukan oleh Sukarno. Apapun yang terjadi, kebangkitan dari gerakan kiri di bawah “Front Sukarno” mendorong terjadinya pemisahan yang jelas antara dua kubu dan akan semakin membuka kemungkinan terjadinya krisis.

Green

7. Amerika Khawatirkan Akan Putus Hubungan Indonesia-Amerika

*Di tengah memanasnya situasi, pihak Amerika khawatir bahwa Indonesia akan memutuskan hubungan dengan Amerika. Salah satu alasannya, karena Sukarno-Soebandrio ingin memotong dukungan Amerika terhadap Angkatan Darat. Pihak Amerika sendiri mengandalkan bantuan dari AD supaya bisa tetap mempertahankan kehadirannya di Indonesia. Menteri Luar Negeri AS Dean Rusk yang menulis telegram ini untuk Dubes Green di Jakarta mengusulkan supaya Amerika menunggu sambil melihat perkembangan situasi dulu.****

TELEGRAM DARI DEPARTEMEN LUAR NEGERI (WASHINGTON) UNTUK KEDUBES AMERIKA (JAKARTA)⁶

1. Upaya Sukarno-Soebandrio untuk mengusir Amerika tampaknya lebih merupakan taktik untuk menekan militer melalui kita, dengan maksud untuk mengisolir militer tidak hanya dari Amerika melainkan juga dari setiap sumber dukungan Barat.
2. Gagalnya suap sebesar US\$ 150 juta, tuduhan konspirasi CIA, kontrol militer terhadap demonstrasi-demonstrasi media dan mahasiswa—semua itu tampaknya akan membuat Sukarno-Soebandrio mengalami kesulitan dalam melawan upaya untuk menggulingkan mereka. Meskipun demikian.... ada kemungkinan bahwa Sukarno akan menyampaikan pengumuman secara mendadak.
3. Apapun yang terjadi hanya militer-lah kekuatan yang dapat meredam ketegangan yang ada. Jika militer mau bertindak, upaya

⁶ Telegram dari Departemen Luar Negeri (Washington) untuk Kedubes Amerika (Jakarta), 21 Januari 1966. Status: Rahasia. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #86.

Sukarno-Soebandrio akan gagal. Tetapi jika militer tidak bertindak, tidak akan ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memengaruhi keputusan Sukarno.

4. Bahkan jika militer sebelumnya tidak sadar akan adanya rencana Sukarno-Soebandrio, peringatan Dahlan terhadap Soeharto, dan pembicaraan Anda [Green] dengan Adam Malik sudah cukup untuk mengingatkan militer agar berjaga-jaga. Kepentingan militer untuk mencegah putusnya hubungan dengan Amerika sudah jelas dengan sendirinya sehingga tidak perlu menjelaskan lagi, dan [kecil] kemungkinan untuk [adanya] salah tafsir (maksudnya kita siap untuk tawar-menawar atau menawarkan prinsip *quid pro quo* supaya kita tetap bisa berada di Indonesia). Meskipun demikian jika Anda benar-benar ragu bahwa militer tidak menyadari bahwa kepentingannya sedang dipertaruhkan, silakan mendekati Nasution melalui *channel* sebagaimana pernah diusulkan...

5. Lebih dari itu semua itu kita cenderung untuk tidak mengambil keputusan apa-apa dulu. Saya setuju bahwa rencana pembicaraan dengan Jepang dan Australia ditunda dulu sampai jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Sukarno-Soebandrio memang benar-benar dimaksudkan untuk memutus hubungan dengan kita.

Rusk



Langkah awal kekuasaan. Jenderal Soeharto beberapa saat setelah peristiwa 1 Oktober 1965 (sumber: Deppen RI)

BAB 2

FEBRUARI 1966: CIA, TENTARA DAN “POTRET GANJIL”

1. Pengantar

Demonstrasi mahasiswa yang berlangsung mulai bulan Januari terus berlanjut pada bulan Februari 1966. Didukung oleh tentara, mahasiswa berseberangan dengan Bung Karno karena Bung Karno tak kunjung menyampaikan “solusi politik” yang ia janjikan berkaitan dengan peristiwa berdarah 1965. Dengan lantang para mahasiswa menyerukan “Tritura” atau Tiga Tuntutan Rakyat. Ketiga tuntutan itu adalah: “Bubarkan PKI, *retool* (bubarkan) Kabinet Dwikora, dan turunkan harga.”

Menanggapi tuntutan mahasiswa itu pada tanggal 21 Februari Bung Karno me-*retool* (atau *re-shuffle*) Kabinet Dwikora dan menggantikannya dengan “Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan”. Dalam Kabinet ini Nasution dicopot kedudukannya sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Ia digantikan oleh Letjen Sarbini sebagai Menko Pertahanan. Soeharto sendiri ditetapkan sebagai Menteri/Panglima AD dan Kepala Staff Komando Tertinggi. Oleh Bung Karno dua orang yang dicurigai terlibat dalam insiden berdarah 1 Oktober 1965 yakni Omar Dhani dan Soebandrio dipertahankan dalam Kabinet. Melihat pencopotan Nasution dan dipertahankannya orang-orang kiri dalam Kabinet mahasiswa dan tentara kecewa. Mereka menyebut Kabinet itu sebagai “Kabinet Seratus Menteri” atau “Kabinet Gestapu”. Pada

hari pelantikan Kabinet itu, yakni tanggal 24 Februari, mahasiswa mengadakan demonstrasi besar-besaran di seputar Istana Negara, sehingga sejumlah menteri harus datang dengan berjalan kaki atau naik helikopter. Dalam bentrokan antara mahasiswa dan pasukan pengawal Istana Cakrabirawa seorang mahasiswa, Arief Rahman Hakim, tewas. Insiden ini membuat mahasiswa makin berani dalam demo-demo mereka.

Sebagai reaksi terhadap demonstrasi mahasiswa, pada tanggal 25 Februari 1966 Bung Karno atas nama Kogam (Komando Ganyang Malaysia) memutuskan untuk membubarkan KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Namun tak lama kemudian peran KAMI diambil-alih oleh organisasi-organisasi lain, seperti KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda-Pelajar Indonesia), KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia), KABI (Kesatuan Aksi Buruh Indonesia), KAWI (Kesatuan Aksi Wanita Indonesia), dll. Ketika pada tanggal 28 Februari Soebandrio menyatakan bahwa setiap kekerasan akan dijawab dengan kekerasan, para mahasiswa membala dengan membakar boneka Soebandrio.

Perlu dicatat pula bahwa pada tanggal 1 Februari Soeharto naik pangkat militernya dari Mayor Jenderal menjadi Letnan Jenderal guna mengimbangi jabatannya sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat. Sementara itu pada tanggal 13 Februari dimulailah sidang Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) untuk mengadili mereka yang dituduh terlibat dalam Gerakan Tigapuluh September. Hingga tahun 1978 ada sekitar 900 orang yang diadili oleh Mahmilub.

Amerika tampak mengamati semua perkembangan itu dari dekat, sambil menunggu siapa yang nantinya akan menjadi “pemenang” dari tarik-ulur antara mereka yang pro-Sukarno dan pro-Soeharto dengan sikap dan pandangan politis masing-masing. Washington masih belum paham, mengapa meskipun sudah memiliki kekuatan yang semakin meningkat tentara masih saja enggan untuk mendongkel Bung Karno.

2. Amerika Bersikap Ekstra Hati-hati

Pada satu sisi Amerika tampak gembira bahwa proses penindasan terhadap kelompok Komunis dan kaum kiri pada umumnya berjalan dengan lancar. Pada sisi lain negeri itu juga belum yakin betul bahwa tentara akan berani melawan Presiden Sukarno secara terang-terangan. Sebagaimana dicatat dalam telegram tertanggal 2 Februari 1966 dari Dubes Green ke Washington di bawah ini, militer makin tak sabar karena “solusi politik” yang dijanjikan Bung Karno tak kunjung tiba. Meskipun demikian mereka juga tak berani untuk terus menekan Sang Presiden. Green bahkan kecewa karena gara-gara kerusuhan demonstrasi mahasiswa di Bogor tanggal 15 Januari itu, kini ada indikasi bahwa militer makin renggang hubungannya dengan kalangan sipil dan justru makin dekat dengan Presiden.

*Namun demikian Green tampak terhibur oleh pemikiran bahwa militer tidak akan memutuskan hubungan dengan Amerika. Sekaligus ia menganjurkan supaya Amerika mengambil sikap ekstra hati-hati dalam pembicaraan mengenai Indonesia di tingkat internasional, guna menghindari kesan bahwa Washington sedang bersekongkol dengan negara-negara lain melawan pemerintahan Sukarno. ****

PERKEMBANGAN SITUASI POLITIK DI INDONESIA¹

1. Catatan berikut mencoba merangkum beberapa pendapat pribadi mengenai kejadian-kejadian di Indonesia serta implikasinya terhadap kebijakan Amerika Serikat.

2. Selama tiga minggu pertama bulan Desember, kubu militer memperoleh kemenangan yang cukup signifikan dalam perebutan kekuasaan dengan pihak Istana. Saat itu banyak hal telah terjadi. Misalnya: dibentuknya triumvirat dengan anggota-anggota yang disegani dan bertugas membawahi KOTI (Komando Operasi

¹ Telegram dari Kedutaan Besar AS (Jakarta) kepada Departemen Luar Negeri (Washington), 2 Februari 1966. Sumber: *Foreign Relations of the United States, 1964-1968, Vol XXVI. Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines* (Washington: United States Government Printing Office, 2001), hlm. 395-399.

Tertinggi, badan tertinggi urusan kebijakan dan koordinasi) yang kekuasaannya diperluas; Soebandrio berada dalam posisi yang makin sulit; dilaporkan bahwa kantor intelijen yang dipimpin Soebandrio yakni BPI telah dialihkan untuk berada di bawah kontrol KOTI; KOTOE (Komando Tertinggi Operasi Ekonomi) dihapuskan; rencana pengadilan terhadap para pelaku Gestapu diumumkan; dan kelompok-kelompok politik sayap kiri terus ditekan hingga mereka harus bersembunyi. Sejumlah gangguan kecil dan ringan yang selama ini agak mengganggu hubungan Amerika-Indonesia telah tersingkir-kan. Pada akhir Desember, beredar desas-desus yang sebagiannya berasal dari sumber terpercaya, yang mengatakan bahwa akan terjadi perubahan besar di Indonesia pada bulan Januari, antara lain ditandai dengan perjalanan Presiden Sukarno keluar negeri untuk jangka waktu yang lama.

3. Akan tetapi, bulan Januari terjadi sejumlah kekalahan kubu militer serta oleh penyegaran dan penyatuan kembali kekuatan kelompok Istana. Jika dilihat kembali, tampaknya suatu pertempuran hebat telah terjadi pada tanggal 18 Desember, yakni pada acara penutupan rapat KOTI yang berlangsung selama tiga hari. Pada kesempatan itu Presiden Sukarno menolak untuk membubarkan PKI dan menyatakan ingin supaya seluruh kekuasaannya kembali. Sebelum hal itu terjadi, para pemimpin militer masih berandai-andai bahwa Presiden Sukarno masih bisa diajak bicara mengenai hal-hal penting seperti pelarangan PKI dan penataan kembali pemerintahan agar dapat segera mengatasi masalah ekonomi yang makin parah itu. Ternyata Sukarno tetap *ngotot*, sehingga dalam pertemuan KOTI tanggal 16-18 Desember itu para peserta sadar bahwa Presiden tidak akan mengalah sedikit pun. Sebuah pertanyaan muncul: apa yang sekarang harus dilakukan oleh militer dan kalangan moderat? Atas pertanyaan macam itu muncullah ketidakpastian di mana mayoritas kelompok militer, di bawah pimpinan Nasution, menolak untuk

melakukan suatu tindakan tegas dan langsung terhadap Sukarno. Keengganan mereka untuk menentang Sukarno secara langsung itu didasari oleh kekhawatiran bahwa kalau para pemimpin militer itu menentang Sukarno secara terang-terangan, mungkin para prajurit akan menolak untuk ikut. Mungkin militer juga berpikir, kalau memang Sukarno dan orang-orang di sekitarnya menolak untuk berkompromi, biarkan saja mereka berkuasa dan biarkan saja mereka nanti dituntut untuk bertanggung jawab atas kacaunya ekonomi negara.

4. Ketika pada akhir Desember lalu Presiden Sukarno tahu bahwa militer tidak akan mau mengambil tindakan tegas terhadapnya, ia melihat hal itu sebagai kesempatan yang baik untuk melakukan *move-move* politik.

5. Reaksi masyarakat selama dua minggu pertama [*tulisan tidak jelas*—”Januari ‘?”] terhadap tingginya harga beras, minyak tanah, transportasi, dan lain-lain, memungkinkan militer untuk dapat bergerak di belakang opini publik dan mendukung mahasiswa untuk berdemonstrasi di jalan guna mengecam PKI, Soebandrio, monumen-monumen mewah yang dibangun Sukarno, serta hal-hal lain yang dipandang merugikan oleh militer dan kaum moderat. Agitasi tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 15 Januari, ketika ribuan mahasiswa menyerbu gerbang Istana Bogor, meminta supaya Soeharto secara pribadi datang guna meredakan suasana. Presiden Sukarno terpaksa berjanji bahwa para menteri ekonominya akan meninjau situasi untuk melihat kemungkinan menurunkan harga-harga.

6. Apa yang terjadi di Istana Bogor itu tampaknya mengejutkan militer. Juga Sukarno sendiri. Mereka menjadi sadar akan apa yang bisa terjadi jika demonstrasi-demonstrasi itu lepas kendali, sebagaimana yang memang hampir terjadi di Bogor hari itu. Oleh karena itu, militer dan Presiden benar-benar bersatu untuk mencegah kekacauan lebih lanjut dan bersama-sama mulai mengambil tindakan terhadap mahasiswa, terhadap [kelompok

agama tertentu], dan terhadap siapa saja yang cenderung bertindak ekstrim. Kepada kelompok-kelompok itu militer menunjukkan diri di mana mereka berdiri.

7. Akibat dari apa yang terjadi itu adalah surutnya semangat kalangan sipil yang selama ini telah menjadi sekutu militer dan dengan demikian Sukarno memperoleh lebih banyak ruang gerak untuk melakukan manuver-manuver. Para pemimpin sipil moderat sekarang ini memandang militer sebagai *partner* yang tak dapat dipercaya, yang mau meng-agitasi kelompok sipil untuk maju, tapi yang lantas meninggalkan mereka ketika harus berhadapan dengan Sukarno. Sikap seperti itu akan mengurangi kemampuan militer untuk menggunakan kelompok sipil di kemudian hari.

8. Saya duga sekarang ini Sukarno menentukan langkah-langkah politiknya berdasarkan keyakinan bahwa semakin lama dia dapat menunda “solusi politik” yang ia janjikan itu, akan semakin besar pula kesempatan baginya untuk mewujudkan citacitanya mengenai NASAKOM dan CONEFO (*Conference of the New Emerging Forces*). Ada kemungkinan dia merasa bahwa kalau ia mengumumkan “solusi politik”-nya itu sekarang, mungkin akan timbul reaksi kontra yang merugikan. Sementara itu kalau ia mengumumkan solusi itu kemudian, katakanlah dua bulan dari sekarang, resikonya akan lebih kecil karena saat itu akan terjadi berbagai perpecahan di kalangan militer, partai-partai politik, kelompok-kelompok agama dan organisasi-organisasi kepemudaan. Lebih dari itu, ketidakpastian soal solusi politik mungkin akan menimbulkan perbedaan kebijakan di kalangan militer sendiri. Sejauh Sukarno dapat menimbulkan kesan bahwa suatu saat nanti ia akan melarang PKI, atau akan mengambil suatu keputusan lain yang sesuai dengan harapan militer, tampaknya sejumlah pihak di kubu militer akan tetap sepakat untuk “tidak mengobok-obok situasi.”

9. Di sisi lain, Sukarno berada dalam tekanan berat untuk segera mengumumkan “solusi politik”-nya itu. [Sukarno tahu, tanpa ada kejelasan soal itu] negara-negara asing dari mana Sukarno berharap akan mendapat bantuan tambahan dan kelunakan dalam pembayaran hutang, akan ragu-ragu untuk membantu Indonesia. Keragu-raguan itu mudah muncul jika situasi politik di Indonesia terus-menerus tak menentu, dan lebih penting lagi jika Indonesia tidak mampu menyodorkan rencana-rencananya secara jelas serta penataan kembali sistem pemerintahannya.

10. Baru-baru ini kita menerima laporan dari setidaknya dua sumber terpercaya bahwa dalam waktu dekat Sukarno mungkin akan mengumumkan keputusan politik mengenai NASAKOM. Meskipun demikian tampaknya yang lebih mungkin adalah bahwa Sukarno akan mengumumkan adanya perubahan-perubahan kecil dalam kabinetnya, dengan maksud memberi kesan seolah-olah dia sedang sungguh-sungguh mengusahakan jalan keluar bagi permasalahan ekonomi yang sedang melanda Indonesia sekarang ini. Dengan langkah seperti itu, begitu Sukarno berpikir, ia akan dapat mengirim misi ke negara-negara asing guna mencari bantuan luar negeri dan mengupayakan pelunakan pembayaran hutang. Kelihatannya dia pikir hanya itu yang diperlukan, terutama jika orang-orang yang ditunjuk untuk urusan ekonomi nasional entah itu di Jakarta atau untuk menjalankan misi ke luar negeri itu adalah orang-orang yang memiliki nama baik di negara-negara yang dituju.

11. Meskipun pemecahan masalah macam itu adalah solusi yang sifatnya semu, ada kemungkinan para pemimpin militer akan menerimanya atas dasar beberapa pertimbangan. Mereka berpikir, suatu keputusan politik yang sifatnya komprehensif atau menyeluruh mungkin akan membuat Sukarno mengumumkan langkah-langkah yang bisa jadi justru bertentangan dengan kepentingan militer. Atau, mungkin saja dapat menimbulkan

kerusuhan sosial yang justru mau dihindari oleh militer. Sementara itu kalangan militer juga berpikir, kalau situasi ekonomi terus memburuk dan kalau nanti ternyata orang-orang yang dikirim ke luar negeri itu pulang dengan tangan kosong, mungkin saja Presiden Sukarno akan terpaksa menyusun ulang kabinetnya dan terpaksa pula mencari solusi bagi masalah ekonomi sebagaimana yang diharapkan oleh kelompok militer beserta unsur-unsur moderat dari kalangan sipil. Dalam situasi demikian, diharapkan Sukarno akhirnya bisa ditundukkan.

12. Saat ini atau setidaknya sampai beberapa waktu mendatang tampaknya Nasution melihat bahwa dalam dinamika perebutan kekuasaan ini peran militer adalah menjamin keamanan dan ketertiban, serta mencegah dampak buruk yang bisa timbul entah itu dari mahasiswa, kelompok agama tertentu, atau mungkin bahkan dari Presidium. Reaksi dari Presidium yang mungkin timbul dan mau dihindari oleh militer misalnya terang-terangan mensahkan PKI sebagai partai politik, atau membina hubungan dekat antara Jakarta dan Beijing. Atau mungkin juga Presidium akan melakukan tindakan-tindakan yang membuat Indonesia semakin terisolasi dari negara-negara sahabat yang kelak diperlukan dukungannya jika militer dan kalangan sipil moderat naik ke tampuk pemerintahan. Saya kira militer sama sekali tidak menginginkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat...

13. Saya tetap merasa bahwa selama Sukarno masih mempunyai kekuasaan sebesar seperti sekarang ini kekacauan politik dan ekonomi akan terus berlangsung atau bahkan semakin memburuk. Saya juga merasa bahwa dia akan tetap berusaha sekuat tenaga untuk mengarahkan revolusi Indonesia ke kiri, sejalan dengan prinsipnya mengenai NASAKOM dan CONEFO.

Strategi militer untuk mengurangi kekuasaan Presiden sebagaimana dilakukan sekarang ini mungkin saja berhasil, tetapi menurut saya hal itu sama mungkinnya dengan keberhasilan

Presiden Sukarno untuk bisa memecah-belah dan menguasai kelompok-kelompok yang menentangnya.

14. Kemungkinan bagi Amerika Serikat untuk ikut memengaruhi apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini amat kecil, namun kita mempunyai kepentingan yang sama dengan negara-negara seperti Jepang yang telah banyak memberikan bantuan kepada Indonesia dan mempunyai pengaruh yang cukup berarti atas negara itu. Ada kemungkinan negara-negara itu menuntut pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang realistik guna memecahkan masalah ekonominya sebagai syarat bagi mereka untuk memberikan bantuan kepada Indonesia. Jika hal itu yang terjadi, mungkin akan timbul dampak positif bagi Indonesia dan akan kuatlah posisi orang-orang Indonesia yang sekarang ini sedang memperjuangkan perbaikan ekonomi.

15. Penting kiranya bahwa kita bersikap ekstra hati-hati kalau suatu saat membicarakan masalah ini dengan negara-negara yang terkait. Hal ini perlu supaya tidak timbul kesan bahwa kita sedang bersekongkol dengan negara-negara sahabat untuk melawan Indonesia. Sebagaimana ditekankan dalam Telegram no. 2195 [dari Kedubes AS di Jakarta tanggal 31 Januari 1966—pen.], negara-negara donor memiliki alasannya tertentu ketika menuntut Indonesia supaya terlebih dulu menata kehidupan politik dan ekonominya sebelum negara-negara itu mau memberi bantuan kepada Indonesia.

Green

3. Cindy Adams Ingin Membantu

*Kekhawatiran mengenai memburuknya hubungan Indonesia-Amerika ternyata tidak hanya melanda kalangan politisi atau korps diplomatik Amerika saja, melainkan juga masyarakat umum. Hal itu mendorong warga masyarakat Amerika untuk juga membantu meredakan suasana. Di bawah adalah kutipan surat tertanggal 3 Februari 1966 dari Cindy Adams, seorang wartawati yang dikenal luas karena telah membantu Bung Karno untuk menyusun otobiografinya.² Ia akan berkunjung ke Indonesia dan meminta seorang staff Gedung Putih, Jack Valenti, supaya memberinya otoritas untuk membantu mendekati Presiden Sukarno agar memperbaiki hubungannya dengan AS.****

Mr. Jack Valenti³

Gedung Putih

Washington, D.C.

Yang terhormat Mr. Valenti,

Saya ingin berterima kasih atas sambutan yang hangat dan pengertian Anda.

Atas saran Anda, kami bertemu dengan Mr. Berger dan asistennya, Dave Cuthell, di Departemen Dalam Negeri. Kami bergurau sejenak dan mereka menunjukkan dengan jelas bahwa mereka tidak setuju jika hubungan internasional dianggap sebagai hubungan antar manusia dalam skala yang lebih besar. Nampaknya, dengan pemikiran yang sederhana ini, masalah di Asia Tenggara tidak pernah menghasilkan strategi yang baik bagi diplomat profesional. Entah kenapa saya terus teringat dengan sebuah ayat yang indah dari Alkitab yang berkata, “Kata yang diucapkan dengan baik adalah seperti apel emas...”

² Sukarno, *An Autobiography As Told to Cindy Adams*. New York: The Bobbs-Merill Company, Inc., 1965.

³ Surat dari Cindy Adams kepada Mr. Jack Valenti, 3 Februari 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, Gen CO 122 Indonesia. #3.

Atas undangan pribadi Presiden Sukarno, suami saya Joey dan saya kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Februari—dengan alasan untuk membawakan salinan resmi dari bukunya, *Sukarno: Sebuah Autobiografi Sebagaimana Diceritakan kepada Cindy Adams*—tetapi khususnya untuk merajut kembali hubungan yang renggang antara negara kita dan Indonesia. Undangan tersebut bisa diperluas. Jalan sudah terbuka. Sukarno akan mendengarkan kami. Yang kami butuhkan hanyalah “Sabda”. Selama dua tahun berada di Indonesia, kami mengunjungi Presiden Sukarno empat-lima jam sehari. Akan sayang sekali kalau dua warga Amerika yang cinta pada negerinya ini tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk melayani Presidennya dan mengabdi tanah airnya.

Seperti yang dikatakan suami saya, dia bekerja untuk Lyndon Baines Johnson selama masa kampanye. Sebagai Presiden Serikat Artis Amerika, dia menyokong hiburan yang bersifat nasional dan juga konvensi di Atlantic City dan pada rapat umum partai buruh untuk Presiden Johnson di Madison Square Garden. Semua anggota keluarga kami ingin menunjukkan kembali pengabdian kami pada Presiden Johnson.

Mr. Valenti yang saya hormati, ini merupakan kesempatan terakhir kami untuk mendapatkan masukan dan pengarahan dari Anda. Kami tahu kami bisa menjadi alat untuk membantu menyembuhkan kembali hubungan kedua negara yang kini sedang terluka.

Ketika Anda menerima surat ini, kami sudah akan berada dirumah kami, di 1050 5th Avenue, New York City. Nomor telepon kami adalah TE-1-8877. Kami menunggu balasan Anda sebelum kami berangkat.

Hormat saya,
Cindy Adams

4. CIA dan “Potret Ganjil” Indonesia

Dalam dokumen tertanggal 4 Februari 1966 berikut ini CIA (Central Intelligence Agency) melaporkan adanya ketegangan yang makin meningkat antara kubu Presiden Sukarno di satu pihak, dengan kubu militer di pihak lain. Akibatnya terdapat dua “pusat kekuasaan”. Yang menjadi pokok persoalan, menurut CIA, adalah sikap yang berbeda antara kedua pihak berkaitan dengan masalah kelompok kiri di Indonesia. Sementara militer ingin supaya PKI beserta seluruh komponen kiri di negeri ini dilarang secara resmi, Bung Karno terkesan enggan untuk melakukan hal tersebut sekaligus menunda-nunda pembicaraan tentangnya.

Berkaitan dengan Peristiwa 1 Oktober, CIA mencatat bahwa di bawah pimpinan Soeharto militer berhasil memadamkan “kelompok kudeta” dalam hitungan jam—suatu hal yang sebenarnya bisa menimbulkan tanda tanya. Pada bagian lain dilaporkan bahwa yang menjadi korban pembantaian massal setelah itu bukan hanya orang-orang yang dituduh Komunis melainkan juga para “pedagang eceran keturunan Cina.”

Akhirnya CIA memandang Indonesia sebagai sebuah “potret yang ganjil”: kubu militer makin besar pengaruh dan kekuasaannya dalam berhadapan dengan Bung Karno, namun anehnya tetap saja enggan menggunakan pengaruh dan kekuasaan itu untuk bergerak lebih jauh melawan Sang Presiden.***

KELUMPUHAN TOTAL INDONESIA⁴

(Central Intelligence Agency, Office of Current Intelligence)

Rangkuman

1. Sejak adanya percobaan kudeta 1 Oktober 1965, Indonesia mengalami kelumpuhan total dalam hal administrasi pemerintahan. Situasi ini muncul akibat adanya dua pusat kekuasaan,

⁴ Central Intelligence Agency, Office of Current Intelligence, “Kelumpuhan Total Indonesia”, Memorandum Intelijen, 4 Februari 1966. Status: Rahasia. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #113.

yakni Presiden Sukarno dan militer. Tidak satupun dari keduanya bisa memaksakan kehendaknya pada yang lain. Berhubung ada kebutuhan mendesak akan adanya pemerintahan pusat di Indonesia yang bisa diterima oleh keduanya, kompromi antara kedua kubu itu tak mungkin dihindari. Kapan dan bagaimana kompromi itu akan terjadi hanya bisa diduga.

2. Isu pokok yang dipermasalahkan di antara keduanya adalah peranan kaum kiri di Indonesia. Sukarno tampaknya percaya bahwa waktu ada di pihaknya. Dengan bergerak sedikit demi sedikit untuk mengembalikan kehidupan politik yang monolitik dengan dirinya sebagai pusat —suatu teknik yang membuat militer kesulitan untuk melawan— dia berharap bahwa nantinya ia akan dapat menempatkan kembali kaum kiri Indonesia pada posisi penting.

Latar Belakang

3. Setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaan pada bulan Desember 1949, Sukarno pada awalnya mentolerir dan kemudian mendorong serta mendukung perkembangan dan pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI). Dengan melalui kombinasi antara kedekatan dengan Sukarno, organisasi yang bagus, serta kerja keras, PKI tumbuh dari partai kecil yang dikecam menjadi organisasi sipil yang paling kuat di Indonesia. Pada pertengahan 1965, Sukarno —yang melalui berbagai cara mendapatkan dorongan dan dukungan dari PKI— tampak akan mempercepat pengambilalihan kekuasaan negara secara bertahap oleh PKI.

4. Sukarno juga mengeksplorasi militer Indonesia yang non-Komunis dengan cara memakai militer bersama PKI untuk membantunya dalam menjalankan suatu rezim otoriter antara tahun 1957 dan 1960. Pada tahun-tahun itu dan selama beberapa tahun setelahnya, dia berhasil mempertahankan kekuasaannya dengan mempermainkan keseimbangan antara militer dan PKI. Akan tetapi dalam dua tahun terakhir ini Sukarno menempatkan

militer di bawah kontrolnya sembari mengurangi peranan politik mereka. Seakan-akan dia itu tidak mau melihat PKI sebagai ancaman bagi kepemimpinannya, dan justru mencurigai para pemimpin militer.

5. Sejak 1948, ketika para pemberontak Komunis mencoba menggulingkan pemerintahan Indonesia yang masih muda, militer memandang PKI sebagai ancaman bagi peran politik mereka, sekaligus sebagai sebuah ideologi yang jahat, yang asing bagi cara hidup orang Indonesia. Selama bertahun-tahun militer secara konsisten mencoba untuk menindas Komunis, namun Presiden selalu menghalangi mereka. Ketika Sukarno secara berangsur-angsur bergerak ke kiri, militer dengan setengah hati mengikutinya. Satu-satunya harapan bagi militer adalah bahwa pada suatu saat PKI akan kembali melakukan suatu tindak kekerasan sehingga militer memiliki alasan untuk melakukan serangan balasan.

6. Percobaan Kudeta pada tanggal 1 Oktober, yang telah menewaskan enam Jenderal tertinggi, memberikan kesempatan itu. PKI jelas terlibat dan mungkin malah merupakan dalang dari peristiwa tersebut. Militer percaya bahwa Sukarno juga terlibat, namun mereka memilih untuk mengabaikan perannya dan mempropagandakan penjelasan bahwa kudeta itu adalah usaha PKI untuk merebut pemerintahan. Atas dasar pemikiran tersebut militer dengan kejamnya telah menumpas anggota PKI dan sekarang ini sedang menghancurkan PKI sebagai organisasi terbuka yang efektif.

Tujuan Militer

7. Kepentingan politis yang paling pokok bagi militer pasca-kudeta itu adalah penghancuran PKI. Militer, di bawah Jenderal Soeharto dan Menteri Pertahanan Jenderal Nasution, tidak punya keinginan untuk mengambil-alih pemerintahan, namun kedua Jenderal tersebut ingin memainkan peran penting dalam politik

serta mengatur kembali arah kebijakan dalam negeri maupun luar negeri Indonesia.

8. Para pemimpin militer juga ingin mempertahankan Sukarno paling tidak sebagai Kepala Negara simbolik. Sementara berharap bahwa dirinya menjadi simpul politik Indonesia serta lambang kemerdekaan nasional, Sukarno masih tetap mempunyai dukungan dan kesetiaan massa yang cukup kuat. Nasution dan Soeharto takut jika mereka berusaha menyingkirkan Sukarno secara terang-terangan, hal itu bisa memecah belah militer Indonesia, membuat bingung rakyat, dan kemungkinan bisa menimbulkan perang saudara. Di mata kedua Jenderal tersebut Sukarno dan kubunya juga bermanfaat sebagai “bumper” melawan ketidakpuasan rakyat atas memburuknya kehidupan ekonomi. Akhir-akhir ini militer telah menjadi tidak populer di mata rakyat, dan oleh karena itu akan senang kalau ada pihak yang bisa dijadikan tempat sembunyi agar tak dituntut bertanggung jawab atas tingginya harga-harga, langkanya barang kebutuhan sehari-hari, serta merosotnya standar hidup masyarakat.

Aktivitas Militer Setelah Kudeta

9. Pada tanggal 1 Oktober, militer —di bawah pimpinan Soeharto— mampu mengerahkan kekuatan hanya dalam beberapa jam saja setelah kelompok kudeta melancarkan operasinya. Secara cepat dan tanpa kompromi militer menggulung upaya kudeta itu, memburu senjata dan pelaku kudeta, mencari siapa yang bertanggung jawab, dan menghancurkan PKI. Pada awalnya militer bertindak sendirian. Dalam perjalanan waktu mereka mendapat persetujuan setengah hati dari Presiden Sukarno untuk mencari dan mengadili para pelaku kudeta, namun pada saat yang sama militer terus bergerak melakukan operasi penumpasan PKI meskipun hal itu bertentangan dengan kehendak Sukarno.

10. Sampai sekitar pertengahan Desember, tekad militer untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang ingin mereka capai telah membuat terjadinya suatu konfrontasi langsung antara militer dan Sukarno. Dalam konfrontasi itu militer berhasil memegang kendali politik, sedang Sukarno menciptakan kesan mengenai dirinya sebagai seorang Presiden yang pantang menyerah —namun ternyata hal itu tak banyak pengaruhnya.

11. Begitu PKI dinyatakan tak berikut lagi, militer lantas mengalihkan perhatiannya ke urusan pemerintahan. Akan tetapi dalam hal ini militer tidak dapat melakukan tindakan langsung seperti ketika memburu PKI. Berhubung sudah bertekad untuk tidak menggulingkan Sukarno, serta mengingat bahwa secara publik dan berulang-ulang telah menyatakan kesetiaan pada Sukarno, militer hanya bisa melakukan manuver dan tekanan-tekanan politik. Penangkapan dan eksekusi di tempat tak lagi dipandang sebagai cara yang efektif untuk menghabisi lawan politik.

12. Militer mengharapkan adanya perubahan besar dalam Kabinet. Akan tetapi satu-satunya keberhasilan yang mereka peroleh dalam hal ini adalah digantinya Panglima Staff Angkatan Udara sekaligus Menteri Perhubungan Udara Omar Dhani yang keterlibatannya dalam Kudeta 1 Oktober sudah umum diketahui. Keberhasilan itupun tidak penuh, mengingat bahwa di mata para pemimpin Angkatan Darat pengganti Omar Dhani sama-sama tidak memuaskannya.

13. Pengorganisasian KOTI (Komando Operasi Tertinggi) pada akhir November sempat memperkuat militer secara politis. Secara khusus, pengangkatan Sultan Yogyakarta sebagai “Wakil Komandan Tertinggi untuk Urusan Ekonomi” tampak menandakan upaya militer untuk melakukan tindakan-tindakan konstruktif guna mengatasi masalah ekonomi yang sudah sedemikian parah.

14. Akan tetapi pada bulan berikutnya, baik Kabinet maupun KOTI sama-sama tertarik untuk bermain-main dengan ekonomi. Upaya mereka bersama hanya menimbulkan kekacauan dan ketidakpuasan. Hal itu masih ditambah dengan masalah kekurangan beras. Sementara itu usaha sebagian pedagang eceran keturunan Cina juga mengalami kemacetan karena banyak dari mereka yang dihabisi bersama dengan orang-orang yang dituduh Komunis. Pada bulan Januari, usaha militer untuk menangani masalah ekonomi hancur total. Jenderal Nasution secara publik mengumumkan bahwa jalan keluar bagi masalah ekonomi tergantung sepenuhnya pada presidium Kabinet.

15. Pada bulan Januari, dengan harapan akan menaikkan reputasi melawan Kabinet, militer mempersilakan kelompok-kelompok mahasiswa untuk melakukan demonstrasi mengecam kenaikan harga dan melawan para anggota Kabinet. Ketika demonstrasi-demonstrasi itu mulai secara terbuka mengecam Sukarno dan menimbulkan kekerasan melawan Istana, militer mulai mengontrol para mahasiswa secara lebih ketat. Demonstrasi di Surabaya yang semula dimaksudkan sebagai kelanjutan dari demonstrasi-demonstrasi yang berlangsung di Jakarta, Bogor dan Bandung, akhirnya dibatalkan.

Hal-hal yang Mau Dicapai Sukarno

16. Dengan dikalahkan dan dicerai-beraikannya PKI sebagai pendukungnya, Sukarno berjuang mati-matian untuk mendapatkan kembali peran sentralnya di Indonesia. Pada saat yang sama ia mencoba mempertahankan sebisa mungkin kelompok kiri —entah itu PKI maupun non-PKI. Modal terbesarnya adalah: kemampuannya untuk melakukan manuver politik, penolakan militer untuk melawan dia, pernyataan publik pihak militer untuk tetap setia padanya, serta kesadaran dalam tubuh militer akan meningkatnya kebutuhan untuk membangun kembali sebuah pemerintahan yang mempersatukan.

17. Dalam upaya untuk mengorganisir kembali dan memperkuat kelompok-kelompok kiri serta memanfaatkan persaingan yang terjadi antara militer dan front non-Komunis dari kalangan sipil, Sukarno terutama dibantu oleh Soebandrio yang adalah Wakil Perdana Menteri I dan Menteri Luar Negeri. Sebenarnya dalam hal bakat politik Soebandrio itu bukan apa-apa dibanding dengan Sukarno, tetapi Soebandrio itu cerdik dan cekatan. Sekaligus ia juga merupakan pelaksana yang handal bagi gagasan-gagasan Sang Presiden.

Kegiatan Sukarno Sejak Kudeta

18. Sukarno telah secara konsisten bertindak dengan semboyan “dia yang bisa memperoleh kekuasaan harus menggunakanannya.” Meskipun kekuasaannya kini telah banyak berkurang, ia tetap berusaha menggunakan dan memperluas apa yang masih ia miliki. Banyak inisiatif-inisiatifnya tidak mendapat sambutan, namun hal ini tidak membuatnya jera. Ia terus saja melakukan plot-plot baru atau mengulangi plot-plot lama.

19. Selama empat bulan terakhir ini Sukarno telah mengubah taktik, dari posisi mundur dan menunggu ke posisi ofensif politik secara terbatas. Semula jawaban dia atas tekanan dari militer cenderung negatif, dengan penyesuaian setengah hati terhadap struktur kekuasaan yang baru. Meskipun berkali-kali ia menjanjikan “solusi politik” ia tetap bersikeras untuk tidak membubarkan PKI dan menolak mengganti anggota Kabinet yang berhaluan kiri dan yang mendukung kudeta kecuali Marsekal Dhani. (Bahkan Dani, meskipun dipecat sebagai Menteri Perhubungan Udara dan Kepala Staf Angkatan Udara, tetap saja menduduki posisi di Kabinet, sebuah posisi yang dibuat khusus untuk dia sejak terjadinya Kudeta. Ia menjabat sebagai Menteri Industri Pesawat Terbang dan kabarnya sedang hidup tenang di luar negeri). Berulang-ulang Sukarno menyatakan bahwa Soebandrio, yang merupakan sasaran utama militer dan

kelompok-kelompok sipil non-Komunis yang mendukung militer, akan tetap dipertahankan sebagai pembantu utamanya.

20. Serangan politik Sukarno sejauh ini terdiri dari dua tindakan yang berbeda. Yang *pertama* adalah tindakan yang ia ambil pada akhir November lalu dalam rangka menghalangi upaya KOTI untuk menguasai Kabinet yang ada. Ia menyendirikan sejumlah menteri di sebuah vila dekat Bogor dan menuntut mereka untuk secepatnya menyusun langkah-langkah guna mengatasi masalah ekonomi Indonesia. Semula langkah-langkah itu berupa kekuasaan resmi untuk menaikkan harga-harga setinggi mungkin dan kemudian devaluasi drastis atas mata uang [Rupiah] dan suatu upaya untuk mengontrol harga-harga dan distribusi barang-barang kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi penolakan rakyat terhadap kenaikan harga begitu kuat, sehingga pada bulan Januari Kabinet menurunkan sejumlah harga dan melepaskan kontrol atas harga-harga maupun distribusi barang.

21. Meskipun nilai ekonominya dipertanyakan, keterlibatan Sukarno dalam bidang ekonomi membawa akibat timbulnya keinginan untuk menghentikan inisiatif-inisiatif politik KOTI. KOTI tampaknya menjadi sadar bahwa campur tangan dalam bidang ekonomi itu secara politis berbahaya. Dengan cepat-cepat KOTI mengembalikan segala tanggung jawab di bidang ekonomi kepada Kabinet. Dalam bidang-bidang non-ekonomipun tampaknya KOTI juga telah gagal dalam usaha untuk menandingi Kabinet.

22. Tindakan *kedua* yang diambil Sukarno sebagai bagian dari serangan politiknya dilancarkan pada pertengahan Januari lalu ketika Soebandrio, rupanya atas perintah boss-nya, mendesak dibentuknya Front Sukarno. Sejauh ini respon masyarakat terhadap front tersebut sangat kecil dibanding dengan besarnya kekuatan massa yang berhasil digalang oleh militer sejak 1 Oktober atau massa yang biasanya mendukung Sukarno selama sebelum terjadi kudeta. Akan tetapi tidak ada indikasi bahwa

Sukarno akan membubarkan front itu. Selanjutnya front tersebut mau dijadikan kendaraan bagi pengembangan politik kiri yang baru.

Kesimpulan dan Antisipasi

23. Situasi Indonesia selama empat bulan setelah percobaan kudeta adalah sebuah potret yang ganjil. Militer jelas-jelas mendapatkan kekuasaan politik yang lebih besar, dan —berkat kekuasaan itu— sekarang ini dalam arti tertentu secara politis sedang naik daun. Sementara itu dukungan kaum kiri terhadap Sukarno makin kecil dan tak terorganisir. Anehnya, militer tetap saja enggan untuk bergerak lebih jauh melawan Presiden.

24. Militer, setelah berhasil menghancurkan PKI dan memaksa para pengikutnya yang masih hidup untuk bergerak di bawah tanah, sedang menunggu-nunggu Sukarno untuk merajut kembali kehidupan politik Indonesia dan menawarkan “solusi politik” [yang sudah sering ia janjikan]. Akan tetapi Sukarno tak kunjung menyodorkan solusi yang diharapkan oleh militer, yakni pembubaran PKI. Dalam keadaan tarik-ulur begini Sukarno menunda-nunda solusi yang mau ia tawarkan.

25. Meskipun demikian operasi anti-Komunis yang dilakukan oleh militer telah memaksa Sukarno untuk menyesuaikan posisi politisnya. Secara publik ia telah mengakui keterlibatan unsur-unsur PKI dalam kudeta itu dan telah setuju untuk diadakannya pengadilan bagi orang-orang yang mendorong terjadinya peristiwa 1 Oktober. Di luar konsesi-konsesi itu tampaknya ia tak berubah pikiran. Selanjutnya kecil kemungkinan akan adanya perubahan dalam hal pendirian politiknya.

26. Tampaknya Sukarno bertindak dengan keyakinan bahwa sang waktu sedang berpihak padanya. Dia sadar bahwa militer tidak akan menumbangkannya dan bahwa secara umum rakyat Indonesia tidak bisa menemukan orang lain selain Sukarno

sebagai simbol nasional. Strategi dia yang paling baru adalah mengabaikan masalah kelompok politik kiri, sementara menekankan perlunya kesatuan nasional dan kebutuhan rakyat Indonesia untuk mempertahankan dirinya sebagai pemimpin tertinggi. Sepanjang bulan Januari strategi ini memang telah berhasil membantu memperbaiki posisi politisnya.

27. Sekarang ini Sukarno masih tetap menolak diskusi terbuka mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan kaum kiri, serta terus mencoba untuk menjadikan dirinya sendiri kembali menjadi pusat dari kehidupan politik Indonesia yang monolit.

28. Berhadapan dengan langkah Sukarno di atas militer hanya bisa melancarkan perlawanan minimal. Dalam suasana seperti sekarang ini tampaknya Sukarno akan semakin baik posisinya, meskipun untuk sementara waktu kelompok kiri akan tetap lemah secara politis. Akan tetapi jika Sukarno tetap hidup, kaum kiri akan mampu untuk secara bertahap memasuki wilayah politik yang lebih luas, dan tampaknya militer akan menyesuaikan diri terhadap perkembangan seperti itu.

5. Bantuan Militer Rahasia untuk Indonesia?

*Dokumen berikut ditulis oleh anggota National Security Council Robert W. Komer tanggal 12 Februari 1966 sebagai bahan briefing untuk Presiden Lyndon B. Johnson yang akan bertemu dengan Dubes AS untuk Indonesia Marshall Green hari Selasa, 15 Februari 1966. Dalam briefing itu antara lain disebutkan adanya ketegangan antara Jakarta dengan perusahaan-perusahaan minyak milik Amerika di Indonesia. Presiden diminta bertanya kepada Green apakah kemungkinan Sukarno untuk kembali berkuasa seperti dulu masih kuat. Sekaligus diusulkan untuk bertanya, bagaimana kalau Amerika membantu militer Indonesia secara rahasia guna memperbaiki posisi militer dalam berhadapan dengan Bung Karno.****

PERTEMUAN DENGAN DUTA BESAR MARSHALL GREEN⁵

Marshall Green berkunjung ke Washington untuk berkonsultasi pada saat di mana kelihian politik Sukarno kini menggantikan sebagian besar dari kekuasaannya yang telah diambil-alih oleh militer setelah kudeta PKI yang gagal akhir tahun lalu.

Setelah menerapkan taktik “salami” yang brilian dalam menumpas PKI sebagai sebuah kekuatan politik yang efektif, Jenderal Nasution dan Soeharto saat ini menggunakan kesempatan untuk memanfaatkan pengaruh yang telah mereka galang selama ini

⁵ R.W. Komer, bahan briefing untuk Presiden Johnson, Washington, 12 Februari 1966. Status: Rahasia. *Foreign Relations of the United States, 1964-1968*, Vol XXVI. Indonesia; Malaysia-Singapore; Philipines (Washington: United States Government Printing Office, 2001), hlm. 402-404. Sumber: Johnson Library, National Security File, Data-data Robert W. Komer, Indonesia, Nov 63 hingga Mar 66, (1 sampai 3). Rahasia. Catatan ini sebenarnya dipersiapkan sebagai draft memorandum kepada Presiden, tetapi Komer merubahnya menjadi Catatan Briefing untuk pertemuan Presiden dengan Marshall Green pada tanggal 15 Februari; Lih. Document 194 [FRUS]. Tersisip tetapi tidak tercetak, sebuah sketsa biografi singkat mengenai Green. Departemen Luar Negeri juga telah menyiapkan sebuah makalah singkat 12 Februari untuk Presiden (National Archives and Records Administration, RG 59, EA/Indonesia Files: Lot 70 D 3, PER 9-3 Consultation).

untuk melawan Sukarno. *Militer* takut bahwa kesatuan mereka akan pecah kalau mereka menyerang Sukarno secara langsung. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk kembali kepada kebijakan *pencapaian target-target politik terbatas*. Sementara itu Sukarno memanfaatkan keraguan militer untuk *memperjuangkan kembali* kekuasaan penuhnya dan *meneruskan* politik dalam negeri dan luar negeri yang bercorak *radikal kiri*.

Sebagai akibatnya, sekarang ini di Indonesia ada semacam “*dua pemerintahan*” yang *saling bersaing untuk mendapatkan kekuasaan* dan berusaha memerintah negara tersebut. Persaingan tersebut tampaknya akan berlangsung selama beberapa bulan mendatang tanpa penyelesaian yang jelas, namun tampak pula Sukarno telah berhasil melakukan *manuver-manuver tertentu sehingga memiliki posisi yang agak lebih baik*.

Tanpa pemerintahan yang efektif, *inflasi yang sudah parah* sekarang ini akan menjadi semakin parah dan ekonomi Indonesia akan terus memburuk dan menyebabkan kekacauan. Kalangan militer berusaha melemparkan tanggung jawab atas buruknya pemerintahan nasional pada Sukarno, namun pada saat yang sama mereka berusaha mencari bantuan beras yang kini sangat dibutuhkan oleh rakyat melalui kontak-kontak pribadi mereka di luar negeri.

Kebijakan kita selama ini adalah *menjaga hubungan baik* dengan pemerintah Indonesia, namun sengaja tidak berusaha menawarkan paket bantuan baru atau program-program bantuan lain. Kita *tidak mau membantu* Sukarno dengan program stabilisasi moneter atau menawarkan bantuan-bantuan lain. Kita masih menunggu bagaimana krisis politik yang ada sekarang ini akan diselesaikan. Kita juga ingin mengaitkan bantuan yang kita berikan dengan *kebutuhan meningkatkan hubungan diplomatik serta mengaitkannya dengan perubahan dalam kebijakan-kebijakan* Indonesia. Pihak Militer Indonesia telah menyatakan menolak bantuan ekonomi luar negeri yang sifatnya publik hingga tercapainya suatu

perubahan politik tertentu—apa perubahan yang dimaksud, tidak jelas.

Kehendak kita untuk memenuhi permintaan bantuan oleh Indonesia mungkin akan terhalang oleh ketegangan antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan-perusahaan minyak A.S. di Indonesia. Tekanan terhadap perusahaan-perusahaan minyak itu terus berlanjut sejak Kudeta 1 Oktober.

Menurut Green enam bulan kedepan adalah bulan-bulan yang amat menentukan. Tn. Presiden mungkin bisa menanyakan beberapa hal ini padanya:

1. *Apakah kebijakan kita saat ini masih bisa diteruskan mengingat masih kuatnya keinginan Sukarno untuk merebut kembali kekuasaannya.*
2. *Sebuah pertanyaan yang lebih konkret dapat diajukan padanya, yakni apakah bantuan rahasia untuk militer akan bisa membantu menempatkan mereka pada posisi yang lebih baik dalam rangka menghentikan upaya Sukarno untuk kembali pada kebijakan-kebijakan radikal kirinya.⁶*

Kita memiliki *channel* dengan kelompok militer yang dapat kita mintai tolong jika bantuan rahasia yang lebih besar dirasa perlu untuk diberikan. Sejauh ini kita telah membatasi diri pada penyediaan alat-alas medis dan perlengkapan komunikasi.

R.W. Komer

⁶ Tanggal 10 Februari Komer mengirim sebuah memorandum kepada Presiden guna mendapatkan persetujuan mengenai pertemuan dengan Green. Di dalam memorandum tersebut, dia menuliskan bahwa “Perjuangan kekuasaan antara Sukarno dan Angkatan Darat merupakan cerita terbesar kedua di Asia Tenggara” dan hasilnya masih belum pasti. Komer mengusulkan untuk memberi “sedikit lagi bantuan tersembunyi kepada Angkatan Darat; atau paling tidak memberitahu mereka bahwa kita akan melakukannya jika dan ketika mereka sungguh-sungguh dapat menempuh langkah-langkah yang tepat. Sepatah kata dari Tn. Presiden kepada Green akan mendorongnya untuk memikirkan kemungkinan pengiriman bantuan sementara.” (Johnson Library, National Security File, Memos to the President, McGeorge Bundy, Vol. 20, Feb. 5-28, 1966). # 111 dan 111a.



Duta Besar Amerika Marshall Green berbincang-bincang dengan Presiden Soeharto di kediamannya. (Dok: ANRI)

TENTANG DUTA BESAR MARSHALL GREEN

Dubes Green pernah menjabat sebagai Deputi Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Jauh. Dia asli Massachusetts, lulusan Sekolah Groton dan Universitas Yale. Ia telah bertugas sebagai Dubes untuk Indonesia sejak bulan Juni 1965.

Dubes Green memulai karirnya di luar negeri sebagai sekretaris pribadi Dubes Joseph Grew di Tokyo persis sebelum mulainya Perang Dunia II. Selama perang ia bekerja sebagai petugas bahasa untuk Angkatan Laut.

Sebagai Pejabat Urusan Luar Negeri ia telah ditugaskan di Auckland, Stockholm, the National War College, Seoul dan Hong Kong, serta Biro Urusan Timur Jauh. Pangkatnya adalah Career Minister dan, pada tahun 1959, oleh Departemen Luar Negeri ia mendapat medali Meritorious Service Award.

Ia menikah dengan Lispenard Seabury Crocker dari New York dan dikaruniai tiga orang anak laki-laki.

6. Indonesia Belum Butuh Bantuan

Dokumen berikut berisi catatan dari percakapan antara Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Dean Rusk, Dubes Marshall Green dan H. Kent Goodspeak, seorang Staff Menlu untuk Urusan Indonesia. Dalam percakapan yang diadakan di Washington tanggal 14 Februari 1966 itu dibahas situasi terakhir di Indonesia. Green melaporkan adanya banyak perkembangan di Indonesia sejak 1 Oktober 1965, namun gerakan ke arah perubahan masih pelan. Kharisma Bung Karno masih kuat, sementara itu tentara masih ragu-ragu untuk menyingkirkan Sang Presiden. Satu-satunya harapan, menurut Green, datang dari kelompok-kelompok mahasiswa.

Sementara itu ekonomi Indonesia rusak berat. Sampai saat itu hutang Indonesia mencapai US\$2,5 miliar. Dalam situasi demikian sejumlah utusan militer Indonesia mendekati Amerika secara diam-diam untuk menyatakan bahwa mereka tidak membutuhkan bantuan asing.

Satu hal yang juga menarik untuk disimak adalah posisi Uni Soviet berkaitan dengan Tragedi 1965. Oleh dokumen ini dikatakan bahwa Soviet berada dalam situasi yang “memalukan”. Militer Indonesia (khususnya Angkatan Darat) yang selama ini mereka bantu justru dengan antusias menghancurkan Partai Komunis Indonesia. Pada saat yang sama Soviet juga tidak terlalu kecewa mengingat bahwa partai Komunis yang ditindas itu adalah partai Komunis yang tidak lagi berorientasi ke Uni Soviet, melainkan ke Cina.

*Atas itu semua Menlu Rusk menanggapi dengan mengatakan bahwa bantuan kepada Indonesia hanya diberikan dengan syarat-syarat tertentu. ****

INDONESIA-KONSULTASI⁷

1. Duta Besar Green menjelaskan situasi terkini Indonesia, empat setengah bulan setelah kegagalan kudeta yang didalangi Komunis

⁷ Memorandum Percakapan, “Indonesia-Konsultasi”, Washington, 14 Februari 1966. *Foreign Relations of the United States, 1964-1968, Vol XXVI. Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines* (Washington: United States Government Printing Office, 2001), hlm. 399-401.

pada 1 Oktober. Dia menyampaikan adanya beberapa hasil yang menggembirakan, meskipun kebanyakan bersifat negatif: PKI telah dihancurkan sebagai sebuah kekuatan politik yang efektif masa depan; poros Jakarta-Peking berantakan; solidaritas Afrika-Asia tidak jelas; citra pribadi Sukarno kini sedang dipertanyakan. Pada saat yang sama ideologi Sukarno masih tetap menjawab rakyat Indonesia, Soebandrio dan sejumlah menteri lain masih mampu mempertahankan kekuasaan mereka, dan momentum yang ada pada bulan November dan Desember berkaitan dengan kemungkinan untuk memperbaiki struktur pemerintahan secara drastis telah hilang, antara lain karena militer takut akan terjadinya kerusuhan sosial. Dalam arti tertentu militer lebih mementingkan persatuan di atas segalanya, sehingga enggan bertindak. AD serta kelompok-kelompok politik Muslim yang sama-sama berkepentingan untuk mencegah bangkitnya kembali kelompok Komunis yang telah dihancurkan melalui pembunuhan besar-besaran, akan tetap mencegah bangkitnya kembali PKI. Militer juga akan mencegah dibukanya kembali hubungan dengan Cina Komunis. Lebih dari itu, tampaknya militer enggan untuk secara terang-terangan melawan Sukarno. Sementara itu ternyata Sukarno tetap mampu mempertahankan kharismanya di mata rakyat Indonesia dan tetap dihormati oleh generasi tua di lingkungan politik maupun militer.

2. Sejauh ini dorongan untuk perubahan datang dari kalangan generasi muda, khususnya dari kelompok-kelompok mahasiswa. Hal itu muncul akibat adanya ketidakpuasan atas pemerintahan yang kacau dan kondisi ekonomi yang semakin runyam. Inflasi dan peningkatan dalam peredaran uang terus berlangsung, dan daerah-daerah tertentu kekurangan bahan pangan. Lebih lanjut, kehidupan ekonomi yang selama bertahun-tahun bertumpu pada pinjaman asing telah menimbulkan krisis mata uang asing yang berat yang kemungkinan akan mendorong perubahan politik. Utang luar negeri Indonesia sekarang ini kira-kira US\$2,5 miliar,

dan yang harus dibayar pada tahun 1966 ini kira-kira US\$470 juta. Mengingat bahwa pendapatan dalam bentuk mata uang asing akan berkisar antara US\$450 juta, pembayaran hutang luar negeri harus dijadwal ulang. Meskipun begitu, sampai sejauh ini Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda ingin bicara dengan kelompok negara-negara penghutang atau menunjukkan diri siap memecahkan masalah-masalah yang ada secara rasional guna menarik negara-negara lain untuk memberi bantuan lebih lanjut. Militer mengambil posisi jaga jarak terhadap masalah-masalah ekonomi yang melanda Indonesia. Dan meskipun pihak militer telah mengirim orang-orang untuk bicara mengenai situasi yang ada sekarang, secara diam-diam mereka menyatakan bahwa untuk sementara ini tidak butuh bantuan asing.

3. Ketika memberi penjelasan mengenai hubungan Indonesia dengan negara-negara lain, Dubes Green mengatakan bahwa posisi AS sekarang ini sedikit lebih baik daripada sebelum 1 Oktober. Sementara itu hubungan Indonesia dengan Komunis Cina semakin memburuk, dan hubungan Indonesia-Uni Soviet sedang sulit. Pihak Rusia sedang berada dalam situasi yang memalukan: militer Indonesia yang selama ini mereka bantu justru sedang menghancurkan sebuah partai Komunis, yakni PKI. Namun pada saat yang sama mereka senang juga, karena yang dihancurkan itu adalah sebuah partai Komunis yang berorientasi ke Cina. Uni Soviet mungkin tidak keberatan kalau perkembangan di Indonesia nantinya menyerupai India, di mana Uni Soviet dan Amerika Serikat sama-sama memberi bantuan, sedang Cina ngacir keluar.

4. Menlu Rusk mengatakan bahwa jika AS mampu memainkan peran di Indonesia lagi, terutama berkaitan dengan pemberian bantuan ekonomi, ada dua persyaratan yang harus dipenuhi. Satu, harus ada pemecahan yang memuaskan atas masalah Konfrontasi Malaysia. Dua, harus ada kebijakan yang sifatnya rasional terhadap perusahaan-perusahaan minyak AS

yang ada di Indonesia. Pengambil-alihan perusahaan-perusahaan itu oleh Indonesia akan membuat diberlakukannya Amandemen Hickenlooper.⁸ Dubes Green mengatakan bahwa militer Indonesia menganggap Konfrontasi sebagai penghambur-hamburan sumberdaya Indonesia yang justru mengurangi kemampuan militer untuk mengatasi masalah-masalah dalam negeri. Menurutnya masalah Konfrontasi ini tidak akan diselesaikan melalui perundingan resmi, melainkan dengan cara mengurangi kekuatan militer di Malaysia sedikit demi sedikit sampai nanti berhenti sendiri. Perusahaan-perusahaan minyak AS kini sedang mengalami problem serius, namun Dubes Green berharap bahwa melalui pendekatan yang berwawasan luas dan tenang dalam melakukan negosiasi, perusahaan-perusahaan itu akan tetap bisa beroperasi di Indonesia. Namun jika perusahaan-perusahaan itu dipaksa untuk keluar, semoga saja mereka keluar sedemikian rupa sehingga tidak akan menimbulkan reaksi anti-Amerika yang justru akan sangat merugikan.

⁸ Amandemen Hickenlooper adalah amandemen terhadap Undang-undang Bantuan Asing tahun 1961 yang kemudian direvisi tahun 1963. Amandemen itu melarang pemerintah Amerika memberikan bantuan kepada negara asing yang mengambilalih perusahaan dan asset milik Amerika tanpa kompensasi.

7. Amerika dan Transisi yang Berkepanjangan

Pada hari Selasa, 15 Februari 1966 jadi diadakan pertemuan antara Presiden Lyndon B. Johnson dengan Dubes Marshall Green di Gedung Putih, Washington. Selain Presiden dan Dubes, hadir pula dalam pertemuan itu Asisten Sekretaris William P. Bundy dan anggota National Security Council Robert W. Komer. Pertemuan berlangsung antara jam 11:15 hingga 12:20 waktu setempat.

Dalam pertemuan itu Green antara lain melaporkan bahwa Indonesia sedang berada dalam “fase transisi berkepanjangan dari Sukarno ke seorang pengganti yang sampai sekarang masih belum jelas.” Dalam situasi demikian ia menganjurkan agar Amerika mengambil sikap *low profile* dan tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan publik yang akan dapat menimbulkan salah tafsir. Berkaitan dengan soal keinginan Amerika untuk memberikan bantuan, Green menganjurkan untuk menahan diri dulu mengingat bahwa para pejabat tinggi militer di Indonesia telah secara sembunyi-sembunyi menyatakan “menolak bantuan apapun dari luar.” Militer takut bahwa bantuan dari luar akan menguntungkan kubu Sukarno-Soebandrio.

Berikut ini adalah bagian dari laporan resmi atas pertemuan tersebut.***

INDONESIA⁹

Sesuai permintaan Presiden, Dubes Green membicarakan perkembangan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini serta prospeknya ke masa depan. Ia kemudian menutup pembicarannya dengan memberikan sejumlah rekomendasi umum mengenai kebijakan Amerika Serikat terhadap Indonesia. Dubes Green

⁹ “Memorandum Pertemuan”. *Perihal: Indonesia*. Washington, 15 Februari, 1966 (11.55 a.m.–12.20 p.m.). *Foreign Relations of the United States, 1964-1968, Vol XXVI. Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines* (Washington: United States Government Printing Office, 2001), hlm. 404-406. Sumber: National Archives and Records Administration, RG 59, Central Files 1964-66, POL INDON-US. Rahasia. Draft disusun oleh Green dan disetujui di Gedung Putih tanggal 23 Februari. Pertemuan ini bersifat *off the record*. Catatan mengenai waktu pertemuan diambil dari buku harian Presiden. (Johnson Library).

mengemukakan bahwa, meskipun hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat masih jauh dari memuaskan, kudeta yang gagal pada tanggal 1 Oktober lalu telah mengakibatkan [a] hancurnya Partai Komunis; [b] hilangnya prestise internasional Peking, yang diduga terlibat di dalamnya; [c] semakin memburuknya hubungan antara Indonesia dan Cina Komunis; [d] hancurnya mimpi Sukarno sebagai pemimpin “kekuatan baru yang bangkit” (*the new emerging forces*) melawan dunia Barat; serta [e] hilangnya kehormatan dan harga diri Sukarno di mata rakyatnya sendiri. Meskipun demikian, Sukarno masih tetap berdiri sebagai Presiden dan Pemimpin Revolusi. Dalam arti tertentu dia berhasil mempermainkan perpecahan dan ketakutan yang ada pada pihak lawan-lawannya dalam rangka merebut kembali kekuasaan. Dia tampaknya tetap bersikukuh untuk kembali mengarahkan revolusi ke kiri. Dia itu cerdik dan sangat persuasif, dan kelihatannya masih menyimpan kekuatan fisik yang luar biasa.

Menurut Dubes Green, kelompok perlawanan terhadap Sukarno yang dipimpin oleh militer, meskipun tidak ingin secara langsung atau frontal menghadang Sukarno, sangat menentang kebangkitan kembali Partai Komunis dalam bentuk apapun dan sangat ingin memutus hubungan diplomatik dengan Cina. Kelompok oposisi juga ingin supaya bisa mengorganisir diri dengan lebih baik dan langkah-langkah yang lebih pragmatis di dalam pemerintahan. Akan tetapi, karena takut akan adanya kemungkinan terjadinya kerusuhan sosial, karena khawatir akan terbaginya loyalitas para personil militernya, dan mengingat bahwa banyak dari mereka telah terjangkit Sukarnoisme, militer enggan untuk secara langsung melawan Sukarno. Militer juga enggan memikul terlalu banyak tanggung jawab terhadap berbagai peristiwa yang terjadi selama ini di Indonesia, kalau yang terjadi terus-menerus di Indonesia adalah kemerosotan ekonomi dan politik.

Dubes Green merasa bahwa kekacauan ekonomi yang semakin parah, terutama krisis pertukaran mata uang asing dan

kecenderungan berbagai kementerian untuk menghindari Bank Pusat, tampaknya akan membuat suasana makin tegang selama kira-kira enam bulan mendatang. Selama beberapa waktu mendatang situasi di Indonesia akan menjadi sangat kacau, katanya, dan tidaklah mudah untuk melakukan prediksi secara akurat mengenai bagaimana nanti akhir dari semuanya ini. Apa yang tampaknya relatif jelas adalah bahwa saat ini kita sedang berada di dalam sebuah fase transisi berkepanjangan dari Sukarno ke seorang pengganti yang sampai sekarang masih belum jelas.

Dalam situasi seperti ini, menurut Dubes Green, Amerika Serikat harus terus tetap bersikap *low profile* dan menahan diri. Dubes mengatakan, dia sangat menghargai sekaligus menganjurkan bahwa pemerintah Amerika mulai dari Presiden sampai para bawahannya telah menahan diri untuk tidak memberikan pernyataan-pernyataan publik mengenai Indonesia. Terus mempertahankan sikap *low profile* ini penting, mengingat bahwa apapun yang dikatakan atau dilakukan oleh Amerika Serikat mengenai Indonesia sangat rentan terhadap distorsi dan misinterpretasi. Kita terus saja dicurigai mau turut campur dalam urusan mereka. Pahadal hal itu tidak kita lakukan dan memang jangan sampai kita lakukan.

Presiden Johnson menanyakan apakah seluruh bantuan Amerika Serikat kepada Indonesia, termasuk bantuan kepada militer Indonesia, telah dihentikan. Dubes Green mengatakan bantuan ke Indonesia memang telah dihentikan, dan dia merekomendasikan agar Amerika Serikat tidak memperluas bantuan lain kepada Indonesia sampai Indonesia bisa menata diri kembali. Dia mengatakan bahwa Sukarno terang-terangan menolak bantuan apapun dari Amerika Serikat kepada Indonesia, sementara para petinggi militer Indonesia telah secara sembunyi-sembunyi menyampaikan kepada kita dan kepada Jepang bahwa untuk saat ini mereka menolak bantuan apapun

dari luar, karena bantuan dari luar akan menguntungkan Sukarno dan Soebandrio.

Namun demikian, Dubes merasa bahwa berkaitan dengan soal bantuan, kita harus tetap bersikap terbuka terhadap berbagai kemungkinan. Siapa tahu, suatu keadaan tertentu tiba-tiba muncul, dan membantu Indonesia dengan beras dalam jumlah terbatas ternyata penting. Bisa jadi bantuan macam itu penting berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, atau untuk mencegah kerusuhan dan kekacauan yang bisa timbul karena kurangnya pangan, sehingga bisa membahayakan orang-orang asing yang ada di Indonesia.

Jika Indonesia sungguh-sungguh mengambil langkah serius untuk menata diri kembali, maka menurut Dubes Green kita harus siap untuk mengulurkan tangan, terutama melalui usaha-usaha bersama secara internasional, atau melalui badan-badan internasional seperti ADB (Asian Development Bank).

Rekomendasi

Presiden mengatakan bahwa dia sangat menghargai hasil-hasil pengamatan yang telah disampaikan tadi, dan bahwa dia akan menyerahkan kepada Dubes Green soal apa dan bagaimana langkah-langkah praktis yang perlu diambil berkaitan dengan waktu dan pertimbangan-pertimbangan yang tepat bagi Amerika Serikat untuk memberikan bantuan kepada Indonesia.

8. AS Menolak Membantu Indonesia

Di tengah keinginan Washington untuk bersikap hati-hati dalam hal memberi bantuan kepada Indonesia, muncul seorang spekulan bernama Achmad yang mengaku mewakili pemerintah Jakarta. Achmad ingin mendesak pemerintah Amerika untuk membantu Indonesia. Caranya Amerika membeli beras dari Thailand, lalu Thailand mengirimkan beras itu ke Indonesia. Achmad bermaksud "mewakili" pihak Indonesia sebagai penerima beras itu. Sebagaimana tampak dalam telegram 15 Februari dari Menlu AS Rusk kepada Dubes AS di Bangkok dan Jakarta ini, Amerika menolak permintaan tersebut. Alasannya, Soeharto dan Nasution masih belum mau menerima bantuan asing.

*Belakangan diketahui bahwa Achmad adalah seorang pialang yang klaim-klaimnya tidak benar****

BANTUAN BERAS UNTUK INDONESIA¹⁰

1. Meskipun kita bersimpati kepada masalah-masalahnya militer Indonesia, kita tidak bisa memenuhi permintaan Achmad. Keputusan ini telah disetujui oleh Dubes Green, dengan berdasar pada pertimbangan-pertimbangan berikut:
 - A. Sementara kita tidak punya alasan untuk mempertanyakan otoritas yang dimiliki oleh Achmad untuk membeli beras dari Thailand, dia belum mendapat kuasa untuk meminta Amerika terlibat dalam hal ini. Lebih dari itu kita tidak punya bukti yang menunjukkan bahwa Nasution dan Soeharto telah berubah pendapat soal belum dibutuhkannya bantuan luar negeri.
 - B. Tidak ada perubahan situasi politik internal di Jakarta yang mendorong kita untuk mengubah kebijakan kita

¹⁰ Telegram dari Menlu Dean Rusk untuk Bangkok dan Jakarta, 15 Februari 1966. Status: Rahasia/Distribusi Terbatas. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #110d.

terhadap Indonesia. Sehubungan dengan hal ini perlu diingat bahwa Sukarno telah memberikan pernyataan publik yang mendukung PKI dalam pidato di depan massa pada tanggal 13 Februari, menyerang kebijakan Amerika, dan mengulangi slogan-slogan lama.

- C. Ada indikasi bahwa militer memiliki akses langsung kepada pendapatan luar negeri Indonesia yang akan dapat mereka alokasikan untuk membeli beras jika situasi menjadi genting.
 - D. (Untuk diketahui, pemerintah Indonesia praktis sudah memenuhi pembayaran sebesar US\$ 18 juta untuk membayar dua buah pesawat DC-8 yang akan dikirim dalam beberapa bulan mendatang. Selain itu pemerintah Indonesia juga telah memerintahkan pengeluaran sebesar US\$ 11 juta untuk proyek CONEFO.)
2. Saya mengusulkan supaya Anda menghubungi Achmad, [*beberapa kata dirahasiakan*] memberi jawaban dengan pokok-pokok sebagai berikut:
- A. Kita bersympati terhadap permasalahan Indonesia;
 - B. Setelah mempertimbangkannya secara masak-masak kita melihat tidak mungkin merahasiakan permoncongannya;
 - C. Bantuan terbuka dari pemerintah Amerika tidak dimungkinkan karena penolakan resmi pemerintah Indonesia terhadap bantuan AS;
 - D. Pada satu sisi kami ingin membantu, tapi pada sisi lain situasi belum mengijinkan.

Rusk

9. Soeharto Mengancam Amerika Serikat?

Dokumen berikut ini sangat menarik. Tampaknya Jenderal Ali Murtopo pernah memberi kesan kepada Soeharto bahwa Amerika akan mau membantu Indonesia dengan mengirim 200 ribu ton beras, jika Soeharto mau menyelesaikan masalah Malaysia dengan damai. Ternyata hal itu tidak benar, karena Amerika memang belum berencana untuk membantu Indonesia. Atas keengganannya AS mengirim beras ke Indonesia Soeharto “marah dan kecewa”. Iapun mengancam akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika. Bahkan sempat dikatakan mengenai adanya kaset di tangan Soeharto dan Ali Murtopo yang dapat membuktikan bahwa Amerika telah turut mendanai demonstrasi-demonstrasi mahasiswa. Amerika menolak tuduhan itu.

*Aslinya dokumen ini adalah telegram rahasia dari Departmen Luar Negeri AS di Washington untuk Kedubes AS di Jakarta, tanggal 17 Februari 1966. ****

BANTUAN UNTUK INDONESIA DAN MASALAH KONFRONTASI¹¹

1. Daan Mogot —ditemani oleh Jan Walandouw dan pengacara dari Washington Max Kampelman (yang memiliki rekanan bisnis Amerika di Indonesia)— menemui Berger dan menceritakan hal berikut ini:
2. Sebagai kelanjutan atas pertemuannya dengan Berger tanggal 14 Januari, ia kembali ke New York dan bertemu dengan Kepala Intelijennya Jenderal Soeharto, yakni Kolonel Ali Murtopo. Di sana Murtopo bertemu secara pribadi dengan [beberapa kata dirahasiakan]. Melalui sebuah pembicaraan yang panjang lebar dengan Murtopo, [wakil pihak Amerika] membahas soal kemungkinan pembelian

¹¹ Telegram Dari Departemen Luar Negeri (Washington) ke Kedubes Amerika (Jakarta), 17 Februari 1966. Status: Rahasia. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #82.

200.000 ton beras melalui pihak ketiga [*beberapa kata dirahasiakan*] dan memberi kesan bahwa Amerika akan menyediakan beras itu jika Jenderal Soeharto dapat menyelesaikan masalah Malaysia melalui “penyelesaian diplomatik”.

3. Murtopo kemudian kembali ke Jakarta dan melaporkan hasil pembicaraan [*satu kata dirahasiakan*] Soeharto kemudian mengadakan pertemuan dengan para komandan militer tanggal 1-5 Februari. Militer setuju untuk mulai melakukan upaya diplomatik guna menyelesaikan masalah Malaysia. Murtopo kemudian melakukan kontak dengan seorang staff Kedutaan AS di Kebayoran yang namanya “mirip nama Polandia”. Staff itu mengatakan bahwa Amerika tidak dapat memberikan bantuan kepada militer Indonesia sampai situasi politik internal menjadi lebih jelas. Murtopo melaporkan hal itu kepada Soeharto. Soeharto marah dan kecewa, lalu bersama para panglima militer memutuskan untuk tidak jadi mengupayakan solusi diplomatik bagi penyelesaian masalah Malaysia. Selanjutnya dalam beberapa bulan mendatang operasi militer terhadap Malaysia akan ditingkatkan. Meningkatnya tekanan militer ini akan disertai dengan pemutusan diplomatik dengan Inggris dan Amerika.
4. Berger mengatakan bahwa Jenderal Soeharto bersedia untuk berkomunikasi dengan Dubes kita di Jakarta setiap saat. Dubes diberi kekuasaan penuh untuk bicara atas nama pemerintah Amerika mengenai hubungan kedua negara. Dia mengatakan bahwa kita bersimpati terhadap masalah-masalah Indonesia namun tidak banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membantu sampai pihak Indonesia mampu menciptakan situasi di mana bantuan dari kita dapat diberikan secara terbuka dan akan efektif hasilnya. Dia

menanyakan apakah kita perlu memahami pernyataan Daan Mogot bahwa Jenderal Soeharto mengancam tindakan militer terhadap Malaysia jika kita tidak mengirim beras ke Indonesia.

5. Daan Mogot menolak pemikiran itu tetapi mengatakan bahwa Soeharto berharap, beras itu akan dapat menjadi “jembatan” bagi sikap saling memahami antara pemerintah Amerika dengan militer. Ia kemudian mengatakan bahwa Soeharto dan Murtopo memiliki bukti dalam bentuk rekaman pembicaraan bahwa sejumlah Jenderal telah diberi dana oleh “staff Kedutaan”. Sejumlah Jenderal mengklaim bahwa uang itu digunakan untuk mendanai demonstrasi-demonstrasi mahasiswa serta kegiatan politik kelompok-kelompok [agama tertentu] dan kelompok-kelompok kanan lain. Berger menolak tuduhan ini.
6. Dalam pembicaraan itu Daan Mogot memberikan komentar tambahan berikut ini:
 - A. Misi pembelian beras Achmad ke Bangkok itu berdasar persetujuan dengan Atase Militer Thailand, dilaksanakan melalui keponakan Atase Militer tersebut di Bangkok. Soeharto mendapatkan bahwa ternyata perusahaan yang diwakili keponakan itu fiktif, dan bahwa pemerintah Thailand tidak mendukung kesepakatan tersebut.
 - B. Sebulan sebelum tanggal 1 Oktober [1965] pihak Komunis melakukan pembunuhan-pembunuhan atas elemen-elemen muslim di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Setelah terjadinya kudeta elemen-elemen muslim tersebut melakukan pembalasan. Sebagai akibatnya hanya ada sedikit padi yang ditanam di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan beras yang dihasilkannya akan sangat sedikit.

- C. Soebandrio akan terkena imbas dari pengadilan-pengadilan yang sedang berlangsung sekarang dan pasti akan tersingkir setelah pengadilan-pengadilan itu selesai.
 - D. Soeharto berharap Amerika dapat memainkan peran sebagai penengah dalam penyelesaian masalah Malaysia.
7. KOMENTAR: Laporan mengenai pembicaraan Ali Murtopo di New York [*beberapa kata dirahasiakan*] menunjukkan bahwa tuduhan mengenai Amerika membantu mengirim beras sebagai imbalan atas penyelesaian masalah Malaysia secara damai sama sekali tidak berdasar. Tampaknya Ali Murtopo sedang memainkan suatu permainan berbahaya. Mungkin demi kepentingannya sendiri ia mencoba menipu Soeharto tentang niat Amerika Serikat. Mohon komentar dari Kedutaan [*satu kata dirahasiakan*].

Ball



Jabat tangan dua kekuatan: Presiden Sukarno dan Jenderal Soeharto sebelum Supersemar. (sumber: Deppen RI)

BAB 3

MARET 1966: AMERIKA, SUPERSEMAR DAN KUDETA KHAS INDONESIA

1. Pengantar

Pada bulan Maret 1966 tampaknya ketegangan antara kubu Bung Karno dan kubu Soeharto makin tak terhindarkan. Pada tanggal 6 bulan itu Soeharto menyampaikan *warning* kepada Bung Karno bahwa ada ketidakpuasan di kalangan perwira ABRI. Dua hari kemudian, yakni tanggal 8 Maret, Bung Karno mengeluarkan surat kepada jajaran ABRI untuk mengatakan bahwa dia masih Presiden RI. Tiga hari setelah itu, yakni bulan Maret tanggal 11, adalah tanggal yang sulit terlupakan dari ingatan kolektif bangsa ini. Itulah tanggal di mana terjadi salah satu peristiwa yang paling bersejarah dalam perjalanan bangsa ini sejak Proklamasi Kemerdekaan.

Sebagaimana telah kita lihat di depan, hari itu, Jumat 11 Maret 1966 sedianya Bung Karno memimpin Sidang Kabinet Yang Disempurnakan di Istana Merdeka, Jakarta. Dengan alasan sakit, Soeharto adalah satu-satunya menteri yang tidak hadir dalam sidang tersebut. Sementara itu di luar istana mahasiswa berdemo untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan mereka. Ketika Bung Karno sedang menyampaikan sambutan pembukaan Brigadir Jenderal M. Sabur (Komandan Resimen Cakrabirawa) masuk ke ruang sidang. Dengan ekspresi agak panik ia bermaksud memberitahu Brigjen Amirmachmud yang juga hadir dalam sidang itu, bahwa di sekitar Monas sedang bergerak pasukan tak

dikenal, pasukan yang tidak mengenakan atribut kesatuan mereka. Berhubung Amirmachmud menolak untuk keluar, Sabur langsung memberitahu Bung Karno. Bung Karno juga ikut panik dan menyerahkan pimpinan sidang pada Waperdam II Leimena. "Saya serahkan pimpinan sidang ke *you*," kata Bung Karno ke Leimena waktu itu. Selanjutnya ia bergegas keluar dan bersama Waperdam Soebandrio naik helikopter ke Bogor.

Belakangan diketahui bahwa "pasukan tak dikenal" atau "pasukan liar" itu adalah pasukan Angkatan Darat yang berjumlah dua kompi atau 80 personil yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edhi Wibowo. Sarwo Edhi mendapat perintah dari Kemal Idris, sedang Kemal Idris sendiri mendapat instruksi mengenai penggerahan pasukan tanpa atribut itu dari Letjen Soeharto. Dikatakan, semula mereka ditugaskan untuk menangkap menteri-menteri yang dipandang dekat dengan Bung Karno dan berhaluan kiri seperti Soebandrio. Apapun latar belakangnya, kehadiran pasukan liar itu telah membuat Brigjen Sabur panik, dan selanjutnya juga membuat Bung Karno turut panik dan lari ke Bogor.

Tak lama setelah kepergian Bung Karno ke Bogor itu, tiga orang Brigadir Jenderal, yakni Basuki Rachmat, M. Jusuf, dan Amirmachmud bertandang ke rumah Letjen Soeharto di Jalan Agus Salim no. 98 Jakarta. Di sana mereka berembug dan siang itu juga ketika Brigadir Jenderal itu ditugaskan untuk menemui Bung Karno di Bogor. Tampaknya agak lama mereka berargumen-tasi soal penting atau tidaknya dibuat suatu surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengamankan situasi. Setelah agak lama terjadi tarik-ulur antara Bung Karno dan ketiga tamunya itu akhirnya Bung Karno setuju untuk menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar, sebagaimana juga telah kita lihat pada bagian Pengantar buku ini.

Berbekal naskah Supersemar tersebut ketiga Brigadir Jenderal itu kembali ke Jakarta untuk menyerahkannya kepada Soeharto dkk yang memang telah menunggu-nunggu. Apa persisnya yang terjadi setelah itu, ada banyak versi cerita. Yang jelas malam itu juga Soeharto dkk bekerja keras untuk melahirkan surat Keputusan Presiden No. 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966 yang ia tanda-

tangani. Pagi hari jam 06:00 tanggal 12 Maret 1966 surat itu diumumkan, dan isinya adalah secara resmi PKI dibubarkan. Kelihatan di sini bahwa Supersemar telah dimanfaatkan oleh Soeharto untuk membubarkan partai, meskipun hal itu sebenarnya merupakan wewenang Presiden. Lebih dari itu, pada hari Sabtu tanggal 13 Maret Soeharto mengeluarkan seruan agar aparatur negara di tingkat Pusat maupun Daerah supaya menjaga kelancaran roda pemerintahan.

Pada hari berikutnya, yakni tanggal 14 Maret, melalui Panglima Angkatan Udara Sri Muljono Herlambang, Bung Karno menanyakan kepada Soeharto mengapa tindakan pembubaran PKI itu tidak dilakukan dalam koordinasi dengan Angkatan Udara. Atas pertanyaan itu Soeharto hanya memberi jawaban singkat: "Itu atas tanggung jawab saya". Setelah itu pada hari yang sama Soeharto mengeluarkan dua keputusan penting. Pertama, menyerukan agar semua anggota eks-PKI melaporkan diri. Kedua, melarang partai-partai politik dan organisasi massa menerima mantan anggota PKI.

Melihat semakin jauhnya pelaksanaan Supersemar dari maksud semula, pada tanggal 16 Maret Bung Karno berusaha menerangkan isi Supersemar sambil menekankan bahwa dirinya masih berkuasa penuh, termasuk atas Kabinet yang ada. Dia tegaskan, misalnya, sebagai Presiden dia adalah yang berhak mengangkat atau mencopot seorang menteri Kabinet. Akan tetapi tampaknya Soeharto tidak terlalu peduli pada apa yang dikatakan Bung Karno. Pada tanggal 18 Maret ia justru secara sepihak mengambil keputusan untuk "mengamankan" (artinya menangkap dan menahan) 15 orang menteri Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan. Di antara mereka yang 'diamankan' itu adalah orang-orang yang justru dipercaya dan sudah bekerjasama dengan Bung Karno dalam waktu yang lama. Mereka itu misalnya Waperdam I Soebandrio dan Waperdam II Leimena serta Ketua MPRS Chairul Saleh.

Tampak sekali bahwa Soeharto menggunakan Supersemar yang sebenarnya adalah perintah Presiden (*executive order*) itu sebagai sebuah "*transfer of authority*". Seolah-olah Bung Karno menyerahkan seluruh kekuasaannya kepada Soeharto sehingga

Soeharto boleh melakukan apa saja untuk menangani masalah keamanan dan ketertiban seakan-akan negara sedang dalam keadaan perang. Dilihat demikian, tampak bahwa yang sedang berlangsung adalah sebuah kudeta, meskipun kudeta itu dilakukan secara perlahan-lahan, atau secara bertahap, atau sebagai sesuatu yang jalannya merangkak.

Melihat itu semua tampaknya Amerika tak keberatan. Sebagaimana dapat dilihat dalam dokumen-dokumen bulan Maret, kelihatan bahwa Amerika sangat mendukung upaya-upaya untuk meminggirkan Bung Kurniawan. Dalam dokumen-dokumen bulan ini istilah yang sering dipakai untuk kepemimpinan Soeharto adalah istilah “pemerintahan yang baru”. Artinya ada sebuah pemerintahan baru yang menggantikan pemerintahan sebelumnya. Salah satu dokumen bahkan menyebut Supersemar sebagai sebentuk kudeta, meskipun ditambahi keterangan kudeta yang “khas Indonesia,” yakni kudeta yang dilakukan melalui beberapa tahap. Memang terjadi kesan yang kuat bahwa melalui Supersemar itu telah terjadi suatu perubahan pemerintahan dari pemerintahan di bawah Bung Kurniawan dengan tekanan tertentu menjadi pemerintahan di bawah Letjen Soeharto dengan tekanan yang berbeda. Padahal resminya Bung Kurniawan adalah Presiden RI yang sah.

2. Bantuan Militer untuk Indonesia

Menteri Pertahanan AS, Robert S. McNamara merasa bahwa Amerika Serikat perlu meningkatkan bantuan militer kepada Indonesia melalui program MAP [Military Assistance Program]. Hal itu penting, menurut McNamara, demi mempertahankan orientasi non-Komunis kalangan militer Indonesia.

*Sementara itu militer Indonesia banyak menggunakan bantuan itu untuk Operasi Karya, serta mendesak AS agar membantu mengusahakan penjadwalan kembali pembayaran hutang-hutang Indonesia. Pada saat yang sama McNamara berusaha melobi Kongres agar bantuan militer untuk Indonesia dapat berjalan mulus. Semua itu dapat dilihat dalam memorandum tertanggal 3 Maret 1966 yang dikirim oleh Ketua Policy Planning Council W.W. Rostow untuk Presiden Johnson di bawah ini.****

MEMORANDUM DARI W.W. ROSTOW KEPADA PRESIDEN JOHNSON¹

Tn. Presiden:

Menteri Pertahanan McNamara melaporkan kepada Anda dalam memorandum tentang efektifnya program MAP [Military Assistance Program] Indonesia dalam mempertahankan orientasi non-Komunis di antara orang-orang kunci militer yang sekarang sedang memegang kekuasaan. Ia menyampaikan adanya penghentian program tersebut pada awal 1965 pada puncak kesulitan kita dengan Sukarno, dan dimulainya kembali program itu September lalu setelah terjadi perubahan politik yang radikal di Indonesia.

Level MAP untuk tahun fiskal 1967 adalah US\$2,5 juta. Untuk tahun fiskal 1968, Menhan McNamara memperkirakan jumlah-

¹ Memorandum dari W.W. Rostow kepada Presiden Johnson, 3 Maret 1966. Status: Rahasia. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #87.

nya akan mencapai US\$6 juta, khususnya untuk membeli peralatan Operasi Karya (*Civic Action*), suku cadang, dan pelatihan di AS. Sebuah tim CINCPAC baru saja menyelesaikan survei di Indonesia tentang efektifnya program level MAP yang baru.

Para pemimpin “Orde Baru” di Indonesia telah memberikan prioritas kepada Operasi Karya. Dengan tepat mereka memandang jaminan dari Dubes Green tentang peningkatan program MAP serta bantuan kita dalam mengupayakan penjadwalan kembali pembayaran hutang dan bantuan luar negeri sebagai bukti dukungan kita pada mereka dalam upaya membangun kembali Indonesia.

Menhan McNamara sekarang sedang mempertimbangkan penjelasan tambahan kepada Kongres guna meratakan jalan bagi disahkannya program MAP yang baru.

W.W. Rostow

3. Menyingkirkan Bung Karno dalam Dua Tahap

Ada tiga pemain utama, yang menurut Kedubes Amerika, berperan dalam dinamika sosial-politik Indonesia pada periode ini. Masing-masing adalah Mahasiswa, Tentara dan Bung Karno. Amerika senang bahwa mahasiswa makin berani, dan Bung Karno makin kehilangan pamornya. Akan tetapi tetap saja ada satu hal yang mengganjal, yakni ketidaktegasan militer untuk memihak mahasiswa dan melawan Bung Karno. Masih terdapat indikasi bahwa militer enggan mendukung mahasiswa, sehingga justru mahasiswa yang menurut dokumen di bawah harus “menggiring tentara agar segera bergerak”.

*Selanjutnya Amerika memperkirakan kecilnya kemungkinan militer secara langsung menyingkirkan Sukarno. Yang lebih mungkin dilakukan adalah bahwa tentara akan menggeser Bung Karno dari panggung kekuasaan melalui dua tahap, mengikuti prinsip “kudeta merangkak.” Pada tahap yang pertama, yang mau disingkirkan adalah orang-orang di sekitar Bung Karno, seperti Soebandrio, dll. Baru pada tahap kedua Presiden Sukarno akan menjadi sasaran utama. Apapun yang terjadi, pihak Amerika sangat berharap bahwa cepat atau lambat pemerintahan Bung Karno akan runtuh.****

TELEGRAM DARI KEDUTAAN BESAR (JAKARTA) UNTUK DEPARTEMEN LUAR NEGERI (WASHINGTON)²

1. Berikut ini adalah analisis pihak Kedutaan Besar atas situasi politik dan proyeksinya ke masa depan yang ditulis berdasarkan pengamatan atas situasi Indonesia yang kini masih sangat cair dan mudah berubah itu.
2. Pada minggu-minggu terakhir ini taktik-taktik para pelaku politik utama sudah semakin terlihat jelas. Para pelaku itu adalah:

² Lydman, Telegram dari Kedutaan Besar (Jakarta) untuk Departemen Luar Negeri (Washington), Jakarta, 4 Maret 1966. *Foreign Relations of the United States, 1964-1968, Vol XXVI. Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines* (Washington: United States Government Printing Office, 2001), hlm. 411-414.

- A. **Mahasiswa.** Para mahasiswa tampaknya menyadari bahwa mereka tidak akan bisa menumbangkan Pemerintah Indonesia dengan kekuatan mereka sendiri, dan bahwa tentara-lah yang akan mampu melakukannya. Akan tetapi, mereka merasa bahwa pihak tentara sudah terlalu lama menunggu-nunggu, dan terdorong untuk menggiring tentara agar segera bergerak. Maka dari itu, demonstrasi dan aktivitas-aktivitas mereka yang lain dirancang untuk memaksa tentara supaya segera bertindak.
- B. **Tentara.** Menurut [*kurang satu baris dirahasiakan*] melaporkan bahwa militer berharap untuk bisa menggunakan mahasiswa serta kelompok lain untuk membuat panas suasana. Kemudian militer akan bergerak melawan Soebandrio dan juga para elit sayap kiri lainnya dengan dalih untuk menertibkan keamanan. Sukarno bukanlah target pokok, tetapi beberapa orang di tubuh tentara menyadari bahwa Presiden pasti akan menentang tindakan perlawanan terhadap Soebandrio. Jika itu terjadi tentara haruslah siap untuk berhadapan langsung dengan Sang Presiden. (Catatan: strategi tentara dan mahasiswa ini sangatlah klop jika tentara betul-betul bergerak sebelum demonstrasi mahasiswa terlanjur kehabisan energi).
- C. **Sukarno.** Sukarno percaya bahwa sikap yang tegas akan memecah-belah dan melemahkan lawan-lawannya. Pada minggu terakhir ini, ia kembali telah menempatkan beberapa orang dari sayap kiri radikal pada posisi penting, melarang KAMI, melarang demonstrasi, dan menutup sebuah universitas. Ia sadar bahwa beberapa orang dalam tubuh militer segan untuk melawannya secara terang-terangan. Ia juga percaya bahwa sikap tegas nantinya akan membuat militer takut, seperti yang telah terjadi sebelumnya, dan dengan demikian ia dapat mengurangi

kemungkinan bersatunya militer dan rakyat sipil untuk menjatuhkannya.

3. Sejauh ini terbukti bahwa “sihir” Sukarno tidak mampu lagi bekerja seperti biasanya. Kegiatan mahasiswa terus berlangsung meskipun jelas-jelas ia menentangnya. Selama ini, aktivitas itu digunakan untuk menyerang. Sejauh ini apa yang dilakukan oleh mahasiswa kemarin merupakan serangan yang paling terbuka terhadap Soebandrio, sementara Sukarno sendiri pun tak luput dari kritik-kritik tajam. Kian hari, selama demonstrasi berlangsung, para mahasiswa terlihat kian percaya diri dan berkeinginan besar untuk terlibat dalam peristiwa bersejarah ini. Kesungguhan ini semakin meningkat apalagi didukung oleh kenyataan bahwa mayoritas rakyat Jakarta ada di pihak mereka.

4. Tak ada indikasi jelas bahwa militer akan bertindak walaupun akhir-akhir ini beberapa orang Indonesia yang tahu mengenai masalah ini telah bersikap optimis. Jenderal Sukendro, berlawanan dengan komentar pesimis yang ia utarakan sebelumnya, menyatakan kepada *Charge New Zealand* pada tanggal 2 Maret bahwa para Jenderal akan segera memilih untuk “menjadi patriot daripada menjadi tentara”. Akan tetapi masih belum jelas kapan dan bagaimana militer akan bergerak untuk menyingkirkan Soebandrio dan beberapa orang penting lainnya. Tampaknya pihak militer belum mengambil keputusan yang tegas mengenai dua hal penting tersebut.

5. Walaupun sekarang ini keadaan masih simpang-siur, namun ada beberapa faktor yang membuat situasi saat ini lebih menjanjikan dibanding dengan waktu-waktu sebelumnya:

A. Mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya sepertinya menyadari (lebih dari sebelumnya) bahwa mereka harus memimpin militer daripada menunggu militer untuk bertindak.

- B. Kalangan perwira yunior merasa tidak puas terhadap pemimpin mereka karena minimnya tindakan yang diambil. Hal ini merupakan unsur tambahan yang pada titik tertentu akan mendorong militer untuk bertindak.
 - C. Taktik militer untuk mengumpulkan petisi dari tentara berpangkat rendah dapat juga meningkatkan peran unsur aktivis dalam menentukan kebijakan tentara. Soeharto, yang diberitakan telah meminta petisi tersebut untuk memperkuat tekanannya pada Sukarno, tampaknya akan mendapat lebih daripada apa yang ia harapkan.
 - D. Meningkatnya aktivitas mahasiswa mendesak pihak Istana untuk melakukan tindakan balasan. Peningkatan frekuensi demonstrasi membahayakan pihak Istana, karena pada akhirnya hal itu dapat mendorong intervensi tentara untuk memihak mahasiswa.
6. Keseimbangan antara unsur-unsur yang menguntungkan kita ini tetap mungkin untuk dimanipulasi oleh Sukarno, sebagaimana yang dilakukannya terhadap NU dan Muhammadiyah. Posisi militer sendiri punya beberapa kelemahan. Masalah utama mereka adalah taktik-taktik mereka yang terlalu berbelit-belit dan tidak terfokus, khususnya dalam hal ketidakberanian untuk mengakui bahwa Sukarno-lah masalah pokok yang mereka hadapi. Sebenarnya militer tidak perlu memakai merosotnya keamanan sebagai alasan untuk bertindak jika mereka memang punya keinginan kuat untuk menjatuhkan Sukarno. Terlebih lagi, dengan terus-menerus menghindarkan mahasiswa dari target yang sebenarnya, pihak militer sesungguhnya menunda terciptanya “kerusuhan” yang mereka harap akan bisa mereka eksloitasi. Ada juga kemungkinan bahwa Sukarno-Soebandrio akan mampu menyatukan berbagai unsur yang saat ini bertengangan dengan mereka lewat suatu gerakan dramatis di tingkat internasional. Kemungkinan diadakannya pertemuan puncak mengenai Malaysia, peningkatan program Konfrontasi,

masalah dengan Filipina, krisis yang semakin meruncing dengan AS atau isu lain bisa digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Apalagi jika Sukarno dan para pendukungnya telah putus asa karena banyaknya tekanan yang ditujukan kepada mereka.

7. Dugaan kami, untuk jangka waktu dekat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada, kemungkinan munculnya tindakan militer untuk menyingkirkan Sukarno sangatlah tipis. Yang lebih mungkin terjadi adalah tindakan untuk meruntuhkan Sukarno dalam dua tahap, dengan pertama-tama menyingkirkan Soebandrio dan pemimpin kiri lainnya. Tetapi besarnya kemungkinan itu tidak lebih dari 50:50. Meskipun demikian hal ini merupakan suatu perkembangan yang lebih menggembirakan dibandingkan dengan sebelumnya.

8. Walaupun dalam waktu dekat militer tidak akan bertindak, namun dalam jangka panjang mungkin mereka akan bertindak, sebagai akibat dari demonstrasi-demonstrasi mahasiswa yang kini telah memberi warna baru dalam atmosfer politik Indonesia.

A. Para mahasiswa yang tadinya pasif dan lemah, kini telah dipenuhi oleh antusiasme dan semangat kepahlawanan yang turut mendorong perlawanan terhadap rezim Sukarno. Contohnya, beberapa intelektual Indonesia yang berorientasi Barat tiba-tiba muncul di jalanan bersama mahasiswa. Padahal mereka sudah lama mundur dari kegiatan politik. Kami juga mendapat laporan bahwa ada sekelompok ibu rumah tangga kelas menengah yang secara terorganisir memberi pakaian dan makanan pada para mahasiswa. Bahkan para pedagang asongan serta unsur kelas bawah lainnya secara spontan juga membagikan makanan gratis kepada para demonstran ini.

B. Mahasiswa juga telah menorehkan noktah pada doktrin politik yang mengidentikkan Sukarno dengan negara dan yang membuatnya mampu mengalahkan lawan-lawan politiknya yang lebih kuat. Para mahasiswa juga telah menunjukkan pada generasi tua bahwa seseorang bisa menjadi patriotik tanpa harus menjadi

pro-Sukarno atau pro-pemerintah. Mereka melakukan hal ini dengan memasukkan tuntutan yang mencakup kepentingan orang banyak (menurunkan harga dan mengurangi jumlah pemimpin yang dinilai tidak efektif) dan dengan mengadakan demonstrasi secara teratur yang tidak mengarah pada anarki atau pemberontakan.

9. Singkat kata, kami percaya bahwa perjuangan politik ini akan panjang. Demonstrasi mahasiswa akan terus berjalan meskipun Sukarno telah berusaha melarang mereka. Mereka tidak akan membawa perubahan dalam waktu dekat kecuali jika tentara membentuk aliansi. Dan kami melihat kemungkinan untuk ini hanyalah 50:50. Akan tetapi, jika dilihat dalam kerangka jangka panjang, demonstrasi mahasiswa ini telah memulai suatu orientasi yang lebih sehat pada ranah pemikiran politik di Indonesia. Semua itu akan bergerak melawan Sukarno dan pada akhirnya nanti akan meruntuhkan pemerintahannya.

Lydman

4. Tegang Menjelang Supersemar

Pada malam tanggal 9 Maret 1966 tampaknya telah terjadi pertemuan rahasia (rendesvouz) antara Dubes Green dan Menlu Adam Malik. Dalam pertemuan itu Malik mengungkapkan berbagai perkembangan politik terakhir di Jakarta. Kelihatan Malik begitu bahagia karena kubu Sukarno-Soebandrio semakin sulit posisinya. Tergambar dengan jelas Malik tidak hanya dekat dengan kubu Nasution-Soeharto, melainkan bahkan menjadi semacam "juru bicara" kubu tersebut. Malik berharap supaya kubu Sukarno-Soebandrio melakukan tindakan drastis (seperti misalnya menyingkirkan Soeharto), supaya dengan begitu militer marah dan melakukan tindakan balasan. Tergambar pula dalam telegram tertanggal 10 Maret 1966 dari Green di bawah bahwa Malik sangat anti terhadap kelompok-kelompok kiri.

*Green agak cemas mengenai keselamatan warga Amerika di Indonesia, namun Adam Malik meyakinkan Green bahwa tentara akan selalu melindungi mereka. Yang penting warga Amerika di Indonesia mengambil posisi *low profile* dan menghindari tempat-tempat umum. Ia juga memberi indikasi bahwa dalam seminggu mendatang suasana Jakarta akan menjadi sangat tegang. Kebetulan minggu itu adalah minggu di mana peristiwa Supersemar akan terjadi.****

TELEGRAM DARI KEDUTAAN BESAR AS (JAKARTA) UNTUK DEPARTEMEN LUAR NEGERI (WASHINGTON)³

1. Menteri Adam Malik terlihat lebih bersemangat daripada ketika saya bertemu dengan dia sebelumnya. Ia mengatakan kepada saya pada pertemuan rahasia semalam bahwa situasi politik bisa meledak sewaktu-waktu. Militer telah siap untuk bergerak setiap saat dengan mengerahkan 22 batalyon yang setia

³ Telegram dari Kedutaan Besar AS (Jakarta) untuk Departemen Luar Negeri (Washington), 10 Maret 1966. Status: Rahasia/Segera. Sumber: *Foreign Relations of the United States, 1964-1968, Vol XXVI. Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines* (Washington: United States Government Printing Office, 2001), hlm. 414-416.

pada Jenderal Nasution dan Jenderal Soeharto di Jakarta dan sekitarnya.

2. Saya katakan bahwa Sukarno sedang berencana untuk menyingkirkan Soeharto. Benarkah demikian? Dia mengatakan bahwa Presiden memang sedang berencana untuk menyingkirkan Soeharto atau [Ibrahim] Adjie. Dan Malik berharap Sukarno akan benar-benar melakukan hal itu, karena tindakan macam itu akan merangsang Angkatan Bersenjata untuk bergerak secara fisik melawan Presidium dan akan membawa perubahan yang memang sudah lama didambakan.

3. Saya katakan bahwa sebelum-sebelumnya, begitu tentara terlihat sudah seja-sekata, biasanya Sukarno akan mengambil inisiatif untuk mengumpulkan para petinggi militer beserta para komandan wilayah dan memesona mereka dengan penampilan dan pitadonya yang membuat pihak militer merasa tidak tahu lagi bagaimana harus bersikap satu sama lain. Akibatnya, mereka pun akhirnya menjadi ragu pada saat harus mengambil keputusan penting. Kalau tak salah akhir pekan ini Sukarno akan mengadakan pertemuan serupa. Apakah sejarah akan terulang?

4. Malik menjawab bahwa hal itu tidak akan terjadi. Semua panglima sekarang berada di belakang Soeharto dan menunggu perintahnya. Walaupun demikian, tentara tidak akan mengambil inisiatif melawan Sukarno/Soebandrio guna menghindari tuduhan sebagai agresor. Tentara hanya akan melakukan tindakan balasan (*counter-action*) terhadap tindakan yang dimulai oleh pihak lawan.

Dengan demikian mahasiswa dan buruh akan terus demonstrasi, hingga kubu Sukarno-Soebandrio terprovokasi untuk mengambil tindakan-tindakan yang akan menjustifikasi operasi pembalasan (*counter-moves*) oleh tentara. Hal ini dapat dipicu oleh pemecatan Soeharto atau Adjie atau Sarwo Edhie atau Mokoginta, atau oleh pasukan Cakrabirawa yang menembaki para mahasiswa. Salah satu contoh kejadian yang hampir saja mendorong tentara untuk

melakukan tindakan macam itu adalah ketika tanggal 9 Maret Sukarno dan Soebandrio menginspeksi kantor Kementerian Luar Negeri yang baru saja dirusak. Sukarno begitu murka, sehingga dia nyaris memerintahkan Cakrabirawa untuk menembak mahasiswa.

5. Malik melanjutkan, bahkan para perwira yunior Angkatan Udara sekarang ini sedang mengorganisir diri ke dalam kelompok-kelompok yang mendukung gerakan anti-Presidium dan berencana untuk menyabotase setiap pesawat udara yang digunakan para menteri sayap kiri kabinet untuk melarikan diri dari Jakarta.

6. Kata Malik, sejak kami bertemu sebulan lalu hingga sekarang ini, gerakan mahasiswa melawan Soebandrio dan para menteri sayap kiri merupakan unsur baru yang paling penting dalam situasi politik sekarang ini. Kekuatan mahasiswa lebih besar dibandingkan dengan kekuatan partai-partai politik jika disatukan. Mereka juga memiliki lebih banyak simpati dan dukungan masyarakat. Sebenarnya gerakan-gerakan anti-pemerintah yang dilakukan sebelumnya kurang mendapat dukungan masyarakat. Para mahasiswa demonstran ini terdiri dari anak-anak dari keluarga-keluarga sangat terpandang, termasuk dari keluarga-keluarga yang berpihak pada Sukarno. Tentu saja apa yang mereka lakukan ini amat berpengaruh pada orang tua mereka. Lebih dari itu, tentara dan polisi enggan untuk menembak mahasiswa yang berdemonstrasi. Malik mencontohkan dilema yang dialami seorang polisi yang bertugas melindungi kantor Kementerian Luar Negeri pada tanggal 8 Maret. Ketika perwira tersebut menodongkan pistol ke arah salah satu mahasiswa demonstran, dia langsung menyadari bahwa mahasiswa tersebut merupakan putra dari salah seorang atasannya. Begitu kagetnya polisi itu, hingga ia memutuskan untuk meninggalkan lokasi. Hal serupa terjadi juga pada anggota batalion Cakrabirawa, sehingga beberapa dari mereka memutuskan untuk desersi.

7. Selain itu, serikat-serikat buruh sudah mulai melibatkan diri. Kebanyakan dari serikat-serikat buruh itu akan secara aktif

mendukung aksi mahasiswa dalam demonstrasi dan akan melakukan aksi mogok yang dimulai minggu ini.

8. Saya bertanya kepada Malik, apakah pemberhentian Nasution merupakan kekalahan yang serius bagi kekuatan anti-Soebandrio. Malik mengatakan sama sekali tidak; Nasution, yang tetap dihormati secara nasional, sekarang justru bisa menjalankan perannya dari balik layar secara lebih efektif dibandingkan ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Nasution dan Soeharto tetap dekat, namun lebih baik jika Soeharto berada di depan. Saya bertanya mengenai Jenderal Machmud (Komandan Kodam V yang bertanggung jawab atas wilayah Jakarta). Machmud sepenuhnya berada di pihak Soeharto, jawab Malik.

9. Yang terakhir dan sekaligus terpenting, saya menanyakan pada Malik tentang situasi keamanan umum berkaitan dengan keselamatan warga Amerika dan aset-aset milik Amerika. Saya katakan bahwa reaksi Soebandrio atas serangan mahasiswa terhadap Kementerian Luar Negeri dan dirinya secara pribadi dapat berupa balas dendam dan usaha untuk mengalihkan perhatian. Soebandrio tidak akan dapat membidik langsung tentara maupun para mahasiswa. Oleh karena itu sangatlah mungkin bahwa dia menghasut preman-premannya untuk menyerang Kedubes Amerika. Sudah ada dua contoh seperti itu dalam dua minggu terakhir ini.⁴ Saya juga mendapat informasi dari sumber yang belum teruji kebenarannya, bahwa dalam kemarahannya Sukarno mengancam akan melakukan suatu tindakan terhadap Amerika, persis dengan apa yang pernah ia lakukan terhadap Inggris. Ini berarti bahaya bagi tempat tinggal orang-orang Amerika dan bagi Kedutaan. Apa pendapat Malik?

⁴ Pada tanggal 23 Februari dan 8 Maret, kelompok-kelompok kiri yang terorganisir dengan rapi menyerang Kedutaan Besar Amerika Serikat. Tidak ada korban dalam kejadian ini dan para penyerang tidak berhasil masuk ke kompleks Kedutaan (Telegram 2509 dari Jakarta, 8 Maret; *ibid*).

10. Malik mengatakan, bisa diduga bahwa Soebandrio akan melakukan tindakan-tindakan anti-Amerika Serikat. Akan tetapi, hal ini tidak akan mendapat dukungan dari unsur-unsur masyarakat di sini, dan tentara akan bertindak melindungi warga Amerika. Malik berpendapat bahwa kita tidak perlu mengevakuasi warga Amerika dari Jakarta, namun ia mengusulkan bahwa para warga Amerika menghindari tempat-tempat umum, khususnya minggu depan, ketika situasi tampaknya akan menjadi amat tegang.

11. Saya menekankan sekali lagi kepada Malik, saya mengharapkan terbangunnya hubungan yang baru antara pemerintah Indonesia dan Amerika, suatu hubungan yang produktif dan menguntungkan Indonesia. Sekaligus saya katakan, sangat pentinglah bahwa tidak akan ada hal-hal buruk yang akan terjadi, seperti misalnya aksi-aksi anti-Amerika. Aksi-aksi macam itu akan merusak hubungan Indonesia-Amerika secara serius atau bahkan permanen. Jika itu terjadi, hubungan kedua negara akan rusak dan kemungkinan untuk membina hubungan dan kerjasama yang saling menguntungkan akan sulit. Malik berkata bahwa dia sepenuhnya paham maksud saya, dan dia pun berharap demikian. Dia kemudian berkata, sekarang dia menjadi lebih yakin bahwa semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan. Sikap yang ia tunjukkan mencerminkan jaminan itu.⁵

12. Saya meminta Malik untuk tidak sungkan menceritakan hal-hal yang kami bicarakan itu kepada Nasution dan Soeharto. Dia menyatakan setuju.

Green

⁵ Dalam telegram 2564 dari Jakarta, 12 Maret, 0150Z, Kedutaan Besar melaporkan, sebuah sumber yang terpercaya mengatakan bahwa sedang terjadi penangkapan terhadap 20 menteri kabinet oleh pasukan tentara.

5. Supersemar sebagai Kudeta Militer

Dokumen berikut ini merupakan dokumen yang sangat penting, karena ditulis langsung setelah peristiwa Supersemar. Dalam dokumen ini tergambar dengan jelas betapa antusiasiknya pihak Amerika. Perhatikan, pada baris pertama dokumen disebut dengan jelas dikatakan bahwa peristiwa Supersemar adalah sebuah kudeta militer (military coup), dengan catatan bahwa ini adalah kudeta militer yang “khas Indonesia”.

Ditulis tanggal 12 Maret 1966 sebagai laporan Dubes Green kepada Departemen Luar Negeri AS di Washington, dokumen ini mengatakan bahwa Supersemar adalah cara militer untuk memotong kekuasaan Bung Karno, sebagai reaksi atas tindakan Bung Karno memecat Menteri Pertahanan Nasution dan mau menggantikannya dengan seseorang yang pro-Komunis.⁶

*Sebagaimana telah diketahui, begitu Soeharto menerima Supersemar dari Presiden Sukarno, pada pagi harinya (tanggal 12 Maret) ia langsung melarang PKI dan semua organisasi yang terkait dengannya. Menurut Green, sebenarnya pelarangan itu tidak perlu, karena toh PKI sudah hancur lebur. Namun demikian secara simbolik hal itu sangat penting karena itu berarti militer sudah mulai berani untuk terang-terangan melawan kehendak Bung Karno. Selanjutnya, meskipun yang diterima oleh Soeharto itu adalah sebuah surat perintah, namun Green sudah menyebut-nyebut soal “pemerintahan yang baru”. Hal ini menegaskan pandangannya bahwa yang terjadi pada tanggal 11 Maret itu adalah benar-benar sebuah pergantian pemerintahan tanpa persetujuan rakyat. Dengan kata lain, kudeta! ****

⁶ Tanggal 21 Februari 1966 Bung Karno melakukan reshuffle Kabinet, dan sebagai salah satu hasilnya Menteri Pertahanan Nasution diberhentikan, digantikan oleh Jenderal Sarbini.

TELEGRAM DARI KEDUBES AMERIKA (JAKARTA) UNTUK DEPARTEMEN LUAR NEGERI (WASHINGTON)⁷

1. Indonesia baru saja melancarkan sebuah kudeta militer [*military coup*] yang khas negeri tersebut. Setelah lama ditunggu-tunggu kini Sukarno telah mempertaruhkan nasibnya terlalu jauh. Rencana dia untuk menyingkirkan jajaran kepemimpinan militer dan memasukkan seseorang yang dikenal sebagai pro-Komunis sebagai Menteri Pertahanan telah mendorong militer untuk memotong kekuasaannya. Cara bagaimana Kudeta 1 Oktober ditingani telah membuat Sukarno tetap dipandang sebagai kekuatan pemersatu dan memperkokoh kedudukan militer. Militer percaya bahwa keduanya amat penting. Pada saat yang sama Soeharto memegang perintah nomor satu [dari Supersemar] dan ia bebas menggunakan sesuai dengan kehendaknya.
2. Penduduk Jakarta jelas-jelas memihak militer. Sementara itu semua partai moderat dan organisasi-organisasi lain telah mengeluarkan pernyataan mendukung Soeharto. Mahasiswa, yang telah membantu melahirkan atmosfir yang memungkinkan militer untuk bertindak, tampak sekali sedang bersuka-ria. Hari ini mereka berkeliling kota dengan berjalan kaki atau naik truk sambil meneriakkan slogan-slogan mengecam Soebandrio, Sumardjo, “Kabinet Gestapu” dan tingginya harga-harga.
3. Pertanyaan kunci sekarang ini adalah apakah militer akan bergerak cepat dan efektif untuk mengonsolidasikan

⁷ Telegram dari Kedubes Amerika (Jakarta) untuk Departemen Luar Negeri (Washington), 12 Maret 1966. Status: Rahasia. *Foreign Relations of the United States, 1964-1968, Vol XXVI. Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines* (Washington: United States Government Printing Office, 2001), hlm. 417-418.

posisinya. Sejauh ini tampaknya militer akan menuju ke arah itu.

- A. Parade militer pagi ini telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengungkapkan perasaan mereka setelah berminggu-minggu berada dalam ketegangan. Sekaligus hal itu menunjukkan luasnya dukungan untuk militer. Semuanya telah direkayasa secara hati-hati namun efektif.
- B. Siang hari ini PKI dan semua organisasi yang terkait dengannya secara resmi dilarang oleh Soeharto. Sebenarnya tindakan itu sendiri kurang perlu mengingat bahwa PKI telah hancur sebagai sebuah organisasi partai yang efektif. Meskipun demikian pelarangan itu sendiri merupakan sinyal yang jelas bahwa militer siap untuk secara langsung menolak permintaan-permintaan Sukarno. Sekarang ini sangat mungkin bahwa militer akan menyerbu elemen-elemen PKI di Jakarta yang selama beberapa bulan terakhir telah menjadi tempat perlindungan yang aman bagi mereka.
4. Sampai sekarang belum jelas akan sejauh mana militer mendominasi pemerintahan yang baru dan seberapa jauh militer akan rela untuk berbagi kekuasaan dengan kelompok-kelompok sipil dari partai-partai politik non-Komunis. Meskipun demikian terdapat kemungkinan bahwa militer akan mendukung koalisi antara militer sendiri dengan pemimpin-pemimpin politik moderat seperti Adam Malik, Sultan Yogyakarta, dll. Kelompok yang sebelumnya dilarang oleh Sukarno dan para pemimpin tua, yang sebagian anggotanya dipenjara atau sekedar dinon-aktifkan, sekarang diperbolehkan memainkan peran sebagai penasihat. Meskipun demikian kita tidak yakin bahwa kelompok yang masih bertahan dan yang akan memainkan

peran penting dalam pemerintahan akan rela untuk berbagi hasil kemenangan dan menyerahkan posisi-posisi penting kepada elemen-elemen tersebut.

5. Jika militer bergerak untuk mengonsolidasikan posisinya, dan kita percaya bahwa hal itu memang akan terjadi, kita dapat berharap akan terjadinya sejumlah *move* berikut:
 - A. Perubahan besar dalam kabinet. Soebandrio akan ditendang, sementara mereka yang pro-Komunis dan tidak kompeten akan diganti. Mungkin jumlah anggota kabinet akan dikurangi dan dirampingkan. Meskipun demikian mungkin juga bahwa Sukarno akan berhasil mempertahankan kroni-kroninya yang tidak terlalu menonjol.
 - B. Pemberantasan korupsi dan usaha militer untuk menyelidiki dana-dana ilegal yang telah ditimbun oleh para Menteri. Perhatian yang lebih serius kepada masalah-masalah ekonomi baru akan dilakukan kemudian.
 - C. Re-evaluasi dan re-orientasi bertahap atas pokok-pokok kebijakan luar negeri. Militer akan menghentikan “poros Jakarta-Peking” yang diprakarsai oleh Sukarno, dan mungkin bahkan memutuskan hubungan diplomatik dengan Cina Komunis. CONEFO [*Conference of the New Emerging Forces*] kemungkinan akan dibatalkan. Konfrontasi dengan Malaysia akan tetap berlangsung tetapi kemungkinan besar akan dikurangi atau bahkan berhenti sama sekali. Terutama yang berkaitan dengan operasi-operasi militer.
 - D. Pemecatan orang-orang yang tidak dikehendaki oleh militer.
6. Sukarno masih akan dibiarkan berada di atas panggung. Tetapi sejauh dia masih tetap di atas panggung, ada bahaya bahwa dia akan kembali berkuasa. Namun demikian tampaknya kemungkinan dia untuk kembali lagi sangat

kecil. Langkah halus telah diambil militer untuk mengurangi kekuasaan Sukarno. Jika Sukarno tetap mau mempertaruhkan nasibnya terlalu jauh, mungkin saja militer akan mengambil langkah yang lebih langsung dalam melawan Sukarno.

7. Penunjukkan posisi-posisi penting di dalam pemerintahan serta perlakuan terhadap para Menteri merupakan indikasi yang tepat untuk melihat arah yang mau dituju oleh pemerintahan yang baru ini. Pemerintah akan terus menggunakan slogan-slogan lama sebagaimana Soeharto telah lakukan di dalam perintah hariannya. Meskipun demikian perbuatan itu lebih penting daripada kata-kata, dan perbuatanlah yang seharusnya menjadi dasar penilaian kita terhadap pemerintahan yang baru. Sejauh menyangkut kepentingan pemerintah Amerika, ada beberapa masalah yang lebih mendesak yang dapat menjadi alat indikasi terhadap sikap pemerintah Indonesia, seperti misalnya kasus Lovestand, kembalinya para wartawan Amerika, serta ganti-rugi atas perusakan Kedubes AS pada tanggal 8 Maret yang lalu. Pada awal pekan depan ketika situasi sudah semakin tenang kami akan menyampaikan rekomendasi kami berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah Amerika.

Green

6. Supersemar sebagai Kudeta Sukses yang Harus Didukung

*Deputi Asisten Khusus Bidang Keamanan Nasional Robert Komer melaporkan kepada Presiden Johnson bahwa apa yang baru saja terjadi di Indonesia, yakni Supersemar, adalah suatu “kudeta yang sukses”. Hal itu, kata Komer, mirip dengan apa yang pernah juga terjadi di Ghana, yang ditandai dengan jatuhnya Nkumrah. Dalam laporan yang tertanggal 12 Maret di bawah, Komer mendesak pemerintah Amerika untuk menggarisbawahi suksesnya kudeta itu dengan mengirim bantuan berupa beras atau gandum, meskipun hanya berjumlah beberapa ribu ton saja. Pengiriman bantuan pada masa transisi macam ini, dalam pandangan Komer, akan melapangkan jalan bagi hubungan Amerika di masa depan.****

MEMORANDUM DARI ROBERT KOMER (DEPUTI ASISTEN KHUSUS BIDANG KEAMANAN NASIONAL) UNTUK PRESIDEN LYNDON B. JOHNSON⁸

Mendukung sukses. Tidak sulit untuk menyadari betapa pentingnya kemenangan AD atas Sukarno (meskipun Sukarno tetap dihormati sebagai simbol negara). Indonesia memiliki jumlah penduduk—dan jumlah sumber alam—melebihi yang ada di seluruh Asia Tenggara. Selama ini Indonesia telah siap menjadi negara Komunis yang ekspansionis, yang siap mengancam bagian belakang posisi Barat di Asia Tenggara. Sekarang, meskipun hal-hal yang tak terduga masih bisa terjadi setiap saat, kemungkinan itu telah dipangkas secara drastis.

Kudeta di Ghana adalah contoh lain dari keberuntungan yang tak terduga. Nkumrah adalah tokoh yang paling membahayakan

⁸ Memorandum dari Robert Komer (Deputi Asisten Khusus Bidang Keamanan Nasional) untuk Presiden Lyndon B. Johnson, 12 Maret 1966. *Foreign Relations of the United States, 1964-1968, Vol XXVI. Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines* (Washington: United States Government Printing Office, 2001), hlm. 419.

kepentingan kita di antara para pemimpin Afrika Hitam yang ada. Sebagai reaksi atas kecenderungannya yang amat pro-Komunis, rezim militer yang menggantikannya telah secara gila-gilaan pro-Barat.

Inti dari memorandum ini adalah mengingatkan agar kita tetap dengan cermat mengikuti dan mengonsolidasikan sukses-sukses macam itu. Beberapa ribu ton surplus beras atau gandum, jika sekarang ini diperbantukan—ketika rezim-rezim baru itu masih belum tahu persis bagaimana bentuk hubungannya dengan kita—akan dapat memberikan keuntungan yang luar biasa bagi kita, jauh melebihi nilai dari apa yang kita perbantukan kepada mereka. Saya tidak bermaksud mendorong kita untuk memberikan hadiah yang berlebih-lebihan terhadap rezim-rezim ini sebaliknya, saya malah percaya bahwa kalau yang kita berikan hanya sedikit, hal itu justru akan merangsang mereka untuk mendapatkan lebih banyak. Selanjutnya dengan menjanjikan bantuan lebih banyak nanti kita akan memiliki posisi yang menguntungkan.

Meskipun demikian, menurut pengalaman biasanya sistem birokrasi kita cenderung untuk bersikap terlalu hati-hati dan sulit berinisiatif. Oleh karena itu saya ingin mengusulkan, dalam mengungkapkan kegembiraan Anda kepada Menteri Luar Negeri [AS] dan yang lain tentang suksesnya kudeta di Indonesia dan Ghana, hendaknya Anda menegaskan bahwa kita perlu memanfaatkan keberhasilan macam itu sepadai dan secepat mungkin. Kata-kata Tn. Presiden amat penting untuk meng-gerakkan birokrasi. Dan dalam hal ini saya menduga bahwa usul saya di atas sangat sejalan dengan instink politik Anda sendiri.

Kalau Tn. Presiden menghendaki, saya akan minta tolong Rusk dan Bell untuk urusan ini. Akan tetapi untuk sekarang ini kata-kata langsung dari Anda adalah faktor yang paling menentukan.

R.W. Komer

7. Supersemar sebagai Pembawa “Pemerintahan Baru”

Dalam memorandum yang ditulis oleh Deputi Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Jauh Berger di bawah ini Supersemar dilihat sebagai puncak dari ketegangan antara Bung Karno dengan kubu anti-Komunis yang terdiri dari kalangan sipil maupun militer. Dalam salah satu langkah politiknya, demikian menurut memo ini, Bung Karno bermaksud menggantikan Soeharto dengan seorang Jenderal berhaluan kiri. Sebagai balasan, kubu militer menyampaikan “ultimatum” kepada Bung Karno, dan hasilnya adalah Supersemar. Dikatakan, Supersemar adalah tindakan Bung Karno “menyerahkan tanggung jawab (transferred responsibility) untuk menjaga keamanan dan ketertiban kepada Angkatan Darat (Army).”

*Apa sebenarnya yang dimaksud dengan “penyerahan tanggung jawab” oleh Supersemar kiranya sulit dipastikan, antara lain mengingat bahwa naskah itu telah diubah-ubah bahkan hilang. Namun yang jelas, pihak AS mengacu pada pemerintahan pasca-11 Maret 1966 sebagai “pemerintahan yang baru.” Sejak dikeluarkannya Supersemar, menurut dokumen ini, Soeharto rajin mengeluarkan perintah “atas nama Sukarno”. Dalam kaitan dengan pemerintahan yang baru, mahasiswa pun dipandang sebagai “the new emerging forces”-nya Indonesia. Istilah itu tentu saja mengacu sambil mengejek istilah sama yang disingkat “NEFOS” dan sering digunakan oleh Bung Karno untuk negara-negara baru merdeka yang gigih melawan negara-negara kapitalis. ****

PERKEMBANGAN TERAKHIR DI INDONESIA⁹

1 Oktober dan Indonesia

1. Meskipun dalam beberapa bulan belakangan ini hanya ada sedikit kemajuan berkaitan dengan hubungan bilateral kita dengan Indonesia, apa yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini

⁹ Memorandum dari Berger (Deputi Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Jauh) untuk Menteri Luar Negeri Rusk, “Perkembangan Terakhir di Indonesia”, 14 Maret 1966. Status: Rahasia. *Foreign Relations of the United States, 1964-1968, Vol XXVI. Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines* (Washington: United States Government Printing Office, 2001), hlm. 422-423.

kiranya akan membawa perubahan yang besar dan memiliki dampak jangka-panjang terhadap kebijakan dalam maupun luar negeri Indonesia. Ada sejumlah perubahan besar sebagai akibat dari Kudeta 1 Oktober yang gagal itu: (1) dihancurnannya PKI sebagai kekuatan politik yang terorganisir; (2) munculnya kekuatan-kekuatan baru yang tuntutan-tuntutannya berlawanan dengan prinsip-prinsip dasar Presiden Sukarno dan bagaimana ia memerintah.

Latar Belakang atas Perkembangan Terakhir

2. Selama lima bulan terakhir sejak terjadinya Peristiwa 30 September [1965], Presiden Sukarno dan Menteri Luar Negeri dr. Soebandrio melakukan berbagai manuver melawan kalangan militer guna memperjuangkan kepentingan politik masing-masing. Pada tanggal 21 Februari [1966] Sukarno mengumumkan keputusannya untuk melakukan *resuffle* atas kabinetnya guna menyiasati kubu militer, mengingat bahwa kubu ini merupakan ancaman terbesar bagi kekuasaannya. Dalam *resuffle* itu sejumlah tokoh non-Komunis disingkirkan, termasuk Menteri Pertahanan Nasution, sementara para penasihat Sukarno yang berhaluan kiri dipertahankan. Hal itu menimbulkan reaksi besar-besaran. Selama periode 22 Februari-12 Maret [1966], ribuan mahasiswa secara terus-menerus melakukan demonstrasi di jalan-jalan di Jakarta. Tuntutan mereka: (1) Bubarkan PKI; (2) Pecat Soebandrio; (3) Turunkan harga. Selama seminggu ini mereka menduduki dan merusak kantor Kementerian Luar Negeri, memaksa Menteri Pendidikan untuk menutup kantornya, dan secara kasar menyerang gedung Kantor Berita Cina Baru, Konsulat Jendral Cina Komunis, dan kantor Misi Dagang Cina Komunis di Jakarta. Dalam penyerangan itu beberapa orang Cina terluka.

3. Sebagai balasan terhadap demonstrasi besar-besaran itu pada tanggal 23 Februari dan 8 Maret telah dilancarkan dua

serangan terhadap Kedubes AS oleh kelompok-kelompok kiri yang kecil namun terorganisir. Tak ada yang terluka, dan gedung Kedutaan juga tidak sampai mereka masuki.

Peristiwa 12 Maret

4. Sebagai langkah besar untuk mengurangi dampak dari demonstrasi mahasiswa itu Sukarno merencanakan tiga kali rapat selama akhir pekan 12 Maret [1966], dengan maksud untuk memecah dan kemudian menguasai lawan-lawan politiknya. Sementara itu kubu militer, setelah mendengar kabar bahwa Sukarno bermaksud menggantikan Soeharto dengan seorang Jenderal berhaluan kiri, membalsas dengan mengajukan ultimatum terhadap Sukarno. Sebagai jawaban atas ultimatum itu Sukarno menyerahkan kekuasaan untuk menjaga keamanan dan ketertiban kepada AD. Sejak itu Soeharto telah mengeluarkan sejumlah perintah “atas nama” Sukarno. Sekarang ini reorganisasi Kabinet sedang berlangsung. Informasi awal mengatakan bahwa Soebandrio dan sejumlah orang kiri akan disingkirkan.

Masa Depan

5. Meskipun bagaimana nantinya hasil akhir dari perebutan kekuasaan yang sedang berlangsung ini masih belum jelas, tampaknya sekarang ini kubu militer sedang berada di atas angin. Berhasil atau gagalnya kubu militer ini bergantung pada kemampuan mereka untuk: (1) mempertahankan momentum yang telah mereka peroleh; (2) mempertahankan kesatuan internal di kalangan mereka sendiri. Tentu saja kita akan terus mengamati dari dekat perkembangan situasi yang ada sambil melihat bagaimana kita akan menyesuaikan diri dengan pemerintahan Indonesia yang baru, yang semoga saja lebih moderat. Selain itu kita juga akan melihat kemungkinan perlu-tidaknya kita mengirim bantuan ke Indonesia, serta mencari saat yang paling tepat untuk itu.

6. Tanda tanya terakhir adalah berkaitan dengan kekuatan politik Indonesia yang terbaru, yakni mahasiswa. Meskipun untuk sementara ini mereka akan memihak kubu militer, ada kemungkinan dalam jangka panjang mereka ini akan menjadi “*new emerging forces*”-nya Indonesia.

Berger

8. Sikap Hati-hati dalam Membantu “Pemerintahan Baru”

Jika dalam memorandum sebelumnya Berger optimis mengenai “pemerintahan yang baru” Indonesia, memo tertanggal 17 Maret 1966 yang ditulis oleh Menlu AS Dean Rusk justru agak meragukannya. Rusk melihat kemungkinan pemerintah yang baru ini merupakan hasil kompromi dengan unsur-unsur lama, yang sekaligus juga belum tentu mampu membangun kembali sistem ekonomi dan politik Indonesia.

*Rusk mengusulkan supaya Washington hati-hati kalau mau memberikan bantuan kepada Indonesia. Menurut dia, bantuan hanya diberikan dengan beberapa syarat, seperti: (a) pemerintah yang baru sungguh-sungguh mau menata kembali kehidupan ekonomi dan politik Indonesia; (b) bantuan bisa disampaikan secara terbuka alias tidak lewat jalur rahasia; (c) bantuan dilakukan secara multilateral; (d) Indonesia tidak terus-terusan mengecam AS atau merampas instalasi-instalasi minyak AS.****

TELEGRAM DARI DEPARTEMEN LUAR NEGERI (WASHINGTON) KE KEDUBES AMERIKA (JAKARTA)¹⁰

1. Berikut adalah penilaian (*assessment*) kami tentang arah perkembangan situasi di Indonesia sekarang ini, serta ringkasan pemikiran kami mengenai bagaimana seharusnya A.S. menanggapi permohonan bantuan dari Indonesia, yang tampaknya cukup mendesak dan tak terhindarkan.
2. Menurut perhitungan kami, dalam waktu dekat ini tidak mungkin bagi Sukarno/Soebandrio untuk kembali ke tampuk pimpinan seperti semula. Namun demikian, tampaknya akan sulit mengharapkan bahwa dari situasi ini akan segera muncul sebuah

¹⁰ Telegram dari Departemen Luar Negeri (Washington) ke Kedubes AS (Jakarta), 17 Maret 1966. Status: *Rahasia*. Sumber: *Foreign Relations of the United States, 1964-1968, Vol XXVI. Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines* (Washington: United States Government Printing Office, 2001), hlm. 422-424.

rezim baru yang kuat dan berorientasi ekonomi. Bahkan seandainya muncul sebuah pemerintahan baru sebagaimana digambarkan dalam alinea kelima Telegram B,¹¹ tampaknya pemerintahan itu akan merupakan sebentuk kompromi antara berbagai kekuatan yang masih ada dalam struktur kekuasaan di Indonesia, yang secara kolektif hanya akan befokus pada bagaimana menegakkan kekuasaan atas rakyat, serta tidak akan mau atau mampu untuk mengambil langkah-langkah dramatis dan taktis atas perekonomian Indonesia. Kami menduga bahwa Sukarno tetap akan mempertahankan kekuasaan simboliknya. Pemerintahan yang baru itu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya akan terpaksa dibatasi oleh keinginan untuk menyenangkan Sukarno dengan jalan tetap menjunjung tinggi slogan-slogan Sukarno demi kesatuan nasional.

3. Pemerintahan macam ini tampaknya akan menyadari dan memiliki perhatian cukup terhadap masalah-masalah ekonomi Indonesia. Namun pada saat yang sama pemerintahan itu akan berusaha untuk tetap bertahan dengan jalan mencari bantuan luar negeri (yang sifatnya sementara), dan bukan dengan memecahkan masalah-masalah ekonomi yang ada secara sungguh-sungguh. Lihat saja, pemerintahan macam itu tak akan berani misalnya mengurangi jumlah pegawai negeri atau personil militer.

4. Pemerintah itu kemungkinan besar akan mengajukan rangkaian permohonan bilateral yang kompleks melalui tim kunjungan ke berbagai negara. Melalui Duta Besar negara-negara asing di Jakarta pemerintah akan memohon bantuan pangan dan bahan pakaian, serta meminta penjadwalan kembali pembayaran hutang. Selanjutnya pemerintah itu akan mengaju-

¹¹ Dalam paragraf 5 telegram 2633 dari Jakarta tanggal 16 Maret 1966, Kedubes AS mengusulkan bahwa “hampir dapat dipastikan bahwa nantinya partai-partai lama yang pro-Barat seperti Masyumi dan PSI akan diakui kembali, namun dengan nama yang berbeda.” Kemungkinan besar tokoh-tokoh politik seperti Adam Malik, Soeharto dan Nasution akan memainkan peran penting.

kan permohonan kredit secara terang-terangan kepada Jepang dan Eropa, dan (setidaknya secara pelan-pelan) akan mengajukan permintaan serupa namun secara sembunyi-sembunyi kepada kita.

5. Oleh karena itu kalau nanti orang-orang Indonesia mendekati kita, tanggapan kita kira-kira begini:

- A. Kepentingan AS dalam memberikan bantuan tergantung pada kemauan pemerintah Indonesia untuk menunjukkan diri sebagai pemerintahan yang sungguh-sungguh bermaksud mengentaskan Indonesia dari kehancuran ekonomi yang ada sekarang ini. Kita siap untuk membantu pemerintahan macam itu dengan beras dan kapas, namun dengan syarat bahwa Indonesia akan mengumumkan pengiriman beras dan kapas itu sebagai hasil dari transaksi komersial, meskipun dalam prakteknya sangat konesisional (segaris dengan apa yang dikatakan oleh Dubes Green di Washington, yakni dengan menggunakan mekanisme seperti PL 480 dan garansi CCC).
- B. Suatu operasi rahasia tidak mungkin dapat kita lakukan. Kita tidak ingin mempermalukan pemerintah Indonesia atau memberikan kesan yang keliru bahwa kita sedang bermaksud untuk kembali campur tangan di Indonesia. Sebagaimana telah sering terjadi, apapun peran yang dapat kita mainkan dalam membantu Indonesia akan selalu diketahui umum.
- C. Berkaitan dengan penjadwalan kembali hutang atau bentuk-bentuk bantuan lain yang terpisah dari bantuan langsung berupa beras dan bahan pakaian sebagaimana disebut di atas, beberapa aspek perlu untuk dipertimbangkan:
 - (i) Kami merasa bahwa dukungan untuk Indonesia hanya akan mungkin dan secara politis akan efektif bila dilakukan secara multilateral. Kecuali dukungan dalam bentuk bantuan langsung dan mendesak.

- (ii) Kami merasa bahwa satu atau dua negara yang bersahabat dengan Indonesia—misalnya Jepang—perlu diminta oleh pihak Indonesia untuk mengatur pertemuan para kreditor serta sejumlah negara lain yang berminat. Negara-negara itu perlu menganalisis situasi hutang Indonesia dan kebutuhan Indonesia akan uang tunai maupun kredit untuk beberapa bulan mendatang. Sementara itu pemerintah Indonesia diharapkan terus mencoba mengatasi krisis ekonomi yang ada sambil selalu memperbaiki kinerjanya. Negara-negara kreditor itu nantinya diharapkan akan dapat mengambil keputusan kolektif tentang bagaimana menolong Indonesia keluar dari berbagai kesulitan yang sedang dialami sekarang ini. Kita akan dengan senang hati berpartisipasi.
- (iii) Masalah Indonesia adalah masalah internasional. Setiap tindakan yang diambil harus disertai dengan perlakuan yang sama terhadap para kreditor. Atas alasan itu kita merasa perlu adanya partisipasi Uni Soviet. Kita dan negara-negara kreditor lain tidak setuju, misalnya, jika upaya penjadwalan kembali kredit dan hutang Indonesia hanya dimaksudkan supaya Indonesia dapat membayar hutangnya kepada Uni Soviet. Kita berharap bahwa Uni Soviet turut diundang dalam pertemuan para kreditor itu (lihat no.ii) meskipun mungkin mereka akan menolak.
- (iv) Kita bersedia membantu pemerintah Indonesia, namun kita tidak akan melakukan hal itu jika pemerintah Indonesia terus-terusan menyebut kita sebagai musuh terbesarnya, atau menggunakan kekuatan militer untuk merampas instalasi-instalasi minyak milik AS. Keduanya bukanlah persyaratan yang sulit dipenuhi oleh Indonesia, dan kita tidak akan menuntut perubah-

an radikal dalam kebijakan-kebijakan publik yang kiranya dapat membahayakan posisi pemerintah Indonesia.

6. Kami merasa bahwa sebaiknya yang pertama-tama dimintai bantuannya untuk Indonesia adalah Jepang, mengingat bahwa Jepang sudah sering mengirim misi ekonomi ke Indonesia. Ketika pihak Departemen Luar Negeri di Washington dan Kedubes di Jakarta setuju mengenai posisi yang perlu diambil oleh AS, kami akan mempertimbangkannya dengan pemerintah Jepang. Tujuannya adalah untuk memperbaiki pandangan sebagaimana dilaporkan dalam paragraf 4B Telegram A, dan untuk membantu Jepang dalam menyiapkan diri menanggapi permintaan bantuan dari Jepang. Dimohon komentarnya secepat mungkin atas gagasan-gagasan di atas, berikut berbagai permasalahan lain yang mungkin perlu untuk dibicarakan.

Rusk

9. Menghindari Tuduhan “Udang di Balik Batu”

*Sikap hati-hati Menlu AS Rusk itu kembali tercermin dalam memorandum berikut yang tertanggal 22 Maret 1966 ini. Pada satu sisi Rusk ingin supaya Kedubes AS di Jakarta mendukung Indonesia agar bergabung kembali dengan lembaga-lembaga internasional. Pada sisi lain ia juga menganjurkan supaya AS jangan memulai inisiatif untuk mendekati Indonesia. Ada dua alasan. Pertama, AS takut jangan-jangan nanti dikira ada “udang di balik batu” inisiatif itu. Kedua, kalau AS yang berinisiatif mendekati, jangan-jangan pemerintah baru Indonesia merasa memiliki posisi tawar yang tinggi di mata AS sehingga AS mau mendekatinya.****

TELEGRAM DARI KEMENTERIAN LUAR NEGERI (WASHINGTON) UNTUK KEDUBES AMERIKA SERIKAT (JAKARTA)¹²

1. Saat ini pemerintah Indonesia yang baru sedang berusaha menggalang dukungan internasional guna memperbaiki ekonominya. Namun demikian upaya itu kemungkinan akan sulit, mengingat bahwa Indonesia telah menarik keanggotaannya di hampir semua organisasi internasional. Menurut dugaan kami orang-orang yang memiliki rasa tanggung jawab seperti Sultan Hamengku Buwono IX dan Adam Malik akan merasa perlu bahwa Indonesia bergabung kembali dengan organisasi-organisasi itu. Namun pada saat yang sama mereka merasa perlu untuk bergerak pelan-pelan, supaya tidak terkesan sedang melawan keputusan-keputusan Sukarno.

2. Kami merasa bahwa Indonesia perlu didorong untuk mau bergabung kembali dengan organisasi-organisasi internasional itu, terutama organisasi-organisasi yang dapat membantu mereka

¹² Telegram dari Kementerian Luar Negeri (Washington) untuk Kedubes AS (Jakarta), 22 Maret 1966. Status: Rahasia. Sumber: *Foreign Relations of the United States, 1964-1968, Vol XXVI. Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines* (Washington: United States Government Printing Office, 2001), hlm. 424-425.

entah secara langsung atau melalui suatu koordinasi multilateral. Kita berharap bahwa Indonesia akan menerima saran-saran dari negara-negara lain mengenai hal ini. Kita juga berharap bahwa Indonesia aktif mencari bantuan, namun kiranya tidak bijaksana jika pemerintah AS mengambil inisiatif untuk mendekati Indonesia. Mengapa? Karena ada kemungkinan mereka akan mencurigai adanya udang di balik batu pendekatan kita itu, atau jangan-jangan inisiatif yang kita ajukan akan ditangkap oleh Indonesia bahwa Indonesia kini punya posisi tawar yang baru di mata kita.

3. Pada saat yang sama, mungkin saja Indonesia akan bertanya-tanya mengenai bagaimana reaksi kita jika Indonesia bergabung kembali dengan organisasi-organisasi yang telah mereka tinggalkan atau bergabung dengan organisasi-organisasi lain yang belum pernah mereka masuki seperti Asian Development Bank (ADB). Jika itu yang terjadi, Anda dimohon untuk menunjukkan sikap bahwa Amerika akan secara diam-diam mendukung upaya Indonesia itu dan bahwa kita tidak akan memanfaatkannya untuk menyatakan hal itu sebagai kemenangan Barat. Kalau pihak Indonesia meminta saran-saran dari Anda, tolong katakan bahwa kemauan Indonesia untuk bergabung dengan ADB (di mana Indonesia belum pernah menjadi anggotanya) akan merupakan langkah awal yang tepat.

4. Butir-butir gagasan yang disebutkan di atas tentu saja bertolak dari kesimpulan kami bahwa Indonesia perlu untuk ditarik kembali ke dunia nyata, bahwa kemungkinan besar Indonesia tidak akan merupakan *partner* yang baik bagi kepentingan AS dalam organisasi-organisasi internasional. Namun demikian tetap saja penting bahwa Indonesia kita bantu agar mau bergabung kembali dalam berbagai kegiatan di tingkat dunia.

5. Dimohon komentar dari Jakarta.

Rusk

10. Limapuluhan Ribu Ton Beras untuk “Pemerintah Baru”

Betapapun ragu dan hati-hatiinya Menlu Rusk terhadap pemerintah Indonesia pasca-11 Maret 1966, tampaknya Presiden Johnson tetap berniat membantu Indonesia. Dokumen berikut menunjukkan adanya langkah yang mau diambil Washington untuk mengirim 50 ribu ton beras ke Indonesia atas perintah Presiden Johnson. Pengiriman mau dilakukan dengan perlindungan hukum “Public Law 480”. Namun demikian tidak berarti langkah itu tidak menimbulkan masalah. Ternyata pengiriman dengan PL 480, dan bukan melalui jalur “Garansi CCC”, akan menyebabkan kegelisahan di antara para pengusaha kapas di Amerika karena tidak memungkinkan mereka untuk berjualan kapas mentah ke Indonesia.

*Apapun komplikasi hukum dan ekonomisnya, dokumen ini tampaknya menunjukkan salah satu langkah Washington untuk mulai membantu “pemerintahan yang baru” di Indonesia. Aslinya dokumen ini ditulis oleh James C. Thompson Jr., dari National Security Council untuk Pembantu Khusus Presiden, Moyers, tanggal 31 Maret 1966.****

BERAS UNTUK INDONESIA¹³

Saya baru saja mendengar bahwa Presiden [Johnson] telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri untuk memenuhi permintaan mengirimkan bantuan darurat kepada Indonesia berupa 50 ribu ton beras di bawah peraturan PL (Public Law) 480, Bagian IV.

Keputusan itu baik adanya. Meskipun demikian saya pikir ada baiknya Anda—dan mungkin Tn. Presiden—sadar akan beberapa faktor berkaitan dengan masalah itu:

1. Terdapat perbedaan pendapat antara mereka yang mendukung jalur PL 480 dan mereka yang mendukung jalur

¹³ Memorandum dari James C. Thomson Jr (Dewan Keamanan Nasional) untuk Moyers (Pembantu Khusus Presiden), “Beras untuk Indonesia”, 31 Maret 1966. Status: Rahasia. *Foreign Relations of the United States, 1964-1968, Vol XXVI. Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines* (Washington: United States Government Printing Office, 2001), hlm. 425-426.

penjualan kredit eksport langsung (dengan garansi CCC berupa surat pernyataan kredit dari Bank Indonesia). Dalam langkah yang mau diambil sekarang ini, gagasan para pendukung jalur PL 480-lah yang dipakai, karena jalur tersebut dianggap lebih cepat dan dapat menghindari urusan garansi CCC dari bank yang tampaknya mau bangkrut itu. Meskipun begitu ada pertanyaan apakah jalur ini akan memuaskan bagi pihak Indonesia. Kemungkinan pihak Indonesia lebih memilih jalur-jalur di mana keterlibatan pemerintah Amerika tidak kelihatan, sementara transaksi melalui CCC itu lebih menjamin kerahasiaan itu daripada kalau melalui jalur PL 480.

2. Ada kemungkinan jalur ketiga juga perlu dipertimbangkan: AS membeli beras dari Thailand, dan agar pihak Thailand yang mengirim beras itu ke Indonesia. Namun jalur ini akan menuntut keterlibatan dana Bantuan Pendukung (*Supporting Assistance*) dan, menurut para pengacara kita, akan menuntut pula adanya *Presidential Determination* (Ketentuan Presiden di bawah Amandemen Broomfield) bahwa bantuan untuk Indonesia itu sejalan dengan kepentingan nasional AS. Langkah macam itu akan sulit dirahasiakan dan akan dapat mempermalukan pihak Indonesia.

3. Jalur PL 480 dapat menimbulkan sejumlah kegelisahan di masa depan: sebagaimana Anda tahu, selama beberapa bulan terakhir ini para pengusaha kapas AS berusaha untuk mendapatkan garansi CCC bagi surat kredit Indonesia dengan maksud untuk bisa menjual kapas mentah ke Indonesia. Para pengusaha itu—berikut para pendukung mereka di Gedung Capitol Washington—merasa gelisah jika Pemerintah AS lebih memilih jalur PL 480 untuk pengiriman kapas daripada dengan menggunakan jalur dagang biasa melalui garansi CCC. Tindakan kita untuk mengirim beras ke Indonesia melalui jalur PL 480 tentu saja akan meningkatkan kekhawatiran para pengusaha kapas dan pendukung mereka di Washington.

Thompson

11. “Pemerintah Baru” Ingin Mempererat Hubungan

*Bagaikan gayung bersambut, uluran niat Washington untuk membantu Indonesia disusul oleh Jakarta untuk membina hubungan lebih dekat dengan Washington. Sebagaimana terbaca dalam surat tertanggal 31 Maret di bawah, dalam hal ini pemerintah Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Dalam surat kepada Wakil Presiden AS Hubert Humphrey, Malik mengungkapkan keinginan untuk “mempererat hubungan” antara Indonesia dan Amerika, bahkan ingin secara pribadi ketemu dengan Humphrey.****

SURAT DARI MENTERI LUAR NEGERI INDONESIA ADAM MALIK KEPADA WAKIL PRESIDEN AS HUBERT HUMPHREY¹⁴

Tn. Hubert Humphrey
Wakil Presiden Amerika Serikat
Capitol Hill
Washington, D.C.

Tn. Humphrey yang terhormat,
Mengacu kepada surat yang Anda tujuhan kepada Bpk. Widjatmika tertanggal 27 Januari 1964, yang isinya telah saya baca, kiranya telah tiba saat yang tepat bagi kita untuk mempererat hubungan kita dan untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi bersama sebagaimana Anda sebut dalam surat itu.

Untuk tujuan itulah saya merasa bersyukur dapat berkomunikasi kembali dengan Anda melalui Bpk. Widjatmika yang memiliki wewenang dan kuasa penuh dari saya untuk membicarakan

¹⁴ Surat dari Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik kepada Wakil Presiden AS Hubert Humphrey, 31 Maret 1966. Status: Sangat konfidensial. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, Confidential File CO 110. #9c.

apapun yang perlu dalam kaitan dengan hal diatas, yakni semua hal yang akan berguna bagi upaya yang cepat dan efisien guna membangun kembali ekonomi negeri kami.

Saya berharap bisa bertemu dengan Anda secara pribadi. Semoga pembicaraan itu berjalan dengan baik dan lancar.

Hormat kami,
(tanda tangan)

ADAM MALIK



Senyum persahabatan: Soeharto dan Wakil Presiden Amerika Serikat Hubert Humphrey di Jakarta. (sumber: Deppen RI)

BAB 4

APRIL 1966: AMERIKA SERIKAT DAN SIKAP HATI-HATI

1. Pengantar

Berbekal Supersemar yang sudah ada di tangan (dengan versi tertentu tentunya), pada bulan April ini para pendukung Soeharto mulai menargetkan para pendukung Bung Karno, baik itu di dalam tubuh PNI, Divisi Diponegoro maupun di DPR/MPR.

Bersamaan dengan itu kubu Soeharto juga mulai mencari dukungan luar negeri, khususnya dalam rangka memulihkan kondisi ekonomi Indonesia. Pada bulan ini Menlu Adam Malik berkunjung ke New York guna mengumumkan bahwa Indonesia akan bergabung kembali dengan PBB. Adam Malik juga mengungkapkan keinginan pemerintahnya untuk bergabung dengan lembaga-lembaga internasional yang lain.

Dalam kaitan dengan politik luar negeri, Indonesia menormalisasi hubungan dengan Singapura, meskipun hal itu meresahkan Malaysia yang resminya masih terlibat dalam politik Konfrontasi melawan Indonesia. Singapura mencoba meyakinkan bahwa normalisasi hubungan Indonesia-Singapura itu tak akan memengaruhi keamanan Malaysia, namun Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rachman tidak terlalu yakin.

Sementara itu pada tanggal 12 April Sultan Hamengku Buwono IX secara terus terang dan terbuka mengakui betapa kacaunya kondisi ekonomi di Indonesia saat ini. Sultan mengundang keterlibatan swasta maupun pemerintah untuk

membangun kembali pertanian Indonesia, sekaligus menghidupkan kembali industri tekstil, produksi alat-alat pertanian dan transportasi.

Sebulan setelah ditandatanganinya Supersemar, posisi Bung Karno makin terjepit. Bisa ditebak, Amerika merasa senang akan hal itu, namun tetap ingin bersikap hati-hati dalam kebijakannya terhadap Indonesia. Karena berharap bahwa ekonomi Indonesia akan segera bangkit, Amerika sengaja ingin menahan diri untuk tidak terlalu cepat memberikan bantuan ekonomi kepada pemerintahan yang *de facto* dipegang oleh Soeharto dkk.

Sikap hati-hati Amerika pada bulan April ini juga tercermin dengan cukup jelas ketika pemerintah Inggris bermaksud memberi bantuan kepada Indonesia sebesar satu juta poundsterling, tetapi dengan catatan bahwa Indonesia bersedia mengurangi konfrontasinya dengan Malaysia. Sebagaimana dapat dilihat dalam salah satu dokumen bulan April, Amerika tidak merekomendasikan bantuan macam itu. Alasannya, bantuan bersyarat macam itu justru dapat bersifat kontra-produktif jika hal itu cepat atau lambat diketahui publik.

2. Senang Namun Hati-hati

Memorandum berikut menegaskan bahwa pengiriman 50 ribu ton beras itu menandai babak baru dalam hubungan Indonesia-Amerika. Di mata Amerika, “pemerintah yang baru” yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto ini memang layak dibantu, karena mulai melakukan banyak perubahan dalam kebijakan dalam negeri maupun luar negeri. Dalam kebijakan luar negeri, misalnya, Indonesia mulai memperbaiki hubungan diplomatik dengan Singapura. Secara internal pemerintah yang baru juga terus berupaya menyingkirkan orang-orang yang diduga pro-Komunis. Semua itu membuat Amerika senang.

*Pada saat yang sama Staff National Security Council D.W. Ropa dalam memorandum tanggal 18 April di bawah ini menganjurkan agar Amerika tetap bersikap hati-hati sambil mengamati langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi.****

SITUASI INDONESIA TERKINI¹

Persetujuan untuk menjual 50 ribu ton beras kepada Pemerintah Indonesia melalui jalur PL-480 Bagian IV telah ditandatangani kemarin dan hari ini telah diumumkan secara publik. Kiriman bantuan yang sifatnya terbatas ini merupakan tanda dimulainya kembali kerjasama antara kedua negara, setelah kini kekuasaan Sukarno amat dibatasi. Perubahan suasana di Jakarta dan pembalikan atas kebijakan-kebijakan Sukarno yang banyak dikecam kini dengan jelas tercermin dalam perencanaan ekonomi yang lebih realistik, penurunan intensitas Konfrontasi dengan Malaysia dan upaya terus-menerus untuk membersihkan pengaruh Komunis dari berbagai kementerian. Semua itu telah menandai pemerintahan baru Jenderal Soeharto.

¹ Memorandum dari Donald W. Ropa (Staff Dewan Keamanan Nasional) untuk Rostow (Pembantu Khusus Presiden), “Situasi Indonesia Terkini” 18 April 1966. Status: Rahasia. *Foreign Relations of the United States, 1964-1968*, Volume XXVI (Washington: Government Printing Office, 2001), hlm. 427-428.

Sultan Yogyakarta secara terus terang menggambarkan kacaunya suasana ekonomi Indonesia dan memetakan langkah-langkah untuk mendorong usaha-usaha swasta serta membangun kembali pertanian, produksi tekstil, produksi alat-alat pertanian dan transportasi. Dia mengatakan bahwa tidak ada jalan keluar yang mudah dan mengajak sektor swasta maupun pemerintah untuk hidup sederhana. Ada pula indikasi bahwa pemerintah sedang menyiapkan diri untuk mengembalikan perkebunan karet milik Amerika yang selama ini telah dirampas.

Indonesia telah mulai memperbaiki hubungan diplomatik dengan Singapura, dan ini bisa jadi merupakan bagian dari upaya untuk meredakan ketegangan dengan Malaysia, meskipun secara publik Konfrontasi tetap dilanjutkan. Pemerintah Singapura menyambut hangat keputusan pemerintah Indonesia untuk memperbaiki hubungan dan telah meyakinkan pemerintah Malaysia bahwa pemerintah Singapura akan selalu berkonsultasi dengan Malaysia jika ada hal-hal yang menyangkut kepentingan pertahanan Malaysia. Pada awalnya reaksi dari Tunku Abdulrahman cukup tenang. Namun demikian dalam perkembangan selanjutnya dia mengecam normalisasi hubungan itu sebagai langkah untuk meningkatkan politik Konfrontasi Indonesia. Lee Quan Yew melakukan pendekatan pribadi kepada Tunku dan menyatakan bahwa normalisasi itu tidak akan digunakan untuk melawan kepentingan Malaysia. Tunku tetap saja curiga atas pengaruh Sukarno dalam politik Konfrontasi. Sikap curiga Tunku ini telah memperlemah posisinya yang semula sebenarnya dapat membantu mengurangi ketegangan Indonesia-Malaysia. Sementara itu Menteri Luar Negeri Adam Malik tetap melanjutkan rencananya agar Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB, serta mendorong Indonesia bergabung kembali dengan lembaga-lembaga internasional lain, meskipun secara publik Sukarno menyangkal gagasan itu.

Di dalam negeri, upaya terus-menerus untuk menyingkirkan orang-orang pro-Komunis dari institusi-institusi pemerintah telah disertai dengan upaya yang terorganisir untuk menyerang orang-orang keturunan Cina di Indonesia. Perusakan dan pembakaran atas Kedutaan Besar Cina Komunis berikut tekanan kepada penduduk keturunan Cina tanpa diikuti tindakan tegas oleh pemerintah Indonesia memberi kesan bahwa para pemimpin Indonesia sedang berusaha memaksa Peking (Beijing) untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Peristiwa-peristiwa itu merupakan petunjuk yang kuat akan adanya gerakan yang sekarang sedang berlangsung secara luas dalam rangka membalik kebijakan-kebijakan Sukarno. Sukarno terus diisolasi dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan-keputusan pemerintahan Soeharto. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian usaha militer untuk melucuti kekuasaan Sukarno akhirnya berhasil.

Atas ini semua kita tetap mengambil sikap hati-hati untuk tidak cepat-cepat merencanakan pemberian bantuan yang besar, sementara kita tetap memonitor langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia untuk merasionalisasi kebijakan-kebijakan ekonominya. Kita tetap berpandangan bahwa normalisasi bantuan yang terlalu cepat justru dapat menghambat reformasi ekonomi yang sekarang sedang dibutuhkan oleh Indonesia.

D.W. Ropä

3. Inggris Dianjurkan Tidak Membantu Dulu

*Bak gayung lain yang juga turut bersambut, pengiriman bantuan Amerika untuk Indonesia rupa-rupanya mendorong perintah Inggris untuk juga berencana mengirim bantuan ke Indonesia, berupa hibah langsung senilai satu juta poundsterling. Sayangnya bantuan itu mau dikaitkan dengan desakan untuk diturunkannya intensitas serangan Indonesia atas Malaysia dalam rangka Konfrontasi. Ketika dimintai pertimbangan atas rencana tersebut Washington menyatakan tidak setuju. Alasannya, pengiriman bantuan yang dikaitkan dengan tuntutan tertentu justru akan mempersulit semua pihak, terutama jika hal itu nantinya menjadi pengetahuan publik. ****

TELEGRAM DARI DEPARTEMEN LUAR NEGERI (WASHINGTON) KE KEDUBES AMERIKA SERIKAT (JAKARTA)²

1. Menteri Inggris (Stewart) mengatakan kepada Bundy hari ini bahwa pemerintah Inggris sedang mempertimbangkan untuk menawarkan kepada pemerintah Indonesia satu juta poundsterling dalam bentuk bantuan hibah langsung. Menurut rencana Kedubes Inggris akan menyampaikan tawaran itu kepada Adam Malik, dan akan mengatakan bahwa uang tersebut akan disampaikan secara bertahap, sekaligus bahwa uang itu tidak terikat dengan maksud tertentu. Pada saat yang sama pemerintah Inggris berharap atas membaiknya hubungan Inggris-Indonesia. Secara lebih khusus Kedubes Inggris akan menunjukkan bahwa pemerintah Inggris mengharapkan menurunnya Konfrontasi militer dengan Malaysia khususnya di perbatasan Kalimantan Utara. Maksud sebenarnya dari pemerintah Inggris (meskipun Adam Malik tidak akan diberitahu)

² Telegram dari Departemen Luar Negeri (Washington) ke Kedubes Amerika (Jakarta), 20 April 1966. Status: Rahasia/Segera. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #80.

adalah bahwa jika penurunan Konfrontasi itu tidak dilakukan pemberian bantuan tidak akan diteruskan. Stewart mengatakan bahwa pemerintah Inggris telah mengadakan konsultasi dengan negara-negara New Commonwealth dan Amerika Serikat. New Zealand tidak keberatan, tetapi Australia belum memberikan jawaban. Dalam konsultasi itu pertanyaan-pertanyaan dipertimbangkan secara matang. Stewart setuju bahwa jika transaksi dengan Indonesia itu terjadi, hal itu tidak akan dapat dirahasiakan dan akan menjadi pengetahuan umum setidaknya di Inggris. Dia meminta komentar dari kita.

2. Kita katakan kepada Stewart, reaksi awal kita adalah bahwa rencana itu cukup berwawasan ke depan, tetapi kita melihat akan adanya kesulitan dalam melaksanakannya. Khususnya kalau nanti berita mengenai hibah itu menjadi publik akan muncul pertanyaan kepada pemerintah Inggris dari Parlemen mengenai imbalan yang didapat pemerintah Inggris dari pemberian hibah tersebut. Pertanyaan macam itu akan sulit dijawab tanpa secara publik menyatakan bahwa Indonesia akan memberikan konsesi berkaitan dengan masalah perbatasan Kalimantan Utara.
3. Pengungkapan berita mengenai hibah dapat dipastikan akan menimbulkan kemarahan di kalangan media massa Malaysia dan akan membuat Tunku Abdulrahman dalam posisi yang sulit. Bahkan kalau Tunku sudah dibujuk untuk menerima alasan pemberian hibah (tapi hal ini meragukan), Tunku akan terpaksa membela diri melawan tuduhan bahwa Inggris telah menjual kepentingan Malaysia. Apa yang dia bisa lakukan hanyalah mengatakan kepada pers bahwa bantuan Inggris itu diberikan atas jaminan bahwa Indonesia mengurangi serangan militernya. Kita memang berharap bahwa Tunku akan berkata demikian.

4. Mengungkapkan semuanya secara blak-blakan sangat mungkin akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan di Jakarta. Reaksi Indonesia yang emosional akan muncul dengan tuduhan bahwa Inggris telah mencoba membeli kebijakan luar negeri Indonesia, dan jika Adam Malik telah menerima tawaran Inggris itu dia akan menanggung dampak negatif yang luar biasa. Jika semuanya itu benar, hasil transaksi antara Inggris dan Indonesia itu akan merupakan langkah mundur dan bukan langkah maju dalam upaya membangun hubungan Inggris-Indonesia secara rasional.
5. Kita mengusulkan bahwa cara terbaik untuk menangani masalah ini adalah dengan cara Kedubes Inggris menawarkan kepada Adam Malik satu juta poundsterling sebagai bantuan terkait dengan langkanya beras (atau masalah kerusakan akibat banjir di Solo baru-baru ini), dan terserah kepada pihak Indonesia untuk ambil keputusan sendiri berkaitan dengan masalah Konfrontasi Malaysia. Kita percaya bahwa Indonesia akan menarik kesimpulan secara tepat. Meskipun demikian kita mesti hati-hati terhadap Indonesia karena dalam transaksi timbal-balik sering kali pihak Indonesia tidak menepati janji. Kita menekankan bahwa apa yang disebut di depan itu merupakan reaksi awal. Perlu pembicaraan lebih lanjut dengan Stewart tentang masalah ini.
6. Setelah melakukan evaluasi lebih jauh kita cenderung untuk *tidak* menyetujui rencana transaksi itu. Jika Adam Malik menerima, akibatnya akan muncul protes dari pers Malaysia dan mungkin pers Inggris juga, dan akan timbul kesan publik bahwa pemerintah Inggris sedang menuap pemerintah Indonesia berkaitan dengan masalah konfrontasi. Jika itu terjadi, akan berakibat timbulnya dampak negatif di Jakarta dan dapat mendorong pemerintah Indo-

- nesia untuk menyimpulkan bahwa pemerintah harus meningkatkan operasi militer guna membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar. Di lain pihak, jika Adam Malik menolak tawaran itu, ia akan merasa bahwa pemerintah Inggris sedang berusaha menjebak dia dan rekan-rekannya. Jika itu yang terjadi ia akan merasa tersinggung (dan bukan bersyukur) atas tawaran Inggris itu.
7. Mohon komentarnya, sementara saya bermaksud mengulangi tanggapan kita di atas kepada Stewart pada hari Kamis, waktu Washington.

Ball



Dua kekuasaan, dua orientasi. Presiden Sukarno dan Jenderal Soeharto pada suatu rapat resmi di Istana Bogor, 21 Nopember 1965.
(Sumber: Deppen RI)

BAB 5

MEI 1966: SOEHARTO TAK MAU SEBUT NAMA BUNG KARNO

1. Pengantar

Dalam kaitan dengan Konfrontasi melawan Malaysia, bulan Mei 1966 merupakan bulan khusus, karena pada bulan ini Menlu Indonesia Adam Malik bertemu dengan Menlu Malaysia Tun Abdul Razak di Bangkok guna secara resmi mengumumkan berakhirnya Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Pada bulan ini pula pemerintah Jepang mengirimkan bantuan darurat untuk Indonesia.

Di dalam negeri, tampaknya kedudukan Jenderal Soeharto dua bulan setelah Supersemar makin mantab. Hal itu dibaca dengan jelas oleh Dubes A.S. Marshall Green ketika bertemu dengan Soeharto pada tanggal 26 Mei 1966. Dilaporkan oleh Green, Soeharto bertemu dengannya diwarnai oleh rasa percaya diri dan antusiasme yang tinggi sehingga Soeharto mampu mendominasi percakapan yang berlangsung selama satu jam 20 menit itu.

Dikatakan oleh Green, Soeharto cukup khawatir dengan situasi konflik di Vietnam dan berharap konflik itu dapat segera diakhiri. Soeharto membuat Amerika senang ketika ia mengungkapkan pandangannya mengenai Cina Komunis sebagai “musuh” bersama dan bukan lagi sebagai kawan seperti ketika Bung Kurni masih berkuasa penuh. Pada saat yang sama Soeharto juga meminta

bantuan dari Amerika, khususnya bantuan militer, seperti misalnya kapal pengangkut tank atau LST.

Bagi Green, naiknya kekuasaan dan rasa percaya diri Soeharto itu tercermin dengan gamblang ketika dalam seluruh pembicaraan itu Soeharto menekankan bahwa yang mempersatukan Indonesia itu Pancasila—artinya, bukan Sukarno. Lebih mencolok lagi ketika dalam pembicaraan yang lebih dari satu jam itu Soeharto menolak untuk menyebut nama Bung Karno. “Dalam seluruh pembicaraan tidak sekalipun ia [Soeharto] menyebutkan nama Sukarno, baik secara langsung maupun tak langsung,” begitu tutur Green. Bisa ditebak tentu tindakan macam itu didasari oleh pertimbangan tertentu dari pihak penerima Supersemar itu. Yang jelas sepanjang bulan Mei berlangsung makin naiknya kuasa dan pengaruh Soeharto, dan bersamaan dengan itu makin merosotnya pengaruh dan kekuasaan Bung Karno sebagai Presiden.

2. Membengkaknya Hutang Indonesia

*Dalam dokumen yang dikeluarkan oleh CIA berikut ini, kelihatan bahwa Indonesia sedang dililit hutang, tanpa ada kepastian bagaimana jalan keluarnya. Satu-satunya cara pokok yang mau ditempuh adalah mencoba melobi negara-negara kreditor agar mau membicarakan “penjadwalan kembali” (artinya menunda) pembayaran hutang Indonesia. Dikatakan dalam laporan CIA yang terbit bulan Mei 1966 ini antara lain, sampai dengan tahun 1962 sebenarnya Indonesia rajin membayar hutang. Namun setelah itu pembayaran hutang hampir selalu macet. Sampai dengan tanggal 1 Desember 1965 Indonesia gagal membayar hutang kepada 12 negara Barat. Belum terhitung hutang pada negara-negara Timur seperti Uni Soviet, Jerman Timur, Romania, dan yang lain. Dikatakan, sampai akhir 1965 jumlah total hutang Indonesia mencapai US\$ 2,5 milyar.****

Central Intelligence Agency
Washington, D.C. 20505

25 Mei 1966

MEMORANDUM UNTUK: Mr Bromley Smith
Staf Gedung Putih
Gedung Putih
Washington, D.C.

Perihal: Krisis Hutang Luar Negeri Indonesia¹

1. Laporan terlampir dibuat untuk memenuhi permintaan dari Agency for International Development [AID], namun saya kira laporan ini juga akan menarik dan berguna bagi Anda. Saya juga mengirimkan kopiannya langsung kepada Francis Bator.
2. Berdasarkan laporan yang ada, hutang Indonesia yang belum terselesaikan kurang lebih mencapai total US\$2-1/2 miliar

¹ Memorandum untuk Broomley Smith, “Krisis Hutang Luar Negeri Indonesia”, 25 Mei 1966. Status: Rahasia. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. # 1588, #121.

pada akhir tahun 1965. Jatuh tempo pembayaran sejumlah US\$550 juta adalah tahun 1966 dan lebih dari US\$160 juta macet dan gagal dibayar pada Maret 1966. Indonesia mencoba untuk melakukan penjadwalan ulang atas hutang-hutangnya dan untuk mendapatkan kredit baru secara bilateral dan mungkin juga akan mendapatkan beberapa dana bantuan.

WILLIAM N.MORELL, JR.
Direktur Dinas Penelitian dan Pelaporan
(Office of Research and Reports)

Lampiran:

CIA/RR EM 66-18 (Hal Laporan)

KRISIS HUTANG LUAR NEGERI INDONESIA²

Ringkasan

Salah satu masalah ekonomi yang paling kritis bagi Indonesia adalah beban hutang luar negeri. Total hutang yang belum terselesaikan mencapai USUS\$2,5 miliar, dan kewajiban yang masih berlaku menuntut pembayaran sejumlah USUS\$550 juta selama tahun 1966. Terlebih lagi, lebih dari US\$160 juta saat ini macet. Untuk bisa mendapatkan solusi agar dapat keluar dari situasi ini, sebuah misi ekonomi sedang bersiap-siap untuk berangkat dan mengadakan perundingan dengan pemerintah Jepang dan negara-negara Eropa Barat mengenai perlunya penjadwalan-ulang pembayaran hutang dan kemungkinan

² Memorandum ini dibuat oleh Dinas Riset dan Laporan (Office of Research and Reports); estimasi dan kesimpulan yang disampaikan di sini adalah apa yang dapat diperkirakan oleh Direktorat Intelijen hingga 15 Mei 1966. Status: Rahasia/Tidak untuk disebarluaskan ke negara lain. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #1588.

perpanjangan kredit baru. Sebuah misi lain akan berangkat ke Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur. Sementara sejumlah negara Barat lebih memilih untuk melakukan negosiasi-negosiasi multilateral, Pemerintah Indonesia enggan untuk menempuh jalan multilateral dan lebih memilih untuk bernegosiasi secara bilateral. Pemerintah tampaknya berharap untuk mendapatkan penundaan selama tiga tahun untuk obligasi ekonomi jangka menengah dan jangka panjang, dan penundaan selama lima sampai delapan tahun untuk obligasi militer. Hal tersebut tampaknya merupakan perhitungan yang terlalu optimis, namun beberapa penjadwalan kembali mungkin bisa didapatkan dan bahkan beberapa kredit baru mungkin akan diperpanjang guna meringankan beban tekanan ekonomi.

1. Kegagalan Hutang Luar Negeri

Sampai dengan awal tahun 1962 Indonesia selalu menyelesaikan kewajiban finansial pada waktunya. Sejak saat itu kesulitan-kesulitan membayar hutang terus memburuk, dan meskipun sudah ada penjadwalan hutang tetap saja terjadi kegagalan pembayaran hutang, baik terhadap para kreditor Negara-negara Komunis maupun Negara Barat. Jumlah total kredit macet dari negara Komunis mencapai kurang lebih US\$110 juta dan ini merupakan porsi terbesar dalam total kredit macet. Sepanjang tahun 1964 dan 1965, Indonesia telah mampu membujuk beberapa negara, khususnya Jepang, Jerman Barat, dan Belanda, untuk menerima penjadwalan ulang beberapa jenis hutang-hutang dan dengan cara ini dapat menjaga reputasi mereka untuk “tidak pernah mengingkari pembayaran hutang” pada negara-negara Barat (*Free World*). Akan tetapi sejak tanggal 1 Desember 1965, Indonesia telah gagal membayar hutang pada sedikitnya dua belas Negara Barat. Sampai dengan bulan Maret 1966, pembayaran yang macet baik kepada Negara Barat maupun Negara-negara Komunis mencapai US\$160 juta dan menjadi semakin bertambah

setiap harinya. Itupun belum semuanya. Masih ada pembayaran jangka pendek berkala terhadap obligasi asing seiring dengan tersedianya valuta asing. Jepang, Jerman, dan Belanda adalah negara non-Komunis yang paling banyak mengalami obligasi macet tersebut.

2. Hutang Jangka-Panjang dan Jangka-Menengah

Sampai dengan akhir 1965 hutang jangka panjang dan jangka menengah Indonesia mencapai US\$2,2 miliar. Negara kreditor terbesar adalah Uni Soviet dengan total kredit sebesar US\$992 juta dan sebagian besar dalam bentuk pengadaan alat-alat dan pelatihan militer. Hutang jangka-menengah dan jangka-panjang sesuai dengan negara kreditor sampai dengan November 1965 ditunjukkan dalam Tabel 1. Jatuh tempo pembayaran tahun 1965 pada hutang jangka menengah dan jangka panjang Indonesia seluruhnya kurang lebih US\$210 juta. Sekitar bulan Januari sampai November, hanya sekitar US\$104 juta dari hutang tersebut yang telah dibayarkan sehingga timbul kredit macet sejumlah US\$106 juta selama 1965. Lebih dari itu, kredit macet dari tahun 1964 yang berjumlah kira-kira US\$45 juta telah dimasukkan ke dalam total kredit macet bulan Desember 1965 yang berjumlah kira-kira US\$150 juta.

3. Hutang Jangka Pendek

Hutang jangka pendek Indonesia sampai bulan November 1965 dilaporkan kira-kira berjumlah US\$325 juta yang kiranya harus dibayarkan dalam waktu satu tahun. Informasi tentang obligasi yang dikeluarkan oleh negara kreditor hanya berlaku sampai September 1965, dan itu dapat dilihat dalam Tabel 2. Beberapa pembayaran hutang kembali mungkin telah dilakukan sejak itu, namun hutang baru telah terjadi lagi setidaknya selama bulan November, dan total hutang jangka pendek mungkin tidak kurang

dari US\$325 juta. Walaupun jumlah tersebut di atas diperoleh dari data Bank Indonesia, pemerintah Indonesia telah mengumumkan secara publik jumlah yang lebih rendah dan karena tampaknya pemerintah tidak menyadari betapa seriusnya situasi hutang yang sebenarnya. Pada bulan Februari dan Maret, Rachmat Saleh, Deputi Direktur Bank Indonesia dan Umarjadi, yang waktu itu Deputi IV Menteri Luar Negeri, mengumumkan bahwa hutang jangka pendek Indonesia adalah antara US\$120 juta dan US\$130 juta.

Tabel 1
Hutang Jangka Menengah dan Jangka Panjang
Indonesia sampai Bulan November 1965

(US\$ Juta)

Dana Moneter Internasional	102.3U a/		
Negara Barat		Negara-negara Komunis	
Jepang	187.1	Uni Soviet	992.4
Amerika Serikat	170.9	Yugoslavia	95.0
Jerman Barat	138.9	Polandia	94.6
Perancis	107.1	Jerman Timur	60.2
Italia	98.5	Cekoslowakia	58.2
Inggris	36.9	Hungaria	17.4
Belanda	20.6	Rumania	15.0
India	8.5	Cina	13.9
Austria	6.9	Bulgaria	1.0
Swedia	3.1		
Republik Uni Arab	3.0		
Swiss	0.5	Total	<u>2.232.0</u>

a. Gambaran netto. Kontribusi emas murni Indonesia telah mengimbangi sebagian dari jumlah tersebut dengan membayar obligasi sejumlah US\$63.5 juta.

Tabel 2
Hutang Jangka Pendek Indonesia
sampai dengan September 1965

(US\$ Juta)

Negara Non-Komunis	Negara Komunis
Jepang	110.2
Amerika Serikat	Cekoslowakia 15.2
Belanda	Uni Soviet 15.0
Pakistan	Yugoslakia 9.5
Jerman Barat	Polandia 5.0
Italia	Jerman Timur 2.8
Swiss	Hungaria 2.3
Perancis	Bulgaria 1.6
Hongkong	Rumania 0.8
India	Lain-lain Negl.
Zanzibar	
Filipina	
Belgia	
Norwegia	
Austria	
Finlandia	
Denmark	
Irak	
Swedia	
Republik Uni Arab	
Australia	
Kanada	
Meksiko	
	Total 297.5

3. Soeharto Tak Lagi Sebut Nama Bung Karno

Pada tanggal 26 Mei Jenderal Soeharto bertemu dengan Dubes Green. Dalam pertemuan itu dilaporkan Soeharto tampak gembira karena telah berhasil menumpas orang-orang Komunis. Pada saat itu ia juga mengungkapkan masih banyaknya masalah lain, termasuk masalah kemiskinan. Dan dalam upaya mengatasi kemiskinan ini Soeharto membutuhkan bantuan Amerika Serikat. Dalam laporan Green tanggal 27 Mei 1966 ini juga dikatakan bahwa meskipun bicara tentang situasi Indonesia selama satu jam 20 menit, tidak satu kalipun Soeharto menyebut nama Bung Karno. Ini mencerminkan pandangan Soeharto bahwa Bung Karno tidak lagi penting bagi kehidupan politik Indonesia.

*Atas sikap Soeharto ini tentu Amerika merasa senang. Apalagi Soeharto juga mengatakan bahwa Indonesia akan mengakhiri Konfrontasi dan memandang Cina Komunis sebagai "musuh."****

TELEGRAM DARI KEDUTAAN BESAR AMERIKA SERIKAT (JAKARTA) UNTUK DEPARTEMEN LUAR NEGERI (WASHINGTON)³

1. Pertemuan saya dengan Jenderal Soeharto pada tanggal 26 Mei yang sedianya hanya berlangsung satu jam ternyata molor hingga satu jam 20 menit. Selama pembicaraan itu Soeharto mendominasi hampir setiap topik yang dibahas. Sebenarnya Soeharto paham bahasa Inggris kalau kita ngomongnya pelan dan jelas (sebagaimana yang saya usahakan). Meskipun demikian dia *ngotot* untuk menggunakan penerjemah. Padahal kalau tanpa

³ Telegram dari Kedutaan Besar Amerika Serikat (Jakarta) untuk Departemen Luar Negeri (Washington), 27 Mei 1966. Status: Rahasia Negara. *Foreign Relations of the United States, 1964-1968, Vol XXVI. Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines* (Washington: United States Government Printing Office, 2001), hlm. 431-433. National Archives and Records Administration (Badan Arsip dan Dokumen Nasional), RG 59, Central Files 1964-1966, POL INDON-US. Diulang untuk Bangkok, Canberra, CINCPAC untuk POLAD, Kuala Lumpur, London, Manila, Saigon, Singapura, dan DOD.

penerjemah sebenarnya akan ada lebih banyak masalah yang bisa kita bahas.

2. Hubungan AS-Indonesia. Soeharto, yang tampak gembira dan penuh percaya diri, berbicara tentang keberhasilannya dalam menumpas orang-orang Komunis beserta elemen-elemen Gestapu lainnya, namun menurutnya masih banyak hal yang harus dikerjakan. Masih banyak kader-kader Komunis belum tertangkap. Pemerintahannya telah menetapkan untuk menghapuskan Komunisme, mengupayakan ketertiban dan keamanan, dan menegakkan Pancasila. Oleh Soeharto Pancasila disebut berkali-kali sebagai falsafah dasar dan faktor pemersatu rakyat Indonesia. Bahaya terbesar yang kini dihadapi Indonesia adalah masalah ekonomi. Orang hanya perlu melakukan perjalanan sepanjang Jawa Tengah dan Jawa Timur, lanjutnya, untuk bisa melihat sendiri betapa miskinnya kedua wilayah tersebut (di beberapa tempat orang-orang menanam padi di wadah-wadah yang terbuat dari tanah liat hanya untuk bisa mendapatkan tambahan beras tiap tahunnya). Jika pemerintah tidak melakukan sesuatu untuk mengurangi penderitaan orang-orang tersebut, ada kemungkinan Komunisme akan bangkit kembali. Pada poin ini Soeharto lantas menguraikan langkah-langkah yang mau ia tempuh guna mengurangi kepadatan penduduk di Jawa dan meningkatkan kemampuan ekspor Indonesia. Caranya adalah dengan memindahkan penduduk dari Jawa ke Kalimantan agar di sana mereka dapat bertani dan mengembangkan industri kehutanan. Proyek ini pernah dilontarkan oleh Jenderal Tasmin sebelumnya [DefAtt], dan sudah pernah kami lapor. Sebagaimana halnya Tasmin, Soeharto juga berusaha untuk mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat untuk mendukung proyek tersebut, dan lebih jauh lagi ia bahkan menyampaikan harapannya bahwa kita dapat menyediakan beberapa LST (*Tank Landing Ship*) karena membangun sebuah fasilitas pelabuhan akan sangat membutuhkan waktu dan biaya.

3. Saya menjawab bahwa ada banyak hal yang perlu untuk dipertimbangkan oleh kedua belah pihak untuk menanggapi usulan tersebut. *Pertama-tama* adanya permasalahan jika mau memulai kembali program bantuan Amerika Serikat untuk Indonesia: selama ini pemerintahan Indonesia belum pernah mengajukan permohonan bantuan kepada AS, dan jika hal itu terjadi, pemerintah AS harus meminta persetujuan Kongres untuk program bantuan ke Indonesia. Tentu saja akan penting bagi kedua belah pihak jika bantuan untuk Indonesia ada kaitannya dengan upaya meningkatkan hubungan antara kedua negara serta upaya untuk memecahkan masalah-masalah perekonomian di Indonesia. *Kedua*, kedua belah pihak harus mempertimbangkan bentuk-bentuk bantuan apa yang kiranya paling dibutuhkan oleh Indonesia. Saya sendiri amat prihatin dengan masalah kemiskinan di Jawa. Kita pernah menyalurkan bantuan dengan baik, berupa bantuan bahan makanan dengan imbalan proyek-proyek tertentu. Tapi lalu Sukarno mengatakan “Persetan dengan bantuanmu!” (*Go to hell with your aid!*). Maka proyek bantuan itu pun terhenti. Menurut perkiraan saya, proyek-proyek semacam ini kemungkinan akan sangat membantu dalam penyelesaian masalah-masalah yang ia sebutkan. Berkaitan dengan masalah Kalimantan, saya usulkan supaya dia melihat kemungkinan untuk mencari bantuan swasta asing dalam rangka pembukaan hutan dan industri-industri lainnya. Mungkin bantuan luar negeri yang lebih besar bisa diperoleh dari kalangan swasta daripada dari lingkungan pemerintah.

4. Soeharto mengatakan bahwa peluang untuk memperluas industri pertanian di Jawa Tengah dan Jawa Timur sangat terbatas. Saya sempat mempertanyakan hal itu, tetapi juga sempat menyampaikan pentingnya pembangunan di Kalimantan dan pulau-pulau luar lainnya. Kami sepakat bahwa hal-hal tersebut perlu kami bicarakan lebih lanjut.

5. Membendung pengaruh Cina melalui Kerjasama Asia Tenggara. Pembicaraan tentang topik ini hampir seluruhnya berkisar pada masalah Konfrontasi, di mana Soeharto berusaha keras mempertahankan kebijakan Indonesia sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Pemerintah Indonesia sejak dulu, namun berakhir dengan pernyataan tegas bahwa Indonesia akan mengakhiri Konfrontasi. Dia berharap bahwa perundingan Bangkok akan membawa hasil yang memuaskan sesuai dengan Persetujuan Manila, tetapi juga mengingatkan bahwa hal ini membutuhkan kesadaran dari kedua belah pihak yang bersengketa untuk saling berkorban. Satu-satunya alasan yang diberikan oleh Soeharto mengenai alasan pemerintah Indonesia mau mengakhiri Konfrontasi adalah supaya bisa membina hubungan lebih baik dengan negara-negara tetangga, dan dengan demikian akan mampu turut membendung pengaruh Cina Komunis. Ia menyampaikan pendapatnya itu secara meyakinkan.

6. Saya mengatakan, kami menyambut baik upaya untuk mengakhiri Konfrontasi sesuai dengan alasan-alasan yang ia kemukakan maupun alasan-alasan lain. Tentang Beijing (Peking), bahkan sejak akhir musim panas 1963 sebenarnya Beijing mendukung kebijakan Konfrontasi yang dilancarkan oleh Indonesia, karena Konfrontasi dapat memecah-belah dan melemahkan wilayah yang sebenarnya Beijing ingin kuasai. Saya menyinggung laporan intel tentang Chen Yi, yang dalam kunjungannya ke Indonesia pada bulan Agustus 1965 telah mendesak Indonesia untuk melanjutkan Konfrontasi dan untuk tidak mau mengakui pembentukan Singapura dan Malaysia. Tampaknya waktu itu Beijing takut bahwa Indonesia merasa lelah dengan kebijakan Konfrontasi, padahal Beijing ingin mengisolasi Singapura dari Malaysia dan Indonesia dalam rangka melemahkan perekonomiannya sambil mendorong kebangkitan kembali Barisan Sosialis. Saya katakan Soeharto dihormati di seluruh dunia berkat usah-usahanya untuk membangun hubungan baik dengan seluruh

negara-negara tetangga. Hal ini akan berdampak positif pada kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, dan strategis Indonesia. Menurut saya jangan ada satu pun hambatan yang akan dibiarkan mengganggu pencapaian kestabilan yang sesuai dengan kepentingan Indonesia dan yang sangat bertentangan dengan maksud-maksud Beijing.

7. Upaya untuk Mengakhiri Perang Vietnam.

Soeharto hanya berbicara secara singkat mengenai masalah ini, dengan menekankan pada keinginan Pemerintah Indonesia supaya segera diakhirinya perang di Vietnam. Ia mengatakan bahwa misi Indonesia ke Hanoi tahun lalu telah melaporkan bahwa sekarang ini Hanoi terbagi dua antara membangun Komunisme yang berorientasi ke Beijing dan menggalang nasionalisme Vietnam. Soeharto menanyakan pendapat saya tentang kemungkinan adanya penyelesaian masalah Vietnam secara damai.

8. Saya menunjukkan bagaimana Beijing berusaha supaya perang itu terus berlanjut dengan maksud supaya perekonomian Vietnam lemah dan dengan begitu makin besarlah kemungkinan bagi Cina untuk menguasai wilayah tersebut. Beijing juga berusaha supaya Amerika kalah secara memalukan dan berusaha mengusir Amerika Serikat di Asia Tenggara supaya nantinya Cina bisa gantian berkuasa. Saya katakan, Uni Soviet tidak akan bisa membantu dalam mengupayakan perdamaian. Meskipun mereka mungkin menginginkan berakhirnya perang di Vietnam, tetapi mereka takut akan dicap lemah dan revisionis oleh Cina Komunis. Uni Soviet takut bahwa kalau sampai tuduhan itu muncul, hal itu akan melemahkan posisinya di mata partai-partai Komunis dunia. Kunci perdamaian ada di tangan Hanoi, dan telah menjadi kebijakan kita untuk membuat Hanoi tertarik akan perdamaian, sekaligus menyadarkan Hanoi bahwa sikap agresif akan mahal harganya. Selama ini kita hanya mengerahkan kekuatan secara terbatas dalam rangka mengakhiri masalah Vietnam. Akan tetapi kita juga tak akan segan-segan menggunakan kekuatan yang lebih

besar untuk menjunjung tinggi komitmen kita dalam melindungi Vietnam Selatan dan negara-negara lainnya dari agresi Vietnam Utara yang Komunis. Saya juga menjelaskan secara singkat peristiwa-peristiwa yang berlangsung di Vietnam Selatan akhir-akhir ini berdasarkan laporan yang kami terima serta informasi-informasi lainnya.

9. Soeharto mengulangi harapan pemerintahannya mengenai pentingnya perdamaian di Vietnam dan di seluruh Asia Tenggara. Saya mengatakan, saya berharap pemerintahannya dapat pula menyampaikan hal itu kepada Hanoi, karena semuanya terserah kepada Hanoi untuk menanggapi sejumlah inisiatif yang telah disampaikan oleh Amerika Serikat, yang juga didukung oleh negara-negara di seluruh dunia.

10. Soeharto sekali lagi mengatakan harapannya bahwa negosiasi-negosiasi dalam rangka mengakhiri Konfrontasi akan berhasil, supaya dengan begitu terbukalah jalan bagi Indonesia untuk membina hubungan yang lebih baik dengan negara-negara tetangganya termasuk Thailand dan Laos. Saya menyampaikan harapan bahwa dia dan saya dapat terus bekerja sama dalam hal ini. Setiap saat saya diperlukan, saya akan bersedia untuk memberikan informasi atau bahan-bahan penjelasan tertentu. Sebaliknya saya katakan saya tertarik untuk mendengarkan pandangan-pandangannya, kapan pun ia bersedia.

11. *Komentar:* Penting dicatat, Soeharto menekankan bahwa pemersatu Indonesia itu adalah Pancasila. Artinya, bukan Sukarnolah yang seharusnya menjadi kekuatan pemersatu Indonesia. Dalam seluruh pembicaraan tidak sekalipun ia menyebutkan nama Sukarno, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya cukup kecewa bahwa dia begitu banyak bicara sambil menekankan betapa penting proyeknya di Kalimantan. Padahal seharusnya ia tahu pandangan saya tentang hal ini, karena saya telah membicarakannya dengan Malik sebelumnya. Namun bagaimanapun juga proyek ini adalah proyek yang pal-

ing dekat di hati Soeharto, dan mengingat Soeharto adalah seorang tokoh kunci di Indonesia, kita harus dapat mengantisipasi kemungkinan adanya desakan dari pihak Soeharto agar kita memberinya bantuan untuk proyek ini di masa depan.

12. Secara umum pembicaraan dengan Soeharto itu amat berguna. Yang paling menyentuh adalah kesadaran Soeharto mengenai ancaman Beijing bagi Asia Tenggara. Sepanjang pembicaraan ia memandang Cina sebagai “musuh”. Hal ini tidak berarti bahwa Indonesia berkeinginan untuk meninggalkan politik non-bloknya. Tapi setidaknya hal itu mencerminkan keinginan Indonesia untuk menjalin hubungan yang lebih luas dengan negara-negara yang kiranya akan dapat membantunya secara strategis maupun ekonomis.

Green



Adam Malik, salah satu tokoh kunci dalam reorientasi politik Indonesia.
(sumber: Deppen RI)

BAB 6

JUNI 1966: ADAM MALIK MINTA BANTUAN AS

1. Pengantar

Bulan Juni ini terasa khusus, karena pada tanggal 20 bulan ini digelar Sidang Umum MPRS IV di Istora Senayan. Sidang itu sendiri baru berakhir pada tanggal 6 Juli. Untuk Sidang Umum kali ini Soeharto mendesakkan sebuah agenda, yakni agar MPRS mau mengukuhkan Supersemar menjadi Ketetapan MPR, dan dengan demikian tak akan dapat dicabut atau diubah oleh Bung Karno.

Dalam Sidang Umum MPRS ini Bung Karno juga diminta berpidato guna mempertanggungjawabkan apa yang terjadi di seputar 1965/66. Bung Karno menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan tanggung jawab, sekaligus menghimpun dukungan politik melalui pidatonya. Pidato itu ia beri judul *Nawaksara*. Sudah setengah bisa ditebak, MPRS menolak pidato pertanggung jawaban itu dan mendesak supaya diperbaiki. Namun demikian, ketika Bung Karno menyampaikan pidato perbaikan tersebut, MPRS juga menolak.

Di luar dugaan Bung Karno, ternyata SU MPRS juga mencabut gelar “Presiden Seumur Hidup” dari tangan Bung Karno. Pada saat yang sama, SU MPRS justru setuju untuk menetapkan naskah Supersemar sebagai TAP MPRS. Lahirlah TAP MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Super-semar. Dengan ditetapkannya Supersemar sebagai Ketetapan MPRS, makin menipislah kekuasaan Bung

Karno untuk bisa mencegah berbagai tindakan politis yang dilakukan atas nama surat tersebut. Ia pun tak akan dapat lagi mencabut surat perintah itu.

Pada bulan Juni ini Adam Malik mengirim surat kepada Presiden AS Lyndon Johnson guna meminta bantuan kepada Amerika Serikat. Sementara itu Sultan Hamengku Buwono IX mengirim surat serupa kepada Wakil Presiden AS Hubert Humphrey. Melalui surat itu ia mengungkapkan keinginannya untuk memperbaiki hubungan antara Indonesia dan Amerika.

Sampai bulan ini tampaknya Amerika masih belum yakin betul berkaitan dengan soal pengiriman bantuan kepada Indonesia. Amerika merasa masih harus mempelajari situasi. Dalam rangka mempelajari situasi itu pulalah CIA memberikan gambaran mengenai kelompok-kelompok pemuda yang nantinya diharapkan akan menjadi kekuatan baru dalam dunia perpolitikan Indonesia.

2. Adam Malik Meminta Bantuan AS

*Dokumen berikut adalah surat dari Adam Malik kepada Presiden AS, Lyndon B. Johnson. Ia berterima kasih atas perhatian Johnson pada situasi di Indonesia, memohon bantuan kepada Amerika, sekaligus berharap supaya segera bisa bertemu secara pribadi dengan Sang Presiden.****

Jakarta, 6 Juni 1966¹

Tn. Presiden yang terhormat:

Melalui surat ini saya ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya atas pengertian Anda terhadap perjuangan kami.

Saya telah menyampaikan harapan-harapan kami melalui Tn. Dean Rusk.

Saya sungguh-sungguh berharap bahwa bantuan Anda terhadap pembangunan negeri kami akan memperkuat posisi kami di Asia demi kepentingan kita bersama.

Saya berharap untuk dapat bertemu secara pribadi dengan Anda dalam waktu dekat guna membicarakan kerjasama yang erat antara kedua negara kita.

Hormat kami,

(*Tanda tangan*)

Adam Malik

¹ Surat dari Adam Malik kepada Presiden Lyndon B. Johnson, 6 Juni 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, Gen CO 121 India 6/26/65.

3. Sultan Hamengku Buwono IX Mengharapkan Hubungan Baik dengan AS

*Pada hari yang sama, 6 Juni 1966, Sultan Hamengku Buwono IX juga beririm surat ke Wakil Presiden AS, Hubert Humphrey. Sebagaimana bisa kita lihat, dalam surat yang berkop “Perdana Menteri Republik Indonesia” itu antara lain Sultan mengungkapkan terima kasihnya atas pemahaman Humphrey terhadap perjuangan rakyat Indonesia, sekaligus mengharapkan hubungan yang semakin membaik antara Indonesia dan Amerika Serikat.****

Yang Mulia Hubert H. Humphrey²

Wakil Presiden Amerika Serikat

Capitol Hill

U.S.A.

Jakarta, 6 Juni 1966

Tn. Wakil Presiden yang terhormat,

Berkaitan dengan surat Tn. Adam Malik, saya juga ingin berterimakasih sedalam-dalamnya atas pemahaman Anda dan teman-teman Anda terhadap tujuan utama perjuangan rakyat saya.

Saya sungguh-sungguh berharap bahwa hubungan baik antara kedua negara kita akan terus berkembang demi kepentingan kita bersama.

Sultan Hamengku Buwono IX

² Surat dari Sultan Hamengku Buwono IX untuk Wakil Presiden AS Hubert H. Humphrey, 6 Juni 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, Gen CO 121 India 6/26/65. #12960.

4. Rencana AS Membantu Indonesia Pasca-Bung Karno

Dari banyak dokumen yang telah kita simak, baru dalam dokumen ini pihak Amerika menyebut angka jumlah korban Pembantaian Massal 1965. Itupun dikatakan sejumlah 300 ribu, yang berarti 200 ribu lebih rendah daripada jumlah korban yang biasanya disepakati di Indonesia, yakni setengah juta orang. Penyebutannya pun dilakukan secara dingin-dingin saja tanpa emosi, seakan mereka yang tewas itu merupakan tumbal yang tak terhindarkan bagi sebuah transisi kekuasaan dari Presiden Sukarno kepada kelompok-kelompok lain, khususnya militer. Sekali lagi di sini dikatakan pandangan bahwa Supersemar merupakan titik tolak bagi suatu "pemerintahan baru" (lihat paragraf no. 2) yang dinilai oleh AS telah bekerja "secara efektif meskipun belum sempurna".

*Tergambar pula dalam dokumen bertanggal 8 Juni 1966 ini apa kepentingan AS di Indonesia (paragraf no. 9) serta berbagai kemungkinan yang dapat dilakukan Amerika untuk mendukung dan membantu pemerintahan baru tersebut. Diakui dalam dokumen ini (paragraf no. 8) bahwa dalam transisi dari pemerintahan Sukarno ke pemerintahan baru yang terjadi pada bulan Maret 1966 itu Amerika tidak punya andil langsung selain dukungan tak langsung berupa komitmen AS untuk memerangi Komunisme di Viet-Nam. ****

MEMORANDUM DARI ASISTEN KHUSUS PRESIDEN (W.W. ROSTOW) KEPADA PRESIDEN JOHNSON³

Tn. Presiden:

Deplu menghendaki Anda membaca dokumen terlampir tentang Indonesia.

³ Memorandum dari Asisten Khusus Presiden (W.W. Rostow) Kepada Presiden Johnson, 8 Juni 1966. Status: Rahasia. *Foreign Relations of the United States, 1964-1968, Vol XXVI. Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines* (Washington: United States Government Printing Office, 2001), hlm. 434-440. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #119a. Ada indikasi bahwa Presiden telah membaca memorandum ini.

Laporan tersebut adalah rangkuman yang bagus mengenai perkembangan Indonesia dan kebijakan kita sejak tanggal 1 Oktober tahun lalu.

Pokok operasionalnya adalah hal ini (lihat hal. 4-6): apabila mereka menyingkirkan Sukarno dalam waktu dekat, kita mungkin menghadapi masalah bantuan sebagai berikut:

- Bantuan darurat lebih lanjut (P.L. 480).
- Penjadwalan hutang multilateral.
- Bantuan jangka panjang utama (sebagian besar berasal dari negara-negara Eropa, Jepang, multilateral, namun mungkin juga beberapa negara yang memiliki hubungan bilateral dengan Amerika).
- Kemungkinan, sejumlah kecil bantuan militer untuk pelatihan dan operasi karya.

Perencanaan ke depan mengenai hal ini telah berjalan dengan sangat baik, bahkan untuk tetap memberikan informasi kepada tokoh-tokoh kunci Kongres. Sejauh ini, mereka sangat mendukung.

Dewan ingin Anda diberitahu.

Tidak ada keputusan yang perlu diambil, kecuali Tn. Presiden ingin memberikan petunjuk.

Hormat kami,

W.W. Rostow

INDONESIA

Latar Belakang

1. Pada tanggal 1 Oktober Partai Komunis Indonesia menggabungkan dirinya dengan unsur-unsur Angkatan Bersenjata untuk mengambil-alih kekuasaan Pemerintah Indonesia yang kemudian dengan segera dihancurkan oleh Angkatan Darat (AD). Antara tanggal 1 Oktober sampai dengan pertengahan Maret

tahun ini [1966] Partai Komunis Indonesia dihabisi sebagai sebuah organisasi politik. Mungkin sebanyak lebih dari 300.000 orang Indonesia telah dibantai—dan menurut kami kebanyakan mereka memiliki kaitan dengan aparat Komunis. Secara bertahap kekuasaan politik kemudian berpindah dari Presiden Sukarno dan klik Istana kepada AD, partai-partai politik [agama tertentu], dan mahasiswa anti-Komunis.

2. Pada bulan Februari dan Maret Sukarno mencoba untuk meraih kembali kekuasaannya, tetapi dia tidak berhasil dan dipaksa untuk menerima Kabinet yang baru yang berada di bawah kendali militer dan politisi moderat. Pada akhir bulan Maret sebuah pemerintahan baru terbentuk, pemerintahan yang memfokuskan diri pada reformasi ekonomi dan sosial, ketika sebagian besar kebijakan luar negeri Sukarno telah ditolak atau diabaikan secara terang-terangan. Sementara itu Triumvirat yang terdiri dari Jenderal Soeharto, Sultan Yogyakarta dan Adam Malik mulai berkuasa secara efektif meskipun belum sempurna.

Situasi Terbaru-Dalam Negeri

3. Dalam dua bulan terakhir ini para pemimpin yang baru telah bergerak dengan sangat cepat untuk menyatukan kekuasaan mereka dan untuk memulai proses panjang membangun kembali sendi-sendi perekonomian Indonesia yang hampir seluruhnya lumpuh. Komunis tampaknya sudah habis kekuasaannya, tetapi Sukarno masih menjabat sebagai Presiden dan masih memiliki kemampuan untuk membatasi ruang gerak dan ikut campur tangan dalam aktivitas pemerintah yang baru. Walaupun berada dalam situasi demikian pemerintah telah memulai program-program pendorong ekspor yang baru, diawali dengan menyalurkan pendapatan dari ekspor melalui Bank Sentral dan paling tidak telah berhasil memperlambat kenaikan harga beras dan komoditas-komoditas dasar tertentu yang lainnya. Keadaan perekonomian masih dalam keadaan yang kacau dan para

pemimpin merasa bahwa jika mereka tidak berhasil menyediakan sandang pangan yang layak kepada masyarakat usaha mereka untuk membangun sebuah sistem politik yang rasional akan gagal.

Situasi Terbaru–Luar Negeri

4. Walaupun masih belum bisa leluasa bergerak karena keberadaan Sukarno, pemerintah yang baru telah membuat perubahan yang sangat mendasar dalam hal kebijakan luar negeri. Pemerintah telah mengumumkan kepada rakyat bahwa Indonesia bermaksud menggabungkan diri kembali dengan PBB dan organisasi-organisasi internasional lain dalam waktu dekat. Pemerintah juga telah menjajagi kemungkinan untuk mengakhiri politik konfrontasi melawan Malaysia dan Singapura. Selain itu Pemerintah yang baru juga telah berusaha untuk memulihkan hubungan kerjasama dengan negara-negara Barat dan Jepang, mau mengakhiri perilaku “nakal”-nya di Afrika, dan praktis sudah memutuskan hubungan dengan Cina Komunis. Minggu lalu di Bangkok, para wakil Indonesia mengungkapkan ketertarikannya untuk bergabung dalam kelompok terbuka negara-negara Asia Tenggara yang nantinya akan melibatkan Malaysia, Filipina, Thailand dan Indonesia.

5. Rezim yang baru telah berhasil mengakhiri sentimen anti-Amerika di Indonesia. Meskipun rezim tersebut secara publik tetap kritis terhadap kebijakan Amerika di Vietnam, Malik telah secara pribadi mengungkapkan pemahamannya atas posisi kita, dan telah terjadi aksi-aksi propaganda yang saling berlawanan antara Vietnam Utara dan Indonesia. Dalam aspek lain yang penting bagi AS, rezim yang baru ini telah memutuskan untuk tidak lagi mengambil alih fasilitas perusahaan-perusahaan minyak Amerika yang menghasilkan dan mengekspor minyak mentah. Lebih jauh tampaknya pemerintah yang baru itu malah mau bernegosiasi untuk membeli kilang minyak Amerika yang masih ada (STANVAC).

Kemungkinan Perkembangan Selanjutnya

6. Tujuan para pemimpin Pemerintahan yang baru adalah untuk terus mengurangi pengaruh Sukarno secara bertahap. Langkah berikut yang mau ditempuh adalah menggunakan mekanisme MPRS yang akan bersidang tiga minggu lagi, yakni pertengahan Juni mendatang. Para pemimpin bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk menghapus jabatan seumur hidup kepresidenan Sukarno, untuk menyingkirkan kekuasaan politis Sukarno hingga nantinya dia hanya akan menjadi pemimpin simbolik, untuk secara resmi mengakhiri Konfrontasi dengan Malaysia, dan secara umum ingin memposisikan badan legislatif yang ada agar mendukung pemerintahan yang baru. Dengan tercapainya hal-hal tersebut pemerintah yang baru berharap bahwa pada pertengahan Juli nanti dapat melantik kabinet kerja yang baru, yang bebas dari pengikut-pengikut Sukarno. Setelah itu pemerintah akan bergerak sepenuhnya untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Keputusan-keputusan mendasar lain seperti tanggal untuk bergabung dengan organisasi-organisasi internasional mungkin baru akan dilakukan setelah semua itu terlaksana.

7. Meskipun tampak adanya keinginan untuk menghentikan politik agresif di Asia Tenggara—rezim baru ini sadar bahwa faktor ini serta beberapa faktor lain merupakan faktor penting untuk menarik bantuan asing—kita tak boleh berharap terlalu banyak atas pemerintah yang baru ini, sebab dalam politik luar negeri mereka tetap akan berorientasi nasionalistik, non-blok dan pro-Asia/Afrika. Meskipun demikian, perbedaan antara politik pemerintahan yang baru dengan politik rezim Sukarno—atau rezim Komunis yang sebelum ini pernah menjadi salah satu kemungkinan—amatlah dramatis. Secara keseluruhan, perubahan politik yang berlangsung di Indonesia sekarang ini telah menjadi semacam “titik balik” yang sangat penting di Asia

Tenggara saat ini. Sekaligus telah menjadi contoh bagi banyak negara lain bagaimana kekuatan nasionalis telah berhasil menyingkirkan ancaman Komunis.

Kepentingan dan Tujuan AS

8. Minat dan kepentingan kita terhadap Indonesia sejak dulu adalah menjauhkan negara tersebut dari tangan Komunis dan menjauhkannya dari kekuasaan Cina Komunis. Sebagaimana sebelum Oktober 1965 rezim Sukarno terus bergerak ke arah Komunis dan semakin berada di bawah pengaruh Cina, Amerika tentu saja menjadi negara nomor satu yang dipandang sebagai musuh utama rezim Sukarno. Amerika dipandang sebagai satu-satunya ancaman bagi keamanan nasional Indonesia karena adanya kehadiran militer Amerika di Filipina, Laut China Selatan, Vietnam, dan Thailand. Pergeseran Indonesia ke posisi pro-Komunis—yang meningkat pesat pada tahun 1963—bisa dipastikan bertolak dari keyakinan bahwa Amerika Serikat sedang kehilangan pamornya di Asia Tenggara.

Sebaliknya, meskipun Amerika tidak memiliki peran langsung sedikitpun dalam pengambilalihan kekuasaan oleh kelompok anti-Komunis yang dimulai bulan Oktober lalu, kenyataan bahwa kita kokoh berdiri di Vietnam turut memberi semangat bagi kubu anti-Komunis. Dengan kata lain, tanpa sikap tegas kita [dalam menghadapi Komunisme di Vietnam], akan kecillah kemungkinan mereka untuk bergerak.

9. Kepentingan dasar kita pada Indonesia masih saja berkisar pada luas wilayahnya, penduduknya yang lebih dari 100.000.000, letak geografisnya yang strategis antara Samudera Pasifik dan Samodera Hindia, dan berada di antara Australia dan Asia. Selain itu juga pada potensinya sebagai negara yang produktif dan berpengaruh sehingga dapat menjadi kekuatan konstruktif dan pemersatu di kawasan Asia Tenggara. Tujuan kita adalah membantu berkembangnya sebuah rezim yang bertanggung

jawab, moderat dan berorientasi ekonomi. Hanya rezim yang begitu yang akan mampu mencegah munculnya ekstrimisme dan nantinya dapat memiliki peran penting di kawasan ini.

Tindakan yang Ingin Dicapai AS

10. Sampai pada akhir bulan Maret, kebijakan utama kita terhadap apa yang terjadi di Indonesia adalah: diam saja. Para pemimpin anti-Komunis tidak menginginkan dukungan dari kita. Kebijakan ini ternyata tepat, khususnya mengingat terjadinya pembantaian massal yang menyertai transisi kekuasaan itu (meskipun tampak sangat jelas bahwa pengambil-alihan kekuasaan oleh Komunis juga akan sama berdarahnya). Meskipun demikian, pelan-pelan sekarang kita menunjukkan dukungan kita pada rezim yang baru tersebut. Kita juga percaya bahwa kemungkinan naiknya rezim ini akan lebih kecil tanpa adanya sikap tegas kita di Vietnam dan kawasan Asia Tenggara. Hanya sebatas itu saja kita bisa mengklaim jasa kita bagi pergantian kekuasaan di Indonesia sekarang ini.

11. Sementara melanjutkan sikap umum ini, kita telah secara keseluruhan menjelaskan secara pribadi bahwa kita siap untuk mulai memberikan bantuan pokok yang terbatas pada saat yang tepat untuk membantu memperkuat kedudukan para pemegang kekuasaan baru ini. Program AID kita di Indonesia telah diakhiri seluruhnya, namun (pada pertengahan bulan April) kita telah setuju untuk menjual 50.000 ton beras kepada mereka sesuai dengan PL 480 Bagian IV (dibayar kembali dalam dolar) dengan syarat bunga sebesar 4-7/8 persen yang diangsur selama lima tahun. Sekarang kita telah mulai melaksanakan Bagian IV yang berupa penjualan 75.000 bal kapas dengan syarat yang lebih ringan, bunga sebesar 3-1/2 persen yang diangsur selama 15 tahun. Kita telah secara diam-diam memberitahukan bahwa kita akan mendukung usaha-usaha mereka untuk kembali bergabung dengan organisasi-organisasi internasional, dan bahwa kita akan

berperan serta dalam usaha-usaha multilateral untuk menjadwal kembali hutang mereka pada waktu yang sesuai. Kita telah mendorong negara-negara non-Komunis lain untuk membantu rezim baru Indonesia memperkuat diri sebelum masalah penjadwalan hutang, stabilisasi dan pembangunan dapat ditangani.

Tindakan-tindakan AS di Masa Mendatang

12. Apabila bulan depan pemegang kekuasaan baru berhasil menghilangkan kekuasaan Sukarno secara efektif, mereka akan mengalihkan usaha-usaha mereka ke arah perekonomian. Bantuan Amerika akan diperlukan dalam beberapa hal.

a. *Bantuan Darurat Lebih Lanjut.* Kemungkinan akan ada kebutuhan akan bantuan yang lebih lanjut untuk menjaga jalannya perekonomian sebelum pengambilan keputusan-keputusan multilateral mengenai permasalahan-permasalahan jangka panjang. Peran kita di sini dapat dijalankan melalui transaksi-transaksi lanjutan yang sesuai dengan PL (*Public Law*) 480. Sementara kita telah menyalurkan bantuan yang sesuai dengan Bagian IV dengan persyaratan yang lebih longgar, kita juga harus menyusun rencana untuk beralih ke Bagian I (dibayar kembali dengan mata uang lokal) apabila situasi politik menjadi stabil, agar tidak lagi menambah hutang devisa Indonesia yang sudah sangat besar itu.

b. *Penjadwalan Hutang Multilateral.* Indonesia memiliki hutang luar negeri yang besarnya lebih dari 2,5 miliar dolar. Kira-kira 170 juta dolar dari jumlah tersebut adalah hutangnya kepada kita, dan sekitar 1 milyar dolar adalah hutangnya kepada Uni Soviet, sebagian besar untuk keperluan militer. Persyaratan pemberian hutang tahun ini mungkin berjumlah sekitar 450 juta dolar, yang lebih dari pendapatan kotor devisa yang mungkin dalam jangka waktu yang sama. Karena Indonesia sudah tidak sanggup membayar pinjaman-pinjaman milik swasta maupun

milik pemerintah, penjadwalan kembali jelas sangat diperlukan. Kita telah mengadakan kontak dengan negara-negara non-Komunis (*Free World*) yang merupakan kreditor Indonesia, dan telah menjelaskan bahwa kita menganggap sangatlah penting untuk melakukan penjadwalan kembali secara multilateral. Kita berkeinginan untuk melihat kemungkinan beberapa negara lain seperti Jepang, atau suatu organisasi internasional, untuk memainkan peran penting dalam mengorganisasi pelaksanaan penjadwalan. Sultan Yogyakarta dan sejumlah utusannya dan utusan Adam Malik baru-baru ini telah mengunjungi Jepang dan memperoleh janji pemberian pinjaman sebesar 30 juta dolar sebagai bentuk bantuan darurat. Sultan berencana untuk mengunjungi negara-negara Eropa Barat pada bulan Juli. Utusan-utusan lain berencana untuk mengunjungi Uni Soviet dan negara-negara anggota EE (Ekonomi Eropa). Tampaknya Indonesia baru akan siap untuk secara formal bicara soal penjadwalan kembali pembayaran hutang ini pada akhir Juli atau Agustus. Kemungkinan Indonesia akan mengusulkan lima tahun penundaan —yang berarti menunda masalah, karena tampaknya mereka lebih mementingkan masalah militer daripada masalah-masalah ekonomi. Kita harus siap untuk berperan serta, dan untuk menyetujui persyaratan yang agak lebih longgar asal kita melakukannya dengan tetap memperhatikan kepentingan semua kreditor.

c. *Bantuan jangka panjang utama.* Di luar bantuan darurat dan penjadwalan hutang, Indonesia akan membutuhkan baik bantuan teknis maupun pemberian pinjaman lebih lanjut jika negara itu ingin kembali mampu untuk berdiri sendiri. Sebagus apa pun pencapaian mereka dalam mengembalikan integritas Bank Pusat, memotong defisit anggaran pemerintah dan meningkatkan produksi dan ekspor, sangatlah mungkin bahwa pada musim gugur tahun ini kemampuan pemerintahan yang baru untuk menjaga kewibawaannya akan bergantung pada penggunaan pinjaman-pinjaman penting luar negeri guna merehabilitasi baik industri

maupun pertanian, serta untuk memulihkan sistem komunikasi dan transportasi yang kini rusak berat. Banyak dari pinjaman yang dibutuhkan ini diperoleh dari Jepang, dari negara-negara Eropa Barat, dan kemungkinan besar dari organisasi-organisasi internasional seperti IMF, IBRD, dan (belakangan) Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ ADB). Kita telah menjelaskan bahwa kita mengharapkan bantuan jangka panjang yang memiliki dasar multilateral, dan kesediaan donatur-donatur lain untuk membantu pada dasarnya akan dipengaruhi oleh bantuan dari Amerika. Oleh karena itu, kita yakin bahwa kita harus siap untuk menjanjikan jumlah yang berarti, dan kebutuhan akan janji seperti ini mungkin akan muncul pada musim gugur apabila tanda-tanda konstruktif di Indonesia tetap berjalan seperti sekarang. Karenanya, kemungkinan kita akan memerlukan dana yang besar dari AID 1967, baik untuk bantuan langsung maupun untuk penyaluran lewat ADB. Situasi hutang-piutang akan menyebabkan disitanya Bank Ekspor-Impor yang berfungsi sebagai sumber bantuan tambahan, dan satu-satunya saluran lain kita akan tampak seperti tambahan komoditas PL-480 dengan persyaratan longgar yang berjumlah sama dengan bantuan.

d. *Berkenaan dengan bantuan militer*, perlu diketahui bahwa jumlah personil Angkatan Bersenjata Indonesia sangat besar dan telah cukup dipersenjatai untuk keamanan dalam negeri. Kita tidak perlu memikirkan rencana untuk memulai program bantuan militer apapun kecuali untuk kemungkinan usaha pelatihan dalam skala kecil yang sebagian besar untuk kepentingan hubungan pribadi dengan tokoh-tokoh kunci militer di masa depan. Ada kemungkinan kita memberi bantuan tambahan untuk proyek-proyek operasi karya di mana Indonesia telah melakukan pendekatan terhadap kita, guna meminta bantuan teknis untuk pengembangan sumber-sumber daya dari pulau-pulau yang tidak padat penduduk. Secara umum proyek semacam ini bisa didanai secara terbatas dari dana MAP dan AID.

Organisasi Resmi Pemerintah Amerika Berkenaan dengan Indonesia

13. Sampai pada tingkat ini, permasalahan Indonesia telah secara efektif ditangani dengan berdasar pada hubungan antar-instansi seperti biasanya. Selain itu, kita tetap berhubungan dengan tokoh-tokoh kunci Kongres, yang tampaknya memahami situasi berikut kemungkinan dampaknya. Gagasan bahwa setiap bantuan besar harus dikelola secara multilateral kiranya akan memiliki daya tarik tersendiri dalam banyak pembahasan Kongres.

14. Meskipun demikian, mengingat besarnya permasalahan Indonesia dalam enam bulan ke depan, sepertinya bijaksana untuk memulai konsultasi yang lebih luas dengan Kongres, dan mungkin bijaksana juga untuk menunjuk kelompok khusus dalam Badan Eksekutif —mungkin sebagai sebuah panitia kecil dari Kelompok Antar Departemen Senior (*Senior Interdepartemental Group*)— untuk menjaga permasalahan tersebut tetap berada dalam peninjauan yang sangat cermat.

5. CIA tentang Kelompok-Kelompok Pemuda di Indonesia

Dokumen berisi laporan CIA tertanggal 29 Juni 1966 tentang kelompok-kelompok pemuda di Indonesia ini menarik. Di sini antara lain digambarkan bagaimana kelompok-kelompok pemuda dan mahasiswa “muncul sebagai kekuatan politik yang sangat penting” yang bersama militer berusaha mengurangi kekuasaan Presiden Sukarno demi terbentuknya pemerintahan yang baru. Ditambahkan bahwa ketika menghadapi musuh bersama kelompok-kelompok pemuda itu biasanya bersatu, namun ketika musuh bersama itu sirna mereka cenderung sibuk dengan konflik internal.

*CIA menggolongkan kelompok-kelompok pemuda itu dalam tiga kategori: (a) organisasi-organisasi nasional; (b) organisasi-organisasi keagamaan; dan (c) organisasi-organisasi sosialis/Marxis. Tentang kelompok yang terakhir dikatakan bahwa dua organisasi anggotanya, yakni CGMI dan Pemuda Rakyat, telah dilarang oleh pemerintah sebagai kelanjutan apa yang terjadi tanggal 1 Oktober 1965.****

KELOMPOK-KELOMPOK PEMUDA DI INDONESIA⁴

Pendahuluan

Kelompok-kelompok mahasiswa non-Komunis telah memainkan peranan penting dalam pembersihan terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) setelah kudeta yang berorientasi Komunis 1 Oktober 1965 itu gagal. Mereka juga membantu menciptakan iklim yang memungkinkan untuk dikuranginya kekuasaan Presiden Sukarno. Dalam menjalankan fungsi ini, kelompok-kelompok mahasiswa itu telah menunjukkan tingkat persatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun sekarang ini mulai

⁴ CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, Direktorat Intelijen, “Kelompok-Kelompok Pemuda di Indonesia”, No. 1586/66, 29 Juni 1966. Status: Rahasia. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #118.

kelihatan adanya perpecahan internal. Biasanya elemen-elemen mahasiswa dan pemuda itu mencerminkan organisasi politik dan keagamaan yang menjadi induk masing-masing. Berhubung induk politik dan keagamaan itu biasanya amat beragam dan kompleks, kelompok-kelompok mahasiswa itu sulit untuk bersatu. Akan tetapi, ketika terjadi suatu krisis nasional mereka biasanya bisa bersatu untuk bersama-sama memperjuangkan suatu tujuan tertentu.

Maksud laporan ini adalah untuk memberikan gambaran latar belakang singkat tentang peranan kelompok-kelompok mahasiswa dan pemuda dalam pergerakan nasional Indonesia serta untuk menilai posisi dan aliansi dari kelompok-kelompok utama yang ada sekarang ini.

Latar Belakang

1. Kelompok-kelompok mahasiswa dan pemuda sudah mulai aktif sejak pergerakan nasional pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Peranan penting mereka semakin terlihat pada masa pendudukan Jepang dan setelah pertempuran empat tahun melawan Belanda. Setelah kemerdekaan, mereka masih bertahan dan bahkan berkembang pesat.

2. Kebanyakan dari kelompok-kelompok itu berafiliasi dengan partai-partai politik, dan dengan begitu mereka mencerminkan tiga orientasi utama kehidupan politik Indonesia—agama, nasionalisme, dan sosialisme atau Marxism.

3. Sebelum Oktober 1965, tiga partai utama di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama (NU), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Presiden Sukarno yang condong ke kiri memfasilitasi pertumbuhan dan pengaruh Komunis dan kelompok-kelompok nasionalis kiri, sedangkan kelompok nasional moderat dan agamis berada dalam posisi yang tidak mudah. Pada tahun 1963, gerak kaum kiri semakin intensif, dan pada pertengahan 1965 hanya militer yang mampu

menunjukkan perlawanan—yang tidak begitu besar—atas kecenderungan nasional menuju Komunisme ala Sukarno.

4. Unsur-unsur Komunis terlibat jauh dalam kudeta 1 Oktober 1965 yang gagal itu, dan militer menggunakan keterlibatan PKI ini untuk membenarkan operasi penghancuran PKI. Dukungan terbesar kepada militer datang dari kelompok pemuda dan mahasiswa yang berorientasi keagamaan — terutama [dari agama tertentu]. Kadang-kadang secara spontan dan kadang-kadang dengan dukungan militer, pemuda dan mahasiswa berdemonstrasi atau mengambil tindakan fisik melawan Komunis, fasilitas milik Cina Komunis, dan warga keturunan Cina.

5. Pada bulan Desember 1965 PKI dan garda depannya, termasuk Front Pemuda Komunis, Pemuda Rakyat, benar-benar telah dimusnahkan. Para pimpinan militer dan para pendukungnya yakin bahwa mereka harus mengalihkan perhatiannya pada perombakan pemerintahan dan pengatasan masalah-masalah ekonomi. Lagi-lagi kelompok-kelompok pemuda berada di barisan depan dalam mendesak perlunya reformasi. Pada bulan Maret 1966, mahasiswa tiba-tiba muncul sebagai kekuatan politik yang sangat penting dan menjadi faktor utama dalam mempersiapkan jalan bagi militer untuk mendesak Sukarno, yang pada akhirnya membuat sebuah perombakan pemerintahan.

6. Akan tetapi, persatuan yang menjadi ciri pergerakan mahasiswa anti-Komunis sejak Oktober sampai Maret itu tampaknya justru memberi peluang untuk timbulnya perselisihan dan perpecahan internal. Karena PKI hilang dan pemerintahan mulai terombak, unsur-unsur anti-Komunis mulai berpikir untuk memperkuat peranannya dalam pergerakan politik secara umum. Perselisihan tampaknya bermula dari dalam tubuh pergerakan pemuda dan menyebar ke dalam partai-partai politik yang mendukung mereka.

7. Pertikaian yang terjadi di dalam dan antara kelompok-kelompok pemuda dan partai-partai politik itu selanjutnya

memecah-belah dukungan terhadap militer dan para pemimpin pemerintahan dari sipil serta memperumit tugas mereka untuk memperbaiki kebijakan dalam negeri dan luar negerinya. Kekacauan dalam negeri saat ini tampaknya akan mewarnai suasana di Indonesia untuk masa-masa mendatang.

Kelompok-kelompok Mahasiswa dan Pemuda yang Besar

8. Berikut ini adalah sebuah gambaran singkat organisasi-organisasi pemuda dan mahasiswa yang besar pada saat ini, digolongkan menurut orientasi keagamaan, nasionalis atau sosialis-nya. Gambaran ini mencoba menunjukkan kelompok-kelompok yang penting setelah percobaan Kudeta 1 Oktober itu, serta aktivitas utama mereka. Gambaran ini juga mau menunjukkan faktor-faktor yang menjadi sumber pertentangan yang menyebabkan pertentangan di antara mereka termasuk afiliasi mereka, serta munculnya kembali permusuhan lama berikut perselisihan intra-partai. Faktor-faktor itu biasanya adalah faktor-faktor sama yang selalu menjadi bagian utama dari kehidupan politik Indonesia. Statistik mengenai jumlah keanggotaan sengaja tidak disertakan di sini, mengingat terbatasnya data mengenai hal itu. Kalaupun tersedia data yang ada biasanya meragukan.

ORGANISASI-ORGANISASI NASIONAL

(KAMI dan KAPPI, meskipun mendapatkan kekuatannya dari organisasi-organisasi keagamaan, tampaknya menganggap dirinya lebih berciri nasionalis daripada religius. Tampaknya dua kelompok ini mendapat pengarahan dan dukungan dari militer dan dari Wakil Perdana Menteri Adam Malik, salah seorang anggota Triumvirat Indonesia [bersama Soeharto dan Sultan Hamengku Buwono IX]).

KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). KAMI adalah sebuah kumpulan kelompok-kelompok mahasiswa Uni-

versitas Indonesia yang tumbuh karena gerakan anti-Komunis setelah insiden 1 Oktober dan tampaknya didirikan pada bulan Desember 1965. KAMI memiliki sistem kepemimpinan bergilir. Sekretaris Jenderalnya yang sekarang adalah Cosmas Batubara, yang juga adalah ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Keanggotaan KAMI yang besar ini berasal dari elemen Islam dan Katolik.

KAMI terbukti sangat efektif di daerah Jakarta, tapi tidak begitu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Alasannya karena adanya simpatian pro-kiri di dalam Polisi dan militer di kedua provinsi itu. KAMI secara umum mudah diterima di daerah Jakarta karena terlebih dahulu mendapat dukungan dan dorongan dari militer yang melindungi demonstrasi-demonstrasi KAMI dan membekali mereka dengan senjata api.

Meskipun taksiran dari pemerintah menyebutkan bahwa anggota inti KAMI pada bulan Februari 1966 hanya 7.500, kelompok ini sangat efektif dalam mengumpulkan ribuan mahasiswa dan menggalang dukungan dari buruh dan kelompok-kelompok pengusaha.

Pada tanggal 26 Februari [1966], Presiden Sukarno melarang organisasi ini tapi KAMI dengan tegas menolak, dan larangan itu hanya berdampak kecil pada aktivitasnya. Banyak anggotanya bergabung dengan KAPPI yang anggotanya kebanyakan pelajar Sekolah Menengah Atas dan mengambil peran penting dalam KAPPI selama periode ini. Setelah adanya larangan itu, di daerah Surabaya elemen KAMI membentuk Kelompok Kerjasama Siswa Progresif Revolusioner (*Progressive Revolutionary Students Cooperation Group/PRSCG*) yang sebenarnya adalah bentuk lain dari KAMI. Satu-satunya anggota KAMI yang tidak berpartisipasi adalah PMKRI cabang daerah. Secara umum, PRSCG terbukti tidak bisa jalan, mengingat kuatnya tekanan dari Gerakan Mahasiswa Nasional dan kalangan militer.

Setelah perombakan kabinet dan penurunan peran Sukarno pada bulan Maret, KAMI mulai lagi menjalankan aktivitas dengan menggunakan nama aslinya.

KAPPI (Kesatuan Aksi Perhimpunan Pelajar Indonesia). KAPPI adalah bentuk lain dari KAMI untuk tingkat Sekolah Menengah. Organisasi ini menjadi lebih aktif ketika KAMI dilarang, dan sering bekerjasama dengan gerakan mahasiswa moderat. Seperti KAMI, kebanyakan anggota KAPPI berasal dari kekuatan Islam dan Katolik. Meskipun cukup efektif dalam melakukan kegiatannya di daerah Jakarta, KAPPI juga mengalami kesulitan yang sama dengan KAMI di Jawa tengah dan Jawa Timur karena adanya perlawanan dari militer, sentimen pro-Sukarno dan perseteruan dengan kelompok Islam lain.

Dalam KAPPI juga terjadi perselisihan internal yang kemudian menyebar ke seluruh gerakan mahasiswa, dan memengaruhi KAMI serta juga organisasi-organisasi lain.

Perpecahan terjadi pada bulan Mei ketika usulan tentang sistem kepemimpinan permanen dan bukan bergilir dari Persatuan Pelajar Islam (PII) ditolak. Kelompok-kelompok lain melihat usulan ini sebagai ancaman dari sebuah kelompok Muslim untuk mengambil alih organisasi.

Pada tanggal 25 Mei PII dikeluarkan dari KAPPI karena telah mengancam dan mencoba mendominasi KAPPI. Keadaan ini semakin diperburuk dengan penahanan terhadap mantan Ketua KAPPI Husni Thamrin—seorang anggota PII dan seorang anti-Sukarno yang gigih—pada tanggal 28 Mei. Selama periode ini, PII didukung oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan gerakan mahasiswa yang berafiliasi ke Partai Nasional. ANSOR dan Faksi Katolik menjadi oposisi, sedangkan Mahasiswa Kristen Protestan mengambil posisi netral.

Laporan terbaru mengindikasikan adanya sebuah penyelesaian atas konflik itu, karena adanya itikad baik PII. Sebuah Piagam Persatuan kembali yang ditandatangani oleh para

anggota pada tanggal 13 Juni dan mengangkat kembali Husni Thamrin sebagai ketua KAPPI.

GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia).

GMNI adalah sebuah organisasi yang berafiliasi dengan Partai Nasional Indonesia (PNI). Pada masa-masa setelah percobaan kudeta 1 Oktober GMNI bergabung dengan golongan kiri, Faksi PNI Ali Surachman yang pro-Sukarno, yang mengantar pada konfrontasi langsung dengan kekuatan Islam.

Perpecahan dalam tubuh PNI membawa kemenangan bagi kelompok moderat Osa-Usep, yang dipimpin oleh Osa Maliki dan Usep Ranuwijaya, serta perombakan kembali elemen-elemen GMNI. Sebuah persekutuan GMNI yang baru di Jawa Timur memisahkan diri dari PNI faksi kiri dan memberikan dukungan pada KAMI. Pada tanggal 24 Mei GMNI secara resmi menarik keanggotaan dari PNI kiri, dan pada tanggal 25 Mei Ketua Umum GMNI cabang Surabaya, Imam Santoso, menyatakan bahwa “Sekarang semua anggota GMNI adalah anggota KAMI dan mendukung semua program dan aksi KAMI bagi kepentingan rakyat”.

Akan tetapi, keanggotaan GMNI dalam KAMI itu tidak didukung oleh semua pihak. Elemen kiri garis keras yang telah terpengaruh oleh PKI dengan keras menentang golongan moderat di daerah Yogyakarta, di mana permasalahan masih sering berada di sekitar supremasi Sukarno, dan bukan masalah manuver partai untuk kepentingan politik.

Perkembangan baru ini memunculkan sedikit keraguan mengenai seberapa jauh kepemimpinan baru GMNI akan mampu bergerak. GMNI tidak sepenuhnya loyal kepada KAMI, dan kerjasamanya mungkin selalu dibatasi, terutama karena KAMI di Jawa Timur didominasi oleh mahasiswa Islam.

BANRA. Ini adalah sebuah organisasi para-militer di bawah GMNI, dan tampaknya dibentuk dari elemen pemuda militer dalam GMNI sendiri. Mereka kabarnya bersenjata dan telah

dilatih oleh unit militer berhaluan kiri di kalangan Kepolisian dan Marinir.

Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila adalah organisasi yang berafiliasi dengan IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), sebuah partai politik kecil yang terkait erat dengan AD. Pemuda Pancasila sangat aktif dalam usaha pemusnahan PKI dan demonstrasi anti-PKI dan anti-Cina di Sumatera Utara setelah 1 Oktober [1965].

Saat ini Pemuda Pancasila menghadapai ancaman akan dikalahkan oleh kelompok-kelompok lain yang lebih berpengaruh dalam dunia politik.

GERMINDO (Gerakan Mahasiswa Indonesia). Germindo adalah organisasi yang berafiliasi dengan Partai Indonesia (Partindo), sebuah partai yang telah dirasuki Komunis bahkan sejak berdirinya pada tahun 1950-an. GERMINDO pasti telah dirasuki Komunis juga. Organisasi ini aktif hingga pertengahan Maret 1966, ketika Sukarno sempat sejenak naik daun. Setidaknya sampai bulan Mei lalu markas besarnya di Jawa Timur telah dijadikan pusat kegiatan rahasia PKI di daerah itu. Pada pertengahan Mei Partindo dan GERMINDO Jawa Timur dilarang. Anggotanya kemungkinan bekerjasama dengan pemuda Komunis untuk membentuk organisasi bawah tanah.

ORGANISASI-ORGANISASI KEAGAMAAN

ANSOR (organisasi kepemudaan di bawah Nahdlatul Ulama, Partai Cendekiawan Muslim). Meskipun aktif di Jawa dan Sumatera Utara, ANSOR paling kuat di Jawa Timur, dan telah banyak melakukan operasi anti-Komunis dan anti-Cina. Sebelum 1 Oktober 1965, ANSOR telah terlebih dahulu secara terang-terangan mengambil posisi anti-Komunis daripada organisasi induknya NU, yang memiliki catatan panjang sebagai kelompok yang gesit menggunakan kesempatan.

Elemen pemuda ANSOR berpartisipasi dan kadang-kadang memimpin pemusnahan berdarah terhadap PKI di Jawa Timur. Mereka juga mengambil keuntungan dari keadaan ini untuk melawan elemen-elemen oposisinya, termasuk anggota faksi kiri Partai Nasional Indonesia (PNI).

Peristiwa berdarah itu telah menimbulkan pertentangan antara elemen marinir (KKO) dan polisi (Mobrig) di daerah ini, mengingat banyak anggota dari unit-unit ini yang pro-Sukarno dan juga keluarga mereka yang bergabung dengan PKI hilang dalam pemusnahan terhadap PKI itu. Dukungan militer terhadap kelompok nasionalis kiri telah menambah rumitnya masalah di Jawa Timur.

Minggu-minggu belakangan ini ANSOR bertikai dengan kelompok-kelompok keagamaan lain dari agama yang sama. Jika mengikuti kecenderungan NU, ada kemungkinan bahwa ANSOR —khususnya di Jawa Timur, daerah dengan sentimen pro-Sukarno yang kuat— akan memanfaatkan sentimen itu sebagai sarana untuk meningkatkan pengaruhnya terhadap organisasi-organisasi Islam lain.

BANSER (organisasi para-militer NU). Kelompok ini berasal dari elemen militan ANSOR. Organisasi ini, seperti telah disebutkan, juga aktif di Jawa Timur dan Sumatera Utara.

HMI (Himpunan Mahasiswa Indonesia). HMI merupakan organisasi yang amat berpengaruh dalam KAMI. Sebagai cabang dari Partai Masyumi yang dilarang, HMI tetap mempertahankan legalitasnya dan bertahan sebagai sebuah organisasi yang berpengaruh. Posisi anti-PKI-nya tidak pernah se-ekstrim ANSOR.

Elemen-elemen HMI sangat efektif dalam mengatur aktivitas gerakan mahasiswa terutama di daerah Jakarta. Sedangkan di daerah Surabaya, Jawa Timur, mereka sangat aktif tapi cenderung tidak efektif. Berlawanan dengan ANSOR dan simpatisan golongan kiri di unit marinir dan kepolisian di daerah itu, mereka

terpaksa berlutut pada taktik dan tidak bisa berkonsentrasi pada tujuan politik dan reformasi ekonomi.

Pada bulan Mei dan Juni lalu HMI terlibat masalah perebutan kepemimpinan KAPPI dan lebih memihak PII.

PII (Pelajar Islam Indonesia). PII adalah organisasi cabang tingkat sekolah menengah yang masih boleh beroperasi meskipun menginduk pada Partai Masyumi yang dilarang itu. Organisasi ini adalah salah satu kelompok tingkat sekolah menengah yang paling besar dan militan dalam tubuh KAPPI —setidaknya sampai dikeluarkannya dari KAPPI pada akhir Mei lalu.

Setelah dikeluarkan dari KAPPI, perselisihan—termasuk penculikan dan pemukulan—antara anggota PII dengan pemuda ANSOR mengancam seluruh gerakan mahasiswa moderat dengan bahaya perpecahan. Para pendukung Masyumi, yang didukung oleh IPKI (sebuah partai politik yang didukung oleh militer), mendukung PII, sementara elemen-elemen NU dan Katolik menentangnya. Faksi moderat PNI di bawah Osa-Usep yang bersimpati pada elemen Masyumi memilih untuk bersikap netral. Bagaimana hasil dari penyelesaian masalah ini masih harus kita tunggu.

PKRI (Pelajar Katolik Republik Indonesia). Sebagai organisasi cabang dari Partai Katolik (PK), anggotanya adalah para pelajar sekolah menengah. PKRI adalah salah satu kelompok terbesar dan paling berpengaruh dalam KAPPI, dan bersama dengan elemen Islam adalah komponen penting dalam memimpin aktivitas-aktivitas protes di Jakarta.

Sukarno menuduh PKRI dan HMI telah diperalat oleh CIA (*Central Intelligence Agency*) milik Amerika dan mengancam akan membubarkan mereka. Meskipun Partai Katolik adalah sebuah partai kecil, namun PKRI (bersama dengan PMKRI) memiliki peran dan pengaruh yang cukup luas di kalangan gerakan mahasiswa, suatu pengaruh yang melebihi pengaruh partai induknya.

PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia). PMKRI adalah organisasi cabang Partai Katolik tingkat Universitas dan salah satu elemen yang paling kuat dalam KAMI. PMKRI sangat kuat di daerah Jawa Barat karena, seperti gerakan mahasiswa moderat dan golongan kanan, secara diam-diam mendapatkan dukungan dan simpati dari militer. Ketuanya, Cosmas Batubara, juga adalah Sekretaris Jenderal KAMI.

GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia). GMKI adalah organisasi cabang Partai Kristen Indonesia (Parkindo), sebuah partai politik kecil di Indonesia yang juga merupakan partai dari kelompok minoritas Kristen Protestan. Sebagai anggota KAMI, GMKI gagal mengambil peran yang efektif dalam organisasi itu. GMKI berpartisipasi dalam demonstrasi-demonstrasi anti-Komunis selama awal-awal masa pasca-Oktober, tapi kemudian tidak begitu aktif sesudah itu. Di daerah-daerah lain di Indonesia, GMKI lebih tidak berperan dibanding di Jakarta.

ORGANISASI-ORGANISASI SOSIALIS/MARXIS

CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia). CGMI (yang sudah dilarang) adalah organisasi yang dikendalikan oleh PKI. Kebanyakan anggotanya adalah non-Komunis, tapi organisasi ini dituduh sebagai tempat persemaian bagi Komunis-Komunis muda dan dicurigai aktif dalam perekruit anggota baru. CGMI dilarang pada awal tahun 1966. Banyak dari aktivitasnya kemudian diambil alih oleh GERMINDO.

Sejak tanggal 1 Oktober CGMI terbukti sangat berpengaruh di daerah Jawa Timur, di mana marinir dan polisi cukup bersimpati pada golongan kiri.

Pemuda Rakjat. Pemuda Rakjat adalah organisasi terlarang yang berafiliasi dengan PKI. Sebelum 1 Oktober, Pemuda Rakjat

aktif dalam memimpin demonstrasi dan menyusupi organisasi-organisasi mahasiswa lain. Setelah kudeta itu, Pemuda Rakjat kehilangan banyak anggota dalam pembantaian yang dilakukan oleh AD dan golongan Islam terhadap PKI beserta organisasi-organisasi front-nya. Pemuda Rakjat secara resmi dilarang bulan Maret silam bersama dengan PKI dan organisasi-organisasi cabang PKI yang lain. Dilaporkan bahwa banyak dari anggotanya yang kemudian masuk ke CGMI dan GERMINDO. Pada masa puncaknya, Pemuda Rakjat mengklaim memiliki tiga juta anggota. Kabarnya organisasi ini sekarang membentuk sebuah gerakan bawah tanah.



Soeharto dan Kumbokarno. Simbol kuatnya mistisisme Jawa dalam dunia politik Indonesia. (sumber: Deppen RI)

BAB 7

JULI 1966: SUPERSEMAR DAN UPAYA DE-SUKARNOISASI

1. Pengantar

Dalam Sidang Umum MPRS yang sama, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1966, dikeluarkanlah Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 yang berisi antara lain: a) Penetapan tidak perlunya jabatan Wakil Presiden; b) Apabila Presiden berhalangan, pemegang SP 11 Maret 1966 memegang jabatan Presiden.¹ Sebagaimana pernah ditunjukkan oleh Dr. Asvi Warman Adam, Ketetapan MPRS itu dengan jelas melanggar UUD 1945. Mengapa? Karena di dalam UUD 1945 ditetapkan adanya jabatan Wakil Presiden, dan waktu itu UUD 1945 belum diamandemen. Dengan demikian sebenarnya TAP tersebut adalah inkonstitusional. Namun tampaknya hal itu dibutuhkan, supaya kalau Presiden Sukarno berhalangan (atau mungkin “dibuat berhalang-an”), bukan seorang Wakil Presiden yang menggantikan-nya, melainkan Pemegang Supersemar, yang tak lain adalah Soeharto sendiri. Tap MPRS macam itu tentu tidak akan sulit didapat, mengingat bahwa komposisi keanggotaan MPRS sudah diatur sedemikian rupa sehingga akan menguntungkan Si Pemegang Supersemar.

Berkaitan dengan perkembangan situasi yang ada di Indonesia, pada bulan Juli 1966 ini majalah *Time* menyebut apa yang terjadi di Indonesia pada periode ini sebagai “*The West’s best*

¹ Asvi Warman Adam, *Sinar Harapan*, Sabtu 11 Maret 2006.

news for years in Asia.² Dengan kata lain apa yang terjadi di Indonesia sejak Peristiwa 1 Oktober 1965, penindasan kaum kiri, serta naiknya Soeharto melalui Supersemar merupakan berita terbagus bagi blok Barat sejak sekian tahun terakhir. Hal itu bisa dimengerti, sebab semakin lama semakin kelihatan bahwa berkat adanya Supersemar berlangsunglah di Indonesia suatu proses de-Sukarnoisasi yang cukup cepat. Dari minggu ke minggu pengaruh Bung Kurniawati tampak makin merosot. Sementara itu dengan adanya de-Sukarnoisasi berarti: rakyat yang berhaluan kiri tak lagi punya pendukung yang handal, pemerintahan baru yang dipimpin Soeharto makin kuat, dan sejalan dengan itu tata kehidupan sosial-politik-ekonomi Indonesia akan semakin mengarah ke negara-negara Barat—bukan lagi ke blok Timur sebagaimana yang selama ini terjadi di bawah pimpinan Bung Kurniawati. Susunan Kabinet baru yang diumumkan pada tanggal 25 Juli mencerminkan semakin “sempurna”-nya upaya de-Sukarnoisasi itu.

Sebagai imbalan atas upaya untuk melakukan de-Sukarnoisasi dan orientasi ke Barat, Indonesia telah dibantu untuk mendapatkan penjadwalan kembali pembayaran hutang-hutangnya. Pada saat yang sama IMF mulai diperbolehkan masuk untuk beroperasi kembali di Indonesia.

Di antara kumpulan dokumen bulan Juli ini yang tidak kalah menarik adalah bagian dari dokumen CIA tertanggal 23 Juli 1966 yang mencoba menerangkan konteks kelahiran TAP MPRS yang tidak mengizinkan “penyebaran ideologi atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam bentuk apapun.” Keterangan ini kiranya perlu disimak guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai latar belakang dari TAP MPRS No. XXV/1966 yang masih sering diperdebatkan sampai sekarang.

² Majalah *Time*, edisi 15 Juli 1966.

2. Perjuangan Panjang De-Sukarnoisasi

*Dengan menjadikan de-Sukarnoisasi sebagai tema pokok perjuangan politiknya di Indonesia pada periode ini, Amerika Serikat memandang hasil sidang MPRS dengan sikap mendua. Pada satu sisi sidang itu dipandang sebagai sidang yang tak banyak menghasilkan terobosan baru, pada sisi lain dilihat sebagai langkah positif dalam upaya de-Sukarnoisasi. Amerika sangat berharap bahwa arus perubahan dapat bergerak secepat mungkin sehingga pengaruh Bung Karno semakin terkikis dan orang-orang “baru” seperti Soeharto, Adam Malik dan Sultan semakin kuat pengaruhnya. Dalam memorandum tertanggal 9 Juli 1966 yang ditulis oleh Donald W. Ropa dari National Security Council untuk W. W. Rostow (Asisten Khusus Presiden Johnson) tercermin rasa gembira bahwa sidang MPRS telah semakin memperkuat kedudukan Jenderal Soeharto.****

POSIK KITA DI INDONESIA³

Hasil dari sidang MPRS yang dipuja-puja itu kebanyakan seperti yang sudah diperkirakan, walaupun Sukarno sekali lagi masih bisa menghindari perangkap dari sekelompok orang-orang yang ingin menyingkirkan dia dari kekuasaan. Kedutaan Besar kita memandang *keputusan-keputusan yang diambil oleh MPRS sebagai langkah penting* dalam perjuangan panjang untuk melakukan de-Sukarnoisasi, namun sudah menjadi rahasia umum bahwa meskipun sudah tidak ada kesempatan untuk melakukan manuver politik lagi, Sukarno masih akan tetap berusaha menggunakan sisa-sisa kekuatan politiknya.

Pada titik ini Marshall Green menjanjikan pada kita tiga kemungkinan: (a) evaluasi terhadap kemungkinan jangka pendek selama tiga bulan; (b) implikasinya terhadap kebijakan Amerika

³ Memorandum dari Donald W. Ropa (Staff National Security Council) kepada Rostow (Asisten Khusus Presiden) “Memo untuk Mr. Rostow”, “Posisi Kita di Indonesia”, 9 Juli 1966. Status: Rahasia dan Pribadi. Foreign Relations, 1964-1968, Volume XXVI (Washington: Government Printing Office, 2001), hlm. 443-445.

Serikat; dan (c) Rekomendasi Kedutaan Besar terhadap langkah-langkah pemberian bantuan berikutnya. Poin pertama disertakan di sini, dan dilampirkan apabila Anda ingin melihatnya.

Dari sisi ekonomi, Green yakin bahwa Indonesia akan mampu berjalan selama tiga bulan dengan baik tanpa adanya masalah ekonomi yang serius. Pandangan ini ia dasarkan pada pengamatan sementara dan adanya dana sebesar \$60 juta dalam bentuk kredit valuta asing (*foreign exchange credit*) yang diterima dari Jepang, Jerman, Inggris dan Amerika Serikat. Hal penting menurut dia adalah bahwa sekarang ini seharusnya *Indonesia mulai berpikir dengan jernih*, memperbaiki sistem perencanaan ekonominya, dan melangkah ke arah penuntasan problem-problem ekonomi yang paling mendasar.

Baik *Adam Malik maupun Sri Sultan* telah mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Rusk melalui Widjatmika untuk meminta berlakunya kembali program AID kita (konsekuensinya pengabulan permintaan ini akan menuntut Surat Keputusan Presiden tentang bantuan ke Indonesia), menyampaikan daftar kebutuhan yang harus dibeli seharga US\$495 juta, serta menanyakan kemungkinan Adam Malik dan mungkin juga Sri Sultan untuk bertemu secara pribadi dengan Presiden [Johnson], wakil Presiden [Humphrey] dan [Menlu] Rusk pada bulan September menyusul kunjungan Adam Malik ke Moskow.

Pihak kita sudah memberitahu Widjatmika bahwa *kedatangan Adam Malik akan diterima dengan senang hati* (belum diputuskan tanggalnya atau apakah akan ada pertemuan dengan Presiden). Kita akan dengan senang hati menyediakan bantuan, khususnya pada penjadwalan ulang pembayaran hutang secara multilateral, tetapi tentu saja hal itu masih bergantung kepada bagaimana pemerintah Indonesia bisa membentuk suatu pemerintahan yang kuat dan efektif, yang mampu memanfaatkan bantuan dari luar dengan baik.

Sementara itu, tim IMF telah menyelesaikan survey awal, dan Indonesia telah secara resmi mengajukan permintaan untuk diterima kembali dalam IMF dan IBRD, dan agenda diskusi antara para kreditor Indonesia telah ditentukan secara tentatif di Tokyo tanggal 12 Juli [1966].

Untuk pihak kita, seperti saran Green terdahulu, sekarang kita telah melangkah untuk memulai kembali program pelatihan untuk peserta skala kecil. Program ini dipisahkan kemungkinan lebih luas mengenai dimulainya kembali program-program bantuan yang lain. Akan tetapi perlu diingat bahwa hal ini baru bisa dilakukan dengan sebuah Keputusan Presiden berdasar pada UU tentang Bantuan Asing no 620 (j) tahun 1961 dan pasal 118 UU Apropriasi tahun 1966. Secara politis hal ini perlu guna membantu menciptakan suasana yang kondusif di Kongres jika nanti ada pembahasan soal pemberian bantuan lebih besar. (Memo tentang hal ini sedang dalam persiapan.).

Sisi politik. Kuncinya adalah pada susunan Kabinet baru [Indonesia] yang kini sedang digodok. Green yakin bahwa ada harapan besar nantinya Soeharto akan memegang tampuk kekuasaan dibantu oleh sebuah kelompok ciptaannya yang terdiri dari para teknokrat yang handal. Kita akan tahu dalam dua atau tiga minggu mendatang ini. Green sudah mengantisipasi bahwa Soeharto akan semakin kuat kedudukannya, mengingat bahwa kekuasaannya telah disahkan oleh MPRS. Meskipun demikian ketegangan berkaitan dengan Sukarno dan partai-partai politik masih mungkin terjadi.

Anda menanyakan tentang perkembangan politik di Indonesia. Saya sedang mempersiapkan beberapa pengamatan awal dan telah meminta baik CIA maupun INR untuk memberikan masukan tentang berbagai kekuatan politik yang sekarang sedang bermain.

Masalah Luar Negeri. Green melihat berakhirnya Konfrontasi secara *de facto*, kembalinya Indonesia ke PBB, dan

dibangunnya kembali hubungan-hubungan Indonesia dengan negara-negara non-Komunis merupakan perkembangan yang positif. Namun demikian MPRS tidak secara khusus menyebutkan dukungan pada Perjanjian Bangkok yang secara resmi mengakhiri Konfrontasi. Indonesia masih melakukan manuver politik terhadap perjanjian tersebut, dan apa langkah berikut yang mau diambil oleh Indonesia belum jelas.

REKOMENDASI

Jika saran-saran Green sudah masuk dan diolah, ada baiknya untuk memasukkan masalah Indonesia dalam agenda diskusi NSC. Sebelumnya masalah ini masih terlalu dini untuk dibicarakan. Sekarang ini kita merasa bahwa diskusi NSC mengenai Indonesia sudah tiba saatnya dan akan memberi manfaat yang besar.

D.W. Ropa

3. Supersemar, Tekanan Militer, dan TAP MPRS No. XXV/1966

Ditekankan kembali dalam dokumen CIA tertanggal 23 Juli 1966 ini bahwa sejak terjadinya peristiwa 1 Oktober 1965 militer bermaksud untuk “secara bertahap membatasi kekuasaan dan pengaruh Sukarno.” Di mata Amerika apa yang terjadi pada tanggal 11 Maret 1966, yakni ditandatanganinya Surat Perintah 11 Maret, merupakan “puncak” dari upaya itu. Dikatakan pula bahwa pada waktu itu “Sukarno, dengan setengah hati dan di bawah tekanan militer, memberikan suatu kekuasaan serupa kekuasaan eksekutif kepada Soeharto.” Kekuasaan itulah kemudian yang dipakai oleh Jenderal Soeharto untuk mengambil banyak keputusan dan tindakan atas nama Presiden dan atas nama kepentingan nasional. Selanjutnya melalui sidang MPRS tanggal 21 Juni 1966 ia berhasil mengusahakan supaya Supersemar disahkan oleh lembaga tertinggi negara itu sehingga tidak dapat diubah lagi—bahkan oleh pemberinya, yakni Presiden Sukarno. Ironisnya, Amerika juga melihat bahwa kelompok militer yang kelak menggantikan Bung Karno ini tampaknya juga akan mempraktekkan sistem “demokrasi terpimpin”, mirip Bung Karno dulu, meskipun mungkin orientasinya berbeda.

Maksud utama dari dokumen ini adalah memberi gambaran singkat mengenai berbagai kelompok atau kekuatan politik yang ada di Indonesia pada waktu itu. Menarik bahwa dalam penjelasan mengenai terbentuknya kelompok “sosialis Pancasila”, dokumen ini menekankan adanya kaitan antara kelompok tersebut dengan TAP MPRS no XXV/1966. Dikatakan, menanggapi munculnya kelompok Sosialis Pancasila, MPRS “mengeluarkan peraturan yang melarang ‘penyebaran ideologi atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam bentuk apapun.’” (paragraf no. 33). Menurut CIA Ketetapan MPRS itu lebih dimaksudkan untuk menghalangi niat Adam Malik untuk membentuk kelompok “Sosialis Pancasila” sebagai bagian dari terwujudnya gerakan “sosialis demokratik” (paragraf no. 32-33) sekaligus menghadang kemungkinan kembalinya kekuasaan Bung Karno.^{4***}

⁴ Pada tahun 2000 desakan untuk mencabut TAP MPRS no. XXV/1966 ini sempat mengemuka sebagai kelanjutan atas usulan Presiden Abdurrachman Wahid waktu itu agar TAP tersebut dicabut karena terkait dengan masalah Hak-hak Asasi Manusia. Lihat *Kompas*, 25 April 2000.

KEKUATAN-KEKUATAN POLITIK DI INDONESIA⁵ (MEMORANDUM INTELIJEN CIA)⁶

Rangkuman

Militer memegang kekuasaan di Indonesia dan tampaknya akan terus demikian sampai beberapa waktu mendatang. Walaupun panglima militer Letnan Jenderal Soeharto dan para pemimpin militer lain mengijinkan elemen politik massa non-Komunis untuk menyampaikan aspirasi, namun mereka berharap untuk membatasi aktivitas organisasi massa tersebut sampai pada titik yang tidak akan membahayakan garis kebijakan umum yang dikembangkan sejak percobaan kudeta yang gagal oleh sayap kiri bulan Oktober lalu. Akan tetapi, kelompok itu diharapkan akan dapat memengaruhi militer dan bersikap independen.

Kelompok atau kekuatan-kekuatan politik massa di Indonesia sekarang ini antara lain: (a) partai-partai Muslim, terutama Nahdlatul Ulama; (b) beberapa partai Kristen kecil; (c) apa yang disebut sebagai “kesatuan aksi” serta kelompok pemuda yang banyak di antaranya tumpang-tindih; (d) partai-partai nasionalis, dari tengah dan kiri, termasuk elemen-elemen Sukarnois; (e) berbagai kelompok buruh, petani, dan kelompok lain yang diorganisasi secara fungsional dan kebanyakan untuk yang bergabung dengan partai-partai politik; dan (f) partai Komunis (PKI) yang sekarang dilarang, berikut berbagai organisasi frontnya.

Kendali pemerintahan saat ini berada di tangan Triumvirat yang terdiri dari Soeharto, Menteri Luar Negeri Adam Malik,

⁵ CIA, Memorandum Intelijen, “Political Forces in Indonesia”, 23 Juli 1966. Status: Rahasia. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #115.

⁶ Memorandum ini disiapkan oleh *Office of Current Intelligence* dan *Office of Central Reference/Biographic Register*, dan telah dikordinasi dengan *Office of National Estimates*, *Office of Research and Reports*, serta *Deputy Director of Plans*.

dan Sultan Yogyakarta. Komposisi Kabinet baru yang dijadwal-kan akan terbentuk sebelum pertengahan Agustus 1966 nantinya harus memberikan pertimbangan lebih jauh mengenai bagaimana Soeharto, pemimpin utama Triumvirat itu, seharusnya menyusun rencana untuk menangani berbagai kelompok atau kekuatan politik yang ada di Indonesia. Pemilihan umum akan diadakan dua tahun mendatang.

Masalah paling penting di Indonesia saat ini adalah masalah ekonomi dan bukan masalah politik. Situasi ekonomi yang memang lemah belum juga membaik sejak naiknya kelompok militer Oktober lalu, dan dalam beberapa hal bahkan semakin memburuk. Jika situasi ini tidak segera diatasi, ada kemungkinan kekacauan politik akan menyusul.

Latar Belakang

1. Selama 20 tahun Presiden Sukarno mendominasi Indonesia dan di dalam maupun di luar negeri. Ia menjadi semacam personifikasi dari bangsanya. Kecenderungannya yang terus-menerus terhadap ideologi kiri berikut sifat otoriternya telah ikut memperkuat Partai Komunis Indonesia (PKI) dan perlahan-lahan menekan kekuatan-kekuatan anti-Komunis dan moderat. Pada bulan September 1965, Sukarno sudah siap untuk membawa negerinya ke arah Komunisme yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

2. Militer Indonesia, walaupun anti-Komunis, tetap setia pada Sukarno dan dengan setengah hati mengikutinya ke arah kiri. Para pemimpin militer hanya mempunyai dua pilihan untuk mencegah Indonesia jatuh ke dalam Komunisme. Pilihan pertama adalah mengharap Sukarno wafat sehingga militer dapat menentang PKI. Pilihan kedua adalah bahwa PKI akan menggunakan cara-cara kekerasan terhadap Sukarno atau pemerintah, sehingga dengan demikian akan sah bagi kubu militer untuk melakukan serangan balasan.

3. Pada tanggal 1 Oktober 1965, sebuah kelompok yang menamakan diri “Gerakan 30 September” menculik dan membunuh enam orang Jenderal, termasuk Panglima AD, mengumumkan berdirinya Dewan Revolusi, dan membubarkan Kabinet. Tetapi percobaan kudeta ini segera dapat diatasi oleh AD, di bawah kepemimpinan Soeharto, yang kemudian mengangkat dirinya sebagai Panglima AD. Militer mengambil keuntungan dari keterlibatan PKI dalam Gerakan 30 September itu untuk kemudian menuduh bahwa pihak Komunis bertanggungjawab penuh terhadap percobaan kudeta tersebut. Kemudian militer bergerak untuk menghancurkan PKI dan selanjutnya membubarkan partai tersebut.

4. Pada awalnya para pemimpin militer percaya bahwa mereka dapat membujuk Presiden Sukarno untuk bergabung dengan gerakan anti-Komunis. Ketika Sukarno ternyata malah mencoba membalikkan arah situasi pasca-kudeta, pihak militer memutuskan untuk secara bertahap membatasi kekuasaan dan pengaruh Sukarno. Upaya ini mencapai puncaknya pada tanggal 11 Maret 1966 ketika Sukarno, dengan setengah hati dan di bawah tekanan militer, memberikan suatu kekuasaan serupa dengan kekuasaan eksekutif kepada Soeharto. “Kekuasaan 11 Maret” yang dimiliki Soeharto itu kemudian pada tanggal 21 Juni disahkan oleh badan tertinggi negara, yakni MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara).

5. Dalam gerakan anti-Komunis yang sekaligus anti-Sukarno, militer mendapatkan dukungan aktif dari organisasi-organisasi massa. Walaupun kebanyakan dari organisasi-organisasi tersebut termotivasi oleh alasan anti-Komunis, sebenarnya mereka juga ingin menggunakan kesempatan itu untuk mencari posisi politis masing-masing. Mereka memandang militer sebagai alat untuk mengembalikan mereka kepada posisi politis masing-masing, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Kehidupan Politik di Indonesia

6. Dalam kehidupan politik di Indonesia terdapat tiga faktor dominan yaitu agama, nasionalisme, dan sosialisme (Marxisme). Setiap partai politik cenderung bertumpu pada salah satu dari ketiganya, tetapi juga dipengaruhi oleh kedua faktor yang lain. Sukarno mencoba menggabungkan ketiganya menjadi satu, ke dalam suatu gagasan yang ia sebut sebagai NASAKOM (singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme). Dengan alasan kesatuan bangsa, beberapa elemen, terutama militer, sekarang ini menyebutnya NASASOS (Nasionalisme, Agama, dan Sosialisme).

7. Dasar politik yang secara luas dipakai adalah “Pancasila” atau “Lima Dasar.” Pancasila dicetuskan oleh Sukarno pada tahun 1945 dan digunakan sebagai falsafah dasar bagi Indonesia merdeka. Kelima dasar itu terdiri dari nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Esa.

8. Secara geografis, kehidupan politik Indonesia berpusat di Jawa, di mana 65 persen penduduk Indonesia tinggal. Meskipun demikian, para pemimpin politik dengan cermat juga mengamati reaksi dari pulau-pulau besar lain (Sumatra, dengan 16 persen penduduk; Celebes, dengan 7 persen; Borneo, dengan 4 persen) terhadap apa yang terjadi Jawa.

9. Kecuali kalau sedang ada tujuan yang jelas dan kepemimpinan yang kuat, partai-partai non-Komunis Indonesia biasanya tidak disiplin dan tidak memiliki arah nasional yang jelas. Selama periode pemerintahan parlementer 1949-1958, para pemimpin partai lebih mementingkan manuver-manuver politik daripada memperjuangkan kepentingan nasional. Situasi ini digunakan Sukarno untuk memberlakukan secara bertahap mulai 1958 apa yang ia sebut sebagai “demokrasi terpimpin”. Ia mengatakan bahwa di bawah sistem “demokrasi liberal” partai-

partai yang ada cenderung untuk tidak hanya menghambat kemajuan bangsa tetapi juga mendorong terjadinya perpecahan.

10. Sukarno membatasi jumlah partai dan kembali ke UUD '45, yang membenarkan Kabinet presidensial dan mengurangi peran DPR. Ada indikasi bahwa kecenderungan untuk membatasi ini nantinya akan diteruskan oleh para penguasa militer sekarang ini.

11. Sekarang ada delapan partai politik yang resmi diakui. Kehidupan politik di Indonesia juga ditandai oleh kait-mengait antara berbagai kekuatan politik, adanya sejumlah “kesatuan aksi” dan kelompok-kelompok fungsional. Orang Indonesia, di bawah undang-undang atau pemerintahan macam apapun, cenderung mengabaikan hukum dan lembaga-lembaga pemerintah dan lebih suka pada penyelesaian masalah secara praktis dan seadanya. Tampaknya Soeharto ingin mencoba menggunakan Konstitusi dan institusi-institusi politik yang ada seturut kepentingannya.

Militer

12. Para pemimpin militer saat ini percaya bahwa militer memiliki misi politik yaitu memimpin dan membentuk negara Indonesia selama masa transisi ini. Para perwira militer ini berpartisipasi dalam pembentukan Indonesia merdeka 20 tahun lalu dan menganggap diri mereka lebih berdedikasi dan mempunyai bekal yang sama dengan —kalau bukan lebih baik daripada— rekan-rekan sipil mereka untuk memimpin bangsa ini. Pada masa lalu, militer —sama seperti Sukarno— merasa tidak sabar terhadap partai-partai non-Komunis yang selama periode demokrasi parlementer lebih suka sibuk dengan perebutan kekuasaan. Sekarang ini indikasinya adalah bahwa militer Indonesia, walaupun berbeda orientasi, tampaknya akan memaksakan suatu bentuk “demokrasi terpimpin” yang mirip dengan gagasan Presiden Sukarno.

13. Panglima AD Soeharto berada dalam urutan kelima di antara enam Wakil Perdana Menteri yang membentuk presidium

Kabinet dari pemerintahan sementara yang ada sekarang ini. Tetapi praktis dia adalah pemimpin terpenting Indonesia dan telah menjadi kekuatan utama dalam kehidupan politik domestik dan pengambil keputusan sejak 1 Oktober. Walaupun bukan merupakan seorang “jenderal politik” sebelum terjadinya kudeta yang gagal itu, dia memiliki kemampuan intuitif dalam hal pendekatan politis sebagai seorang pemimpin Jawa yang sukses. Orientasi politiknya, sebagaimana orientasi politik kelompok militer pada umumnya, adalah nasionalisme sekuler.

14. Meskipun demikian, dalam tubuh militer terdapat elemen-elemen Muslim, kiri, dan pro-Sukarno yang sama kuatnya. Soeharto harus mampu mengatasi dan mengakomodasi kelompok-kelompok itu dalam organisasinya guna memastikan kesetiaan dalam tugas yang lebih penting yaitu mempertahankan kesatuan negara.

Nahdlatul Ulama

15. Nahdlatul Ulama (NU) adalah partai terbesar di Indonesia. Pendukung utama partai Muslim ini berada di Jawa Timur, tapi NU kuat di seluruh Jawa dan Sumatra Utara, dan beberapa bagian Kalimantan. Posisi pentingnya sekarang adalah hasil dari dilarangnya PKI, tak menentunya PNI yang pro-Sukarno, dan dibubarkannya Masyumi, yang sebelumnya juga merupakan partai Muslim besar oleh Sukarno pada tahun 1960.

16. NU memiliki pandangan kedaerahan dan mempunyai riwayat [...]. Partai ini sering diwarnai oleh intrik tetapi tidak pernah memaksakan kehendak untuk membentuk negara teokratis. Sejak 1 Oktober NU ragu-ragu dalam mengambil sikap mengenai Sukarno. Rapat MPRS terakhir diatur dengan baik oleh militer, dan NU sering ikut dengan kebijakan-kebijakan militer.

17. Seperti kebanyakan partai, NU membawahi kelompok-kelompok pemuda, buruh, wanita, budaya, dan beberapa

kelompok lain. Di antara kelompok-kelompok itu yang paling aktif adalah ANSOR, sebuah organisasi pemuda yang pada periode sebelum Kudeta telah mengambil sikap anti-Komunis secara lebih terang-terangan daripada organisasi induknya. Pada periode pasca-kudeta, ANSOR membantu militer membasmikan Komunis dan dalam beberapa kasus melakukan sendiri operasi-operasi berdarah anti-Komunis.

18. Partai ini dipimpin oleh Chalid, pemegang posisi yang relatif tidak penting sebagai Wakil Perdana Menteri Kedua dalam Kabinet Nasional. Chalid tidak begitu disukai oleh militer dan dalam Kabinet mendatang mungkin akan diganti oleh Wakil Ketua NU, Muhammad Dachlan.

Front Pancasila

19. Pada awal periode pasca-kudeta, Wakil Ketua NU, Subchan, memelopori usaha pembentukan partai dan organisasi-organisasi anti-Komunis. Hasilnya adalah Front Pancasila, suatu penggabungan sepuluh organisasi yang dipimpin oleh Subchan (tujuh partai politik, sebuah organisasi sosial, dan dua federasi buruh). Tujuan awalnya adalah untuk membantu militer dalam operasi anti-Komunis dan untuk membujuk Sukarno agar menerima kebijakan politik baru. Tindakan awalnya adalah mengkoordinasi aktivitas pemuda dalam demonstrasi dan penyerangan fisik terhadap orang-orang Komunis. Tetapi ketika pada bulan Desember diadakan pengorganisasian “kesatuan-kesatuan aksi” banyak kader Subchan tersedot ke sana.

20. Setelah alasan keberadaannya banyak yang terrealisir, Front Pancasila mulai kehilangan kepaduannya. NU, terutama Subchan, kemungkinan akan berusaha mempertahankan Front Pancasila sebagai alat untuk membantu NU secara politis dan mempopulerkan Subchan. Walaupun demikian, tampaknya Front Pancasila tidak akan memiliki peran penting.

Partai-partai Muslim Lain

21. Dua partai Muslim kecil lain adalah Persatuan Sarikat Islam Indonesia (PSII) dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). PSII lebih besar dan lebih tua dan banyak aktif di Jawa. Kekuatan utama PERTI berada di Sumatra. Kedua partai ini secara konsisten menunjukkan kecenderungan untuk mengikuti tren politik agar bisa bertahan. Keduanya pernah berdamai dengan Marxisme dan memiliki anggota-anggota yang bersedia bekerjasama dengan PKI. Setelah 1 Oktober, mereka dengan cepat mengutuk PKI. PSII berusaha untuk mengambil banyak tindakan politik yang dapat diterima oleh militer.

22. Yang menjadi kekhawatiran pokok NU adalah kemungkinan bangkitnya kembali Masyumi. Walaupun masih dilarang, Masyumi bergerak aktif melalui beberapa kelompok afiliasinya—yang tidak pernah dilarang—and melalui Muhammadiyah, organisasi sosial yang aktif dalam politik. Masyumi dan Muhammadiyah mewakili Islam modern dan mempunyai pendekatan politik ala Barat. Para pemimpin mereka berharap untuk dapat mendirikan kembali Masyumi atau membentuk partai baru dengan dukungan mantan anggota Masyumi. Tetapi, keputusan jadi atau tidak jadi bergantung pada pemerintah—khususnya militer.

Partai-partai Kristen

23. Partai Katolik dan Kristen (Protestan) adalah partai kecil tetapi mempunyai pengaruh yang cukup dalam pemerintahan. Berhubung selama bertahun-tahun banyak dari anggota mereka mempunyai pendidikan rata-rata lebih baik daripada para anggota partai Muslim atau Nasionalis, mereka mampu berpartisipasi pada tingkat yang tinggi walaupun hanya partai kecil. Meskipun cukup khawatir dengan kemungkinan Indonesia menjadi negara teokratis, kedua partai ini mempunyai lebih

banyak kesamaan dengan partai religius (Muslim) daripada Nasionalis sekuler atau partai-partai kiri. Akhir-akhir ini Partai Katolik lebih berperan aktif dan tampak lebih getol dalam perlawanan anti-Komunis daripada Partai Kristen.

24. Salah satu pemimpin Partai Kristen, Johannes Leimena, adalah Wakil Perdana Menteri Satu dalam Kabinet interim saat ini. Tetapi, posisinya lebih banyak bersifat simbolik dan diyakini tidak akan mendapat tempat pada Kabinet berikut. Walaupun dianggap tidak berbahaya dan tidak terlalu efektif, dia sering disebut sebagai orang yang selama bertahun-tahun dipercaya oleh Sukarno, meskipun secara pasif.

Partai Nasional

25. Partai Nasional Indonesia (PNI) menganggap Sukarno sebagai pendirinya dan telah memopulerkan serta mengembangkan diri dengan menunjukkan sebagai partai yang paling setia pada Sukarno. Dalam Pemilu 1955 —satu-satunya pemilihan umum di Indonesia— PNI memperoleh suara terbanyak, namun setelah itu mereka kehilangan simpatisan karena banyak yang menyeberang ke partai Komunis atau NU. Apakah sekarang PNI akan mampu mendapatkan kembali simpatisannya setelah PKI dilarang masih tanda tanya.

26. Sayap moderat PNI, yang anggota-anggotanya diturunkan dari kepemimpinan partai hanya setahun yang lalu, sekarang memimpin partai. Sayap kiri, yang secara membabi-buta telah menjadi pengikut Sukarno dan telah diinfiltasi oleh kelompok Komunis, masih mempunyai kekuatan di Jawa Timur dan Jawa Tengah, daerah yang selama ini telah menjadi kekuatan PNI. Di Jawa Tengah, basis utama PNI, diperkirakan PNI terbagi seproto-seproto antara kedua sayap.

27. Tiga bulan terakhir ini sentimen pro-Sukarno dan PNI-kiri mengemuka di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Para komandan militer pro-Soeharto yang bertugas di dua wilayah tersebut

pada akhir Juni lalu sekarang sedang bergerak untuk menekan elemen-elemen pro-Sukarno. Tindakan-tindakan yang sangat represif ini, digabung dengan kecenderungan orang Jawa untuk berkompromi, tampaknya akan menenggelamkan sayap kiri. Meskipun demikian, sentimen nasionalis kiri ini tetap potensial bagi pemimpin yang mampu mengeksploitasinya.

28. Roeslan Abdulgani, anggota dan mantan pemimpin PNI, adalah Wakil Perdana Menteri Kedua, suatu posisi yang sebenarnya hanya simbolik dalam Kabinet interim saat ini. Walaupun tidak terlalu dekat dengan PNI sayap kanan, Abdulgani masih lebih dekat dengan sayap kanan daripada dengan sayap kiri. Walaupun tampaknya Abdulgani tidak akan menjabat pada Kabinet mendatang, PNI sayap kanan akan tetap terwakili.

29. PNI telah melekat pada falsafah yang pernah dikemukakan Sukarno yaitu “Marhaenisme,” sebuah doktrin kabur Marxisme yang disesuaikan dengan situasi di Indonesia. Pengertian Marxis dalam Marhaenisme telah jatuh pamornya, dan sekarang para pemimpin PNI menyatakan bahwa Marhaenisme itu sama dengan Pancasila.

Partai-partai Nasionalis Lain

30. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) adalah sebuah partai kecil yang berorientasi militer, didirikan pada tahun 1954 oleh Jenderal Nasution, mantan panglima militer dan sekarang ketua MPRS. Kekuatan utamanya berada di Sumatra Utara dan Jawa Barat.

31. Partai Indonesia (Partindo) adalah partai nasionalis kiri kecil yang disusupi Komunis sejak didirikannya pada tahun 1958. Militer membubarkan Partindo dan kelompok mudanya di Jawa Timur di mana kebanyakan pendukung partai ini berada. Di daerah-daerah lain Partindo berada dalam pengawasan dan umumnya tidak aktif.

Kekuatan Non-Komunis Kiri

32. Tidak ada partai yang diakui yang bisa menjadi wadah bagi kalangan kiri non-Komunis. Pernah ada dua partai yang kecil dan menganut elemen ini, tapi sudah dilarang. Kedua partai tersebut adalah Partai Murba (Proletarian) yang dilarang pada tahun 1965 dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang dibubarkan pada tahun 1960. Gagasan untuk menghidupkan kembali kedua partai itu akhir-akhir ini telah dibahas di sejumlah lingkaran dalam pemerintahan. Tampaknya sebagai alternatif atas langkah tersebut, suatu gerakan sedang dilakukan untuk membentuk sebuah partai kiri baru. Dalam sidang MPRS baru-baru ini, kelompok kecil yang terdiri dari kira-kira 20 orang telah menyatakan diri sebagai kelompok “Sosialis Pancasila.” Kelompok ini dianggap sebagai bagian dari langkah awal menuju terbentuknya gerakan “sosialis demokratik.” Adam Malik, Wakil Perdana Menteri I yang sekaligus Menteri Luar Negeri dan pemimpin Partai Murba adalah sosok di belakang gerakan ini.

33. Menanggapi munculnya kelompok Sosialis Pancasila, MPRS mengeluarkan peraturan yang melarang “penyebaran ideologi atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam bentuk apapun”. Apakah hal ini akan membatasi perkembangan “sosialisme demokratik”, masih harus dilihat lebih lanjut. Dekrit MPRS itu tampaknya untuk sebagian didasari oleh keinginan partai-partai Muslim untuk menghalangi maksud Adam Malik serta keinginan untuk menghadang kemungkinan kembalinya Sukarno.

34. Secara umum dapat dikatakan bahwa kalangan non-Komunis kiri sulit mendapatkan pengikut di Indonesia walaupun mengedepankan “keadilan sosial” dan amat dipengaruhi Marxisme. Tampaknya partai-partai keagamaan dan nasionalis telah cukup memasukkan gagasan-gagasan sosialisme dalam kebijakan mereka, sehingga masyarakat merasa bahwa partai khusus sosialis tidak dirasa perlu lagi. Oleh karena itu hanya para

idealistic militan dan kaum Marxis non-Komunislah yang memerlukan organisasi khusus guna mewadahi aspirasi mereka.

35. Adam Malik, di luar ketertarikan pribadinya pada partai kiri, menyatakan bahwa suatu organisasi diperlukan untuk menampung jutaan mantan pengikut PKI dan organisasi frontnya yang sebenarnya tak tahu banyak mengenai Komunisme.

Sukarno dan Sukarnoisme

36. Satu hal yang masih tetap mewarnai kehidupan politik Indonesia adalah wibawa dan kharisma Presiden Sukarno. Sukarno, yang membuktikan dirinya sebagai pemimpin massa dengan kecakapan yang luar biasa, tetap menjadi simbol populer dari Revolusi Indonesia dan merupakan personifikasi dari kebanggaan nasional. Sukarno tetap mendapat tempat khusus di hati rakyat kebanyakan — terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Semua itu melampaui daya tarik politik tertentu dari Sukarno, dan telah menjadi salah satu daya tarik orang terhadap PNI, sekaligus berguna bagi kelompok Komunis.

37. Para pemimpin militer, sadar akan sulitnya menghancurkan citra politik Sukarno, merasa kurang tepat untuk menempuh suatu tindakan langsung melawan sang Presiden. Dalam pandangan mereka, pentinglah bahwa demi kebanggaan nasional, kesatuan bangsa, dan sejarah bangsa, Indonesia tetap menjaga nama baik pemimpin revolusi yang sekaligus presiden pertamanya.

Selain itu, kebanyakan pemimpin militer yakin bahwa Sukarno memang mempunyai kontribusi yang besar kepada negara. Walaupun mereka tidak suka, mereka merasa bangga dan bersimpati terhadap Sukarno.

38. MPRS telah mencabut dekret 1963 yang menyatakan Sukarno sebagai presiden seumur hidup. Masa jabatanya akan berlangsung sampai anggota MPR terpilih sepakat untuk memilih presiden yang baru, dan tampaknya hal itu baru akan terjadi dua

tahun mendatang. Sementara itu, tampaknya Sukarno tidak akan bisa kembali sepenuhnya ke panggung kekuasaan, meskipun ia akan terus berusaha menghalangi kebijakan-kebijakan kubu militer.

Kesatuan Aksi dan Kelompok Pemuda

39. Desember lalu, ketika operasi-operasi anti-Komunis mulai mengendor karena makin habisnya target yang menjadi sasaran dan ketika Sukarno terus berusaha meraih kekuasaannya kembali, mulailah pembentukan berbagai kelompok “kesatuan aksi”. Ini adalah kelompok-kelompok penekan (*pressure groups*) yang dibentuk dari berbagai macam organisasi dan elemen masyarakat guna mendukung kebijakan-kebijakan militer pasca-kudeta. Dalam pembentukannya, kelompok-kelompok ini—setidaknya sebagian—diprakarsai oleh militer dan Adam Malik. KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dan KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia) adalah kelompok yang paling aktif. Walaupun terdiri dari gabungan kelompok-kelompok pelajar yang berafiliasi pada partai-partai politik berbasis agama, cita-cita mereka lebih bersifat nasionalis ketimbang politis sektarian. Berbagai demonstrasi yang mereka lakukan merupakan faktor penting, mungkin yang terpenting, yang pada bulan Maret lalu memaksa Sukarno untuk memberikan kekuasaan kepada Soeharto dan untuk membentuk sebuah Kabinet baru pada bulan yang sama.

40. Sebuah kelompok aksi yang kecil tapi cukup efektif adalah KASI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia. KASI sangat dipengaruhi oleh Partai Sosialis (PSI) yang dilarang itu dan sering bekerja sama dengan KAMI dan KAPPI. Beberapa aksi dan front lain juga bermunculan. Misalnya KABI (buruh), KAWI (wanita), KAGI (guru), KATI (petani), bahkan KAPNI (pengusaha). Bulan April lalu sebuah badan kerjasama untuk kelompok-kelompok itu

dibentuk. Namanya KOSTRAM. KOSTRAM hanya sempat berdiri sejenak, dan bubar karena adanya masalah internal dan adanya perlawanan dari Front Pancasila. Sekarang sedang dibentuk usaha koordinasi yang lain, Badan Musyawarah Kesatuan Aksi (BMKA). Salah satu tujuannya adalah untuk mengembangkan organisasi yang mampu bersaing dalam pemilihan umum. Sejauh ini, KAMI menolak untuk berpartisipasi. Kesatuan-kesatuan aksi yang besar biasa disebut sebagai "Angkatan '66".

41. Di luar kesatuan-kesatuan aksi tersebut terdapat pula beberapa kelompok pemuda yang bertindak secara independen. ANSOR, gerakan pemuda NU, mengambil tindakan anti-Komunis sebelum maupun sesudah kudeta. Di Jawa Timur, ANSOR menentang PNI dan Masyumi. Pemuda Pancasila, yang berafiliasi dengan IPKI, aktif dalam penumpasan Komunis di Sumatra Utara. HMI (Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia) berafiliasi dengan Masyumi dan merupakan organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia. HMI sangat aktif dalam politik selama era Sukarno dan terus berlanjut hingga periode pasca-kudeta. HMI juga bergerak melalui KAMI.

42. Anggota PNI dari mahasiswa adalah GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia). Perpecahan yang ada dalam PNI dapat dilihat dari perpecahan serupa di GMNI. Di beberapa daerah, elemen GMNI sayap kanan bekerjasama dengan KAMI. Tetapi, di beberapa bagian di Jawa Timur dan Jawa Tengah, mahasiswa sayap kiri sering melakukan perlawanan, kadang-kadang dengan kekerasan, terhadap kelompok-kelompok sipil moderat. Kelompok mahasiswa yang berafiliasi dengan Partindo, yakni GERMINDO (Gerakan Mahasiswa Indonesia) bergerak aktif hingga pertengahan Maret untuk mendukung Sukarno. Setidaknya hingga bulan Mei, markasnya di Jawa Timur menjadi pusat aktivitas rahasia PKI di daerah tersebut. GERMINDO

sekarang dilarang di Jawa Timur, tetapi anggotanya diduga akan bekerja dengan pemuda Komunis untuk mengembangkan gerakan bawah tanah.

Kelompok-kelompok Fungsional

43. Dalam kehidupan politik Indonesia peran dan posisi politis dari kelompok-kelompok ini tidak menentu. Sementara ini mereka terkait dengan kesatuan-kesatuan aksi. Kelompok ini sebenarnya merupakan suatu kategori dalam masyarakat, seperti buruh dan petani, dan sejak awal buruh dan petani inilah yang dimasukkan dalam kelompok fungsional ini. Tetapi tidak bisa dihindari bahwa mereka menjadi terkait dengan partai-partai politik dan didukung oleh militer.

44. Sukarno mulai menggunakan mereka pada era awal kemerdekaan sebagai cara meningkatkan perwakilan dari kelompok-kelompok yang memiliki orientasi politik yang khusus. Mereka juga dapat digunakan sebagai elemen penyeimbang dalam keanggotaan partai. Kelompok fungsional sebagai kelompok fungsional jarang aktif dalam berpolitik. Mereka dieksplorasi oleh aktivis politik di dalam lingkaran politik umum mereka.

Partai Komunis

45. Partai Komunis Indonesia telah dihabisi dan menjadi organisasi bawah tanah dengan jumlah yang tidak diketahui. Tetapi, terdapat indikasi bahwa jumlah pemimpin Komunis pada tingkat nasional maupun lokal yang terbunuh atau ditahan tidak sebanyak yang diberitakan. Dalam beberapa minggu terakhir dilaporkan bahwa ada sejumlah pamflet pro-PKI beredar di Jawa Timur. Walaupun begitu, ketatnya pengawasan militer telah membuat efektivitas partai ini sebagai sebuah kekuatan politik nasional hampir tidak ada—setidaknya untuk beberapa tahun ke depan.

46. Sebelum 1 Oktober, PKI mengklaim diri memiliki anggota sebanyak 3.5 juta orang. Kelompok front PKI membuat perkiraan yang tumpang tindih dan berlebihan, dan mengklaim memiliki anggota 15 juta. Sebagai akibat dari pembunuhan dan larangan, kebanyakan anggota menghilang. Pemerintah Indonesia menyatakan sisa anggota partai hanya 100.000. Bagaimana arah politik dari jutaan mantan anggota PKI di masa depan masih menjadi pertanyaan.

Kabinet

47. Jenderal Soeharto mengadakan rangkaian diskusi dengan beberapa partai dan kelompok tentang pembentukan Kabinet baru sebelum 17 Agustus 1966, hari kemerdekaan Indonesia. Rumor yang beredar menyatakan bahwa Kabinet akan terdiri dari satu Perdana Menteri dan lima Wakil Perdana Menteri yang akan membawahi lima departemen umum dan kira-kira 15 sampai 20 portofolio. Terdapat indikasi bahwa Soeharto akan menjadi Perdana Menteri, bahwa dia akan mempertahankan Adam Malik dan Sultan Yogyakarta, dan bahwa sekurang-kurangnya akan memberikan masing-masing satu posisi Wakil Perdana Menteri kepada NU dan PNI. Soeharto menginginkan Kabinet yang terutama terdiri dari para teknokrat, tapi sejumlah kompromi dengan Sukarno dan partai-partai politik tampaknya tidak bisa dihindari. Ada kemungkinan kesatuan-kesatuan aksi akan terwakili.

Pemilihan Umum

48. Oleh ketetapan MPRS pemilihan umum akan diadakan dalam waktu dua tahun ke depan, yaitu sebelum Juli 1968. Undang-undang yang mengatur pemilihan umum itu belum ditulis, tetapi MPRS telah menetapkan bahwa undang-undang itu akan diselesaikan dalam enam bulan mendatang. Persiapan pemilihan

umum dipimpin oleh Jenderal Nasution, seorang pendukung kuat partisipasi militer dalam pemerintahan.

49. Dua badan akan dipilih — MPR yang akan menentukan kebijakan, dan DPR yang merupakan badan legislatif. Kemungkinan militer menginginkan separuh anggota dari kedua lembaga itu dipilih sedang separuhnya lagi ditunjuk. Akan tetapi militer merasa harus berkompromi dengan partai-partai yakni bahwa semua anggota akan dipilih, namun setelah itu mereka akan mencari cara untuk mengontrol kedua lembaga itu. Begitu terpilih, sebagaimana ditentukan dalam UUD '45, MPR akan memilih Presiden dan Wakil Presiden.

50. Di antara berbagai partai politik di Indonesia, hanya Nahdlatul Ulama yang mendesak untuk mengadakan pemilihan umum lebih cepat. NU merasa bahwa situasi sekarang ini amat menguntungkan baginya dan lebih suka diadakan pemilihan umum secepatnya, sebelum PNI dapat menata diri kembali dan sebelum ada sebuah partai Islam baru yang dapat menyedot pengikut. Pengurus NU merasa bahwa 18 bulan ke depan adalah waktu yang menguntungkan.

51. Ada indikasi bahwa pemilihan umum baru bisa diadakan paling cepat sebelum akhir 1967.

Perhitungan ke Depan

52. Sulit diragukan bahwa nantinya militer dapat secara umum mengendalikan kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Meskipun demikian, masalah politik yang utama nantinya tidak akan terletak pada masalah hubungan militer-sipil, melainkan pada masalah ekonomi nasional secara keseluruhan.

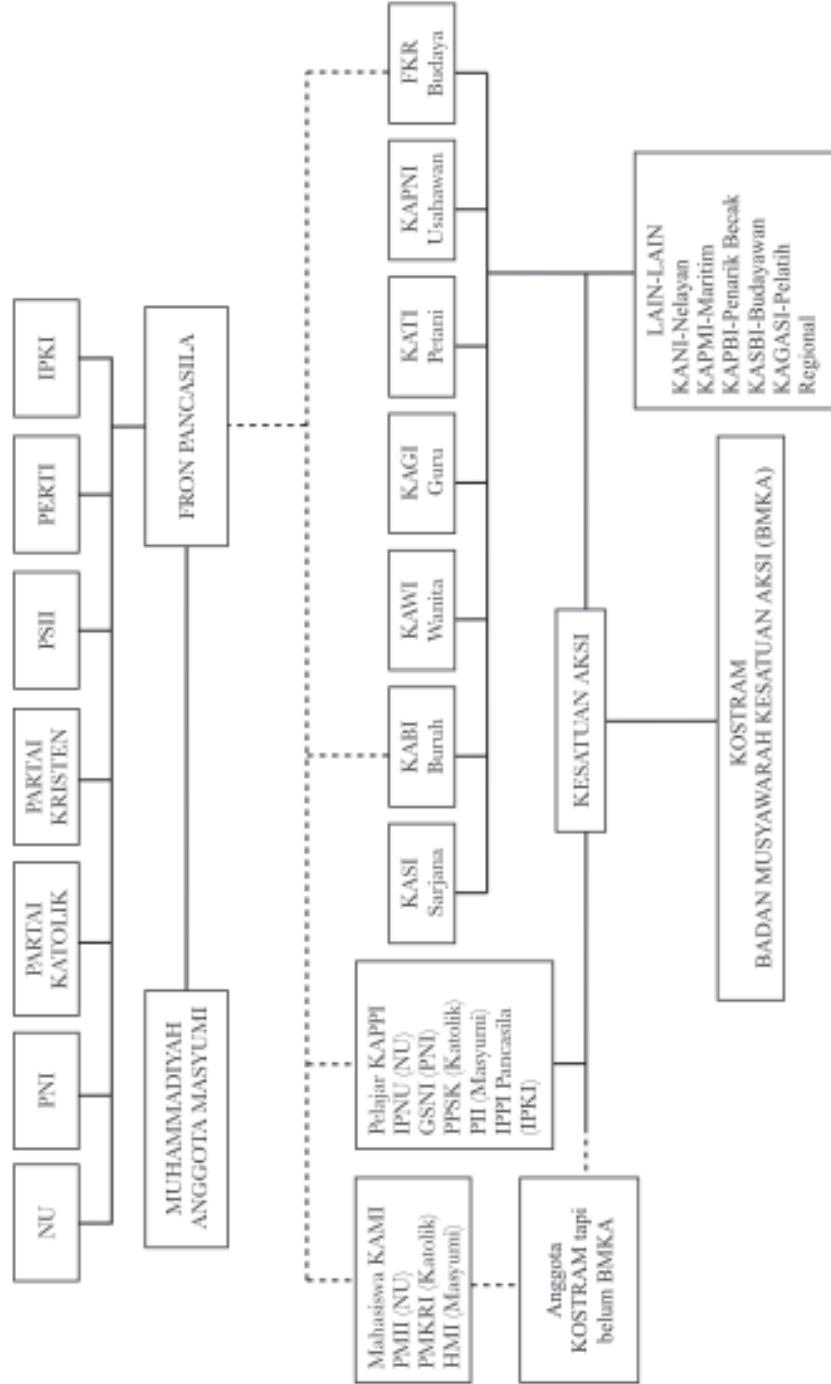
53. Situasi ekonomi tidak berubah sejak Oktober lalu; bahkan dalam hal tertentu semakin memburuk. Sukarno dan para penasihatnya pada periode pra-Oktober masih dipandang sebagai penyebab inflasi yang semakin tinggi dengan berbagai sebab dan akibatnya. Kecuali ada pemecahan masalah yang efektif, sangat

mungkin bahwa akan timbul sejumlah masalah politik. Masalah itu dapat berupa perkembangan situasi anti-rezim yang dapat dieksplorasi oleh partai-partai politik, perwira militer yang ingin melakukan kudeta, atau elemen-elemen nasionalis ekstrim dan Komunis. Situasi demikian akan dapat memicu kekisruhan politik atau pengambilalihan kekuasaan oleh militer dan kembalinya otoritarianisme.

54. Para pemimpin militer sadar akan adanya berbagai kemungkinan tersebut. Soeharto, khususnya, mencoba untuk membuat kemajuan bertahap ke berbagai arah. Di dalam negeri, dia mencoba mengembalikan sebagian sistem dari pemerintahan konstitusional (*partial return to constitutional government*), mempertahankan kendali politik, melakukan kompromi —di dalam kerangka kebijakan-kebijakan militer— terhadap permintaan berbagai kelompok non-Komunis, mengurangi pengaruh Sukarno secara bertahap, dan terus menekan Komunis. Dalam kebijakan luar negeri ia mencoba membina persahabatan dengan negara-negara Barat dan megambil jarak dengan kebijakan pro-Pekingnya Sukarno. Hanya ada kemajuan sedikit dalam bidang ekonomi, tetapi dalam hal ini Soeharto dan rekannya telah memangkas pengeluaran-pengeluaran yang tak perlu dan telah bernegosiasi dengan beberapa negara Barat untuk mendapatkan hutang. Soeharto dan orang-orang di sekitarnya, baik militer maupun sipil, mendasarkan harapan mereka atas perbaikan ekonomi pada masuknya bantuan luar Negeri sebagai pemicu bagi stabilitas jangka panjang dan perbaikan dasar ekonomi Indonesia. (Lihat tabel, di halaman selanjutnya).

KEKUATAN PARTAI POLITIK SIPIL BESAR DI INDONESIA

PARTAI POLITIK



4. Kabinet Baru Makin Meninggalkan Bung Karno

*Dokumen berikut tertanggal 25 Juli 1966 dan berisi laporan Dubes Green tentang pembentukan Kabinet baru di Indonesia, yang baru saja diumumkan hari itu juga. Tampak di sini pihak AS senang karena dalam susunan Kabinet yang baru itu unsur Bung Karno makin hilang (ditandai dengan disingirkannya Roeslan Abdulgani dan Johannes Leimena), sementara posisi Soeharto makin naik. Dalam Kabinet ini kekuasaan Soeharto meningkat tajam karena dia memiliki kekuasaan langsung pada Kabinet. Dokumen ini juga mencatat kedekatan Soeharto dengan Adam Malik. Dikatakan, dukungan Soeharto kepada Malik ternyata lebih kuat daripada yang diduga sebelumnya, dan hal itu membuat Amerika merasa senang. ****

KOMENTAR TENTANG KABINET YANG BARU⁷

1. Kabinet baru merupakan perbaikan total atas kabinet sebelumnya, bahkan mungkin yang terbaik dalam sejarah Indonesia, meskipun masih mengandung unsur-unsur kompromi dengan Sukarno dan jelas-jelas merupakan hasil kompromi antara kekuatan-kekuatan politik yang ada. Kabinet yang baru itu menunjukkan tekanan yang kuat pada aspek politik daripada aspek ekonomi. Hal itu terjadi karena telah disingirkannya para pendukung Sukarno sekaligus karena ditambahkannya orang-orang yang kompeten, yang sekaligus sangat anti-Sukarno, seperti B.M. Diah dan Sutjipto SH. Meskipun demikian dari sisi ekonomi beberapa orang yang tidak kompeten dan korup masih saja dipertahankan. Demikian pula dua atau tiga orang yang mungkin masih terkait dengan Sukarno.

2. Ciri yang paling jelas dan penting dari kabinet yang baru ini adalah dipertahankannya Soeharto, Adam Malik dan Sultan

⁷ Telegram dari Kedubes Amerika Serikat (Jakarta) ke Kementerian Luar Negeri (Washington), “Komentar tentang Kabinet yang Baru”, 25 Juli 1966. Status: Konfidensial. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #113a.

Yogya di tiga posisi kunci. Meskipun Soeharto disebut sebagai Ketua Presidium Kabinet dan bukan sebagai Perdana Menteri, namun posisinya dalam pemerintahan mengalami peningkatan secara mencolok. Hal itu terjadi mengingat bahwa dalam posisinya yang sekarang ini dia memiliki kekuasaan langsung atas kabinet. Alasan dipertahankannya Adam Malik adalah karena adanya perlawanan yang keras dari Sukarno, serta oposisi yang kuat dari partai-partai politik besar, bahkan dari sejumlah elemen di kalangan kubu AD itu sendiri. Adam Malik tidak hanya dipertahankan di dalam kabinet, tapi posisi politiknya juga mengalami peningkatan mencolok. Penunjukkan atas temannya, yakni B.M. Diah, sebagai Menteri Penerangan (posisi yang sangat penting untuk mengantar transisi ke era baru) menunjukkan bahwa dukungan Soeharto untuk Adam Malik ternyata lebih kuat daripada yang pernah diperhitungkan sebelumnya. Ini merupakan suatu perkembangan yang sangat positif.

3. Sukarno merasa sangat terpukul karena disingkirkannya Leimena dan Roeslan Abdulgani dari Presidium. Antek Sukarno yang lain yang juga disingkirkan adalah Muljadi Djojomartono dan dr. Satrio (untuk tidak menyebut Wirjono Prodjodikoro dan Rumambi yang sudah disingkirkan pelan-pelan selama dua bulan terakhir ini). Kepergian Muljadi si kroni Sukarno itu tidak hanya merupakan langkah mundur bagi Sukarno dalam kaitannya dengan kabinet, tetapi juga merupakan pemotongan atas kemampuannya untuk melakukan manuver di kalangan organisasi Muhammadiyah yang secara historis merupakan inti dari partai Masyumi yang dilarang itu. Dampak dari kekalahan ini menjadi lebih besar oleh adanya dua tokoh pro-Muhammadiyah, yakni Moh. Sanusi dan Brigjend Sutjipto SH., di dalam kabinet yang baru.

4. Secara umum partai-partai politik diberi peran dalam kabinet lebih besar daripada sebelumnya, meskipun pengaruh mereka akan tetap sekunder. NU memiliki dua posisi di kabinet. Hal itu dipandang tidak mencukupi, khususnya dalam kaitan dengan naiknya posisi Muhammadiyah. Walaupun NU memegang salah satu posisi di dalam Kabinet Presidium, Idham Chalid adalah orang yang terlalu lemah untuk bisa bekerja secara efektif di situ. Lebih dari itu dia lebih merupakan boneka Sukarno daripada wakil NU.

5. Kabarnya AD lebih menghendaki Dachlan dalam Presidium daripada Chalid. Alasannya, karena Dachlan itu loyal kepada AD dan anti-Sukarno, dan kebetulan bisa bekerjasama dengan Masyumi. Penyingkiran dia dari Presidium atas permintaan Sukarno mungkin merupakan kekalahan kecil bagi AD, namun di lain pihak penampilan NU yang mengecewakan mungkin akan memperdalam ketidakpuasan di tubuh NU atas kebijakan NU akhir-akhir ini untuk bersedia bekerjasama dengan Sukarno. Orang yang paling bisa disalahkan dalam kaitan dengan kerjasama dengan Sukarno adalah Subchan. Bagi AD, lebih baik bahwa orang yang tak jelas posisinya seperti Chalid itu berada dalam Presidium daripada orang yang potensial menjadi sumber masalah seperti Subchan.

Green

5. Kabinet Baru Sebagai Kekalahannya Bung Karno

Serupa dengan dokumen sebelumnya, dokumen yang juga tertanggal 25 Juli (waktu Washington) berikut ini sama-sama berisi reaksi AS terhadap diumumkannya Kabinet yang baru di Indonesia. Ditulis oleh Thomas L. Hughes dari Dinas Intelligence and Research untuk Menlu Rusk, laporan ini hanya ingin menggarisbawahi bahwa terbentuknya Kabinet baru berarti makin tergesernya peran Presiden Sukarno, atau bahkan merupakan “kekalahan” baginya.***

KABINET INDONESIA YANG BARU SEBAGAI KEKALAHAN BAGI SUKARNO⁸

Kabinet yang baru, yang susunannya diumumkan oleh Jenderal Soeharto pada tanggal 25 Juli [1966] merupakan suatu langkah pokok dalam upaya untuk menggeser Presiden Sukarno dari kekuasaan nyata ke posisi simbolik. Meskipun Sukarno berjuang keras untuk membujuk MPRS supaya ia diberi hak untuk ikut bersuara dalam penyusunan Kabinet, melakukan lobi terus-menerus agar para pendukungnya mendapat posisi, serta berjuang melawan jajaran kepemimpinan yang baru, Jenderal Soeharto mampu menguasai situasi dan berhasil menanamkan orang-orangnya di posisi-posisi kunci dalam Kabinet.

Hanya Konsesi Kecil untuk Sukarno. Triumvirat dari Kabinet sebelumnya tetap utuh. Soeharto sendiri akan duduk sebagai Ketua Presidium dan Menteri Pertahanan dan Keamanan; Adam Malik sebagai Menteri Pertama untuk Bidang Politik dan akan tetap menjabat sebagai Menteri Luar Negeri; Sultan Hamengku Buwono IX akan mempertahankan tugas-tugas sebelumnya namun dengan nama jabatan baru yakni

⁸ Laporan dari Thomas L. Hughes (INR/Intelligence and Research) untuk Menteri Luar Negeri AS, “Kabinet Indonesia yang Baru sebagai Kekalahannya bagi Sukarno”, 25 Juli 1966. Status: Rahasia/Tidak untuk Disebarluaskan ke Negara Lain. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #1.

Menteri Pertama Bidang Ekonomi dan Keuangan. Dua orang lain yang juga menjadi Menteri Pertama dan anggota Presidium adalah Idham Chalid, pemimpin Partai NU (Nahdlatul Ulama) untuk urusan Kesejahteraan Rakyat, dan Sanusi Hardjadinata, seorang tokoh PNI yang akan membawahi portofolio industri dan pembangunan. Keberadaan dua orang politisi ini terutama merupakan hasil konsesi Sukarno dan sejumlah partai politik. Tanpa keduanya Kabinet ini akan sepenuhnya diisi oleh teknokrat. Dua orang pendukung Sukarno dari Kabinet yang lalu, yakni Roeslan Abdulgani dan Johannes Leimena telah disingkirkan, meskipun Sukarno mati-matian membela mereka. Dubes Indonesia untuk Thailand yang sekaligus pro-Barat, yakni Burhanuddin Mohamad Diah, ditunjuk sebagai Menteri Penerangan menggantikan Roeslan Abdulgani. Salah satu perubahan terpenting adalah bahwa keduapuluh empat menteri bertanggung jawab langsung kepada Presidium, yang diketuai oleh Soeharto, dan bukan kepada Presiden, yang kini tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri melainkan melulu sebagai kepala negara.

Sang Pemimpin Besar Tampaknya Menyerah. Kalau dilihat secara keseluruhan, perkembangan di atas mencerminkan pukulan berat bagi posisi dan pengaruh Sukarno. Namun tampaknya ia menerima pukulan itu tanpa perlawanan. Sejumlah berita telegram menyatakan bahwa Presiden Sukarno mendukung Kabinet hasil susunan Soeharto itu dan memberi sinyal bahwa ia akan bersedia memberikan pidato pada saat pelantikan para menteri.

T.L. Hughes

6. Wayang dan Realitas Politik di Indonesia

*Cerita wayang adalah cerita fiktif, sementara dinamika politik adalah sebuah realitas. Meskipun demikian, menarik bahwa di Indonesia keduanya bisa saling bercampur dan saling memengaruhi. Setidaknya begitu pengamatan sejumlah diplomat Amerika yang agak terheran-heran namun berusaha untuk memahami. Dokumen berikut berasal dari memo D.W. Ropa (Staff National Security Council) yang ditulis tanggal 29 Juli 1966 ditujukan kepada W.W. Rostow (Asisten Khusus Presiden Johnson) berisi soal bagaimana mistisisme Jawa meresapi dinamika politik Indonesia. Dalam memo itu dilampirkan memo dari Dubes Green tanggal 20 Juli 1966 tentang bagaimana sebuah lakon wayang tiba-tiba diganti “hanya” karena takut akan menimbulkan persepsi tertentu mengenai suatu misi diplomatik yang sedang ditempuh. Tercatat pula dalam lampiran itu pandangan Menteri Koordinator Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Prijono, seorang simpatisan Komunis, tentang dinamika politik waktu itu.****

PENTINGNYA MISTISISME JAWA DALAM POLITIK INDONESIA SEKARANG⁹

Kalau Anda punya waktu luang, silakan baca catatan dari Dubes Marshall Green (terlampir) tentang kecenderungan orang Jawa untuk mengaitkan situasi politik yang ada sekarang dengan *lakon-lakon* yang ada dalam Kisah Ramayana sebagaimana diceritakan dalam pertunjukan Wayang Kulit (Lihat dokumen tanggal 20 Juli 1966-Pen.). Mistisisme Jawa sangat meresapi politik Indonesia dan sangat memengaruhi berbagai dinamika politik negeri tersebut.

Salah satu hal terpenting yang perlu kita sadari adalah bahwa Soeharto itu orang Jawa. Oleh karena itu ia bisa memahami Sukarno, sedangkan Nasution tidak. Waktu saya berada di Indo-

⁹ Memorandum dari D.W. Ropa untuk W.W. Rostow, “Pentingnya Mistisisme Jawa dalam Politik Indonesia Sekarang”, 29 Juli 1966. Status: Untuk Penggunaan Resmi Terbatas. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #112.

nesia dan sedang berurusan dengan Nasution melalui seseorang, suatu hari orang itu di rumah saya mengungkapkan kekesalannya. Sambil mengangkat kedua tangannya ke atas dia mengatakan bahwa Nasution sama sekali tidak mampu memahami psikologi Jawa. Kemudian orang itu memohon bahwa *kita* bersedia membantu Nasution supaya ia bisa memahami pikiran Jawa! Saya harus mengaku bahwa *kita* juga mempunyai kesulitan yang sama.

D.W. Ropa

Lampiran:

SATU MALAM SAAT PERTUNJUKAN WAYANG BERSAMA SIMPATISAN KOMUNIS PROFESOR DR. PRIJONO¹⁰

Agen yang menyampaikan laporan telah berkesempatan untuk bertemu dan berbincang-bincang selama beberapa jam dengan Profesor Dr. Prijono, saat diadakan pertunjukan Wayang tanggal 16 Juli [1966]. Prijono adalah seorang tokoh pendukung partai PKI-Murba yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan kemudian menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Prijono menyampaikan informasi-informasi di bawah ini. Beberapa sudah dikonfirmasikan kepada sumber-sumber informasi yang lain.

1. Chairul Saleh telah dikeluarkan dari penjara dan sekarang hidup dengan tenang di rumahnya sebagai tahanan kota. Tidak ada satu pun bukti yang mengaitkan dia dengan Gerakan 30 September, dan sepertinya tidak ada tanda

¹⁰ Telegram dari Kedubes Amerika (Jakarta) untuk Departemen Luar Negeri (Washington), 20 Juli 1966. Status: Rahasia. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #112a.

bahwa ia pernah akan mencoba korupsi. Begitu menurut Prijono.

2. Usaha-usaha untuk menghidupkan kembali Partai Murba kemungkinan besar tidak akan berhasil. Prijono mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Adam Malik kurang berminat untuk merehabilitasi Murba. Dia lebih berminat untuk membentuk partai baru yang menggabungkan elemen-elemen dari PSI dan Murba. Sebaliknya, Partai Murba sayap Prijono menolak rencana ini... Kemungkinan besar karena takut bahwa partai Murba nantinya akan tenggelam dalam partai baru tersebut, meskipun Prijono tidak mengatakan hal ini. Prijono mengatakan kelompoknya belum dapat mencapai kesepakatan dengan Sukarno tentang rehabilitasi Murba, tetapi menduga keras bahwa “tentara telah menyetujui rencana tersebut”. Ketika ditanyai tentang apa dan siapa yang dimaksud dengan “rencana” dan “tentara”, Prijono bergumam tentang mendapatkan persetujuan dari Jenderal Soeharto tetapi tidak dijelaskan lebih jauh. Prijono mengatakan bahwa Wasid Suwarto, seorang pengusaha berumur 33 tahun sebagai Ketua Jenderal Murba, sekarang menghabiskan semua waktunya bekerja dalam hal-hal yang menyangkut kepartaian.
3. Seperti kebanyakan bekas simpatisan Komunis yang ditemui akhir-akhir ini, Prijono berusaha keras untuk menekankan bahwa sekarang ini ia adalah juga sebagai pendukung Amerika, sebuah posisi yang sebenarnya anti-Komunis. Ia mengklaim telah mengambil bagian dan turut bertanggung jawab dalam gerakan anti-PKI BPS (lihat di bawah) dan berbicara seolah-olah ia sangat dekat dengan Malik. Dengan wajah meyakinkan, ia mengatakan ia telah secara pribadi bertanggung jawab terhadap “pelarangan” PKI ketika ia masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar. Selama

masa jabatannya ia hanya mengizinkan 40 pelajar/mahasiswa untuk belajar ke negeri Cina Komunis (ia tidak menyebutkan ribuan lainnya yang telah ia izinkan untuk pergi ke Moskow).

Prijono mengatakan bahwa anak laki-laki tertuanya baru-baru ini telah menyelesaikan sekolahnya selama 4 tahun di bidang pembuatan film di Uni Soviet. Ia mengatakan bahwa Duta Besar Jones pernah menyampaikan padanya bahwa juga disediakan beasiswa untuk pelatihan yang sama dan ia bertanya apakah mungkin anaknya bisa belajar tentang pembuatan film di Hollywood selama empat tahun atas pemberian Pemerintah Amerika Serikat untuk memastikan bahwa ia tidak mendapatkan “pandangan yang salah tentang segala sesuatu” dari tahun-tahun yang telah dilaluinya di Moskow. Ketika agen yang melaporkan bertanya kapan anaknya akan menyelesaikan pelatihannya dan mulai membuat film, Prijono menjawab bahwa mungkin sekali ia akan mendapatkan pekerjaan di pemerintahan dan tidak akan pernah memproduksi satu pun film yang “terlalu mahal untuk dibuat di Indonesia”.

Komentar: Prijono adalah seorang tokoh pemimpin sebagian kecil Murba sayap PKI yang tidak setuju dengan sayap Saleh-Malik-Sukarno beberapa tahun lalu. Ia tidak pernah turut ambil bagian dalam kegagalan gerakan BPS yang dimulai oleh Saleh, Malik, Sukarni dan pengkhianat PKI-PNI Sajuti Melik pada akhir 1964. Setelah BPS dilarang, Prijono diserang oleh kalangan pers PNI karena keterkaitannya dengan Murba. Pada suatu saat ia merasa harus menulis dan menerbitkan surat pribadi ditujukan kepada Sukarno yang menyatakan penolakannya terhadap keikutsertaannya dalam “Gerakan Membunuh Sukarnoisme dan Sukarno”, dengan menawarkan untuk membunuh dirinya sendiri jika Presiden menghendaki. Sayangnya

Presiden tidak menghendaki, dan Prijono turut ambil bagian dalam usaha setengah hati yang gagal untuk menghidupkan kembali Murba di bawah sayap kepemimpinannya pada awal dan pertengahan tahun 1965.

Prijono kemudian diserang oleh pers PKI bulan Agustus 1965 karena telah melakukan diskriminasi melawan Pemuda Rakjat dalam rombongan kebudayaan yang dipimpinnya ke Korea Utara dan Cina pada waktu itu. Pendiskriminasian ini benar, tetapi sebenarnya merupakan bagian dari rencana Saleh beberapa bulan sebelumnya. Rombongan tersebut sebenarnya telah dijadwalkan untuk mengadakan pertunjukan di New York World's Fair dan telah dipilih oleh Saleh (yang menggantikan Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Ketua Komite Indonesian World's Fair). Ketika Sukarno membatalkan keikutsertaan Indonesia dalam New York World's Fair, rombongan dikirim bersama Prijono.

Prijono ditunjuk sebagai Menteri Koordinator bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam kabinet "pancingan" yang diumumkan oleh Sukarno pada tanggal 21 Februari 1966. Bersama dengan menteri-menteri lainnya ia diterbangkan dengan helikopter untuk dilantik pada tanggal 24 Februari. Pada awal masa-masa keberhasilan Surat Perintah 11 Maret, ia "ditahan" oleh pelajar dan mahasiswa KAMI/KAPPI, tetapi dibebaskan oleh tentara. Minggu-minggu terakhir ini ia sekali lagi berusaha untuk merehabilitasi Murba sayap kiri, saat ini dengan berkolusi dengan Presiden Sukarno, yang (sebagaimana diketahui) akhir-akhir ini sedang mengais-ngais sana-sini untuk mencari dukungan. Telegram A-745 melaporkan usaha-usaha tersebut.

Ini ada sesuatu yang lain tetapi penting untuk disebut, karena menunjukkan sekali lagi betapa peka dan erat terkaitnya politisi dan politik di Indonesia dengan pertunjukan wayang. Lima menit sebelum pertunjukan diumumkan bahwa lakon yang

sebenarnya mau dimainkan terpaksa dibatalkan karena “izin polisi telah ditarik atas petimbangan situasi akhir-akhir ini”. Lakon yang sebenarnya dipilih dalam pertunjukan wayang tersebut adalah “Kresna Duta” yang sangat terkenal, yang menceritakan tentang usaha diplomatik terakhir Pandawa dalam rangka mencapai penyelesaian secara damai dalam pembagian Kerajaan Ngastina dengan Raja Sujudana dari pihak Kurawa. Sujudana siap menerima Kresna dengan penuh kepercayaan, tetapi pada saat-saat terakhir berhasil dipengaruhi oleh Perdana Menteri Sengkuni dan Menteri Luar Negeri Durna untuk menyerang secara tiba-tiba dan membunuh Kresna setelah putaran pertama pembicaraan tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi Kresna yang pintar dan cerdik melarikan diri dan dengan sangat marah kembali ke lingkungan Pandawa untuk membantu mereka merencanakan kampanye Baratayudha Jayabining, perang besar-besaran di mana semua Kurawa terbunuh.

Menurut Prijono, lakon ini tidak dipertunjukkan karena dapat mengundang berbagai macam kritikan terhadap perjalanan Adam Malik ke Bangkok untuk menyelesaikan perselisihan dengan Malaysia. Tetapi hal ini hanya pendapat Prijono pribadi, mungkin berdasarkan tidak adanya lagi informasi tambahan dari agen yang melaporkan. Sebagai ganti dari “Kresna Duta”, penonton menghabiskan malam itu (pertunjukan wayang berlangsung sampai pukul 05:30) menonton “Lahirnya Wisanggeni” (anak pertama Arjuna), yang secara politis identik dengan “kelahiran” gerakan pelajar dan mahasiswa KAMI dan KAPPI dan dengan “Generasi ‘66” umumnya. Lakon ini kemudian secara politis menjadi “tren” dan sering dimainkan.

Green

7. Kabinet Baru, Kemenangan Bagi Soeharto

Sekali lagi, diumumkannya Kabinet baru pada tanggal 25 Juli dan pelantikannya pada tanggal 28 Juli merupakan berita baik yang disambut dengan senang hati oleh AS. Sebagaimana tercermin dalam dokumen sebelumnya, disingirkannya para pendukung Bung Karno dan naiknya orang-orang yang pro-Soeharto dipandang sebagai kemenangan bagi Jenderal Soeharto dengan segala kepentingannya. Apalagi ketika diketahui bahwa keinginan Bung Karno untuk ikut menyusun daftar para menteri (bahkan untuk turut menentukan pejabat-pejabat di bawah level menteri) sama sekali ditolak.

*Amerika sangat berharap bahwa Kabinet yang baru ini akan membalik kebijakan-kebijakan Presiden Sukarno, baik dalam bidang politik maupun bidang ekonomi. Dalam kaitan dengan bidang ekonomi Amerika menduga bahwa kemungkinan besar pemerintahan yang baru akan memperbanyak perjalanan ke luar negeri guna mendapatkan pinjaman asing. Dalam dokumen CIA tertanggal 30 Juli 1966 di bawah ini semua itu terlihat jelas.****

KABINET BARU INDONESIA¹¹ (MEMORANDUM INTELIJEN, DIREKTORAT INTELIJEN CIA¹²)

Rangkuman

Kabinet baru Indonesia yang dilantik pada tanggal 28 Juli adalah sebuah kemenangan lagi untuk panglima militer Jenderal Soeharto atas Presiden Sukarno. Walaupun Sukarno sangat berkeberatan, Soeharto menjadi ketua Kabinet tersebut, dan dua anggota Triumvirat yang lain yang memimpin pemerintahan yang lalu —Adam Malik dan Sultan Yogyakarta— juga dipertahankan. Kabinet menunjukkan kompromi antara militer dan partai

¹¹ Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #111a. Secret.

¹² Memorandum ini disiapkan oleh Office of Current Intelligence dan Office of Central Reference/Biographic Register, dan telah dikoordinasi dengan Office of National Estimates, Office of Research and Reports, serta Deputy Director of Plans.

politik, dan, pada tingkat tertentu, dengan Sukarno. Kabinet ini mungkin lemah dari sisi ekonomi, tetapi lebih baik daripada pemerintahan Indonesia beberapa tahun terakhir.

Triumvirat yang ada sekarang mungkin akan melanjutkan tujuan-tujuan yang mau dicapai oleh Kabinet sebelumnya. Misalnya perang melawan Komunisme, stabilisasi ekonomi, dan—melalui kebijakan luar negeri “bebas-aktif”—membangun kembali hubungan dengan negara-negara Barat dan mencari bantuan ekonomi dari negara Barat maupun negara-negara blok Komunis.

Dengan dikendalikannya situasi politik dalam negeri sekarang ini oleh militer, kalangan sipil non-Komunis berharap bahwa Kabinet ini akan mampu mengambil langkah-langkah yang efisien guna mengatasi krisis ekonomi Indonesia yang parah. Tampaknya, itu pula yang menjadi harapan pemerintah. Walaupun tampaknya keadaan ekonomi akan memburuk sebelum bisa sungguh-sungguh membaik, Indonesia mungkin masih akan bisa bertahan, setidaknya untuk beberapa bulan mendatang, dengan menggunakan kredit luar negeri terbatas dan dengan memanipulasi dana-dana yang ada, khususnya dalam instansi-instansi pemerintah. Harapan mereka adalah bahwa negara-negara kreditor dapat meringankan jadwal pembayaran terhadap hutang luar negeri Indonesia yang begitu besar dan akan segera diadakan pembicaraan tentang bantuan ekonomi luar negeri yang berskala besar.

1. Kabinet baru Indonesia yang beranggotakan 27 orang Menteri dan dilantik pada 28 Juli, seperti yang sudah diduga, adalah kemenangan bagi Jenderal Soeharto dalam usahanya mengurangi kekuasaan dan wibawa presiden Sukarno. Tidak hanya menjadi pemimpin Kabinet, Soeharto juga mempertahankan dua anggota Triumvirat dari pemerintahan sebelumnya, yakni Adam Malik dan Sultan Yogyakarta. Walaupun ditentang oleh Sukarno, Triumvirat ini adalah sebuah tim yang dapat bekerjasama dengan baik dan merupakan kombinasi unik yang dapat diterima oleh militer maupun kalangan sipil Indonesia.

Presidium

2. Soeharto adalah ketua merangkap anggota Kabinet “presidium” dari lima “menteri pertama.” Setiap menteri pertama membawahi sebuah kelompok portofolio. Soeharto membawahi sektor pertahanan dan keamanan Kabinet, dan, sebagai seorang panglima militer, ia memegang portofolio militer. Adam Malik —selain Soeharto mungkin dia adalah orang yang paling cakap dalam Kabinet ini— membawahi sektor politik dan juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Sultan Yogyakarta tidak membawahi portofolio, tetapi sebagai menteri pertama urusan ekonomi dan keuangan, dia akan membawahi enam kementerian. Dua menteri pertama yang lain tidak memegang portofolio dan mewakili dua partai politik terbesar di Indonesia: Chalid mewakili Nahdatul Ulama (NU) dan Sanusi mewakili Partai Nasional (PNI). Chalid membawahi kementerian yang berurusan dengan masalah kesejahteraan rakyat. Sanusi akan membawahi kementerian yang berkaitan dengan industri dan pembangunan.

Triumvirat

3. Triumvirat tetap merupakan inti dari Kabinet. Keberadaan Soeharto dan Sultan, keduanya orang Jawa, memberi kekuatan tersendiri pada pemerintahan yang baru: Soeharto memberi dimensi kekuatan militer, sedang Sultan menyumbangkan sisi seorang aristokrat yang berpendidikan tinggi dan terbuka. Keduanya juga membantu memahami dengan baik kompleksitas kehidupan orang Jawa. Adam Malik, orang Sumatra, mewakili wilayah luar Jawa dan membawa ke dalam Kabinet semangat keberanian dan negarawan yang cerdas.

4. Masing-masing anggota Triumvirat memiliki akar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Malik, yang aktif berpolitik sejak sebelum Perang Dunia II, memiliki catatan panjang perjuangan yang tak kunjung henti. Soeharto mempunyai catatan yang bagus dalam perjuangan militer melawan Belanda, dan ia

juga berperan dalam menumpas pemberontakan Komunis tahun 1948 di Madiun, Jawa Timur. Sultan mendukung revolusi kemerdekaan. Dialah yang, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Luar Negeri, pada tahun 1949 menerima penyerahan kedaulatan dari Belanda di Jakarta.

5. Soeharto dan Sultan tidak pernah bergabung dengan partai politik, tetapi keduanya condong ke nasionalisme sekular. Malik hampir tidak mempunyai pengikut yang terorganisir — fakta yang membuat dia disukai oleh Soeharto dan dalam waktu yang sama membebaskannya dari urusan golongan yang setia padanya. Malik berorientasi pada sosialis pragmatis dan, dalam kapasitasnya sebagai pemimpin urusan politik, saat ini mengusulkan gerakan yang dinamakan “Sosialisme Pancasila.” Partai-partai muslim tidak menyukai Malik, karena takut bahwa keberadaannya dalam Kabinet presidium akan membahayakan masa depan politik mereka. Ketiga Triumvirat adalah Muslim, dan kemungkinan Malik adalah yang paling taat.

Komposisi Kabinet

6. Komposisi Kabinet merupakan hasil kompromi antara militer, partai-partai politik, dan Sukarno. Tetapi, satu-satunya akomodasi yang diberikan oleh pihak militer kepada Sukarno adalah penunjukan Chalid, ketua NU yang ... [*gambaran negatif—Pen*]. Kabinet tersebut cukup mengecewakan bagi sejumlah orang Indonesia, termasuk Adam Malik, yang mengharapkan bahwa Kabinet itu terdiri dari teknokrat yang handal. Para pengkritik menyatakan bahwa tiadanya keahlian dalam sejumlah posisi Kabinet merupakan akibat dari pemberian konsesi kepada Sukarno.

7. Dalam Kabinet ini partai-partai politik memainkan peran sekunder setelah militer, namun mereka memiliki posisi yang lebih kuat dalam pemerintahan daripada yang mereka miliki selama beberapa tahun yang terakhir ini. Lima partai memegang delapan

portofolio. NU, PNI, Partai Katolik yang kecil masing-masing memegang dua; Partai Kristen (Protestan) dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) yang pro-militer masing-masing memiliki satu portofolio.

8. Soeharto mengklaim bahwa partisipasi politik dalam pemerintahan didasarkan pada unsur-unsur utama yang ada dalam masyarakat Indonesia. Soeharto menggolongkan unsur-unsur itu menjadi tiga, yakni unsur nasionalis, unsur religius, dan unsur “Sosialis Pancasila.” Dengan begitu ia mempertahankan gagasan NASAKOM-nya Sukarno dengan mengubahnya sedikit menjadi NASASOS. (NASAkom adalah akronim dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme; NASASOS adalah akronim yang sama dengan mengganti Komunisme menjadi Sosialisme).

9. Perwira militer—termasuk wakil dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian—memiliki 12 portofolio. Enam dari itu —urusan militer, urusan veteran, urusan dalam negeri, perdagangan, pertanian, dan industri dasar—dipegang oleh perwira militer.

10. Sektor ekonomi dan keuangan di bawah kepemimpinan Sultan Yogyakarta tampaknya menjadi titik terlemah dalam Kabinet dan menjadi target utama keluhan Malik. Malik khawatir bahwa orang-orang yang diberi jabatan dalam portofolio ekonomi —beberapa dari militer dan beberapa dari mereka yang disebut teknokrat— tidak kompeten untuk tugas-tugas mereka. Sumber-sumber lain juga menyangsikan kompetensi teknis dari beberapa menteri dan menyatakan bahwa beberapa dari mereka itu dikenal oportunistis dan korup. Sultan sendiri memberi warna integritas dan wibawa ke dalam Kabinet tetapi ia tidak memiliki latar belakang bidang ekonomi. Meskipun demikian, terdapat kemungkinan bahwa banyak ahli ekonomi yang terlatih akan mengisi posisi-posisi terkemuka di bawah level menteri. Soeharto menyampaikan laporan yang bisa dipercaya

bahwa ia telah menolak permintaan Sukarno untuk ikut terlibat dalam pemilihan para pejabat di bawah level menteri itu.

11. Dengan demikian ekonomi Indonesia mau tak mau akan menjadi masalah politik, mengingat bahwa lambatnya rehabilitasi ekonomi akan mengecewakan banyak elemen di Indonesia. Dalam situasi demikian, mungkin wibawa Sultan akan memiliki nilai politik yang penting dalam rangka mencari kepercayaan masyarakat. Walaupun pengikut sertaan menteri-menteri yang tidak kompeten di bidangnya mungkin dilakukan sebagai akibat konsesi dengan Sukarno, namun dapat saja hal itu menunjukkan adanya keputusan dari Soeharto untuk mencari cara-cara yang tidak biasa untuk sekedar membantu supaya pemerintahan masih bisa berlangsung. Beberapa menteri dilaporkan telah membuktikan diri mampu mengoperasikan dana untuk pemerintahan selama periode yang kacau-balau setelah percobaan kudeta Oktober lalu, dan Soeharto berharap mereka dapat mengulangi prestasi tersebut di masa depan.

Kebijakan Kabinet

12. Badan pembuat kebijakan tertinggi negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), pada bulan Juni merumuskan empat program besar bagi pemerintah yang akan datang. Program tersebut, yang kebijakannya mengikuti kebijakan yang sudah dibuat Kabinet sebelumnya, mendesak untuk segera diatasinya masalah ekonomi, untuk tetap dipertahankannya politik bebas aktif, dan untuk segera diadakan pemilihan umum. Program tersebut juga mengulangi kata-kata klise untuk memerangi “kolonialisme, imperialism, dan neokolonialisme.”

13. Para anggota Triumvirat tampaknya akan mempertahankan kebijakan mereka. Di dalam negeri, Soeharto telah mulai bergerak untuk mengembalikan pemerintahan konstitusional (meskipun tidak sepenuhnya), mempertahankan kontrol politik, mengakomodasi—tapi tetap di dalam koridor kebijakan militer—

permintaan kelompok-kelompok non-Komunis, mengurangi pengaruh dan wibawa Sukarno secara bertahap, serta melanjutkan upaya untuk menghabisi kelompok Komunis. Pemilihan umum akan diadakan sebelum Juli 1968. Terdapat indikasi bahwa Pemilu baru bisa diadakan paling cepat akhir 1967.

14. Dalam bidang kebijakan luar negeri, Indonesia akan membina kembali hubungan dekat dengan negara-negara Barat dan meninggalkan kebijakan Sukarno yang pro-Peking. Menlu Malik berharap Indonesia bisa kembali menjadi anggota PBB September mendatang. Indonesia mengurangi kehadiran diplomatiknya di Afrika, dan setidaknya untuk saat ini, menunjukkan berkurangnya minat untuk mempertahankan ambisi Sukarno menjadi pemimpin negara-negara Asia-Afrika.

15. Kabinet baru mungkin akan meneruskan langkah-langkah yang telah ditempuh untuk mengakhiri Konfrontasi melawan Malaysia dan Singapura yang telah berlangsung selama tiga tahun. Perundingan dengan Malaysia akhir Mei lalu telah menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian, meskipun sejauh ini Jakarta masih menolak untuk menandatangani kesepakatan itu, dengan alasan situasi politik dalam negeri Indonesia belum memungkinkan. Jakarta mengakui pemerintah Singapura awal Juni dan telah mengirim misi untuk membicarakan dimulainya kembali hubungan perdagangan. Terdapat indikasi bahwa Indonesia menginginkan keuntungan ekonomi dan diplomatik yang akan terjadi dengan berakhirnya Konfrontasi, tetapi akan terus mendukung upaya penggulingan kekuasaan internal di wilayah Sabah dan Serawak dengan harapan pada suatu saat dapat memisahkan Kalimantan Utara dari Malaysia.

16. Di bidang ekonomi Soeharto dan rekan-rekannya telah mengurangi pengeluaran domestik yang tidak perlu dan telah mengupayakan pinjaman terbatas dari beberapa negara Barat. Indonesia telah mendaftar kembali ke Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia. Indonesia sudah setuju bahwa setiap

upaya penjadwalan kembali pembayaran utang Indonesia akan diputuskan dengan dasar multilateral. Pertemuan untuk membicarakan masalah hutang tersebut dijadwalkan akan diadakan di Tokyo pada pertengahan September, dan sembilan negara atau lebih akan turut ambil bagian —Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Belanda, Jerman, Italia, Prancis, Australia, dan Selandia Baru, dan mungkin Kanada dan Pakistan.

17. Soeharto dan orang-orang di sekitarnya, baik militer maupun sipil, mendasarkan harapan akan adanya kemajuan ekonomi pada suntikan bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri itu diharapkan akan menjadi pemacu stabilisasi dan perkembangan ekonomi untuk jangka panjang. Sultan Yogyakarta berencana untuk mengunjungi beberapa negara Eropa Barat pada akhir Agustus guna membicarakan prospek bantuan. Pada pertengahan September mungkin ia akan ikut dalam pertemuan para kreditor untuk Indonesia di Tokyo. Pada bulan September itu pula ia berencana mengunjungi Amerika Serikat. Menlu Adam Malik telah merencanakan kunjungan ke Uni Soviet untuk membicarakan penjadwalan kembali pembayaran hutang (Uni Soviet adalah kreditor tunggal terbesar Indonesia) dan menjajaki kemungkinan bantuan ekonomi dari Soviet. Belum ada tanggal yang jelas.

Tambahan

[Satu alinea dirahasiakan.]



Menuju puncak kekuasaan: Soeharto mulai menduduki kursi Kepresidenan Republik Indonesia. (sumber: Deppen RI)

BAB 8

AGUSTUS 1966: SUPERSEMAR DAN BERAKHIRNYA KONFRONTASI

1. Pengantar

Ada dua hal yang mendominasi perhatian Washington berkaitan dengan Indonesia pada awal bulan Agustus 1966. Yang pertama adalah masalah bagaimana membantu pemulihan ekonomi Indonesia, dan yang kedua menyangkut masalah sejauh mana keberhasilan upaya de-Sukarnoisasi sebagaimana telah kita singgung di bab terdahulu. Terhadap yang pertama jawaban Amerika adalah bahwa pemulihan ekonomi itu akan bisa terjadi kalau terjalin kerjasama multilateral negara-negara blok Barat (termasuk Amerika) untuk membantu Indonesia. Dalam hal ini tampaknya Amerika masih ingin mengambil posisi yang tidak terlalu mencolok. Terhadap masalah kedua dikatakan bahwa kemungkinan bangkitnya kembali Sukarnoisme memang masih ada, namun itu kemungkinan yang amat kecil. Menurut Menlu AS Dean Rusk, kalau sampai Sukarnoisme bangkit kembali akan ada banyak kalangan militer yang terkena imbasnya atau bahkan terancam hidupnya. Oleh karena itu menurutnya militer akan memastikan bahwa Sukarnoisme tidak akan pernah bangkit lagi.

Pada paro kedua bulan Agustus itu perhatian Amerika terhadap Indonesia bergeser ke masalah hubungan Indonesia-Malaysia, menyusul diakhirinya Konfrontasi antara kedua Negara secara resmi pada tanggal 11 Agustus 1966. Semboyan “Ganyang Malaysia” yang dulu amat populer pada masa Konfrontasi (sebagai

salah satu bentuk perlawanan terhadap neo-kolonialisme dan neo-imperialisme) kini akan segera berlalu. Pada satu sisi Amerika senang bahwa Konfrontasi berakhir. Bagi Amerika berakhirknya Konfrontasi (yang diketahui umum sebagai salah satu “proyek favorit” Bung Karno) berarti tanda yang jelas bagi suksesnya Supersemar dan makin minimnya pengaruh Bung Karno beserta para pendukung kiri-nya. Namun demikian pada sisi lain Amerika juga sadar bahwa dengan berakhirknya Konfrontasi akan ada masalah-masalah lain yang mungkin timbul, dari masalah merosotnya pengaruh militer Inggris di bekas wilayah jajahannya di Asia Tenggara hingga masalah akan terus tingginya ambisi Indonesia untuk mendominasi wilayah-wilayah di sekitarnya. Amerika membutuhkan sikap tertentu guna mengantisipasi kemungkinan munculnya masalah-masalah baru tersebut.

2. Mencegah Bangkitnya Kembali Sukarnoisme

Pada tanggal 4 Agustus 1966 di Washington berlangsung rapat National Security Council (NSC) guna membahas perkembangan terakhir di Indonesia. Rapat tersebut dihadiri oleh Presiden Johnson, Menteri Luar Negeri (Menlu) Dean Rusk, serta sejumlah pejabat lain dari lingkungan Gedung Putih, Departemen Luar Negeri dan NSC. Sebagaimana dapat dilihat dari catatan rapat tersebut oleh W.J. Jorden di bawah ini, pembicaraan berkisar pada masalah pentingnya memberikan bantuan ekonomi kepada Indonesia untuk bisa bangkit kembali, dan pada bagaimana bantuan itu harus disampaikan. Para peserta rapat menekankan perlunya kerjasama multilateral, artinya bekerjasama dengan banyak negara lain, dalam upaya mengumpulkan dan menyalurkan dana untuk Indonesia.

*Dalam rapat itu Presiden Johnson sempat bertanya mengenai seberapa besar kemungkinan Bung Kurni dan kawan-kawan bangkit dan berkuasa kembali. Menlu Rusk mengatakan bahwa kalau sampai Bung Kurni bangkit kembali banyak orang dari kalangan militer akan terancam hidupnya. Oleh karena itu, menurutnya militer akan berusaha mati-mati untuk mencegah bangkitnya kembali Sukarnoisme.****

NATIONAL SECURITY COUNCIL (NSC) TENTANG INDONESIA¹

Presiden [Johnson] membuka rapat dengan permintaan agar para peserta rapat memberi perhatian khusus pada perkembangan terakhir politik di Indonesia yang sedang mengalami perubahan dramatis serta pada orientasi politik negara tersebut. Dia sejenak mengenang bagaimana baru setahun yang lalu NSC (*National Security Council*) mengadakan rapat dan memutuskan untuk

¹ Notes of the 563rd Meeting of the National Security Council, Washington, August 4, 1966. *Foreign Relations of the United States, Vol XXVI, Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines* (Washington: United States Government Printing Office, 2001), hlm. 459-462. Status: Rahasia. Sumber: Johnson Library, National Security files, NCS Meetings, Vol 4, Tab 4, 8/14/66, Indonesia.

memotong hampir semua program bantuan AS untuk Indonesia, karena waktu Indonesia itu sedang bergerak dengan cepat untuk menjadi negara Komunis.

Dia meminta Menteri Luar Negeri Dean Rusk dan Tn. Helms untuk melaporkan perkembangan terakhir di Indonesia.

Menlu Rusk mengatakan bahwa dalam perjalanannya baru-baru ini ke Asia, ia menyaksikan banyak sekali tanda akan adanya suasana baru dan rasa percaya diri yang baru pula di Asia. Menurut dia perubahan suasana di Asia disebabkan oleh dua faktor:

- (1) Komitmen kita untuk kokoh berdiri di Viet-Nam dan untuk membantu mempertahankan keamanan fisik wilayah itu.
- (2) Pemberikan total politik Indonesia.

Sebuah pertanyaan penting adalah apakah perubahan yang terjadi di Indonesia itu akan langgeng. Menurutnya, dengan melihat berbagai faktor yang ada, tampaknya perubahan itu akan langgeng. Memang ada kemungkinan kembalinya Sukarnoisme. Ada pula kemungkinan pertentangan internal di kalangan Angkatan Bersenjata yang mengarah pada konflik terbuka. Namun menurut Menlu kemungkinan-kemungkinan itu hanya kecil.

Berkaitan dengan masalah Konfrontasi dengan Malaysia, kemungkinan untuk segera berakhir sangat besar.

Masalah utama Indonesia sekarang ini menurutnya adalah masalah ekonomi. Ia menggarisbawahi masalah hutang luar negeri dan perlunya penjadwalan kembali pembayaran pinjaman asing. Ia menekankan besarnya hutang Indonesia pada Uni Soviet dan kita perlu hati-hati supaya jangan sampai kita membantu Indonesia, namun bantuan itu digunakan untuk membayar hutang ke Uni Soviet.

Menurut perkiraannya, jumlah bantuan yang dibutuhkan Indonesia dari kita adalah US\$50 juta untuk tahun pertama.

Ia menekankan perlunya kerjasama multilateral dalam menyediakan bantuan untuk Indonesia. Menurut dia dalam hal ini peran Jepang akan sangat penting.

Mengenai kebijakan AS, Menlu Rusk mengatakan bahwa selama ini kita dengan sengaja bersikap hati-hati terhadap Indonesia. Hal ini dilakukan sesuai dengan permintaan Indonesia agar kita tidak memainkan peran yang terlalu besar atau mencolok. Mereka dan kita sepakat, reaksi AS yang terlalu berlebihan terhadap apa yang berlangsung secara internal di Indonesia sekarang ini dapat menjadi “ciuman maut” yang justru akan mematikan pemerintahan yang baru.

Dalam jangka pendek, bantuan kita akan disampaikan terutama melalui program PL-480. Melalui program itu kita telah menjual beras dan kapas kepada Indonesia.

Ia mengatakan, kita sedang mencoba memecahkan masalah Amandemen Hickenlooper, yang menuntut bahwa bantuan kepada Indonesia itu harus sesuai dengan kepentingan nasional kita. Kita akan mengusahakan Ketetapan Presiden (*Presidential Determination*) untuk itu. Untuk itu pula kita akan menunggu langkah-langkah yang ditempuh oleh pihak Indonesia.

Ia mengatakan pentingnya mengupayakan agar Indonesia dan IMF bekerjasama guna menyusun rencana pembangunan yang komprehensif bagi Indonesia.

Mau tidak mau nantinya kita harus mengambil keputusan untuk membedakan apa yang dimauि oleh Indonesia dan bantuan ekonomi macam apa yang menurut kita akan bisa mereka gunakan secara efektif.

Menlu Rusk meringkas laporannya dengan mengatakan:

- Masalah Indonesia itu adalah masalah yang vital;
- Kita harus siap untuk bergerak secara cepat dan efektif;

- Kita harus mencoba mempercepat pendekatan multilateral atas masalah penjadwalan kembali pembayaran hutang dan masalah bantuan kepada Indonesia.

Menlu mengatakan, ia merasa bahwa secara umum Kongres akan mendukung langkah-langkah yang akan kita tempuh.

Tn. Helms memulai pembicarannya dengan berkata bahwa ia setuju dengan uraian permasalahan yang baru saja disampaikan oleh Menlu Rusk.

Berkaitan dengan masalah Konfrontasi, [*kurang dari satu baris dirahasiakan*] Menteri Luar Negeri Malaysia Razak akan berkunjung ke Jakarta pada akhir bulan Agustus. Ia akan mengadakan persetujuan dengan Indonesia bahwa:

- (1) Konfrontasi harus diakhiri
- (2) Hubungan diplomatik penuh harus dijalin kembali segera setelah ada kepastian bahwa Sabah dan Sarawak memang ingin bergabung dengan Malaysia sebagai keluarga.

Sehubungan dengan pemerintahan yang ada di Indonesia sekarang ini, Tn. Helms mengatakan bahwa Kabinet yang ada ini adalah Kabinet yang terbaik selama beberapa tahun terakhir ini. Ia mengakui Kabinet ini agak lemah dari sisi ekonomi. Namun, ia tegaskan, Kabinet ini amat mendukung Triumvirat dan sangat memperkuat posisi Triumvirat itu. Ia mengatakan bahwa ketiga anggota Triumvirat (Soeharto, Adam Malik dan Sultan Yogyakarta) semuanya adalah orang-orang baik dan berkat mereka pemerintah sekarang ini memiliki kewibawaan dan stabilitas.

Ia menggarisbawahi adanya banyak masalah ekonomi, misalnya bahwa 55% dari sistem transportasi Indonesia tidak jalan.

Presiden Johnson mengatakan bahwa kita sebaiknya mengikuti garis kebijakan yang telah diutarakan oleh Menlu Rusk. Ia menekankan pentingnya kita terus mengusahakan agar Kongres bisa mengikuti perkembangan yang terjadi di Indonesia berikut tanggapan dan pemikiran kita mengenai perkembangan itu. Ia

lalu bertanya kepada Wakil Presiden Humphrey, menanyakan bagaimana pendapatnya.

Wapres Humphrey setuju bahwa kita harus mengusahakan supaya Kongres bisa selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di Indonesia. Ia mengatakan bahwa di Capitol Hill sekarang ini suasannya amat kondusif. Menurutnya banyak anggota Kongres merasa bahwa apa yang terjadi di Indonesia itu merupakan buah dari komitmen kita di Viet-Nam.

Ia menekankan betapa pentingnya usaha kita dalam mendukung negara-negara lain guna membantu Indonesia dalam membangun kembali ekonominya. Ia katakan bahwa ia telah bicara dengan Menteri Miki dari Jepang mengenai hal ini dan baru-baru ini Jepang telah memberikan pinjaman kepada Indonesia sebesar US\$30 juta.

Peran IMF [*International Monetary Fund*] juga dibicarakan. Dibahas pula masalah hutang Indonesia kepada IMF sebesar US\$47 juta, suatu masalah yang harus segera dicari jalan keluarnya.

Presiden Johnson bertanya kepada Tn. Rostow, apa pendapatnya.

Tn. Rostow mengatakan ada dua hal yang patut dicatat:

- (1) Indonesia dapat menjadi titik tolak bagi terbangunnya suatu pola kerjasama multilateral yang baru di Asia;
- (2) Apa yang terjadi sekarang ini membuka kesempatan untuk mengaitkan bantuan multilateral dengan *Asian Development Bank* (ADB) yang baru saja didirikan.

Kasus bantuan untuk Indonesia dapat dijadikan proyek perintis bagi pembentukan kerjasama semacam CIAP di Amerika Latin, tapi untuk Asia. Negara-negara Asia yang membutuhkan bantuan seharusnya pergi ke Manila, dan bukan ke Paris. Jika demikian, sebuah pola yang baru dan menarik akan lahir dan nanti harus didorong.

Presiden bertanya, apakah itu tidak mirip dengan rekomendasi untuk Afrika sebagaimana yang disampaikan dalam laporan Korry.²

Menlu Rusk mengatakan bahwa [Bank] Pembangunan Afrika agak lemah, tapi Bank Pembangunan Asia akan sungguh-sungguh kuat.

Presiden bertanya berapa kira-kira besarnya bantuan yang mau diberikan untuk Indonesia.

Tn. McNaughton mengatakan bahwa jumlah bantuan militer tidaklah besar — hanya kurang dari US\$10 juta.

Menlu Rusk memperkirakan bahwa jumlah keseluruhan bantuan — termasuk PL-480 dan kerjasama bantuan multilateral — yang dibutuhkan akan kurang dari US\$100 juta.

Sempat dibahas pula secara singkat tentang besarnya bantuan untuk Viet-Nam.

Tn. Gaud mengatakan bahwa berkaitan dengan soal Vietnam masalah utamanya bukan masalah uang, melainkan masalah prioritas serta kemampuan rakyat Vietnam untuk melaksanakannya.

Tentang Indonesia, Tn. Gaud menegaskan bahwa tekanan pada kerjasama multilateral memang sangat penting. Ia katakan bahwa kasus Indonesia dapat menjadi sumber jawaban yang tepat bagi pertanyaan Senator Fulbright.

Dia juga mengingatkan bahwa persyaratan bagi bantuan tambahan mungkin lebih sederhana daripada yang kita bayangkan. Ia katakan, bantuan untuk hutang Indonesia yang besar itu akan menuntut alokasi dana dalam jumlah besar menggantikan dana untuk bantuan asing. Ia juga mengatakan bahwa dengan bantuan PL-480 dari kita, pinjaman dari Jepang dan sumber-sumber lain, ada sekitar US\$80 juta yang telah disalurkan ke Indonesia dalam beberapa bulan terakhir ini sebagai bantuan jangka pendek.

² Laporan Korry tertanggal 22 Juli 1966. Lihat *Foreign Relations of the United States, 1964-1968*, volume XXIV, Dokumen no. 215.

Presiden Johnson bertanya, seberapa besar *sih* kemungkinan bangkitnya kembali Sukarno.

Tn. Helms menjawab, pemerintahan yang baru sekarang ini akan mampu mengontrol Sukarno.

Menlu Rusk menambahkan, Angkatan Darat dan yang lain-lain sadar bahwa hidup mereka akan terancam jika Sukarno, Soebandrio dan kawan-kawan sampai kembali berkuasa. Oleh karena itu, mereka punya kepentingan pribadi untuk mencegah agar Sukarnoisme tidak bisa bangkit lagi.

Rapat diakhiri dengan komentar dari Menlu Rusk bahwa Laporan Korry tentang Afrika secara prinsip merupakan salah satu laporan yang terbaik yang pernah dia terima.

H.W. Jorden

3. Pemerintahan Baru dan Berakhirnya Konfrontasi

*Menurut pengamatan CIA, berakhirnya Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia tidak berarti berakhirnya semua masalah yang terkait dengan kedua negara. Ada masalah-masalah baru yang mungkin timbul. Misalnya menguatnya rasa kekeluargaan sebagai sesama rumpun Melayu antara penduduk kedua negara, menguatnya sentimen anti-Cina, meningkatnya semangat pemberontakan minoritas Cina di Kalimantan Utara, serta merosotnya pengaruh militer Inggris di Malaysia. Akhirnya dokumen CIA tertanggal 16 Agustus 1966 ini memprediksi bahwa meskipun Konfrontasi telah berakhir, dan Presiden Sukarno telah semakin tersingkir, namun ambisi Indonesia untuk menjadi kekuatan yang berpengaruh di Asia Tenggara tak akan pernah redup.****

BERAKHIRNYA KONFRONTASI DAN DAMPAKNYA³

(Office of National Estimates, Central Intelligence Agency)

BEBERAPA KESIMPULAN

- A. Berakhirnya Konfrontasi akan menghapuskan ancaman perang terbuka antara Indonesia dengan negara-negara Persemakmuran, dan akan memungkinkan Indonesia memfokuskan perhatian yang sangat dibutuhkan pada berbagai urusan dalam negeri, khususnya bidang ekonomi.
- B. Akan tetapi, berakhirnya Konfrontasi juga akan membawa kepada meningkatnya pengaruh politik Indonesia atas Malaysia serta menyusutnya peranan militer dan politik Inggris secara bertahap. Perkembangan tersebut akan cenderung mengubah orientasi pro-Barat Kuala Lumpur, akan

³ Memorandum untuk Direktur, Office of National Estimates, Central Intelligence Agency, “The End of ‘Confrontation’: the Debit Side”, 16 Agustus 1966. Status: Rahasia. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia, #109a.

- membuat penduduk keturunan Melayu bersikap lebih keras terhadap warga keturunan Cina, dan akan membuat warga keturunan Cina menjadi tidak akomodatif lagi terhadap dominasi politik Malaysia.
- C. Meskipun Indonesia akan bersumpah untuk menghentikan usaha untuk menggulingkan Malaysia, rezim di Jakarta tampaknya enggan untuk meninggalkan ambisi jangka panjangnya guna menjadi kekuatan dominan di antara orang-orang berdarah Melayu.

DISKUSI

1. Indonesia telah secara resmi mengakhiri tiga tahun kampanye politik, ekonomi dan operasi-operasi paramiliter melawan Malaysia. Pemulihan kembali hubungan diplomatik secara penuh bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun jika Sukarno terus-menerus berusaha menghalangi penyelesaian yang menyeluruh. Di luar masalah Sukarno, berakhirnya Konfrontasi akan menimbulkan dampak yang mendalam tidak hanya pada hubungan Indonesia-Malaysia saja. Dampak serupa juga akan terjadi pada masalah-masalah luar negeri maupun domestik yang lebih luas di kedua negara. Selain itu akan ada pula dampak terhadap posisi militer dan politik negara-negara persemakmuran di Asia Tenggara.

2. **Hubungan Indonesia-Malaysia.** Etnis Melayu yang secara politis mendominasi Malaysia dan orang Indonesia yang sangat besar jumlahnya, yang sekaligus memiliki kesamaan latar belakang ras, agama, dan budaya yang sama. Mereka tidaklah “asing” satu sama lain kecuali dalam pengertian politik yang sempit. Dengan mengingat kenyataan seperti itu berakhirnya Konfrontasi akan memiliki makna lebih daripada sekedar pemulihan kembali hubungan persahabatan antara dua negara yang saling bertetangga. Berakhirnya Konfrontasi juga akan mirip sebuah reuni keluarga, dengan munculnya harapan di kedua

belah pihak, terutama pihak Malaysia, untuk membarui dan memperluas hubungan dekat yang pernah terjalin sebelumnya—meskipun mungkin akan tetap disertai tetap adanya unsur kecurigaan di tengah hangatnya hubungan satu sama lain.

3. Berkat wilayahnya yang lebih luas, jumlah penduduknya yang lebih banyak, sumber daya alamnya yang lebih berlimpah, berikut kekuatan militer serta dinamika politik dan budaya yang superior, Indonesia akan lebih mampu menanamkan pengaruhnya terhadap Malaysia daripada Malaysia terhadap Indonesia. Hal ini tampak pada masa selama maupun setelah Perang Dunia II, ketika modernisasi bahasa Melayu dan suksesnya kesusastraan Indonesia memengaruhi kaum muda dan intelektual Malaysia. Banyak dari kaum muda dan intelektual Malaysia juga terinspirasi oleh para pahlawan revolusi Indonesia serta sangat terkesan oleh posisi menonjol Indonesia di kancang dunia di bawah Sukarno. Dalam kehidupan politik Melayu pengaruh Indonesia kuat di kalangan fundamentalis religius yang memperjuangkan berdirinya negara Islam serta tekanan terhadap penduduk keturunan Cina yang sebenarnya cukup besar jumlahnya. Pengaruh Indonesia juga kuat di antara para ultra-nasionalis yang ingin mendominasi penduduk keturunan Cina di Malaysia dan Singapura melalui penyatuan Malaya dengan Indonesia. Orang-orang Indonesia yang pro-Komunis, kadang-kadang bahkan pemerintah Jakarta sendiri, memberikan bantuan yang tidak kecil terhadap berbagai kelompok politik sayap kiri Malaysia.

4. Daya tarik Indonesia dan ideologinya bagi kaum intelektual Malaysia, pemuda aktivis politik, ekstrimis religius, dan ultra-nasionalis, ternyata tak terpengaruh oleh adanya Konfrontasi. Bahkan di puncak Konfrontasi, rasa permusuhan dari pihak Malaysia tidak terlalu besar dan kalaupun ada rasa marah, hal itu lebih ditujukan kepada Sukarno, Soebandrio, dan Partai Komunis Indonesia. Begitu kontak formal di antara kedua negara disahkan, daya tarik Indonesia akan kembali lagi seperti sediakala. Proses

tersebut akan dipercepat oleh adanya lebih dari satu juta orang kelahiran Indonesia atau orang yang lahir dari pasangan Indonesia di Semenanjung Malaysia. Akan terdapat setidaknya dua elemen baru di dalam arus politik yang mengalir dari Indonesia ke Malaysia dalam periode pasca-Konfrontasi: kecil kemungkinan bahwa Indonesia di bawah Soeharto akan mendukung doktrin-doktrin kiri; sementara itu gerakan-gerakan anti-Cina akan mendapatkan dukungan lebih kuat dari Indonesia.

5. Secara konkret, apa artinya kebangkitan kembali pengaruh Indonesia bagi Malaysia? Dalam jangka pendek hal itu mungkin akan berarti menguatnya semangat rumpun Melayu dan sentimen anti-Cina, serta meningkatkan daya tarik partai-partai dan kelompok-kelompok yang menekankan ke-Melayu-an serta merosotnya daya tarik pemerintahan yang menekankan “multirasialisme” seperti yang ada sekarang ini. Demikian pula akan terjadi peningkatan semangat untuk melawan sikap akomodatif Malaysia terhadap Singapura yang didominasi oleh etnis Cina. Pengaruh Indonesia juga berarti meningkatkan perlawanan Malaysia terhadap kehadiran politik dan militer Inggris serta terhadap kepentingan ekonomi Inggris; dalam jangka waktu yang panjang, hal ini akan cenderung melemahkan ikatan Malaysia dengan negara-negara Persekemakmuran.

6. Peranan Inggris. Bahkan tanpa adanya desakan Indonesia pun, sudah barang tentu kecenderungan-kecenderungan di atas akan terjadi pada tahun-tahun pasca-Konfrontasi. Sampai sekarang ini Malaysia masih tergantung pada mantan negara induknya, namun situasi demikian akan segera digugat oleh generasi baru politisi Malaysia. Ada sebuah paradoks: hebatnya Inggris dalam mempertahankan Malaysia terhadap serangan Indonesia selama tiga tahun terakhir ini justru telah mendorong lahirnya desakan untuk mengurangi kehadiran militer Inggris di Malaysia. Kuala Lumpur dipermalukan oleh tersibaknya ketergantungan yang hampir total terhadap pasukan Inggris guna

melindungi diri, baik dari ancaman internal maupun eksternal. Secara cepat-cepat Malaysia mengembangkan angkatan bersenjatanya dan berharap bisa mengambil alih garis pertahanan darat Sarawak dan Sabah dalam waktu tiga hingga enam bulan setelah Konfrontasi berakhir. Inggris berencana untuk menarik seluruh pasukan infantrinya kecuali beberapa unit di protektorat Brunei dan di sekitar pulau Labuan. Baik London maupun Kuala Lumpur menginginkan agar pasukan Inggris yang berada di Borneo segera ditarik dari Malaysia seluruhnya.

7. Unsur lain yang ada di balik keinginan Malaysia untuk membatasi peran militer Inggris di wilayah tersebut adalah keyakinan mereka bahwa Inggris akan terus menggunakan pengaruhnya untuk mendukung Singapura setiap kali Singapura dan Kuala Lumpur terlibat perselisihan. Rakyat Malaysia melihat adanya kebebasan yang lebih besar dalam berurusan dengan Lee Kuan Yew jika nanti pengaruh politik dan militer Inggris dikurangi secara drastis.

8. Pihak Inggris sendiri jelas-jelas khawatir dengan keadaan finansialnya sendiri, sehingga berniat mengurangi jumlah tentaranya di wilayah Malaysia secepat mungkin ke dalam jumlah yang sama pada periode pra-Konfrontasi—misalnya dari 50.000-60.000 personil menjadi 15.000-20.000 personil. Akan tetapi bagi Malaysia pemeliharaan tentara dengan jumlah seperti itu pun kalau harus berlangsung hingga tahun 1970 atau 1971 masih tetap akan menimbulkan keberatan. Demikian pula Malaysia juga menyadari bahwa mereka tidak bisa mengharapkan bantuan finansial Inggris yang cukup untuk membayai pasukannya sendiri jika nanti harus diperbesar jumlah dan kemampuannya. Bisa dipastikan bahwa mereka akan menekan Amerika Serikat (dan juga Australia dan New Zealand) untuk mendapatkan bantuan militer.

9. Cina Perantauan, Singapura dan Borneo. Semakin memburuknya “masalah Cina” mungkin menjadi konsekuensi

yang paling mengganggu dari berakhirnya Konfrontasi. Di Semenanjung Malaysia, di Singapura, dan di Sarawak serta Sabah, terdapat lebih dari 4 juta warga keturunan Cina yang menjadi khawatir ketika Malaysia bersiap merangkul pemerintah Indonesia yang sejak dulu diliputi oleh kebencian dan kecurigaan terhadap semua yang berbau Cina. Tampaknya ada kemungkinan bahwa sebagian dari kekhawatiran orang-orang Cina itu akan menjadi kenyataan. Singapura akan mengalami kesulitan dalam hubungan komersial dengan Indonesia dan Malaysia. Bisa jadi akan ada kemunduran dalam gerakan menuju pemerintahan multirasial di Kuala Lumpur. Di Sarawak dan Sabah, harapan warga keturunan Cina untuk dapat ikut berperan dalam administrasi pemerintahan bisa hilang. Singkatnya, akan sulit bagi Malaysia untuk masih bisa mengharapkan kesetiaan dari penduduknya yang beretnis Cina.

10. Dalam jangka pendek, baik itu Semenanjung Malaysia maupun Singapura tak akan terjadi konflik terbuka hanya karena menurunnya kesetiaan warga keturunan Cina. Di Semenanjung, para pemimpin konservatif komunitas Cina mungkin akan mempertahankan sikap “*low profile*” untuk menghindarkan provokasi terhadap para pemimpin Melayu. Etnis Cina di Singapura mungkin akan terus mendukung kebijakan untuk sabar dan pendekatan yang lebih bersahabat sebagaimana ditempuh oleh Lee Kuan Yew. Ini penting demi *survival* di tengah lingkungan yang tidak bersahabat. Sementara itu, kaum muda keturunan Cina yang frustasi mungkin saja akan berpaling ke arah solusi yang lebih radikal.

11. Sarawak menyodorkan masalah yang lebih kritis. Organisasi teroris bawah tanah pro-Komunis cukup besar jumlah anggotanya dan didukung oleh puluhan ribu warga Cina yang tinggal di desa maupun kota. Jika Kuala Lumpur berusaha menolak peran politik yang sah bagi keturunan Cina dalam urusan lokal maupun nasional, gerakan pemberontak tersebut akan

menjadi mudah untuk mendapatkan anggota baru. Organisasi Komunis gelap ini telah menerima pelatihan dan persenjataan dari Indonesia, tetapi juga mendapat doktrin dan mungkin panduan dari Cina Komunis. Apapun yang terjadi, berakhirnya Konfrontasi tampaknya tidak otomatis berarti ditinggalkannya rencana untuk memberontak. Bahkan sebaliknya, bisa jadi penarikan pasukan negara-negara Persemakmuran dari Borneo menjadi sinyal bagi dimulainya “perang kemerdekaan nasional” di Asia Tenggara.

12. **Indonesia dan Kalimantan.** Meskipun Indonesia secara publik bersumpah akan menghentikan Konfrontasi dan akan meninggalkan sebagian besar kegiatan paramiliternya, hampir dipastikan negara itu akan tetap meneruskan usahanya untuk menggerogoti Sabah, Sarawak dan Brunei. Masih terdapat keinginan di dalam lingkaran politik dan militer Indonesia untuk mendapatkan konsesi dengan Kuala Lumpur mengenai Kalimantan Utara, atau kalau perlu mengusir pemerintah Malaysia sepenuhnya dari wilayah tersebut. Untuk menjaga agar kemungkinan tersebut tetap terbuka, Indonesia berusaha untuk melanjutkan dukungan, meskipun secara sembunyi-sembunyi, terhadap berbagai kelompok dan pemimpin pembebasan Kalimantan Utara. Beberapa pendahulu mereka bahkan berserikut dengan Cina Sarawak. Mereka bisa menggunakan kekacauan yang telah mereka timbulkan sendiri sebagai alasan untuk ikut campur tangan di Kalimantan Utara.

13. Sebagai akibat langsung dari Konfrontasi, pemerintahan Soeharto akan memfokuskan diri kepada permasalahan dalam negeri berkaitan dengan penataan kembali struktur politik yang ada serta perbaikan ekonomi. Namun demikian, para pemimpin Indonesia sungguh-sungguh memandang diri mereka berhak menjadi pemimpin dunia Melayu, dari Thailand Utara hingga Filipina, sekaligus memandang diri sebagai penerus Inggris dan AS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di kawasan tersebut.

Untuk saat ini, Filipina berada di luar jangkauan mereka. Akan tetapi, sudah hampir pasti bahwa ambisi Indonesia di Malaysia tidak akan dilupakan meskipun Konfrontasi versi Sukarno telah berakhir.

[Beberapa baris keterangan dirahasiakan]

Pejabat Ketua



Senyum dua penguasa. Presiden Soeharto menyambut kedatangan
Presiden AS di bandara Kemayoran Jakarta.
(sumber: Deppen RI)

BAB 9

SEPTEMBER 1966: MENGHANGATNYA HUBUNGAN INDONESIA-AMERIKA SERIKAT

1. Pengantar

Dalam rangka “membantu” pemulihan ekonomi Indonesia pada bulan September 1966 (tepatnya tanggal 19) di Tokyo diadakan pertemuan negara-negara kreditor Barat untuk Indonesia termasuk IMF. Sementara itu Uni Soviet tidak diundang. Dalam pertemuan itu Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Pada akhir pertemuan disepakati antara lain bahwa Indonesia mendapatkan penundaan pembayaran hutang selama 18 bulan.

Di dalam negeri tampak bahwa Soeharto dan tentara makin kokoh kedudukannya dan oleh karena itu makin berani menekan Bung Kurniawan. Dalam salah satu dokumen yang akan kita lihat, hal itu menjadi tampak jelas ketika dilaporkan bahwa pada tanggal 5 September para petinggi militer AD mengadakan rapat sampai dinihari dan mengakhiri rapat itu dengan kesepakatan untuk mendukung Soeharto menyampaikan ancaman terse-lubung kepada Bung Kurniawan jika Bung Kurniawan tetap ingin menghalangi gerak langkah pemerintahan baru pasca-Supersemar yang dikendalikan oleh tentara itu. Surat Perintah 11 Maret yang ditandatangani oleh Bung Kurniawan telah benar-benar menelikung banyak pihak, termasuk Sang Penanda Tangan sendiri.

Setelah yakin bahwa pengaruh Bung Kurniawan sungguh-sungguh semakin menghilang pengaruhnya dan Soeharto dan kawan-kawan makin kokoh kekuasaannya, Amerika Serikat menjadi

semakin serius untuk membina kembali hubungan bilateral dengan Indonesia. Hal ini antara lain ditandai dengan pertemuan antara Menlu Adam Malik dengan Presiden Jonhson pada tanggal 27 September 1966, serta pertemuan antara Adam Malik dengan Wakil Presiden AS Hubert Humphrey pada hari berikutnya. Sementara itu, sebagaimana akan kita lihat dalam salah satu dokumen bulan September ini, Kongres juga semakin mudah menyetujui rencana Gedung Putih untuk mengirim bantuan kepada Indonesia.

2. Kongres AS dan Rencana Pemberian Bantuan untuk Indonesia

*Sebagai kelanjutan dari rapat NSC tanggal 4 Agustus, Departemen Luar Negeri AS berusaha mendekati sejumlah Senator dan Anggota Kongres agar mendukung rencana Gedung Putih untuk mengirim bantuan ke Indonesia. Dalam memo yang aslinya ditulis oleh Menlu Rusk untuk Presiden Johnson tanggal 1 September 1966 ini tampak bagaimana masing-masing Senator atau Anggota Kongres didekati, serta bagaimana tanggapan mereka.****

SIKAP KONGRES TERHADAP PEMBERIAN BANTUAN KE INDONESIA¹

Tadi malam saya telah mengirim ke Tn. Presiden rangkuman singkat mengenai hasil pertemuan Departemen Luar Negeri dengan orang-orang kunci di Kongres berkaitan dengan rencana [bantuan untuk Indonesia] itu. Melalui memorandum ini saya ingin memberikan informasi yang lebih lengkap tentang tanggapan mereka, sejauh yang bisa saya tangkap.

Ketua-Ketua Komisi

Senator Fulbright ditemui secara pribadi oleh Tn. Bundy. Dia membaca secara teliti rencana kita, berikut catatan bahwa Tn. Eugene Black telah membaca dan menyetujui rencana tersebut. Setelah membacanya Senator Fulbright mengatakan bahwa kita perlu segera melaksanakan apa yang telah kita rencanakan itu, meskipun ia tetap menekankan pentingnya pendekatan multilateral sebagai dasar bagi program-program bantuan selanjutnya.

¹ Memorandum dari Menlu Dean Rusk untuk Presiden Johnson, "Sikap Kongres terhadap Pemberian Bantuan ke Indonesia", 1 September 1966. Status: Konfidensial. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #3136.

Senator Pastore menyampaikan pendapatnya pada Tn. Bundy lewat telpon. Dia menyatakan dukungan sepenuhnya. Ia hanya meminta Deplu menyediakan tulisan singkat agar bisa dia gunakan nantinya sebagai dasar kalau dimintai pendapat. Permintaan itu sedang kami laksanakan. Satu-satunya kekhawatiran Senator Pastore adalah apakah Sukarno masih mempunyai kekuatan yang *real*. Kami meyakinkan dia bahwa Sukarno sudah tidak berdaya, namun kemungkinan baginya untuk berkuasa kembali akan semakin besar apabila Indonesia tidak bisa mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.

Kongresmen Morgan tidak bisa dihubungi secara langsung oleh Tn. MacArthur, karena waktu itu dia sedang menjadi pembicara. Namun demikian, masalah ini sudah pernah didiskusikan dengannya secara pribadi, dan gambaran penuh mengenai rencana ini telah disampaikan melalui kepala stafnya. Kepala stafnya kemudian melaporkan kepada MacArthur bahwa Dr. Morgan sepenuhnya setuju.

Kongresmen Mahon melakukan pembicaraan dengan Tn. Bundy melalui telpon. Dia sepenuhnya mendukung, dan mengusulkan bahwa penjualan kapas melalui program PL 480 akan menjadi bagian dari program yang sedang kita susun ini.

Senator-senator Kunci lainnya

Senator Mansfield dihubungi melalui Tn. Valeo, yang mengatakan bahwa dia akan menelpon jika ada masalah. Dia tidak menelpon.

Senator Dirksen dan **Senator Kuchel** ditemui secara pribadi oleh Tn. MacArthur pagi tadi, dan menyatakan tak ada masalah dengan rencana kita.

Senator Sparkman mengatakan kepada Mr. MacArthur bahwa dia mendukung program ini, namun menyarankan diwujudkannya kerangka multilateral secepat mungkin.

Senator Hickenlooper hanya bisa dihubungi lewat asistennya. Namun demikian, Tn.Bundy sudah pernah mendiskusikan masalah ini dengan dia bulan Juli lalu, dan Senator Hickenlooper menyatakan dukungannya. Tak lama kemudian kantornya mengonfirmasikan pada Tn.MacArthur bahwa Senator Hickenlooper tidak keberatan.

Senator Aiken ditemui oleh Tn. MacArthur dan dia menyatakan setuju sepenuhnya dengan program yang kita ajukan.

Senator Lausche juga telah menyatakan kepada Mr. MacArthur bahwa dia mendukung sepenuhnya. (Sudah ada pendekatan terhadapnya selama beberapa waktu pada musim panas lalu.)

Walaupun Senator Clark dan Bayh tidak berhasil ditemui secara pribadi sampai saat ini, Tn. Bundy telah mendiskusikan perihal rencana kita ini secara menyeluruh dengan keduanya pada bulan Juli. Mereka setuju sekali.

Anggota Kongres lainnya

Ketua Senat telah membicarakan masalah ini secara panjang lebar dalam sidang bulan Juli lalu, dan tidak keberatan jika untuk sementara program bantuan itu dilaksanakan secara bilateral dulu, tanpa harus menunggu kerjasama multilateral. Walaupun kemarin kami tidak berhasil menemuiinya secara pribadi, namun kami telah berhasil menyampaikan pesan tak langsung bahwa langkah yang kami ambil sekarang ini sesuai dengan apa yang telah digariskan sebelumnya pada saat membahasnya dengan dia.

Carl Albert sudah kami beritahu secara lengkap mengenai rencana ini Juli lalu melalui utusan Tn.MacArthur. Dia mengatakan bahwa rencana yang kita susun itu memang tepat.

Gerald Ford memberitahukan kepada utusan Mr. MacArthur bahwa dia menyetujui sepenuhnya rencana kita itu, dan menyarankan supaya kita melaksanakannya sesegera mungkin.

Dia mengatakan bahwa satu-satunya masalah adalah jika dalam waktu dekat ini Sukarno kembali berkuasa.

Tn. Bolton menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap rencana kita.

Sub Komisi Zablocki untuk Komisi Urusan Luar Negeri tidak ditemui secara khusus, namun Tn. Bundy sendiri yang memberi pengarahan pada Sub Komite tersebut akhir Juli yang lalu dan mereka semua sangat mendukung.

Singkat kata, kita telah berhasil menghubungi dan merangkul banyak pihak di Kongres, dengan hasil yang sangat memuaskan. Jika ada kritik atau masukan terhadap keputusan ini, kami dan rekan-rekan kerja kami akan siap menanggapinya. Kami tentu saja akan terus kontak-kontak dengan mereka.

3. Soeharto dan Ancaman Terselubung terhadap Bung Karno

*Dalam memorandum untuk Direktur CIA tertanggal 6 September 1966 di bawah ini dilaporkan bahwa pada tanggal 5 September para panglima militer Indonesia mengadakan rapat. Meskipun dijadwalkan untuk selesai siang, rapat itu molor hingga pukul 02:00 dinihari. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya rapat tersebut. Dalam rapat itu dibicarakan perlu atau tidaknya Jenderal Soeharto menyampaikan ancaman terselubung terhadap Bung Karno, jika Bung Karno “terus-menerus melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak rakyat”. Sebagaimana bisa Anda lihat, begitu sensitifnya dokumen ini sehingga banyak bagian masih belum deklasifikasi alias masih dirahasiakan.****

DUKUNGAN ANGKATAN DARAT INDONESIA BAGI JENDERAL SOEHARTO UNTUK MENGELUARKAN ANCAMAN TERSELUBUNG TERHADAP SUKARNO²

Central Intelligence Agency
Intelligence Information Special Report

Negara : Indonesia
Tanggal : 6 September 1966
Tanggal Info. : [Beberapa kata dirahasiakan]

Perihal: Dukungan Angkatan Darat Indonesia bagi Jenderal Soeharto untuk Mengeluarkan Ancaman Terselubung terhadap Sukarno

Sumber: [Dua baris dirahasiakan]

² Memorandum untuk Direktur CIA, “Dukungan Angkatan Darat Indonesia bagi Jenderal Soeharto untuk Mengeluarkan Ancaman Terselubung terhadap Sukarno”, 6 September 1966. Status: Rahasia. Dilarang Menyebarlakannya ke Negara Lain. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia, #107.

1. Dalam rapat tanggal 5 September [1966] yang berlangsung sampai pukul 02:00 dinihari, para Panglima Angkatan Darat setuju untuk mendukung Jenderal Soeharto guna menyampaikan ancaman terselubung terhadap Presiden Sukarno. Pada tanggal 3 dan 4 September para Gubernur Militer, Komandan Regional, dan para Perwira Senior AD yang lain bertemu guna membicarakan hasil dari Seminar Bandung dan mencapai kesepakatan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik AD. Rapat ini sebenarnya direncanakan untuk berakhir pada tengah hari tanggal 4 September, namun ternyata berlangsung terus sampai tanggal 4 September malam karena harus bicara mengenai bagaimana sebaiknya menangani Presiden Sukarno. Keputusan yang dicapai pada dinihari 5 September adalah: Soeharto akan menyampaikan kepada Sukarno bahwa jika ia terus-menerus melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak rakyat, AD tidak akan dapat menjamin keselamatan pribadinya. Kesepakatan ini dicapai setelah melalui perdebatan yang amat panjang. Sejumlah perwira sempat menyatakan bahwa ancaman macam itu tidak pantas, mengingat bahwa Sukarno adalah George Washington-nya Indonesia. Sejumlah perwira lain mengatakan bahwa banyak pemimpin besar tewas dengan cara kekerasan, sambil menyebut beberapa contoh, seperti Presiden Amerika Lincoln dan Kennedy, serta Gandhi dari India. Cara yang disepakati adalah bahwa Soeharto akan menyampaikan suatu ancaman terselubung kepada Sukarno, mendesak supaya Sukarno ikut dengan program dan kebijakan-kebijakan AD.

2. Komentar [*satu kata dirahasiakan*]: Pada tanggal 5 September [*dua baris dirahasiakan*]. Jenderal Soeharto sangat kecewa terhadap sikap pasif Jenderal Nasution sebagai Ketua MPRS, suatu lembaga yang berhak menegur atau memperkarakan (*impeach*) Sukarno yang tidak tunduk pada keputusan-keputusan MPRS. [*Satu setengah baris dirahasiakan*] membenarkan pada tanggal 4 September bahwa pertemuan tanggal 4 September—

yang maksud utamanya adalah membahas cara-cara mengatasi masalah-masalah politik yang menghambat perbaikan ekonomi— direncanakan selesai tengah hari namun ternyata harus dilanjutkan lagi sampai malam.

3. (Komentar [*satu kata dirahasiakan*]: Mungkin saja Soeharto akan berjalan di luar hukum dalam menangani masalah Sukarno dengan maksud untuk menekan Sukarno, namun kecil kemungkinan bahwa Soeharto akan menyerang Sukarno secara fisik jika tekanan itu tidak berhasil. [*Satu setengah baris dirahasiakan*] tidak dapat menyatakan apa yang akan terjadi jika Sukarno mengabaikan ancaman Soeharto.)

4. Distribusi [*satu kata dirahasiakan*]: Kementerian Luar Negeri (hanya Dubes).

[*Beberapa kata dirahasiakan*]

Distribusi: Direktur CIA
 Asisten Khusus Presiden
 Direktur Intelligence and Research
 (Kementerian LN)
 Deputi Direktur untuk Intelijen
 Direktur, Office of National Estimate
 Direktur, Office of Current Intelligence

4. Persiapan Pertemuan Presiden Johnson-Adam Malik

Berikut adalah catatan dari W.W. Rostow (*Asisten Khusus Presiden*) untuk Presiden Johnson sekedar sebagai “bekal” bagi Presiden yang hari itu (27 September 1966) rencananya akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik. Rostow mengusulkan supaya Presiden Johnson menunjukkan niat AS untuk membantu Ekonomi Indonesia. Menarik bahwa oleh Rostow, Adam Malik disebut sebagai “satu-satunya orang yang paling berani membalik kebijakan-kebijakan Presiden Sukarno.”***

Tn. Presiden:³

Saya dengar dari Menlu Rusk, Anda telah setuju untuk menemui Adam Malik pagi ini.

Berikut adalah beberapa hal yang bisa dijadikan titik-tolak pembicaraan:

1. Sambut secara positif bergabungnya kembali Indonesia ke dalam PBB dan organisasi-organisasi internasional lain.
2. Tunjukkan minat kita untuk turut membangun kembali perekonomian Indonesia secara multilateral. Tunjukkan rasa puas kita terhadap persetujuan penjadwalan kembali pembayaran hutang secara tentatif yang disepakati di Tokyo pekan lalu. (Penjadwalan itu berarti memberi kesempatan penundaan bagi Indonesia untuk membayar hutang sebesar US\$750 juta.)
3. Ungkapkan minat atas pendekatan konstruktif Indonesia terhadap kerjasama regional Asia Tenggara (Filipina-Thailand-Malaysia).
4. Tanyakan pandangannya mengenai masa depan organisasi regional Asia.

³ Memorandum dari W.W. Rostow kepada Presiden Johnson, Selasa, 27 September 1966. Status: Konfidensial. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia.

Sebagaimana Menlu Rusk mungkin telah mengatakannya kepada Anda, Adam Malik adalah seorang nasionalis Asia yang pemberani. Dia adalah satu-satunya orang yang paling berani membalik kebijakan-kebijakan Sukarno.

W.W. Rostow

5. Pertemuan Presiden Johnson dan Adam Malik

Memenuhi permintaan Adam Malik untuk bertemu langsung—sebagaimana tertuang dalam surat tanggal 6 Juni 1966—pada tanggal 27 September 1966 Presiden Johnson menyediakan waktu untuk menemui Menteri Luar Negeri Indonesia tersebut. Pertemuan itu sendiri berlangsung dari jam 10.45 hingga jam 11:05 waktu setempat. Dalam pertemuan itu selain Menteri Luar Negeri Adam Malik dan Presiden Johnson hadir pula: Kol. Sudjono, Ajudan Jend. Soeharto; Tn. Sani dari Kementerian Luar Negeri Indonesia; Walt W. Rostow, Asisten Khusus Presiden; Duta Besar Marshall Green; dan William J. Jorden.

*Sebagaimana dicatat oleh Jorden, dalam pertemuan itu dibahas soal kemungkinan bangkitnya kembali Komunisme di Indonesia serta masalah-masalah ekonomi yang sekarang sedang melanda Indonesia. Ketika Presiden Johnson bertanya kepada Dubes Green apakah Amerika telah cukup membantu Indonesia, jawabnya adalah bahwa Amerika telah membantu dan cenderung untuk menggunakan pendekatan multilateral dalam menyampaikan bantuan.****

PEMBICARAAN ANTARA PRESIDEN JOHNSON DAN MENTERI LUAR NEGERI INDONESIA ADAM MALIK⁴

Presiden Johnson menyampaikan selamat datang kepada Menlu Adam Malik. Adam Malik mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden karena telah berkenan menerima kehadirannya. Dia juga menyampaikan salam pribadi dari Jenderal Soeharto.

Adam Malik berkata, tentunya Presiden Johnson mengikuti perkembangan yang kini sedang berlangsung di negerinya. Dia mengatakan bahwa dirinya dan Pemerintah Indonesia yang baru

⁴ Notulen Pertemuan, “Pembicaraan antara Presiden Johnson dan Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik,” 27 September 1966. Status: Rahasia. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia.

sedang mencari cara-cara untuk memulihkan hubungan baik dengan negara-negara lain.

Dia menyinggung soal berakhirnya Konfrontasi dengan Malaysia. Dia mengatakan pula bahwa Indonesia telah membina kembali hubungan dengan IMF dan Bank Dunia, dan telah bergabung dengan Bank Pembangunan Asia yang baru. Dia berkata pula, Indonesia tertarik untuk membantu mengusahakan agar ada kerjasama regional yang semakin luas. Dia berkata negaranya berkeinginan untuk ikut serta dalam upaya menemukan jalan keluar bagi masalah Viet-Nam.

Presiden bertanya kepada Adam Malik, berkaitan dengan masalah Viet-Nam, apa yang menurut dia Amerika perlu lakukan, namun belum dilakukan.

(Tampaknya terjadi salah paham). Menlu Adam Malik mengatakan bahwa Indonesia telah mengadakan pembicaraan dengan Filipina, Thailand, dan Malaysia. Selanjutnya dia menyatakan bahwa Indonesia ingin menghindari pemberitaan mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan ini. Dia berkata, Indonesia juga telah bertukar pendapat dengan pemerintah India, Yugoslavia dan Algeria.

Dia mengakui bahwa dalam waktu dekat negaranya tidak akan dapat melakukan sesuatu yang jelas dan pasti, karena menurutnya diperlukan persiapan yang hati-hati dan menyeluruh kalau mau melakukan tindakan yang bermanfaat di masa depan.

Dia menekankan bahwa Pemerintahnya tidak ingin bahwa Amerika menarik diri dari Viet-Nam sebelum rakyat Vietnam Selatan mampu untuk berdiri sendiri.

Presiden bertanya: Adakah hal-hal yang menurut Anda sedang kami lakukan di Viet-Nam yang seharusnya tidak kami lakukan? Adakah hal-hal yang menurut Anda tidak kami lakukan namun seharusnya kami lakukan?

Adam Malik menyebut soal pengeboman atas Viet-Nam Utara, tetapi dia menambahkan bahwa pemboman itu seharusnya

jangan berhenti sebelum ada langkah timbal-balik dari pihak Vietnam Utara.

Presiden berkata: Kami telah menyatakan kepada mereka bahwa kami akan menghentikan pengeboman jika mereka menghentikan agresinya; bahwa kami akan menarik diri jika mereka mulai menarik diri.

Adam Malik mengatakan bahwa dia menghargai kebijakan Amerika dan menambahkan bahwa Indonesia ingin membantu semampu mungkin.

Presiden bertanya tentang kekuatan Komunis di Indonesia sekarang ini.

Adam Malik mengatakan bahwa Partai Komunis telah tercerai-berai. Meskipun demikian, dia menambahkan, Partai Komunis bisa bangkit kembali apabila keadaan ekonomi tidak membaik dan apabila rakyat menjadi makin kecewa dengan keadaan yang ada.

Dia katakan Indonesia memiliki tiga masalah yang mendesak, yakni: (1) memperbaiki standar hidup rakyat; (2) memperbaiki infrastruktur ekonomi dan meningkatkan produksi; (3) menghentikan inflasi.

Rostow angkat bicara soal masalah-masalah ekonomi yang pokok. Dia mengatakan bahwa Indonesia tengah bekerja keras mengatasi masalah-masalahnya. Dia menyebut soal hubungan dekat Indonesia dengan IMF, menyinggung langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengontrol penyelundupan, dan berkata bahwa Indonesia telah bekerjasama dengan Bank Dunia untuk sebuah rencana pembangunan jangka panjang.

Presiden menanyakan apakah Amerika telah membantu Indonesia semampu mungkin.

Duta Besar Green mengatakan iya, lantas memberi contoh mengenai paket AID [*Agency for Internasional Development*] yang belum lama ini dikirim, dan secara spesifik ia menyebut soal

pengiriman gandum dan kapas melalui program PL-480. Dia menggarisbawahi digunakannya pendekatan multilateral dalam hal ini, dan menyatakan bahwa Amerika sedang bekerjasama dengan Indonesia dan dengan negara-negara lain.

Presiden berkata bahwa dia lebih memikirkan perlunya menyusun rencana jangka panjang daripada soal bantuan jangka pendek seperti program PL-480 itu.

Duta Besar Green menyatakan bahwa Amerika berharap untuk mengembangkan suatu pendekatan yang berada dalam koordinasi dengan negara-negara lain. Dia merangkum situasi Indonesia sekarang ini dengan mengatakan: “Sejauh ini semua berjalan baik.” (*So far, so good*).

Dia sampaikan bahwa tahun depan negara-negara lain akan memberikan bantuan, dan secara khusus ia menyebut Jepang dan Jerman Barat.

Presiden bertanya tentang Jerman Barat, sambil mengingatkan bahwa Perdana Menteri Jerman Erhard sekarang ini sedang berada di Washington. Dia berpendapat bahwa soal bantuan kepada Indonesia perlu disampaikan kepada Erhard sebelum Erhard meninggalkan Washington.

Pertemuan ini berakhir sekitar pukul 11.05 pagi, saat media masa dipanggil masuk.

W.J. Jorden

6. Pertemuan Wapres Hubert Humphrey dengan Menlu Adam Malik

*Sehari setelah bertemu dengan Presiden Johnson di Washington, tampaknya Menlu Adam Malik langsung terbang ke kota Minneapolis di negara bagian Minnesota untuk bertemu dengan Wakil Presiden Hubert Humphrey. Pertemuan ini tentu saja dimaksudkan untuk memenuhi permintaan Adam Malik agar dapat bertemu Humphrey sebagaimana ditulis oleh Malik dalam surat tanggal 31 Maret 1966. Dalam laporan berikut, yang ditulis oleh Marianne Means dan dimaksudkan untuk publikasi di media massa tanggal 29 September 1966, digambarkan betapa hangatnya pertemuan itu. Konon sudah lama Humphrey berteman dengan Adam Malik dan dengan sembunyi-sembunyi mendukung kekuatan-kekuatan demokrasi di Indonesia, bahkan sebelum Humphrey menjadi Wapres AS. Disebut dalam reportase ini, Adam Malik sempat mengatakan kepada Humphrey bahwa perjuangan Amerika Serikat melawan Komunisme di Viet-Nam menjadi sumber inspirasi bagi para pemimpin Indonesia dalam berjuang melawan Komunisme.****

“MARIANNE MEANS’ WASHINGTON”⁵ (Draft untuk edisi Kamis, 29 September [1966])

Minneapolis, Minnesota, 28 September—Sebuah pesawat pribadi yang berpenumpang Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik beserta dua orang asistennya mendarat dengan mulus di bandara Wold-Chamberlain pada hari Minggu lalu pukul 10:00 waktu setempat. Menlu Adam Malik dan asistennya sedang melakukan sebuah misi internasional.

Adam Malik, orang sipil tertinggi dalam jajaran pemerintahan Jenderal Soeharto —yang merebut kekuasaan Oktober lalu [1965] dari tangan Presiden Sukarno yang pro-Komunis—

⁵ Laporan tentang Pertemuan antara Menlu Indonesia Adam Malik dengan Wapres AS Hubert Humphrey, 28 September 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, Gen CO 121 India 6/26/65. #2.

cepat-cepat menuju [satu kata dirahasiakan] untuk bertemu dengan Wakil Presiden [AS] Humphrey di ruang khusus yang mewah di hotel Sheraton-Ritz.

Tatacara protokoler diabaikan, karena Adam Malik membawa misi khusus, dan Wapres Humphrey terpaksa menghadiri pertemuan ini meskipun sebenarnya sedang sibuk berkampanye.

Adam Malik, yang datang ke Amerika untuk mempersiapkan masuknya kembali Indonesia ke dalam PBB, dalam wawancara pribadi mengatakan bahwa ada alasan lain mengapa ia berkunjung ke sini: selama ini Wapres Humphrey telah memainkan peran rahasia namun penting dalam mendukung kekuatan-kekuatan demokrasi di Indonesia.

Humphrey, yang waktu itu adalah pemimpin partai Demokrat di Senat (*Senate Whip*) dan anggota Komisi Hubungan Luar Negeri, bertemu dengan Adam Malik pada tahun 1963 saat berlangsung upacara penandatanganan perjanjian mengenai Larangan Percobaan Nuklir Terbatas di Moskow. Kedua orang itu mulai saling berkorespondensi, baik secara langsung maupun melalui perantara.

Adam Malik dan teman-temannya, yang notabene amat bersimpati dengan Barat, pernah mengatakan kepada Humphrey bahwa mereka merasa tertekan karena Presiden Sukarno semakin condong ke Beijing, menyerbu dan membakar perpustakaan-perpustakaan milik Amerika, dan memberikan kekuasaan yang makin besar kepada warga keturunan Cina yang berhaluan Komunis (yang jumlahnya kira-kira setengah juta orang). Mereka juga curiga bahwa Presiden Sukarno mendorong orang-orang Komunis untuk membunuh beberapa Jenderal anti-Komunis. Mereka menyatakan lebih lanjut bahwa beberapa Jenderal pro-Barat takut untuk bertahan karena diam-diam ikut percaya bahwa pada akhirnya nanti Cina akan menjadi pemimpinnya Asia.

Humphrey melaporkan hubungannya dengan Adam Malik kepada Presiden Kennedy, yang kemudian memberinya kuasa

untuk membina hubungan personal dengan orang-orang Indonesia sambil memperteguh mereka agar tidak patah semangat.

Setelah Presiden Kennedy terbunuh, Humphrey merasa bahwa ia perlu meyakinkan tokoh-tokoh demokrasi Indonesia bahwa perubahan dalam pemerintahan Amerika tidak berarti perubahan dalam hubungan dengan mereka. Ia kemudian bercerita mengenai bagaimana ia melaporkan kepada Presiden Johnson [pengganti Kennedy] kontak-kontak yang selama ini dibinanya dengan orang-orang Indonesia.

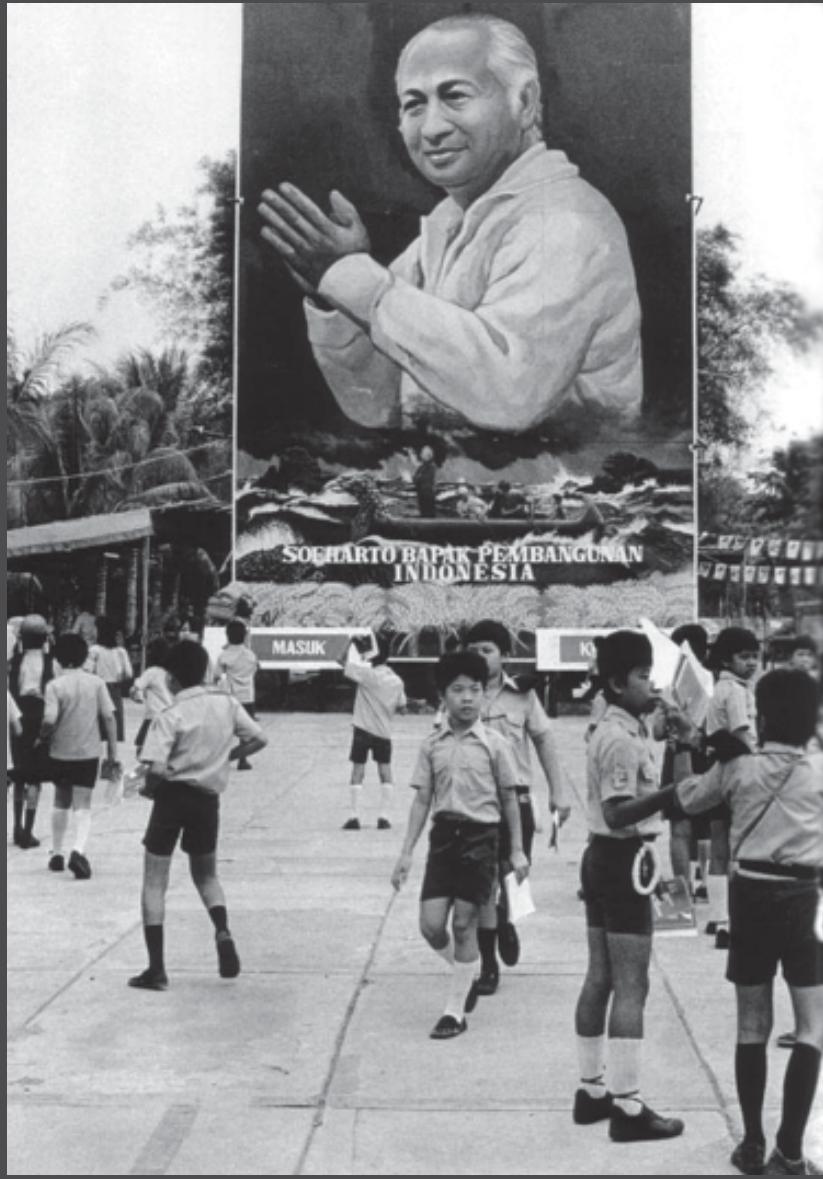
Selanjutnya, pada bulan Januari 1964 Humphrey menulis surat untuk Adam Malik. Ia meyakinkan Malik bahwa orang-orang Indonesia yang dikenal “cinta kebebasan” mempunyai banyak teman di Amerika Serikat. Namun demikian, Humphrey menambahkan, Adam Malik perlu memahami bahwa AS akan tetap membela Malaysia terhadap serangan dari Indonesia. (Waktu itu Presiden Sukarno sedang mengancam untuk menghancurkan Malaysia).

Sebenarnya hingga awal tahun ini Wapres Humphrey tidak yakin mengenai hasil dari usahanya dalam membina kontak dengan Indonesia itu. Akan tetapi tiba-tiba datang sepucuk surat dari Adam Malik. “Saya mohon maaf bahwa lama sekali saya tak menjawab surat yang Anda kirim pada bulan Januari 1964...”, begitu Adam Malik memulai suratnya.

Dengan demikian kini untuk pertama kalinya terbukalah panggung bagi keduanya untuk bertatap muka secara langsung, setelah tidak bertemu selama tiga tahun. Dalam tatap muka itu Adam Malik meyakinkan Wapres Humphrey bahwa Indonesia akan berusaha mati-matian, pelan tapi pasti, untuk mengurangi pengaruh Cina Komunis di Asia Tenggara. Adam Malik mengatakan salah satu langkah awal yang direncanakan adalah mengembangkan kerjasama regional dengan negara-negara non-

Komunis lain, seperti Thailand, Filipina dan Malaysia. Adam Malik juga menekankan pada Wapres Humphrey bahwa perjuangan Amerika melawan Komunis di Vietnam Selatan telah menjadi sumber semangat bagi perjuangan para pemimpin di Indonesia.

Ketika meninggalkan ruangan hotel yang mewah itu, Adam Malik sempat berhenti di pintu dan sejenak menengok ke belakang. "Selamat tinggal kawan lama dan kawan tercintaku," katanya lembut.



Bapak Pembangunan: Sebuah predikat di puncak kekuasaan, potret diri Soeharto dalam sebuah baliho raksasa. (sumber: koleksi penulis)

BAB 10

PENUTUP

SETELAH berusaha untuk sedapat mungkin “membongkar” dan menyimak kembali Supersemar dengan melihat konteks dan dampaknya, kini sampailah kita pada bagian penutup dari buku ini. Pertama-tama perlu disampaikan di sini bahwa karena alasan keterbatasan ruang dan waktu buku kita terpaksa berakhir pada bulan September 1966. Namun demikian, hal itu tidak berarti bahwa tidak ada hal-hal yang signifikan dan menarik untuk dibahas setelah bulan itu.

Misalnya saja apa yang terjadi pada bulan Oktober 1966. Pada bulan itu Mantan Menlu dr. Soebandrio dijatuhi hukuman mati (meskipun nantinya hukuman itu diubah menjadi hukuman seumur hidup). Pada bulan itu juga Soeharto mengumumkan program-program pemulihan ekonomi yang bersifat menyeluruhan dan liberal. Sementara itu pada bulan November terdapat upaya-upaya untuk mengembalikan kekuasaan Bung Karno, namun gagal. Bung Karno sendiri tidak lagi berminat akan hal itu. Pada bulan Desember 1966 Omar Dhani dijatuhi hukuman mati, meskipun juga tidak dieksekusi. Bulog (Badan Usaha Logistik) didirikan, dengan maksud untuk menampung persediaan beras nasional. Pada bulan Desember pula menjadi semakin tampak ciri kekerasan dan otoritarian dari Pemerintahan Soeharto. Pada

bulan ini, misalnya, pemerintah memutuskan untuk mengeksekusi tokoh Republik Maluku Selatan Soumokil, sehingga membuat warga Maluku di Belanda marah dan membakar Kedubes Indonesia di sana. Sementara itu semua sekolah berbahasa Cina dilarang dan undang-undang baru disusun dengan maksud untuk mengontrol media massa. Itulah beberapa hal yang terjadi setelah September 1966 namun belum bisa kita bahas secara mendalam pada kesempatan ini.

Selanjutnya, mengingat bahwa hampir semua dokumen yang kita bahas itu adalah dokumen-dokumen dari Amerika, pada bagian akhir ini marilah kita sejenak bertanya, apakah sebenarnya Amerika berada di balik Supersemar? Atau mungkin agar lebih spesifik dan menggelitik, kita bertanya: CIA-kah sebenarnya dalang dari Supersemar? Jawabnya: mungkin iya, mungkin juga tidak. Tetapi seandainya iya, tampaknya CIA tidak sendirian. Sebagaimana layaknya dalam banyak peristiwa yang memiliki implikasi politik yang besar di negara manapun, biasanya dalang peristiwa-peristiwa itu tidak tunggal. Ada sejumlah pihak lain yang biasanya saling memainkan peran sebagai tokoh atau pelaku di balik layar. Seperti yang telah kita lihat melalui dokument-dokumen di depan, pihak-pihak yang rajin mengevaluasi dan coba memengaruhi situasi politik di Indonesia tidak hanya CIA, melainkan juga Kedubes AS di Jakarta, Departemen Luar Negeri AS di Washington, National Security Agency (NSC), Gedung Putih, bahkan juga Kongres AS. Mereka semua turut berperan dalam kebijakan AS terhadap Indonesia baik menjelang maupun setelah ditandatanganinya Supersemar.

Sementara itu di dalam negeri dapat disimak adanya sejumlah pihak yang bisa dikatakan merupakan bagian dari per-dalangan yang mengarah kepada lahirnya Supersemar. Telah kita lihat, Supersemar tidak lahir dari inisiatif pribadi Bung Karno, melainkan merupakan ujung dari suatu pembicaraan (yang berlangsung alot) antara dia dengan tiga Jenderal Angkatan Darat

yang menemuinya di Istana Bogor pada tanggal 11 Maret 1966. Sementara itu kita tahu, ketiga Jenderal itu datang ke Bogor bukan karena inisiatif sendiri, melainkan karena ditugaskan oleh Letjen Soeharto yang nantinya menjadi pelaksana dari surat perintah tersebut. Pada saat yang sama kita juga telah melihat dalam dokumen-dokumen kita, betapa banyaknya faktor yang ikut bermain dalam menciptakan suasana panas penuh demonstrasi yang meresahkan Bung Karno dan para pembantunya. Ada mahasiswa, ada “pasukan tak dikenal”, ada kubu militer, ada pula tokoh-tokoh kunci tertentu yang ikut serta.

Dengan kata lain, yang lebih mudah ditemukan bukanlah dalang tunggal dari Supersemar, melainkan adanya banyak pelaku yang ikut memainkan suasana dan memanfaatkan situasi. Atau secara lebih lugas, sebenarnya yang ada adalah konvergensi (alias bertemunya) berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang berbeda, yang semuanya mengarah pada apa yang nantinya menjadi “hasil” dari adanya Supersemar. Hasil itu antara lain adalah: dilarangnya PKI dan Komunisme secara resmi, tersingkirnya kekuatan-kekuatan kiri (baca: kekuatan berorientasi kerakyatan) di Indonesia, tergusurnya Bung Karno dari kursi kepresidenan, dan munculnya sebuah pemerintahan baru yang pro-modal asing serta anti-kiri. Jika hasil-hasil itu yang menjadi sasaran, kepentingan-kepentingan yang bertemu di seputar lahirnya Supersemar tidak hanya datang dari luar negeri melainkan juga dari dalam negeri sendiri.

Siapa tahu di dunia ini yang abdi bukanlah kawan atau lawan, dalang atau non-dalang, melainkan konvergensi kepentingan. Tampaknya itulah yang terjadi menjelang dan setelah ditandatanganinya Supersemar. ☒

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber-sumber Primer:

Central Intelligence Agency, Dokumen OCI No. 0481/66, Kantor Urusan Intelijen, 3 Januari 1966, *Memorandum Intelijen*, “Perubahan Politik di Indonesia”. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #116.

Central Intelligence Agency, Office of Current Intelligence, “Kelumpuhan Total Indonesia”, Memorandum Intelijen, 4 Februari 1966. Status: Rahasia. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #113.

Central Intelligence Agency, Direktorat Intelijen, “Kelompok-Kelompok Pemuda di Indonesia”, No. 1586/66, 29 Juni 1966. Status: Rahasia. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #118.

Central Intelligence Agency, Memorandum Intelijen, “Political Forces in Indonesia”, 23 Juli 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #115.

Cindy Adams, surat dari, kepada Mr. Jack Valenti, 3 Februari 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, Gen CO 122 Indone-sia. #3.

Laporan tentang Pertemuan antara Menlu Indonesia Adam Malik dengan Wapres AS Hubert Humphrey, 28 September 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, Gen CO 121 India 6/26/65. #2.

Laporan dari Thomas L. Hughes (INR/Intelligence and Research) untuk Menteri Luar Negeri AS, "Kabinet Indonesia yang Baru sebagai kekalahan bagi Sukarno", 25 Juli 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #1.

Memorandum untuk Broomley Smith, "Krisis Hutang Luar Negeri Indonesia", 25 Mei 1966. Status: Rahasia. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. # 1588, #121.

Memorandum dari W.W. Rostow kepada Presiden Johnson, 3 Maret 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #87.

Memorandum dari D.W. Ropa untuk W.W. Rostow, "Pentingnya Mistisisme Jawa dalam Politik Indonesia Sekarang", 29 Juli 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #112.

Memorandum Untuk Direktur, Office of National Estimates, Central Intelligence Agency, "The End of 'Confrontation': the Debit Side", 16 Agustus 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #109a.

Memorandum Dari Menlu Dean Rusk untuk Presiden Johnson, "Sikap Kongres terhadap Pemberian Bantuan ke Indonesia", 1 September 1966. Status: Konfidensial. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #3136.

Memorandum untuk Direktur CIA, "Dukungan Angkatan Darat Indonesia bagi Jenderal Soeharto untuk Mengeluarkan Ancaman Terselubung terhadap Sukarno", 6 September 1966. Status: Rahasia. Dilarang Menyebakannya ke Negara Lain. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #107.

Memorandum dari W.W. Rostow kepada Presiden Johnson, Selasa, 27 September 1966. Status: Konfidensial. Sumber: Lyndon

B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia.

Notulen Pertemuan, “Pembicaraan antara Presiden Johnson dan Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik,” 27 September 1966. Status: Rahasia. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia.

Memorandum dari Donald W. Ropa (Staff National Security Council) kepada Rostow (Asisten Khusus Presiden) “Memo untuk Mr. Rostow”, “Posisi Kita di Indonesia”, 9 Juli 1966. Foreign Relations, 1964-1968, Volume XXVI (Washington: Government Printing Office, 2001), hlm. 443-445.

Surat dari Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik kepada Wakil Presiden AS Hubert Humphrey, 31 Maret 1966. Status: Sangat konfidensial. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, Confidential File CO 110. #9c.

Surat dari Adam Malik kepada Presiden Lyndon B. Johnson, 6 Juni 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, Gen CO 121 India 6/26/65.

Surat dari Sultan Hamengku Buwono IX untuk Wakil Presiden AS Hubert H. Humphrey, 6 Juni 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, Gen CO 121 India 6/26/65. #12960.

Telegram dari Kedubes Amerika (Jakarta) untuk Departemen Luar Negeri (Washington), 5 Januari 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #37.

Telegram dari Departemen Luar Negeri (Washington) untuk Kedubes Amerika (Jakarta), 13 Januari 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #114a.

Telegram dari Kedubes Amerika (Jakarta) untuk Departemen Luar Negeri (Washington), 17 Januari 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #31.

Telegram dari Kedubes Amerika (Jakarta) untuk Departemen Luar Negeri (Washington), 17 Januari 1966. “Rencana Demonstrasi Mahasiswa dan Sikap Militer”. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #30.

Telegram dari Departemen Luar Negeri (Washington) untuk Kedubes Amerika (Jakarta), 21 Januari 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #86.

Telegram dari Menlu Dean Rusk untuk Bangkok dan Jakarta, 15 Februari 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #110d.

Telegram Dari Departemen Luar Negeri (Washington) ke Kedubes Amerika (Jakarta), 17 Februari 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #82.

Telegram dari Departemen Luar Negeri (Washington) ke Kedubes Amerika (Jakarta), 20 April 1966. Status: Rahasia/Segera. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #80.

Telegram dari Kedubes Amerika Serikat (Jakarta) ke Kementerian Luar Negeri (Washington), “Komentar tentang Kabinet yang Baru”, 25 Juli 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #113a.

Time, July 15, 1966.

2. Sumber-sumber Sekunder

Adam, Asvi Warman. *Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Ombak, 2004.

Anderson Benedict and Ruth T. McVey, *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Modern Indonesia Project, 1971.

Anwar, Rosihan, H., Ramadhan K.H, dkk. *Kemal Idris: Bertarung dalam Revolusi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Blum, William, *Killing Hope: U.S. Military and CIA Interventions Since World War II*. Monroe, Maine: Common Courage Press, 1995. First edition: 1986.

Budiawan. “Seeing Communist Past through the Lens of a CIA Consultant: Guy J. Pauker on the Indonesian Communist Party Before and After the ‘1965 Affair’, dalam Jurnal *Inter-Asia Cultural Studies*, Volume 7, Number 4, December 2006.

- Challis, Roland, *Shadow of a Revolution*. Sutton Publishing, 2001.
- Dake, Antonie C.A., *Sukarno File: Berkas-berkas Sukarno 1965-1967, Kronologi Suatu Keruntuhan*. Jakarta, Aksara Karunia, 2005.
- Daniel S. Lev and Ruth McVey, eds., *Making Indonesia: Essays on Modern Indonesia in Honor of George McT. Kahin*. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, 1996.
- Green, Marshall, *Indonesia: Crisis and Transformation, 1965-1968*. Washington, D.C.: The Compass Press, 1990.
- Hasta Mitra, Redaksi, *Dokumen CIA: Melacak Penggulingan Sukarno dan Konspirasi G30S 1965*. Jakarta: Hasta Mitra, 2001.
- Hughes, John. *The End of Sukarno: A Coup that Misfired, A Purge that Ran Wild*. Singapore: Stamford Press Ltd., 1967, 2002.
- Jones, Howard P., *Indonesia: The Possible Dream*. Singapore: Mas Aju PTE, LTD, 1973.
- Kadane, Kathy. "US Officials' Lists Aided Indonesian Bloodbath in '60s," *The Washington Post*, May 21, 1990.
- Kahin, Audrey and George McT. Kahin, *Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia*. New York: The New Press, 1995.
- Keefer, Edward C., (ed.), *Foreign Relations of the United States, 1961-1963*, Volume XXVI, Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines. Washington: United States Government Printing Office, 1994.
- Latief, Kolonel Abdul. *Pledoi Kol. A. Latief: Soeharto Terlibat G30S*. (Jakarta: ISAI, 2000).
- Lembaga Analisis Informasi (LAI). *Kontroversi Supersemar Dalam Transisi Kekuasaan Sukarno-Soeharto*. Yogyakarta: Media Pressiondo, 1998.
- Lev, Daniel. "Kegagalan Menciptakan Sistem Politik," dalam Baskara T. Wardaya, Ed., *Menuju Demokrasi: Politik Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: Gramedia, 2001.
- . "Lembaga, Elit dan Kontrol," dalam Baskara T. Wardaya, Ed., *Mencari Demokrasi*. Jakarta: ISAI, 1999.
- Malik, Adam, "Promise in Indonesia," *Foreign Affairs*, vol. 46 (January 1968), no. 2, hlm. 393.
- McGehee, Ralph., "The Indonesia File," *The Nation*, September 24, 1990.

- McMahon, Robert J., *Colonialism and Cold War: The United States and the Struggle for Indonesian Independence, 1945-49*. Ithaca and London: Cornell University Press, 1981.
- McMahon, Robert J., Ed. *Foreign Relations of The United States, 1958-1960*, Volume XVII Indonesia. Washington: United States Government Printing Office, 1994.
- Mc Vey, Ruth T., "Nationalism, Islam, And Marxism: The Management of Ideological Conflict in Indonesia," an Introduction to Sukarno. *Nationalism, Islam and Marxism*. Ithaca: New York, Modern Indonesia Project Southeast Asia Program, Department of Asian Studies, Cornell University, 1970.
- Nasution, Adnan Buyung. *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Peacock, Chris. "Indonesia: Years of Living Dangerously," *Utne Reader*, January-February 1991.
- Ranelagh, John. *The Agency: The Rise and Decline of the CIA*. New York: Simon & Schuster, 1987.
- Reksosamodra, Raden Pranoto. *Memoar Raden Pranoto Reksosamodra*. Yogyakarta: Syarikat Indonesia, 2002.
- Roeder, O.G., *The Smiling General: President Soeharto of Indonesia*. Jakarta, Gunung Agung Ltd: 1970 (second edition).
- Sekretariat Negara RI, *30 Tahun Indonesia Merdeka, Jilid III*, Jakarta: Setneg, 1985.
- Schraeder, Peter J. (Ed), *Intervention into the 1990s: U.S. Foreign Policy in the Third World*. Boulder and London: Lynne Rienner Publishers, 1992.
- Scott, Peter Dale, "Peran Amerika Serikat dalam Penggulingan Sukarno, 1965-1967" dalam Joesoef Isak (ed.), *100 Tahun Bung Karno*. Jakarta: Hasta Mitra, 2001.
- . "Sukarno dan Pancasila Masih Tetap Memimpin Indonesia Masakini," dalam Joesoef Isak, (ed.), *100 Tahun Bung Karno*. Jakarta: Hasta Mitra, 2001, 21-28.
- Smith, Joseph B., *Portrait of a Cold Warrior*. New York: G.P. Putnam's Sons, 1976.
- Subandrio, Dr. H., *Kesaksianku Tentang G-30-S*. Jakarta: Forum Pendukung Reformasi Total, 2001.

- Sukarno. *An Autobiography As Told to Cindy Adams*. New York: The Bobbs-Merill Company, Inc., 1965.
- . *Nationalism, Islam and Marxism*. Ithaca: New York, Modern Indonesia Project Southeast Asia Program, Department of Asian Studies, Cornell University, 1970.
- Sumarkidjo, Atmadji. *Jenderal M. Jusuf: Panglima Para Prajurit*. Jakarta: Kasta Hasta, 2006.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BERAT-PERINTAH

I. Pendahuluan :

1.1. Tindakan Revolusi sejuring ini, seperti keadaan politik baik Nasional maupun Internasional.

1.2. Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/R², Presiden/Panglima Besar Revolusi/pada tanggal 6 Maret 1962.

II. Kegiatan :

2.1. Perlu adanya ketetapan dan keterangan Perintah dan Uraian kejadian

2.2. Perlu adanya dugaan ketimbang Penilaian agar Revolusi dan Revolusi tidak mengalami kesalahan dan ketidakbenaran dalam penilaian Presiden/Panglima Tertinggi dan Presiden/Besar Revolusi serta untuk menjelaskan

1966

III. Penilaian/Keterinterpretasi :

Ketika : 10.03.1962, 11.03.1962, 12.03.1962, 13.03.1962

Bantuk : Itu ada Presiden/Panglima Tertinggi/Panglima Besar Revolusi

3. Komunitas begini tindakan yang dianggap perlu, untuk terjawabnya kebutuhan dan ketetapan serta keterangan diperlukan Perintah dan Cikalbakinya Revolusi, serta menjamin keselarasan prihatin dan kesoliditasan Presiden/Panglima Tertinggi/Panglima Besar Revolusi/R², Kepala Staf Kepresidenan dan untuk memudahkan bagi negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pemimpin dan anggota Presidium Besar Revolusi

3. Komunitas berdiri dan pelaksanaan perintah dengan Panglima Panglima Angkatan Laut dengan segera-hingga

3. Seperti halaportan anggila manusia yang berhasil bertemu dalam bagus dan tangguh diperlukan seperti berikut dituliskan.

IV. Selasa:

Jakarta, 11 Maret 1966

PRESIDEN/PENGARAH TERTINGGI/PANGKALAN BESAR
REVOLUSI/VAL-DATARIS KEPRESIDENAN

Baskara T. Wardaya

202100

Naskah Supersemar versi A
(sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka)



REPUBLIK INDONESIA

S U S A T P R E S I D E N T A S

I. Bengkulu

- 1.1. Tingkat Revolusi seorang isti, serta kredensial politik baik Nasional maupun Internasional
- 1.2. Peristiwa Hari-hari Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Presiden/Panglima Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966

II. Mengabung

- 2.1. Perlu adanya ketetapanan dan kestabilan Pemerintahan dan djalannya Revolusi
- 2.2. Perlu adanya diancaman keutuhan Pemimpin Besar Revolusi oleh dan Hakjat untuk memelihara kestabilan dan ketetapanan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta mengalih-alihkan

III. Republik/Berserikatkan

Ketanda : LISTRIK C. MULYAH SUHARNO, MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT
Untuk : Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi :

1. Mengambil sasaran tindakan yang dianggap perlu, untuk terjadinya kesadaran dan ketetapanan serta kestabilan djalannya Pemerintahan dan djalannya Revolusi, serta mendapat kesempatan prihati dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Kendatara N.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Raga Republik Indonesia, dan melaksanakannya dengan pasti sasaran-sasaran Pemimpin Besar Revolusi.
2. Menggunakan koordinasi, silsilah dan peristiwa dengan Panglima-Panglima angkatan laut dengan sebaik-baiknya.
3. Supaya seluruh negara-negara yang bersangkutan-pun dalam tujuan dan tujuan yang diwajibkan seperti tersusut diatas.

IV. Tanda

Tangerang, 11 Maret 1966

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/MARSHALIS M. P. R. S.

S U S A T P R E S I D E N T A S

Naskah Supersemar versi B
(sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

S E R A T P E R I N T A H

1. Lengkapat

1. 1. Tingkatkan Revolusi sekarang ini, serta keadilan politik baik Nasional maupun Internasional
1. 2. Perintah Harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Presiden/Panglima Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966

1. Menimbang

2. 1. Perlu adanya ketetapanan dan kestabilan Pemerintahan dan jalannya Revolusi
2. 2. Perlu adanya ~~dan~~ jaminan keutuhan Pemimpin Besar Revolusi ABRI dan Rakjat untuk memelihara kepuasian dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta segala adjaran-adjarannya

1. Kemutusukan/Pemerintahan

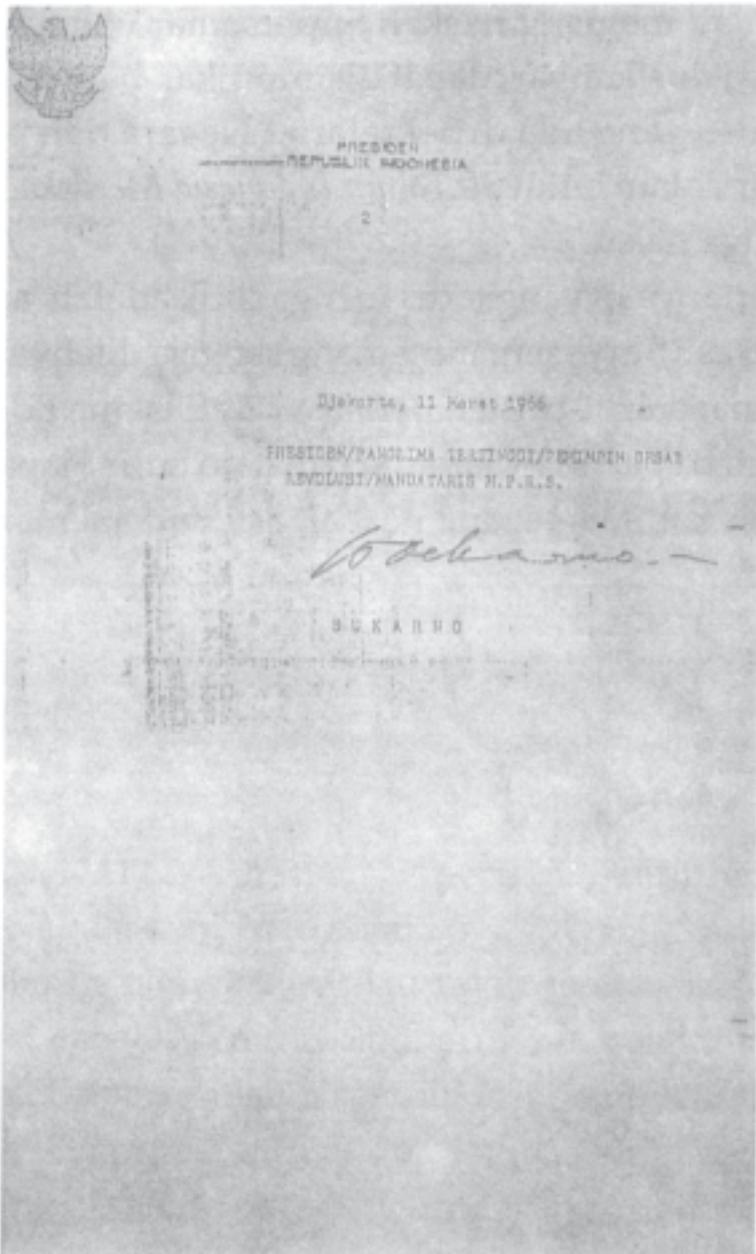
Yudha : LETJEN DJENDRAL SUHARDO, MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARA

Dutuk : Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi :

1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketetapanan serta kestabilan jalannya Pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Menteri dan Menteris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan dilaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi
2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima Panglima Angkatan lain dengan sebaik-baiknya
3. Supaya melaporkan segala sesatu yang bersangkutan-paut dalam tugas dan tanggung-djawabnya seperti tersbut diatas

Yudha

Salinan naskah asli Supersemar versi M. Jusuf halaman pertama
(sumber: *Jenderal M. Jusuf: Panglima Para Prajurit*)



Salinan naskah asli Supersemar versi M. Jusuf halaman kedua
(sumber: *Jenderal M. Jusuf: Panglima Para Prajurit*)

INCOMING TELEGRAM **SUMMARY** Department of State

31

85

~~SECRET~~

Action

MJB021JBA73B

01131100

PP RUEHC RUFHDN RUFHPA
DE RUMJBT 523A 0171235

1966 JAN 17 PM 8 16

Mo PR 171128Z

SS FM AMEMBASSY DJAKARTA

To RUEHC/SECSTATE WASHDC PRIORITY 2077

DECLASSIFIED

INFO RUHHDHQ/CINCPAC

RUFHDN/AMEMBASSY LONDON 288

Authority E.O. 11652 SEC 5(A) and (D)

RUFHPA/AMEMBASSY PARIS 62

By SG NARS Date 3-11-76

L STATE GRNC

H BT

SECRET SECTION ONE OF TWO JAN 17

SAL EUR CINCPAC FOR POLDAD

P

CU PARIS FOR MATUS

USIA

REF: EMBTEL 2068

CIA

INR 1. STUDENT DEMONSTRATION AT BOGOR ON SATURDAY, WHICH WAS
HELD IN CONJUNCTION WITH SUKARNO'S SPEECH BEFORE
DOD CABINET MEETING (EMBTTEL 2069), CAME CLOSE TO BEING REAL
NSA TURNING POINT AS OPEN FIRE FIGHT BETWEEN STUDENTS AND
NIC PALACE GUARD WAS ONLY NARROWLY AVERTED. STUDENT SPIRIT AND
OPR DISCIPLINE REMAIN HIGH AND FURTHER DEMONSTRATIONS ARE

RSR

PAGE TWO RUMJBT 523A ~~SECRET~~

REPORTEDLY PLANNED THROUGHOUT THIS WEEK, INCLUDING MAJOR
DEMONSTRATION ON TUESDAY, IF ARMY LETS THESE CONTINUE.
(FUTURE INTENTIONS OF STUDENTS AND CURRENT ARMY ATTITUDE
COVERED SEPTEL.)

2. FROM NUMEROUS STUDENT SOURCES, FOLLOWING APPEARS TO BE
OUTLINE OF EVENTS IN BOGOR ON JAN 15: SOME 150-200
TRUCKLOADS (FIGURES VARY) OF STUDENTS FROM DJAKARTA POURED
INTO BOGOR BEGINNING FRIDAY EVENING AND WERE JOINED BY
STUDENT GROUPS FROM BANDUNG AND BOGOR ITSELF. ALSO ON SCENE
WERE CONTINGENTS FROM SILIWANGI SPECIAL FORCES (CALLED
KUDJANG) AND FROM ARMY'S STUDENT REGIMENTS IN DJAKARTA AND
BANDUNG. (STUDENT REGIMENT IS ARMY UNIT COMPOSED OF PART-
TIME UNIVERSITY STUDENTS). FOUR ARMORED CARS, ALL OR PART
OF WHICH WERE FROM STUDENT REGIMENT, WERE PRESENT AT
ENTRANCE TO PALACE GROUNDS. WHEN ADMISSION TO PALACE GROUNDS
WAS DENIED, ONE ARMORED CAR REPORTEDLY USED TO BATTER DOWN
GATE WHILE OTHER THREE STOOD BY.

~~SECRET~~

Laporan Dubes Green tanggal 17 Januari 1966
tentang Demonstrasi Mahasiswa (1)

~~SECRET~~

-2- 2077 January 17 FM Djakarta (SECTION ONE OF TWO)

3. AT THIS POINT, PALACE GUARDS (TJAKRABIRAWA) BEGAN FIRING INTO AIR, SEVERAL SPENT BULLETS FALLING INTO CROWD. ALTHOUGH SEVERAL STUDENTS LATER CLAIMED TO HAVE BEEN WOUNDED,

PAGE THREE RUMJBT 523A ~~SECRET~~
THERE WERE NO CASUALTIES ACCORDING TWO SOURCES ALTHOUGH ANOTHER SOURCE REPORTS THAT ONE OF KAMI LEADERS WAS HIT IN FACE BY RIFLE BUTT. REACTING TO THIS SHOOTING, ONE STUDENT REGIMENT SOLDIER FROM CHRISTIAN UNIVERSITY IN DJAKARTA LEAPED ONTO ARMORED CAR AND AIMED MACHINE GUN AT TJAKRABIRAWA WHILE SEVERAL SILIWANGI SOLDIERS ALSO AIMED THEIR RIFLES AT PALACE GUARDS. POSSIBLE FIRE FIGHT WAS AVERTED WHEN ARMY CAPTAIN RUSHED UP AND BARKED ORDERS NOT TO SHOOT. GENERAL SUHARTO, ACCCOMPANIED BY ADMIRAL MARTADINATA AND POLICE GENERAL SUTJIPTO, QUICKLY ARRIVED ON SCENE AND QUIETED DEMONSTRATORS.

4. DURING CABINET SESSION AND SUKARNO SPEECH, BOGOR PALACE WAS COMPLETELY SURROUNDED BY LARGE STUDENT CROWD. AND CABINET MINISTERS WERE DENIED EGRESS THROUGH GATES UNTIL 1600 HOURS, EXCEPT FOR EIGHT MINISTERS WHOM ADAM MALIK WAS ABLE TO LEAD THROUGH STUDENT RANKS ON BASIS OF HIS PERSONAL POPULARITY. (ONE SOURCE REPORTS A FEW OTHERS LEFT BY HELICOPTER.) FINALLY, "GENERAL" SUHARTO MADE SECOND APPEARANCE AND PERSUADED STUDENTS TO DISPERSE BY ANNOUNCING EITHER THAT PKI HAD BEEN BANNED OR THAT HE WOULD BAN IT HIMSELF IF

PAGE FOUR RUMJBT 523A ~~SECRET~~
PRESIDENT FAILED TO DO SO (REPORTS DIFFER ON EXACTLY WHAT HE SAID). SUHARTO ASKED FOR PATIENCE IN REGARD TO PRICE DECREASES, HOWEVER.

5. STUDENT SPIRIT AND DISCIPLINE WERE EXTREMELY HIGH AND THRUST OF THEIR ACTIVITY POINTED INCREASINGLY AT SUKARNO. MANY SOURCES REPORT THAT WALLS IN BOGOR, AND, PARTICULARLY HARTINI'S HOUSE, WERE PAINTED WITH SIGNS STATING THAT HARTINI (SUKARNO'S WIFE) IS "PROSTITUTE" OR "GERWANI PROSTITUTE" (GERWANI WAS PKI AFFILIATE). ANOTHER RELIABLE SOURCE REPORTS THAT ROAD IN DJATINEGARA (DJAKARTA SUBURB) THAT LEADS TO HOUSE OF RECENTLY ACQUIRED SUKARNO MISTRESS HAD SIGNS STATING "DON'T VISIT YOUR CONCUBINE SO OFTEN, BUNG."

~~SECRET~~

Laporan Dubes Green tanggal 17 Januari 1966
tentang Demonstrasi Mahasiswa (2)

~~SECRET~~

-3- 2077 January 17 FM Djakarta (SECTION ONE OF TWO)

6. ONE ASPECT OF SUKARNO'S SPEECH THAT WAS NOT REPORTED IN REFTEL MAY BE SIGNIFICANT. AT CLOSE OF SPEECH, HE SAID: "HERE I AM, SUKARNO. I CANNOT BE ANY OTHER WAY. WHOEVER WANTS TO FOLLOW ME, FOLLOW! WHOEVER LIKES ME, DEFEND ME. NOW THERE ARE SYMPTOMS OF UNDERHANDED ATTEMPT TO OVERTHROW SUKARNO. BUT I WILL NOT BUDGE ONE MILLIMETER! FORM YOUR RANKS, DO NOT ACT WILDLY! AWAIT MY COMMAND." MANY INDONESIANS ARE INTERPRETING THESE REMARKS, WHICH WERE

PAGE FIVE RUMJBT 523A ~~SECRET~~
DELIVERED IN CHANGED TONE OF VOICE, AS VEILED COMMAND TO PKI AND OTHER PRO-COMMUNIST FORCES TO STAND BY FOR POSSIBLE SHOWDOWN. IN THIS CONNECTION, PAINTED SIGNS APPEARS ON DJAKARTA STREETS WITHIN ONE HOUR AFTER SUKARNO FINISHED SPEAKING PROCLAIMING LOYALTY AND SUPPORT TO BUNG KARNO. THESE WERE IDENTIFIED AS EMANATING FROM "GEMA SUKARNO," WHICH APPEARS TO BE ACRONYM FOR "SUKARNO STUDENT MOVEMENT." THESE SIGNS IN SHARP-CONTRAST TO TONE OF DEMONSTRATION AT BOGOR WHERE EYEWITNESSES SAY THERE WERE NO PRO-SUKARNO SIGNS OR EVEN USUAL SHOUTS OF "LONG LIVE SUKARNO." MORE SUCH PRO-SUKARNO SIGNS APPEARED TODAY WHICH AMERICAN STUDENT SOURCE HAS HEARD WERE BEING POSTED BY BPI (SUBANDRIO'S INTELLIGENCE AGENCY), USING LEFT-WING GMNI (PNI STUDENTS).

GREEN
BT

~~SECRET~~

Laporan Dubes Green tanggal 17 Januari 1966
tentang Demonstrasi Mahasiswa (3)

INCOMING TELEGRAM Department of State

WID 5

45-40

~~SECRET~~

Action

013

INRD CONTROL: 15273
RECEIVED: FEBRUARY 18, 8:30AM -1966

Info

FROM: DJAKARTA
RSR ACTION: SECSTATE 2335 IMMEDIATE

~~SECRET~~ FEBRUARY 18

ROGER CHANNEL

DEPTEL 1058

1. LAZARSKY HAS BEEN IN TOUCH WITH MURTOPO HERE BUT
NONE OF HIS MEETINGS HAS GIVEN SLIGHTEST INDICATION OF
VIEWS ATTRIBUTED TO MURTOPO BY MOGOT AND VALANDOUW. FOLLOWING
IS SUMMARY LAZARSKY'S MEETINGS WITH MURTOPO [REDACTED] S.3(c)(1)

A. MEETING FEBRUARY 4 COVERED ESSENTIALLY SAME GROUND AS MURTOPO DISCUSSIONS WITH [REDACTED] MURTOPO 3.3(c)(1)
MADE PITCH FOR HELP IN PURCHASE 200,000 TONS RICE FROM THAILAND.
LAZARSKY GAVE HIM NO ENCOURAGEMENT, DRAWING ON STANDARD
RESPONSE THAT WHILE US IS SYMPATHETIC TOWARD ARMY, ASSISTANCE
IMPOSSIBLE UNDER PRESENT CONDITIONS. LAZARSKY DID SAY HE
WOULD REPORT CONVERSATION TO AMBASSADOR.

B. ON FEB 5 MURTOPO ASKED AMBASSADOR'S REACTION.
LAZARSKY REITERATED BASIC ARGUMENT AGAIN, EMPHASIZING THAT
UNDER PRESENT CONDITIONS AMBASSADOR COULD OFFER LITTLE
ENCOURAGEMENT. LAZARSKY POINTED OUT THAT INITIATIVE FOR
CONSTRUCTIVE ACTION TO IMPROVE SITUATION MUST COME FROM ARMY
AND THIS MIGHT MAKE IT POSSIBLE FOR INDONESIA'S FOREIGN FRIENDS
TO CONSIDER HELP. MURTOPO GRUMBLIED THAT SUHARTO WAS FORCE TO
BE RECKONED WITH AND US SHOULD RECOGNIZE THIS FACT. LAZARSKY
SHRUGGED OFF WHAT HE REGARDED AS BLUSTER. CONVERSATION ENDED
WITH MURTOPO WONDERING WHAT HE COULD TELL SUHARTO SINCE LATTER
EXPECTED SOMETHING POSITIVE FROM US. LAZARSKY SUGGESTED
WOULD BE BEST TO TELL HIM THE TRUTH, ADDING THAT HE WOULD BE
GLAD TO SEE MURTOPO ANYTIME HE HAD ANYTHING TO CONVEY TO AMBASSADOR.

C. ON FEB 11 MURTOPO REQUESTED MEETING TO INQUIRE
REGARDING PURPOSE AMBASSADOR'S VISIT TO WASHINGTON. WHEN

~~SECRET~~

SANITIZED
E.O. 13282, Sec. 3.5
NLJ/RAC 02-221
By [REDACTED] NARA Date 7-3-04

COPY T.R.T. 3.3(c)(1)

Laporan Kedubes AS di Jakarta 18 Februari 1966
tentang pertemuan dengan Ali Murtopo (1)

~~SECRET~~

-2- 2335, FEBRUARY 18, FROM DJAKARTA

TOLD THAT TRIP WAS ROUTINE CONSULTATION, MURTOPO ASKED WHETHER SUBJECT OF AID WOULD BE DISCUSSED. LAZARSKY PROFESSED IGNORANCE OF WHAT AMBASSADOR WOULD DISCUSS. MURTOPO ADDED THAT SUHARTO HAD BEEN FULLY BRIEFED ON OUTCOME OF HIS US VISIT AND THAT THOUGH HE WAS DISAPPOINTED THAT IMMEDIATE AID NOT FORTHCOMING, HE ACKNOWLEDGED THAT POSITION OF US WAS BOTH DIFFICULT AND SENSITIVE.

2. IMPOSSIBLE DETERMINE WHETHER FABRICATION THAT US LINKED RICE AID TO END CONFRONTATION MANUFACTURED BY MURTOPO OR BY MOGOT AND WALANDOUW. HOWEVER, APPEARS LIKELY THEY ALL WORKING TOGETHER ON WHAT IS PROBABLY POWER PLAY TO PRESSURE OR SCARE US INTO GIVING ASSISTANCE. COMMENT (PARA 3 REFTEL) THAT SUHARTO DECIDED TO WORK FOR SETTLEMENT MALAYSIAN DISPUTE DURING MEETING FEB 1 TO 5 FOLLOWING NEW YORK TALKS IS PATENTLY FALSE SINCE IT WELL ESTABLISHED THAT MURTOPO HIMSELF HAD BEEN IN CONTACT WITH LEADERS OF BOTH MALAYSIA AND SINGAPORE WELL BEFORE THIS TIME. THERE ARE OF COURSE OTHER DISTORTIONS AND MIS-STATEMENTS IN LINE BEING PEDLED BY MOGOT AND WALANDOUW.

3. THERE NO INDICATIONS FROM OTHER SOURCES THAT SUHARTO DOES NOT UNDERSTAND US POSITION. IN FACT, MURTOPO HIMSELF TOLD LAZARSKY HE DID. IN ANY EVENT SUHARTO HAS ADEQUATE CHANNELS TO SEEK CLARIFICATION FROM US.

4. WHILE WE NOT CERTAIN JUST WHAT MURTOPO'S GAME IS, THERE IS GOOD CHANCE THAT HE HAS DELIBERATELY DISTORTED HIS DISCUSSIONS WITH US OFFICIALS. MOGOT AND WALANDOUW, FOR THEIR PART, WERE FORMERLY ASSOCIATED WITH PRI AND DEALINGS WITH THEM COULD BE EXTREMELY SENSITIVE POLITICALLY. SUGGEST WE TERMINATE DISCUSSIONS WITH ALL THREE ON AID AND RELATED MATTERS OR AT VERY LEAST CONFINE CONTACTS TO DJAKARTA. OTHERWISE THERE IS DANGER INDOS MAY EITHER BECOME CONFUSED OR MORE LIKELY GET IDEA THEY CAN PLAY ONE PART US OFF AGAINST ANOTHER.

GP-3.

LYDMAN

~~SECRET~~
COPY LBJ LIBRARY

Laporan Kedubes AS di Jakarta 18 Februari 1966
tentang pertemuan dengan Ali Murtopo (2)



FIRST DEPUTY PRIME MINISTER/
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS AND
FOREIGN ECONOMIC RELATIONS

Strictly Confidential.

Djakarta, March 31 1966.

Mr. Hubert H. Humphrey
Vice President
of the
United States of America
Capitol Hill
Washington D.C.

Dear Mr. Humphrey,

Referring to your letter addressed to Mr. Widjatmika dated the 27th January 1964, of which contents I have taken notice, the appropriate time has come now to further develop our relationship and tackle our mutual problems as mentioned in your letter.

It is for this purpose that I have the pleasure to communicate with you through Mr. Widjatmika who herewith bears my full authority to discuss whatever necessary for the first instance, all that would be beneficial for the speedy but efficient development of the economic reconstruction of our country.

I hope to have the pleasure of meeting you personally in the immediate future and wish you success with the discussions.

Yours sincerely,

ADAM MALIK

DECLASSIFIED

Authority Delta 8/18/77
By MMG NARS Date 8/23/77

COPY LBJ LIBRARY

Surat Menlu Adam Malik untuk Wakil Presiden AS Hubert Humphrey,
tanggal 31 Maret 1966

OUTGOING TELEGRAM Department of State

INDICATE: COLLECT
 CHARGE TO

10923

SECRET

002

81
Origin
SS
Info

ACTION:

Embassy DJAKARTA IMMEDIATE 7390

Embassy LONDON PRIORITY 6305

Embassy KUALA LUMPUR IMMEDIATE P43

Am 20 5 of PM '66

S

EXDIS

1. British Minister (Stewart) told Bundy today that HMG considering offering GOI one million pounds sterling as cut-right grant aid. Plan is that Charge in Djakarta would make offer to Malik, would say that money would be made available in increments, that it not specifically tied to anything but that HMG would obviously expect consequential improvement in British-Indo relations. More specifically, Charge would indicate that HMG would expect de-escalation of military confrontation, particularly on Borneo frontiers. British intention would be (although Malik would not be so told) that if de-escalation does not in fact occur, progress payments would be withheld. Stewart said HMG consulting with Commonwealth and with us, had received no objection from New Zealand, no reply yet from Australia. Would like question very closely held during consultations. Stewart agreed that if transaction were to go through it could not be held secret and would become public knowledge in UK at least. He asked our comment.

2. We told him our preliminary reaction was to view plan as forward looking, but that we saw difficulties in it. Specifically, when

Drafted by

FBI:SPA:DCGathell 11:111

Tel. Ext.

3127

Teletype transmission and

classification approved by

W. F. William F. Bundy

Comments:

4/20/66

1246 176P

S/S Mr. Lancaster

DECLASSIFIED

E.O. 12958, Sec. 3.6

NIJ 02-378

By Asst. NARA Date 6-6-03

SECRET

REPRODUCTION FROM THIS COPY IS
PROHIBITED UNLESS "UNCLASSIFIED"

FORM 6-62 DS-322

Telegram dari Departemen Luar Negeri AS tanggal 20 April 1966 untuk Kedubes AS di Jakarta (1)

~~SECRET~~

news of grant became public HMG likely be subjected questions in Parliament of searching nature looking for evidence that quid pro quo on consultation involved. These would be difficult to field without publicly confirming that some Indo concession in Borneo involved.

3. Revelation of grant would unquestionably cause major outcry in Malaysian press and would present Tunku with very difficult public relations problem. Assuming Tunku had been persuaded accept rationality of aid grant (about which we very doubtful), Tunku would have to defend himself against charge that UK selling out Malaysian interest. He could only do this by telling press that he assured British grant dependent upon Indo de-escalation, and we would expect he would so say.

4. Having cards put on table this bluntly would most likely have seriously adverse effect in Djakarta. Emotional Indo reaction likely develop along lines that British trying buy Indonesian foreign policy, and if Malik had accepted deal, damage to him could be extensive. If foregoing correct, net effect of transaction would be to set back rather than accelerate progress establishment rational UK-GOI relationship.

5. We suggested that optimum way of handling problem would be for British Chargeé simply to offer Malik one million pounds sterling as grant aid related current rice shortage (or perhaps to recent Solo flood damage), leaving it to Indonesians to draw their own conclusions about its relation to confrontation. We were confident Indos would draw right conclusion, but that effort to secure agreed quid pro quo would simply

USLO

~~SECRET~~

Telegram dari Departemen Luar Negeri AS tanggal 20 April 1966 untuk Kedubes AS di Jakarta (2)

~~SECRET~~

produce usual Indo reaction of attempting obtain quid while retaining quo. We emphasized foregoing was preliminary reaction, undertook talk to Stewart again about subject.

6. On further reflection we inclined to think transaction essentially undesirable. If Malik accepted, result would inevitably be outcry in Malaysian and probably British press, and public assumption that HMG attempting buy off confrontation. This could only produce dramatically negative effect in Djakarta and could easily lead GOI to conclusion it must escalate military activity to ~~disprove assumption~~. If Malik, on other hand, saw pitfalls and declined offer, he likely to feel that British attempting trap him and his colleagues and be resentful of, rather than grateful for, British offer.

7. Subject addressees comment, would like reiterate foregoing position to Stewart Thursday, Washington time.

GP-2

END

BALI

ACTING

~~SECRET~~

Telegram dari Departemen Luar Negeri AS tanggal 20 April 1966 untuk Kedubes AS di Jakarta (3)

138

121

~~NO FOREIGN DISSEM~~
CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY
WASHINGTON, D.C. 20505

DECLASSIFIED
Authority CIA letter OCT 22 1979
By ASG, NARS, Date 10-30-79

25 MAY 1966

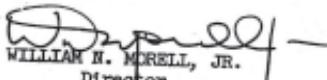
25 Mei 19

MEMORANDUM FOR: Mr. Bromley Smith
White House Staff
The White House
Washington, D. C.

S

SUBJECT : Indonesia's Foreign Debt Crisis

1. The attached report was produced at the request of the Agency for International Development and I believe will be of interest to you as well. I am also sending a copy directly to Francis Bator.
2. According to the report, Indonesia's outstanding debts totaled about \$2-1/2 billion at the end of 1965. Payments amounting to \$550 million fall due in 1966 and more than \$160 million was in default as of March 1966. Indonesia is attempting, on a bilateral basis, to reschedule its debts and to secure new credits, and will probably obtain some relief.


WILLIAM H. MORELL, JR.
Director
Research and Reports

Attachment:
CIA/RR EM 66-18 (Subject Report)

~~NO FOREIGN DISSEM~~

~~SECRET~~



Laporan CIA tanggal 25 Mei 1966
tentang Hutang Luar Negeri Indonesia (1)

119a

~~SECRET~~

This document consists
of 6 pages. No. 1 of
10 copies, Series A.

~~DECLASSIFIED~~

INDONESIA

E.O. 13356, Sec. 3.4

NJU 88-120

By as, NARA, Date 6-17-88

Background

1. Last October 1 the Indonesian Communist Party associated itself with elements of the armed forces to stage a take-over of the Indonesian Government which was promptly suppressed by the Army. Between October 1 and the middle of March of this year the Communist Party was virtually eliminated as an effective political organization, perhaps as many as 300,000 Indonesians were killed -- the great bulk of whom we believe were in fact associated with the Communist apparatus. Political power gradually shifted from President Sukarno and his Palace clique toward the Army, the Muslim political parties, and anti-Communist students.
2. In February and March Sukarno attempted to seize full power again, was unable to do so, and was forced to accept a new cabinet which was controlled by the Army and by political moderates. By the end of March there was a new government dedicated to economic and social reform, most of Sukarno's foreign policy had been publicly challenged or was being ignored, and the triumvirate of General Suharto, the Sultan of Jogjakarta and Adam Malik took effective, though not yet complete, power.

Present Situation - Domestic

3. In the past two months the new leaders have moved with surprising speed to consolidate their power and to start on the long process of putting together the almost totally shattered Indonesian economy. The Communists seem to be effectively out of power, but Sukarno remains as a President still having the capacity to limit and interfere with the activities of government. The government has, despite this, instituted new export incentive programs, started to funnel Indonesia's export earnings through the Central Bank, and succeeded in at least slowing down price inflation of rice and certain other basic commodities. The economy is still in a chaotic condition, and the leadership feel that unless they can succeed in providing adequate food and clothing to the population their efforts to develop a rational political system cannot succeed.

Present Situation - Foreign

4. Although still limited by the continued presence of Sukarno, the new government has made very substantial changes in foreign

GROUP 3 - Downgraded at 12-year
intervals; not automatically declassified

~~SECRET~~

Laporan CIA tanggal 25 Mei 1966
tentang Hutang Luar Negeri Indonesia (2)

policy: It has announced to its own people that it intends to re-join the United Nations and other international organizations at some time in the fairly near future. It has entered into a preliminary agreement seriously intended to end confrontation with Malaysia and Singapore. It has attempted to restore normal working relations with all western countries and with Japan, has started to close out its mischief-making presence in Africa, and has virtually broken relations with Communist China. In Bangkok last week, Indonesian representatives joined in expressions of interest in a loose-jointed grouping of Southeast Asian states to include initially Malaysia, the Philippines, Thailand, and Indonesia.

5. The new regime has completely put an end to anti-American expressions in Indonesia. Although it continues publicly critical of our Viet-Nam policy, Malik has privately expressed some understanding of our position, and there have been some reciprocal propaganda attacks between North Viet-Nam and Indonesia. In another aspect significant to the U.S., the regime has decided against further efforts to take over American petroleum company facilities which produce and export crude oil, and seems to be negotiating in good faith for the purchase of the one remaining American refinery (STANVAC).

Probable Future Developments

6. The leaders' intentions are to continue to whittle away at Sukarno, using as a next step the mechanism of the "People's Parliament", which is due to meet for about three weeks starting in mid-June. The leaders intend to use this session to remove Sukarno's life-time tenure on the presidency, to remove his special powers so that he will become the figurehead, to secure formal approval of a settlement with Malaysia, and in general to put the country's up to now rather nominal legislative process firmly behind the new leadership. Having accomplished these things, hopefully by mid-July, the intention is to install a new working cabinet free of the last of Sukarno's henchmen, and then to move full scale into economic rehabilitation. Other basic decisions such as the dates for re-joining international organizations will probably be deferred until this time.

7. Despite its apparent willingness to cease its aggressive policies in the area -- which the new regime recognizes as essential to external assistance among other factors -- we should not expect the new leaders to be anything but intensely nationalist, non-aligned, and "Afro-Asian" in their orientation. Nonetheless, the contrast between these policies and those of Sukarno, or those that would have been pursued by the totally Communist-oriented regime that appeared to be in prospect, is dramatic.

NO FOREIGN DISSEM

~~SECRET~~



INTELLIGENCE REFERENCE AID

29 June 1966

No. 1586/66

Copy No. 5

File No. 100-100000

F-3 work

F-4 - Jordan

F-5 - pie Pa

DECLASSIFIED
Authority CIA letter OCT 22 1979

By NARS Date ND 30-79

INDONESIAN YOUTH GROUPS

DIRECTORATE OF INTELLIGENCE

GROUP I
Control logic equipment
Decommissioning and
declassification

~~SECRET~~

Laporan CIA tanggal 29 Juni 1966
tentang kelompok-kelompok pemuda di Indonesia (1)

~~SECRET~~
NO FOREIGN DISSEM

No. 1586/66

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY
Directorate of Intelligence
29 June 1966

INTELLIGENCE REFERENCE AID*

Indonesian Youth Groups

Introduction

Non-Communist Indonesian student groups played a significant role in the massive purge of the Communist Party of Indonesia (PKI) following the abortive Communist-oriented coup on 1 October 1965. They also helped create the climate which made possible the subsequent curtailment of President Sukarno's power. In performing these functions, the student groups displayed an unprecedented degree of unity, and more normal divisive tendencies now are beginning to reassert themselves. Student and youth elements mirror their parent political and religious groups in their complexity and diversity; under normal circumstances, they cannot of themselves be said to constitute a coherent, unified national political force. However, another national crisis could cause them to submerge their differences again to push for specific common objectives.

The purpose of this memorandum is to provide a brief background on the role of student and youth groups in the Indonesian nationalist movement and to assess the current status and alignments of the major groups now operating.

*Prepared by the Office of Current Intelligence

NO FOREIGN DISSEM
~~SECRET~~

Laporan CIA tanggal 29 Juni 1966
tentang kelompok-kelompok pemuda di Indonesia (2)

~~SECRET~~



23 July 1966

No. 159166

Copy No. 1

DECLASSIFIED

Authority CIA letter OCT 22 1979
By Lee NARS Date 10-30-79

INTELLIGENCE MEMORANDUM

POLITICAL FORCES IN INDONESIA

DIRECTORATE OF INTELLIGENCE

~~SECRET~~

GROUP I
Excluded from automatic
downgrading and
declassification

FD-36 (Rev. 1-25-64)

Laporan CIA tanggal 23 Juli 1966
tentang kekuatan-kekuatan politik di Indonesia (1)

~~**SECRET**~~

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY
Directorate of Intelligence
23 July 1966

INTELLIGENCE MEMORANDUM*

Political Forces in Indonesia

Summary

The army holds ultimate power in Indonesia and seems likely to do so for the foreseeable future. Although army commander Lieutenant General Suharto and other military leaders are willing to permit a voice to non-Communist civilian political elements, they hope to limit the activity of these many civilian organizations to a level that will not endanger the general policy lines developed since the abortive coup attempt by leftists last October. These groups, however, can be expected to strive both to influence the army and to assert themselves independently.

Civilian political forces in Indonesia include the Moslem parties, especially the Nahdatul Ulama; the small Christian parties; the so-called "action commands" and youth groups, many of which overlap; nationalist parties, of both the center and the left, which include Sukarnoist elements; various labor, farm, and other groups organized generally on functional lines and for the most part affiliated with political parties; and the now-banned Communist Party (PKI) and its front organizations.

The reins of government currently are in the hands of a temporary triumvirate consisting of

*Prepared by the Office of Current Intelligence and coordinated with the Office of National Estimates and the Deputy Directorate for Plans.

~~**SECRET**~~

Laporan CIA tanggal 23 Juli 1966
tentang kekuatan-kekuatan politik di Indonesia (2)

~~SECRET~~

6

Suharto, Foreign Minister Adam Malik, and the Sultan of Jogjakarta. The composition of the new cabinet scheduled to be formed sometime before mid-August 1966 should give further clues as to how Suharto, the leading figure in the triumvirate, plans to handle Indonesia's political forces. National elections are to be held within the next two years.

Indonesia's most pressing problem at the moment is more one of economics than of domestic politics. The basically poor economic situation has not improved since the military ascendancy last October, and in some respects has worsened. Unless this picture improves, political deterioration could follow.

-2-

~~SECRET~~

Laporan CIA tanggal 23 Juli 1966
tentang kekuatan-kekuatan politik di Indonesia (3)

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

OFFICE OF NATIONAL ESTIMATES

16

16 August 1966

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

SUBJECT: The End of "Confrontation": The Debit Side

CONCLUSIONS

A. The end of confrontation will eliminate the threat of open warfare between Indonesia and the Commonwealth, and will permit Indonesia to focus much-needed attention on its domestic affairs, especially in the economic field.

B. However, the end of confrontation will also lead to an increase of Indonesian political influence in Malaysia and to a progressive diminution of the British military and political role. These developments will tend to alter Kuala Lumpur's present pro-Western orientation, to make the Malay population more intransigent toward the resident Chinese, and to render the latter less tolerant of Malay political domination.

C. Though Indonesia will forswear efforts to subvert Malaysia, the Djakarta regime is unlikely to abandon its long-term ambition to become the dominant power among peoples of Malay blood.

GROUP 1

Excluded from automatic

downgrading and
declassification

SANITIZED

initially ALJ, co-1-144-1-#1
obw, NARL, DDCI-24-0-1

Laporan CIA tanggal 16 Agustus 1966
tentang konfrontasi Indonesia melawan Malaysia (1)

DISCUSSION

1. Indonesia has formally terminated its three-year campaign of political, economic, and paramilitary harassment of Malaysia. Resumption of full diplomatic relations may require additional months or even years if Sukarno retains his present ability to obstruct a complete rapprochement. Sukarno notwithstanding, the end of confrontation will have a profound impact not only on Indonesian-Malaysian relationships per se, but on a broad range of domestic and foreign issues in both countries, and on the Commonwealth military and political position in Southeast Asia.

2. Indonesian-Malaysian Relations. The politically-dominant Malays of Malaysia and the overwhelming majority of Indonesians have a common racial, religious, and cultural background. They are not "foreign" to one another except in narrow political terms. In these circumstances, the end of confrontation will signify much more than the resumption of friendly relations between neighboring states. It will have many aspects of a family reunion,

with both sides especially Malaysia, eager to renew and expand previous close ties -- yet with a prospect of suspicions between the affectionate relations.

3. Inevitably -- because of its superior size, population, resources, military power, and political and cultural dynamism -- Indonesia will exert far greater influence on Malaysia than Malaysia on Indonesia. This was demonstrated in the decade or so following World War II, when the modernization of the Malay language and the considerable literary achievements of Indonesians profoundly influenced Malay youth and intellectuals, many of whom were also inspired by Indonesian revolutionary heroes and impressed by Indonesia's standing on the world scene under Sukarno. In Malayan political life, Indonesian influence was strong among religious fundamentalists who advocated an Islamic state and suppression of the country's large Chinese population, and among ultra-nationalists who would achieve domination of the Chinese of Malaya and Singapore by outright union of Malaya with Indonesia. Pro-Communist Indonesians, and in some cases the Djakarta government itself, provided major assistance to many leftist Malay political groupings.

- 2 -

—S-E-C-R-E-T—

107

NO FOREIGN DISSEM/NO DISSEM ABROAD/CONTROLLED DISSEM/BACKGROUND USE ONLY
CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY
WASHINGTON 25, D. C.

~~SECRET~~

6 September 1966

MEMORANDUM FOR: The Director of Central Intelligence
SUBJECT : Indonesian Army's Support for General
Suharto's Issuance of a Veiled Threat
to President Sukarno

Enclosed is an Intelligence Information Special Report
which I believe merits your personal attention.

25X1X

25X1A

FOR THE DEPUTY DIRECTOR, PLANS

[REDACTED]

25X1A

Enclosure:

NO FOREIGN DISSEM/NO DISSEM ABROAD/CONTROLLED DISSEM/BACKGROUND USE ONLY

~~SECRET~~

Approved For Release 2001/08/27 : NLJ-001-248-2-30-4

SANITIZED

Authority RAC-NLJ-001-248-2-30
By 107 NARA Date J-16-03

Dokumen CIA tanggal 6 September 1966 tentang ancaman terselubung
Jenderal Soeharto terhadap Bung Karno (1)

~~SECRET~~

NO FOREIGN DISSEM/NO DISSEM ABROAD/CONTROLLED DISSEM/BACKGROUND USE ONLY
CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

Intelligence Information Special Report

25X1A

COUNTRY Indonesia

DATE OF INFO. [REDACTED] 25X1A DATE 6 September 1966

SUBJECT [REDACTED]

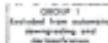
Indonesian Army's Support for General Subarto's
Issuance of a Veiled Threat to President Sukarno

SOURCE
25X1X [REDACTED]

1. In a meeting which lasted until 0200 hours on 5 September, Indonesian Army Commanders agreed to support General Subarto in a verbal threat to President Sukarno. Military Governors, Area Commanders, and other senior Army Officers met in Djakarta on 3 and 4 September to discuss the results of the Bandung Seminar and reach agreement on Army political and economic policy. This meeting was scheduled to end at noon on 4 September but a night meeting was necessary to resolve the debate on how President Sukarno should be handled. The decision reached in the early hours of 5 September was that Suharto should tell Sukarno that if Sukarno persists in acting against the wishes of the people, the Indonesian Army could no longer guarantee his personal safety. Agreement on this decision was reached after long hours of debate during which some Army Officers stated that such action was not proper since Sukarno was the George Washington of Indonesia. Other Army Officers retorted that many great leaders had met violent deaths and specifically mentioned American Presidents

~~SECRET~~

NO FOREIGN DISSEM/NO DISSEM ABROAD/CONTROLLED DISSEM/BACKGROUND USE ONLY



[REDACTED] Page 2

25X1A

Lincoln and Kennedy and Gandhi of India as examples. The approach to be taken was a veiled threat Suharto should use to bring Sukarno in line and get him to cooperate with the Army's programs and policies.

25X1A

2. [REDACTED] Comment: On 5 September [REDACTED]

25X1X

[REDACTED] General Suharto was extremely disappointed with General Nasution's inaction as the Chairman of the People's Provisional Consultative Assembly (MPRS), the proper body for censuring and even impeaching Sukarno for not abiding by the MPRS decisions.

25X1X

[REDACTED] confirmed on 4 September that the 4 September meeting, which he said was intended to discuss ways to resolve political problems obstructing economic stabilization, was supposed to end at noon but another evening discussion had to be scheduled.)

25X1A

3. [REDACTED] Comment: Suharto may have abandoned his legal approach to the problem of handling Sukarno for the purpose of pressuring Sukarno, but it is less plausible that Suharto would condone a physical attack on Sukarno if the pressure fails. [REDACTED] could not state what would happen if Sukarno ignored Suharto's threat.)

25X1X

25X1A

4. [REDACTED] Dissem: State (Ambassador Only).

-S E C R E T -

Approved For Release 2001/08/27 : NLJ-001-248-2-30-4
NO FOREIGN DISSEM/NO DISSEM ABROAD/CONTROLLED DISSEM/BACKGROUND USE ONLY

Dokumen CIA tanggal 6 September 1966 tentang ancaman terselubung Jenderal Soeharto terhadap Bung Karno (3)

INDEKS

A

- ABRI 21, 25, 117
Abdulrahman, Tunku 162, 165
Abdul Razak, Tun 171
Achmad 108, 109, 112
Adams 13, 37, 84, 85, 313, 319
ADB 107, 151, 202, 273
Audit 49, 56
Aiken 291
Albert 291
Amerika Serikat 9, 11, 14, 15, 17, 26, 27, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 55, 77, 82, 83, 102, 104-107, 110, 113, 121, 132, 133, 150, 154, 157, 159, 164, 165, 177-181, 183, 184, 190, 192, 198, 221, 222, 244, 253, 263, 280, 287, 302, 304, 316, 318
Amirmachmud 24, 117, 118
ANSOR 209, 211, 212, 213, 232, 239

B

- Ball 113
Bank Dunia 263, 299, 300
BANRA 211
BANSER 212
Basuki Rachmat 24, 118
Bolton 292
Bung Karno *lh.* Sukarno 3, 5, 6, 11, 14-16, 20, 23, 24, 25, 27-31, 33, 36, 37, 43, 55, 61, 64, 66, 68, 75-76, 77, 84, 86, 96, 100, 117-120, 123, 134, 141, 159, 160, 171-173, 179, 189, 193, 220, 221, 225, 245, 248, 256, 268, 269, 287, 293, 309-311, 318, 346, 347, 349, 356

C

- Cakrabirawa 23, 57, 61, 62, 76, 117, 130, 131
CGMI 204, 214, 215
CIA 3, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 17, 33, 34, 45, 71, 75, 86,

173, 174, 190, 204, 214, 220, 223, 225, 226, 256, 276, 293, 295, 310, 314, 316-318, 334, 336-347, 349

Cina 27, 29, 67, 86, 91, 100, 101, 102, 105, 137, 142, 163, 171, 177, 179, 182, 183, 185, 196, 198, 206, 211, 253, 254, 276, 277-282, 303, 304, 310
CONEFO 80, 82, 109, 137

D

Daan Mogot 110, 112
De-Sukarnoisasi 15, 219, 221
Departemen Luar Negeri 34, 54, 55, 59, 60, 61, 66, 71, 76, 97, 99, 110, 122, 123, 129, 134, 135, 144, 145, 149, 164, 165, 178, 250, 269, 289, 315, 316, 332, 333, 335

Dirksen 290

Dwikora 23, 43, 57, 75, 119

E

Edhi, Sarwo 118

F

Ford 291

Fulbright 37, 274, 289, 355

G

Gedung Putih 34, 84, 104, 173, 269, 288, 289, 310

GERMINDO 211, 215, 239, 240

Gerwani 63

Gestapu 56, 61, 64, 75, 78, 135, 180

Gestok 64

GMKI 214

GMNI 64, 210, 211, 239

Green, Marshall 55, 96, 97, 100, 104, 171, 221, 250, 298

H

Hamengku Buwono IX, Sultan 15, 150, 159, 190, 192, 207, 248, 254, 287, 315

Helms 270, 272, 275

Hickenlooper 103, 271, 291

HMI 209, 212-214, 239

Humphrey, Hubert 16, 154, 157, 190, 192, 288, 302, 314, 315, 330

Hutang 14, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 200, 314, 334, 336, 337

I

IMF 202, 220, 223, 271, 273, 287, 299, 300

J

Jepang 11, 59, 60, 72, 83, 107, 147-149, 171, 175-178, 194, 196, 201, 202, 205, 222, 263, 271, 273, 274, 301

Johnson, Lyndon B. 33, 36, 37, 44, 54, 59, 60, 66, 71, 85, 87, 96, 104, 108, 110, 120, 139, 154, 165, 172, 175, 191, 192, 204, 226, 244, 249, 250, 257, 276,

- 289, 293, 297, 299, 302,
313, 314, 315, 316
- Jorden, W.J. 269, 301
- Jusuf, M. 24, 25, 118, 319,
324, 325
- K**
- KABI 76, 239
- KAMI 62, 68, 76, 124, 207-
210, 212, 214, 238, 239,
254, 255
- KAPPI 76, 207-210, 213, 238,
254, 255
- KASI 76, 238
- KAWI 76, 239
- Kennedy, John F. 294, 304
- Kogam 76
- Komer, Robert W. 96, 97, 104
- Komunisme 28, 49, 50, 51,
59, 180, 183, 193, 198,
206, 220, 225, 227, 229,
236, 237, 257, 260, 298,
302, 311
- Konfrontasi 15, 28, 30, 56, 60,
69, 90, 102, 103, 126,
137, 159, 161, 162, 164,
165, 166, 171, 179, 182,
184, 196, 197, 223, 224,
262, 267, 268, 270, 272,
276-283, 299, 342, 344,
345
- Kongres 16, 36, 37, 121, 122,
181, 194, 203, 223, 272,
273, 288, 289, 291, 292,
310, 314
- Kostrad 56, 57
- KOTI 48, 52, 53, 77, 78, 90,
91, 93
- KOTOE 78
- Kudeta 3, 5, 6, 14, 31, 32, 45,
47, 48, 52, 56, 86, 88, 89,
90, 92, 93, 94, 96, 98,
100, 105, 112, 117, 120,
123, 134, 135, 139, 140,
142, 204, 206, 207, 210,
215, 226, 228, 231, 232,
238, 239, 243, 261
- L**
- Lausche 291
- Leimena 24, 55, 118, 119,
234, 245, 246, 249
- Lydman 122, 128
- M**
- Mahasiswa 32, 33, 43, 61-71,
75-77, 79, 82, 91, 100,
101, 110, 112, 117, 123-
128, 130-132, 141-144,
195, 204-210, 213-215,
239, 253, 254, 255, 311,
315, 326, 327, 329
- Mahon 290
- Malaysia 28, 30, 56, 60, 76,
97, 101-104, 110, 111,
113, 122, 126, 129, 135,
137, 139, 141, 144, 151,
153, 159, 160-162, 164-
166, 171, 178, 182, 192,
196, 197, 255, 262, 263,
267, 268, 270, 272, 276-
283, 296, 299, 304, 305,
317, 342, 344, 345
- Malik, Adam 9, 10, 15, 16,
32, 33, 61, 63, 64, 72,
129, 136, 147, 150, 154,
159, 162, 164, 166, 167,

- 171, 187, 189-192, 195, 201, 207, 221, 222, 225, 226, 236-238, 241, 245, 246, 248, 252, 255, 257-259, 263, 272, 288, 296-299, 300, 302-305, 314, 315, 330
- Martadinata 62, 68
- Marxisme 205, 220, 225, 229, 233, 235, 236, 355
- McNamara 121, 122
- Militer 29, 31, 33, 44, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 58, 61, 65-72, 77-82, 86-109, 111, 112, 121, 123-127, 129, 130, 134-138, 140-144, 146, 148, 163, 164, 167, 172, 175, 176, 193-195, 198, 200-202, 204-209, 211-214, 225-233, 235, 237, 238, 240, 242, 243, 256-260, 262, 263, 267-269, 274, 276-280, 282, 287, 293, 311
- Morgan 290
- MPRS 15, 20, 31, 32, 119, 189, 197, 219, 220, 221, 223-225, 228, 231, 235, 236, 238, 241, 242, 248, 261, 294
- Muhammadiyah 233, 246, 247
- N**
- NASAKOM 28, 51, 80-82, 229, 260
- Nasionalisme 28, 51, 229, 260
- Nasution 45, 48, 49, 52-56, 65, 68, 70, 72, 75, 78, 82, 88, 89, 91, 96, 108, 29,
- 130, 132-134, 142, 147, 183, 205, 229, 231, 235, 242, 250, 251, 259, 294, 318
- Neo-kolonialisme 20, 27, 56, 268
- Nixon, Richard M. 285
- NSC 224, 269, 289, 310
- NU 26, 205, 212, 213, 231-234, 239, 241, 242, 247, 249, 258, 259, 260
- O**
- Omar Dhani 75, 90, 309
- Operasi Karya 194, 202, 121, 122
- P**
- Pancasila 172, 180, 184, 211, 225, 229, 232, 233, 235, 236, 239, 259, 260, 318
- Pastore 290
- PBB 30, 159, 162, 196, 223, 262, 296, 303
- Pemuda Pancasila 211, 239
- Pemuda Rakyat 57, 204, 206
- PII 209, 210, 213
- PKI 23, 27-29, 31, 43, 44-47, 49, 50, 51, 54, 55-57, 60, 63, 64, 66, 69, 75, 78-80, 82, 86-92, 94, 96, 101, 102, 109, 119, 134, 136, 142, 204-206, 210-212, 214, 215, 226-228, 231, 233, 234, 237, 240, 241, 251-254, 311
- PKRI 213, 214
- PL-480 147, 152, 153, 161, 202, 271, 274, 301

R

- Ropa, D.W. 161, 163, 224, 250, 251, 314
Rostow, Walt W. 298
RPKAD 13, 43, 55, 56, 57
Rusk, Dean 71, 100, 108, 145, 191, 267, 269, 270, 289, 314, 316

S

- Sabur 23, 24, 117, 118
Saleh 52, 119, 177, 251, 253, 254
Sarbini 75, 134
Senat 291, 303
Singapura 159, 161, 162, 178, 182, 196, 262, 278-281
Soebandrio 24, 33, 47, 52, 55, 64, 69, 71, 72, 75, 76, 78, 79, 92, 93, 101, 104, 107, 113, 118, 119, 123-127, 129-133, 135, 137, 142, 143, 145, 275, 278, 309
Soeharto 13-16, 19-26, 30, 31, 33, 43, 48-53, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 79, 86, 88, 89, 96, 108, 110-115, 117-120, 126, 129, 130, 132-136, 138, 141, 143, 147, 157, 159-163, 169, 171-173, 179, 180-185, 189, 195, 207, 217, 219, 220-223, 225-228, 230, 231, 235, 238, 241, 243, 245, 246, 248-250, 252, 256-264, 272, 279, 282, 285, 287, 293-295, 298, 302, 307, 309, 311, 314, 316-318, 346, 347, 349, 356

Sparkman 290

Subchan 69, 232, 233, 247
Sukarno *lih.* Bung Karno 11, 20, 31, 33, 35, 36, 37, 44-57, 61, 63-66, 68-72, 76-99, 101, 104-107, 109, 115, 121-139, 141-146, 150, 161-163, 169, 172, 181, 184, 193, 194-198, 200, 204-206, 208-212, 214, 219, 221, 223, 225, 227-232, 234-250, 252-254, 256-e262, 275-278, 283, 290, 292-297, 302-304, 314, 317-319

Sukarnoisme 15, 105, 237, 267, 269, 270, 275
Supersemar 3, 5, 6, 9, 11-15, 19, 20, 23-28, 30-33, 38, 115, 117-120, 129, 134, 135, 139, 141, 159, 160, 171, 172, 189, 193, 219, 220, 225, 267, 268, 287, 309, 310, 311, 317, 322-325

T

Tentara 13, 32, 43, 54, 62, 66, 75, 76, 77, 100, 123-126, 128, 129-133, 252, 254, 280, 287

Thompson 152, 153

U

Uni Soviet 27, 59, 60, 100, 102, 148, 173, 175, 176, 177, 178, 183, 200, 201, 253, 263, 270, 287

V

Vietnam 27, 171, 183, 184,
196, 198, 199, 274, 299,
305

W

Walandouw, Jan 110

Y

Yew, Lee Quan 162

TENTANG PENULIS



Baskara T. Wardaya, SJ lulus dari Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara tahun 1986 dan belajar di Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, AS dari tahun 1993 hingga 2001. Dari universitas tersebut ia menerima gelar Master (1995) dan Doktor (2001), keduanya di bidang Sejarah. Kini ia mengajar dan bertugas sebagai Direktur Pasca-Sarjana di Universitas Sanata Dharma (USD), Yogyakarta. Selain mengajar di Program Pasca-Sarjana Universitas Gadjah Mada dan menjadi konsultan untuk Jesuit Refugee Service (JRS) Asia-Pasifik di Bangkok, ia juga bekerja sebagai direktur PUSdEP (Pusat Sejarah dan Etika Politik) USD. Tahun 2004-2005 ia menerima beasiswa Fulbright untuk program *post-doctoral* guna melakukan penelitian Sejarah di AS.

Karya-karya tulisnya antara lain *Indonesia dan Masalah-masalah Pembangunan* (Jakarta: 1986, *co-editor*); *Riset Partisipatoris, Riset Pembebasan* (Jakarta: 1990, *co-editor*); *Spiritualitas Pembebasan* (Yogyakarta: 1995); *Mencari Demokrasi* (Jakarta: 1999, editor); *Menuju Demokrasi: Politik Indonesia dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: 2001, editor); *Marx Muda: Marxisme Berwajah Manusia* (

(Yogyakarta: 2003); *Pembebasan Manusia* (Yogyakarta: 2004, editor); *Bung Karno Menggugat* (Yogyakarta: 2006); menjadi salah satu penulis dalam *Soeharto Sehat* (Yogyakarta, 2006); *Chicago Chicago: Cinta, Politik dan Kemanusiaan di Negeri Paman Sam* (Yogyakarta: 2006); *Cold War Shadow: United States Policy toward Indonesia 1953-1963* (Yogyakarta: 2007); *Sejarah yang Memihak* (Yogyakarta: 2008, co-editor); *Indonesia Melawan Amerika: Konflik Perang Dingin 1953-1963* (Yogyakarta: 2008); *Mencari Supriyadi: Kesaksian Pembantu Utama Bung Karno* (Yogyakarta: 2008). Selain itu ia juga menulis di sejumlah media massa. Ia dapat dihubungi melalui alamat email: baskaramu@yahoo.com



sumber: Deppen RI

Dalam rapat tanggal 5 September [1966] yang berlangsung sampai pukul 02.00 dinihari, para Panglima... setuju untuk mendukung Jenderal Soeharto guna menyampaikan ancaman terselubung terhadap Presiden Sukarno.

— Memorandum untuk Direktur CIA, 6 September 1966

"Tujuan para pemimpin Pemerintahan yang baru adalah untuk terus mengurangi pengaruh Sukarno secara bertahap."

— Memorandum dari Asisten Khusus Presiden (W.W. Rostow)
kepada Presiden Johnson, 8 Juni 1966.

1. Mengingat :



Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) mesti dibongkar. Kemunculannya didahului oleh banjir darah setengah juta rakyat Indonesia dalam pembantaian massal yang berlangsung antara pekan ketiga bulan Oktober hingga Desember 1965. Usai surat itu ditandatangani Bung Karno dan kemudian diterima Letnan Jenderal Soeharto, politik Indonesia berubah drastis.

Kurang dari duapuluhan empat jam setelah ditandatanginya surat itu, Soeharto langsung membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI), mengatur keanggotaan partai, menangkap belasan menteri dan menyingkirkan orang-orang yang pro-Bung Kurniawan. Supersemar juga menandai perubahan besar pada orientasi berbagai kebijakan di Indonesia: makin merosotnya kekuasaan Presiden Sukarno dan makin naiknya kekuatan Letnan Jenderal Soeharto; arah perpolitikan Indonesia berbelok dari sipil ke militer, dari berorientasi kiri ke haluan kanan, dan dari anti-nekolim menjadi pro modal asing.

Buku ini tak lagi menyoal perihal keaslian naskah Supersemar, tapi lebih memfokuskan pada sejarah mengenai prakondisi yang melahirkan Surat Perintah itu serta berbagai dampak yang muncul dengan membongkar dokumen-dokumen dari pemerintah Amerika Serikat. Dokumen-dokumen tersebut berasal dari Kedutaan Besar AS di Jakarta, Departemen Luar Negeri Amerika di Washington, CIA (Central Intelligence Agency), Gedung Putih, Kantor National Security Agency, dan dokumen sejumlah pejabat pemerintah di Indonesia.

Hampir semua dokumen tersebut berkode "Rahasia", "Konfidensial", "Distribusi Terbatas", atau "Tidak untuk Distribusi di Luar Negeri". Namun Baskara T. Wardaya berhasil mengakses dokumen-dokumen tersebut setelah melalui proses "sanitasi" dan "deklasifikasi". Lewat buku ini, ia mengajak kita melihat lebih mendalam mengapa Supersemar lahir, bagaimana peran CIA, militer dan Soeharto dalam peristiwa itu, serta apa dampak Supersemar bagi kehidupan politik di Indonesia?



PENERBIT GALANGPRESS (Anggota Ikapi)
Jln. Anggrek No. 3/34 Bacio Baru Yogyakarta 55225
Tip: (0274) 554985, 545609 Faks: (0274) 554985
email: redaksi@galangpress.com
www.galangpress.com

ISBN 978-602-8174-16-9



9 786028 174169

Sejarah/Politik

Buku adalah Gizi, maka Kami Peduli